

Friedrich Naumann
STIFTUNG **FÜR DIE FREIHEIT**

Friedrich Naumann
STIFTUNG **FÜR DIE FREIHEIT**

LIBERALISME ARAB

Editor: Clemens Recker



LIBERALISME ARAB

Editor: Clemens Recker



LIBERALISME ARAB

Penerbit

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Liberalisme Arab

Editor: Clemens Recker

Penerbit: Mahrosa, Kairo

Tahun: 2010

Penerjemah: Taufik Damas & M. Zaenal Arifin

Desain cover & tata letak: Freshwater Communication

Dicetak di Indonesia.

Penerbit: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dipersilakan mengutip atau memperbanyak sebagian isi buku ini
dengan seizin tertulis dari penulis dan/atau penerbit.

Indeks

ISBN: 978-979-1157-29-2

Copyright © 2011.

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Jl. Rajasa II No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Tel.: 62-21-7256012-13

Fax: 62-21-7203868

E-mail: Indonesia@fnst.org

www.fnsindonesia.org

Daftar Isi

Pengantar | iv

Ringkasan | ix

Bab I Kebebasan | 1

Bab II Negara Hukum | 25

Bab III Ekonomi Pasar | 57

Bab IV Sekularisme | 75

Bab V Demokrasi | 114

Bab VI Pendidikan | 136

Bab VII Perempuan | 154

Sekilas Tentang Penulis | 182

Senarai Pustaka | 188



Mukadimah Umum

Apakah ada liberalisme di dunia Arab? Inilah pertanyaan yang sering diajukan di Jerman ketika saya berusaha menjelaskan topik penelitian saya. Liberalisme pada dasarnya tidak berhubungan dengan dunia Arab yang mengenal komunisme, nasionalisme Arab, nasionalisme, dan Islam politik radikal yang menyebar di dunia Arab pada abad 20. Tidak demikian dengan liberalisme. Istilah liberalisme sendiri merupakan istilah asing yang diimpor dari luar Arab.

Di sisi lain, lebih mengherankan lagi, bahwa para intelektual Arab yang hidup di bawah pemerintahan despotik dan tidak liberal sekian lama tidak pernah berpikir tentang sistem politik lain yang lebih menjamin keadilan, kebebasan dan demokrasi. Mereka tidak pernah mencari sistem politik yang menjamin kebebasan individu (yang bagi manusia sama dengan kebutuhan akan roti dan air, sebagaimana ditulis oleh Ahmad Luthfi Sayyid), negara hukum, ekonomi pasar, sekularisme, demokrasi, pendidikan umum yang bebas dan emansipasi perempuan.

Demikianlah kami mengenal liberalisme yang menanamkan tujuh pilar tersebut dan membuatnya berbeda dari ideologi yang lain.

Komunisme tidak menerima ekonomi pasar, Islam tidak menerima sekularisme, dan nasionalisme tidak menerima prinsip kebebasan individual. Dalam buku ini kami mengumpulkan para tokoh kebangkitan Arab yang menonjol pada abad 19 dan 20 (kecuali Ibnu Khaldun yang telah lebih dahulu melakukan kebangkitan dengan membangun pondasi ilmu-ilmu sosial). Kami juga memaparkan tentang era kebangkitan dalam sejarah pemikiran Arab yang sebagian orang menyatakan dimulai sejak kedatangan Napoleon Bonaparte yang membawa para peneliti dan ilmuwan. Pertemuan langsung para ilmuwan ini dengan para pemikir Mesir memberikan pengaruh cukup besar, di mana mereka pertama kali melihat secara langsung kemajuan bangsa Eropa. Di antara pemikir Mesir yang terpengaruh oleh pertemuan tersebut adalah Syaikh Hassan al-Aththar dari al-Azhar yang tidak lama kemudian ia mengajarkan filsafat Eropa secara khusus kepada murid-muridnya. Di antara murid-murid Syaikh Hassan al-Aththar adalah Rifa'ah Rafi ath-Thahthawi yang dianggap sebagai pemikir pertama dalam kebangkitan Arab.

Pemerintah Mesir lantas mengirim ath-Thahthawi ke Perancis pada tahun 1826 sebagai salah satu delegasi Mesir. Di Perancis ath-Thahthawi mempelajari filsafat pencerahan Eropa. Ia membaca karya-karya Voltaire, Montesquieu, dan Russo. Ketika kembali ke Mesir pada tahun 1831, ath-Thahthawi menerbitkan bukunya yang terkenal, "*Takhlîsh al-Ibrîs fî Talkhîsh Bârîz*" yang cukup berpengaruh terhadap generasi reformis setelah ath-Thahthawi. Tak lama kemudian, di Tunisia, muncul Chairudiin at-Tunisi yang melakukan proyek pembaruan sistem hukum di negaranya. Akan tetapi pemerintah Tunisia menolak proyek reformasi Chairuddin dan mencopot jabatannya.

Setelah itu, pada akhir abad 19 dan awal abad 20, muncul generasi akibat pertemuan dengan Eropa. Masyarakat Arab

menyaksikan proyek kolonialisme Eropa terhadap negara-negara Arab, seperti penjajahan terhadap Aljazair pada tahun 1830 dan penjajahan terhadap Mesir pada tahun 1882. Selain itu, mereka juga menyaksikan despotisme Sultan Uthmani, Abdul Hamid, di belahan timur wilayah Arab. Pada era ini lahirlah berbagai kelompok liberal reformis dan pemikiran-pemikiran baru yang belum ada pada masa ath-Thahthawi dan Chairuddin.

Arus liberalisme pertama dari generasi ini ingin meniru gaya Eropa yang tercerahkan. Mereka berpendapat bahwa dunia Arab harus mendirikan lembaga-lembaga politik, manajerial dan sosial seperti gaya Eropa. Mereka mengkampanyekan pemisahan antara agama dan negara, sebagaimana yang dituntut oleh, misalnya, Syibli Syamil dan Farah Anton. Di sisi lain juga lahir kelompok nasionalis liberal seperti Abdurrahman al-Kawakibi yang berusaha membebaskan masyarakat Arab dari belenggu otoritarianisme.

Arus kedua adalah arus reformis yang lahir dari gerakan Islam. Tokoh paling menonjol dalam arus ini adalah Muhammad Abduh yang berusaha melakukan peninjauan ulang terhadap ilmu ushul fikih dan membebaskan diri dari taqlid yang telah memenjarakan pemikiran keislaman dalam waktu yang panjang. Ia menegaskan bahwa hukum Islam (fikih) harus diperbarui agar sesuai dengan dunia modern dan siap menghadapi berbagai tantangan. Abduh meyakini bahwa ijtihad yang bebas dan rasional akan membuka cakrawala baru bagi Islam. Ia menemukan bahwa sumber-sumber Islam tidak memperkenankan poligami dan tidak mewajibkan hijab bagi perempuan.

Selain dua arus pemikiran yang telah disebutkan tadi, ada arus pemikiran ketiga yang layak untuk diperhatikan. Arus pemikiran ini lebih merujuk pada kekayaan intelektual kuno serta lebih banyak tumbuh dan berkembang di wilayah Mesir dan Lebanon. Arus pemikiran ini tidak hanya melihat modernitas Eropa, akan tetap berusaha kembali kepada sumber-sumber kuno di kota-kota Yunani

dan masyarakat Romawi. Peninggalan kuno ini merupakan sumber bersama antara Eropa dan dunia Arab yang pernah bertemu dalam satu budaya yang pernah hidup di wilayah laut Mediterania. Arus pemikiran ini berusaha menghidupkan kembali budaya tersebut. Mereka membangun tradisi-tradisi liberalisme dengan melihat kota-kota Yunani seperti Atena dan negara hukum di Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa liberalisme Arab tidak sama dengan liberalisme Eropa walau keduanya memiliki akar-akar yang sama.

Ath-Thahthawi memiliki perhatian khusus terhadap filsafat Yunani dan ia menerjemahkan beberapa buku tentang filsafat Yunani. Buku *Tuhfatu Sulaiman al-Bustānī* (berbahasa Arab) merupakan karya terjemahan ath-Thahthawi dari buku *Illiad* (berbahasa Yunani) karya Homeros. Thaha Husein menyatakan bahwa peninggalan kuno itu merupakan contoh ideal bagi masyarakat Mesir pada masa itu dan ia menulis buku tentang Atena yang berjudul *Hunā Wulidat ad-Democratīyah (Di Sinilah Demokrasi Dilahirkan)*.

Sejarah pemikiran modern diwarnai oleh para pemikir liberal dan reformis. Merekalah yang mengilhami para intelektual pada masa sekarang ini selain juga karena keberhasilan dan kreativitas para tokoh kebangkitan Arab pada pertengahan abad 20. Pada saat yang sama juga muncul berbagai ideologi seperti nasionalisme Arab atau Pan Islamisme yang mendominasi wacana publik. Dan, secara alami para pemikir liberal mengalami kegagalan dalam mempertahankan gagasan-gagasan mereka dan tidak mampu menyusupkan gagasan-gagasan liberal dalam sistem berpikir masyarakat dalam setiap perdebatan. Tentu banyak faktor yang menyebabkan kegagalan liberalisme yang di antaranya adalah para penguasa otoriter dan intervensi tidak liberal oleh negara-negara Eropa. Selain itu, konflik di antara para pejuang liberalisme juga ikut andil dalam kegagalan ini.

Dalam sejarah pemikiran Arab modern, para pemikir liberal lebih banyak daripada yang kami kumpulkan dalam buku ini. Bukan tujuan

buku ini untuk mempersembahkan liberalisme Arab secara utuh dengan berbagai alirannya. Akan tetapi, buku ini ingin mempersembahkan gagasan-gagasan para pemikir liberal terbaik. Melalui tujuh bab dalam buku ini liberalisme dijelaskan dan ditegaskan bahwa liberalisme bukan barang asing dan barang impor bagi dunia Arab. Liberalisme justru merupakan bagian dari sejarah pemikiran dan kekayaan intelektual mereka.

Terakhir saya mengucapkan terimakasih kepada Friedrich-Naumann-Stiftung di Kairo yang selalu mempromosikan dan memperjuangkan kebebasan serta mendukung liberalisme dalam berbagai bentuk. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas penerbitan buku ini di mana Friedrich-Naumann-Stiftung selalu membantu orang-orang yang berusaha merevitalisasi warisan liberalisme yang besar. Dan semua itu sangat pantas mendapatkan penghargaan dari kami.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Usamah al-Ghazali Harb yang dengan sabar memberikan masukan-masukan positif. Saya ucapkan terimakasih juga kepada Prof. Dr. Rev George Churi dari Universitas Heidelberg atas kepakarannya di bidang sejarah filsafat Arab dan sejarah pemikiran politik dunia Arab. Saya juga memberikan penghormatan yang tulus kepada kolomnis Musthafa Ubadah atas usahanya yang serius dalam mengoreksi buku ini dan berbagai masukannya hingga buku ini menjadi seperti yang ada di tangan pembaca.

Clemens Recker

Ringkasan

1. Tujuan Penerbitan

P ara pesaing politik menyebarkan tuduhan bahwa liberalisme dan gagasan-gagasan liberal sampai saat ini belum dikenal di dunia Arab, bahkan dianggap sebagai filsafat politik asing dan sepenuhnya berasal dari luar. Kendati sebagai ideologi dan filsafat politik liberalisme berkembang pesat di Eropa dan Amerika Utara, namun dalam tingkat tertentu dasar-dasarnya telah dianut dan dikontekstualisasikan di semua wilayah non-Barat, tanpa terkecuali dunia Islam dan Arab. Sebenarnya, ada satu masa dalam sejarah pemikiran Arab yang dikenal sebagai periode *Nahdha* (“renaissance”/ kebangkitan) dari pertengahan abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 di mana gagasan-gagasan liberal menjadi sangat penting dan dalam beberapa hal memiliki pengaruh politik yang sangat luas.

Salah satu tujuan penerbitan buku ini adalah untuk membangkitkan kembali warisan liberal dalam sejarah pemikiran Arab dengan mengetengahkan capaian-capaian gagasannya dalam tujuh kategori pemikiran liberal yang paling mendasar: kebebasan individu, penegakan hukum, ekonomi pasar, demokrasi, sekularisme, pendidikan, dan hak-hak perempuan.

Inilah “suara dari dalam” yang dikemukakan untuk kaum liberal Arab dan Muslim dalam rangka membangun jembatan antara mereka dengan para pendahulunya dan menekankan bahwa liberalisme sesungguhnya memiliki akar sejarah yang sangat dalam dan kuat dalam pemikiran politik Arab.

2. Pemilihan Penulis dan Naskah

Walaupun gagasan-gagasan liberal terlihat tidak banyak dan jauh dalam sejarah pemikiran Arab, namun dengan pengamatan yang jeli terhadap warisan itu akan ditemukan sejumlah pemikir dan naskah yang bisa dimasukkan ke dalam lingkup bacaan mengenai liberalisme Arab. Beberapa di antaranya yang paling terkenal dan terkemuka telah dipilih berdasarkan tiga dimensi.

Yang pertama adalah dimensi waktu. Dengan perkecualian Ibn Khaldun, pemikir yang telah mendahului yang lain dengan analisisnya mengenai pengaruh pajak dan aktivitas negara dalam ekonomi pada abad ke-14, kerangka waktu dari para penulis dan naskah-naskah terentang dari tahun 1830, ketika Rifa'a Rafi' al-Tahtawi menerbitkan catatannya mengenai Paris yang pernah ia diami dan komentar mengenai sistem politik dan Konstitusi Perancis, sampai kepada Taha Husayn pada tahun 1940an yang mengusulkan demokrasi sosial-liberal. Di antara itu, puncak pemikiran liberal Arab dapat ditemukan pada *fin de siècle*, ketika sejumlah buku yang paling berpengaruh dari Muhammad Abduh, Qasim Amin, Farah Antun dan Abd Rahman al-Kawakibi terbit.

Dimensi kedua adalah geografi. Kendati, untuk alasan politik pada waktu itu, pusat Kebangkitan Arab tentu saja adalah Mesir, para pemikir dari Arab Maghrib (Arab Barat/ Afrika Utara, pent.) dan Mediterania Timur telah dimasukkan untuk menjustifikasi buku-buku tersebut sebagai “Sejarah pemikiran Arab” dan bukan “Mesir.” Ibn Khaldun berasal dari Maghrib (Afrika Utara) dan Sulaiman al-Bustani



dari Mediterania Timur. Yang lain, seperti Farah Antun, berasal dari Lebanon tapi kemudian pindah ke Mesir yang pada waktu itu sedang menerbitkan lebih banyak buku-buku hukum liberal dan audiens yang lebih besar daripada Suriah.

Yang ketiga dan mungkin dimensi yang paling penting tentu saja adalah isi. Naskah yang merangkum keseluruhan debat pemikiran liberal dan semua topiknya telah dimasukkan. Pada buku ini dibagi ke dalam tujuh bab.

3. Konteks Kesejarahan

Pada ekspedisi Perancis 1798, yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, untuk pertama kalinya di masa modern, tentara Eropa menginjakkan kaki di jantung dunia Arab dan Islam. Berbeda dengan upaya orang-orang Eropa sebelumnya, pasukan Perancis kali ini membawa gagasan-gagasan revolusi Perancis untuk disebarluaskan di Mesir. Kendati bukan hanya karena alasan itu, kehadiran Perancis di Mesir adalah untuk menanamkan pengaruhnya dan menjadi titik masuk bagi para intelektual Arab dan Muslim untuk bertanya “apa yang salah?”

Dampaknya selanjutnya adalah bahwa penguasa-penguasa Turki Usmani, Tunisia dan Mesir kemudian mengirim misi ke Eropa untuk mempelajari teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Meski misi ini tidak serta merta menerjunkan mereka ke dalam sains modern namun mereka mulai membaca Voltaire, Montesquieu dan Rousseau ketika mereka di Perancis. Akibatnya, ketika mereka kembali ke negeri mereka masing-masing mereka mempengaruhi kehidupan politik lokal dan membangun pusat-pusat studi yang dari situ muncul generasi baru pemikir-pemikir liberal. Dalam kasus Mesir, Tahtawi mengawalinya pada tahun 1834. Tidak lama setelah itu, dia mendirikan “Sekolah Bahasa” yang dari sana sejumlah karya terjemahan yang sangat penting kemudian mengisi toko-toko buku di Mesir.

Pada abad ke-19, pengaruh Eropa ke dunia Arab tampak semakin menguat. Hal ini ditunjukkan oleh kontrol atas negara-negara Arab, pada mulanya secara ekonomi, kemudian finansial dan akhirnya secara politik ketika Aljazair dan Tunisia diduduki Perancis dan Mesir diduduki Britania Raya. Wacana pemikiran liberal Arab kemudian menjadi lebih jelas masuk dalam perbincangan pada masa-masa kemunduran dan ketika kebijakan-kebijakan dalam negeri yang despotik muncul pada kekaisaran Utsmani masa Sultan Abdulhamid II dari 1876-1909. Pada saat yang sama, nasionalisme, baik secara khusus atau Pan-Arab, bergabung dengan sejumlah ideologi dan menjadi kekuatan dominan di mana kalangan liberal juga ikut di dalamnya. Mereka kemudian membentuk kelompok liberal-nasionalis (*"Nationalliberale"*) yang tuntutannya adalah kebebasan individu pada tingkat domestik dan otonomi nasional pada tingkat internasional, keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama.

Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga menjadi saksi atas diferensiasi ideologi politik. Apa yang sebelumnya hanya dikenal dengan kelompok "modern" kini terpecah misalnya ke dalam kelompok liberal dan sosialis yang satu sama lain saling bersaing.

Cabang kedua liberalisme Arab atau Muslim, di luar pengaruh langsung Eropa, dapat ditemukan dalam teologi reformis. Di Mesir hal ini diperjuangkan oleh Muhammad Abduh yang menuntut dibebaskannya Islam dari dogma-dogma dan tradisi-tradisi anakronistik dan mengusulkan pelebagaan kembali atas tradisi ijtihad terhadap teks-teks Islam. Ini kemudian menuntunnya untuk menemukan sejumlah justifikasi dan panduan Islam bagi pemerintahan demokratis (*"syura"* = konsultasi dan *"ijma"* = konsensus) dan penegakan hukum sebagai prinsip kebebasan yang mesti ada di dalam kehidupan Islam yang nyata.

Wacana *nahdha* mengalami kemunduran pada tahun-tahun 1930an menyusul kegagalan eksperimentasi liberal Mesir pada masa perang dan bangkitnya sejumlah ideologi *illiberal* seperti sosialisme radikal, Islamisme dan fasisme di negara-negara Arab. Beberapa intelektual yang awalnya liberal seperti Haykal di Mesir dan Kayyali di Mediterania Timur berbalik menjadi Islamis atau konservatif. Taha Husayn mungkin adalah pemikir liberal asli terakhir pada periode ini.

4. Isi

Tujuan bab dalam buku ini menjelaskan tujuh prinsip yang paling penting dalam liberalisme di Eropa dan kemudian juga di dunia Arab. Kebanyakan karena alasan sejarah, pembelaan terhadap kebebasan, penegakan hukum dan demokrasi jauh lebih kuat daripada liberalisme ekonomi yang kurang lebih tampak sebagai samping dari skema reformasi yang lebih luas. Ketujuh prinsip yang dibutuhkan dalam liberalisme ini juga membedakan para pemikir liberal dari para pendukung ideologi politik lain. Pada umumnya ulama-ulama Islam tidak keberatan terhadap bentuk ekonomi pasar tapi tidak menganut sekularisme liberal. Pada sisi yang lain, kaum sosialis lebih gencar menyuarakan sekularisme ketimbang dalam beberapa hal dengan kelompok liberal, tetapi tentu saja hak-hak kepemilikan liberal dan ekonomi pasar bebas.

4.1. Kebebasan Individu

Ahmad Lutfi Al-Sayyid (1873-1963) mengawali dengan dua artikel yang terbit pada 1913 di majalahnya, *Al-Jarida*, corong partai liberal Umma di Mesir. Sangat jelas bahwa dia adalah satu di antara sedikit pendukung liberalisme klasik yang menjadikan kebebasan sebagai titik pijak melawan kesemena-menaan negara dan masyarakat.

Kebebasan ia pahami seperti roti dan air atau sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dasar kebebasan adalah kebebasan individu dari mana kebebasan-kebebasan lain seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, berniaga dan seterusnya berasal. Dia mempertahankan argumen melawan pemerintahan otokratik yang menolak hak individu ini tapi juga melawan kelompok-kelompok oposisi lain yang ingin memanfaatkan kebebasan individu untuk memperoleh keuntungan dari masyarakat. Meski ia memperjuangkan institusi-institusi demokrasi, kebebasan positif (*positive liberties*) kurang penting baginya ketimbang kebebasan negatif, yaitu hak-hak individu untuk bebas dari koersi.

Salama Moussa (1887-1958), meskipun pada akhirnya ia merupakan pemikir sosialis, tulisannya tahun 1927 mencoba mempertahankan argumen kebebasan berpikir dan berbicara. Argumen yang ia kemukakan, dalam banyak hal, mengikuti John Stuart Mill yang tidak hanya bicara tentang kebebasan sebagai hak-hak alamiah, tetapi juga sebagai alat untuk kemajuan, yakni melalui diskusi yang bebas.

4.2. Penegakan Hukum

Rifa'a Rafi'al-Tahtawi (1801-1873), pelopor pendukung liberalisme pada masa modern, bukunya tentang masa-masa hidupnya di Paris dimasukkan dalam satu bab. Dalam tulisan itu dia menerjemahkan dan memberi komentar positif Konstitusi dan sistem politik Perancis. Dia menekankan fakta bahwa raja Perancis tidak memerintah secara absolut, ia bisa dikoreksi dengan Konstitusi dan sistem politik. Dia menyebut sistem ini sebagai sistem yang baik, namun, seperti yang diakui sendiri, dasarnya tidak dari Qur'an atau Sunnah. Secara langsung dia menghubungkan kemajuan dan modernitas masyarakat Perancis dengan kebebasan. Dan dia menikmati dan mengusulkan keteladanan itu untuk Mesir. Barangkali memang dia tidak terlalu

mengeksplisitkannya karena dia tinggal di Mesir dan akhirnya buku itu dipesan oleh penguasa absolut Mesir Muhammad Ali. Namun begitu, itulah sumbangan abadi Tahtawi dalam memperkenalkan dasar-dasar sistem politik yang dalam banyak hal merupakan buah dari revolusi Perancis.

Ab al-Rahman al-Kawakibi (1854-1902), dalam beberapa hal dia adalah pendukung nasionalisme pan-Arab, tahun 1902 menulis satu catatan yang sangat mengena tentang dasar despotisme. Dua bab dari buku itu coba diringkas dalam buku ini. Dia menganalisis dampak pemerintahan otokratik pada masyarakat tapi juga hubungan timbal balik antara sebuah pemerintahan absolut dan masyarakat yang agak lesu, mereka sendiri bertindak despotik dalam segala domain kehidupan mereka (keluarga, suku, perusahaan, dan seterusnya), di mana setiap orang adalah despot kecil. Setelah menunjukkan ciri-ciri despotisme, yang dia kontraskan dengan penegakan hukum yang dia dukung, dia mencari cara untuk membersihkan pemerintahan otokratik dan mendorong pendekatan moderat dengan mengemukakan tiga parameter bagi perubahan. Pertama, masyarakat harus mengetahui hak-hak kebebasannya. Tanpa itu, maka tiada yang mereka terima selain despotisme. Ini hanya mungkin dicapai melalui pendidikan (politik). Kedua, despotisme tidak bisa dilawan dengan ekstrimisme melainkan dengan moderasi dan perubahan gradual. Ini tentu saja berhubungan dengan pendidikan sebagai penggerak utama perubahan yang tidak bisa terjadi dalam semalam. Ketiga, harus diketahui apa yang akan mengganti pemerintahan otokratik tersebut sebelum dijatuhkan.

4.3. Ekonomi Pasar

Sarjana dan ahli matematika Tunisia, Ibn Khaldun (1332-1406), yang mengawali bab ini, adalah pilihan yang cukup aneh mengingat

dimensi waktu yang telah dirumuskan. Namun reputasi dan pengaruh besarnya dalam dunia Arab menyebabkan pencantuman tulisannya menjadi sangat istimewa. Ketika menganalisis pengaruh perpajakan dalam sistem ekonomi masyarakat dia menyimpulkan bahwa hal itu harus sedang-sedang. Jelas ini adalah pelopor bagi apa yang tahun 1970-an dikenal sebagai kurva Laffer, yang menjelaskan dampak pajak yang berlebihan di mana pendapatan akan mendekati angka nol karena masyarakat berhenti bekerja. Ibn Khaldun juga melihat dampak aktivitas ekonomi dari sultan yang dalam pandangannya sungguh berbahaya. Pemerintah harus membatasi dirinya untuk merancang kerangka politik dan legal bagi aktivitas ekonomi pribadi dan tidak secara langsung terlibat di dalamnya.

Ahmad Lutfi Al-Sayyid (1873-1963), sudah dimasukkan pada bab pertama, di sini juga muncul dengan advokasi liberal klasiknya untuk negara minimal yang mengeluarkan bisnis pribadi masyarakat dan hanya fokus pada keamanan dan keadilan hukum. Dia memandang solusi sosialis sangat berbahaya bagi ekonomi dan negara-negara berkembang seperti Mesir.

4.4. Demokrasi

Taha Husayn (1889-1973) adalah intelektual liberal terkemuka Arab pada paruh pertama abad ke-20. Posisinya jelas bertolak-belakang dengan Ahmad Lutfi Al-Sayyid, namun melalui tulisannya tampak bahwa Taha Husayn adalah seorang liberal individual pada level tertinggi. Dalam artikelnya dia mengajukan egalitarianisme radikal dan penghapusan hak-hak istimewa. Lebih jauh, partisipasi demokratis masyarakat dalam urusan publik adalah kewajiban. Dia juga mengusulkan beberapa aturan mengenai distribusi kekayaan dan memberi jalan bagi mekanisme seperti pendidikan sekuler yang bebas yang menjadi prasyarat bagi partisipasi demokratis.

4.5. Sekularisme

Farah Antun (1874-1922), seorang pengungsi dari Lebanon di Mesir, adalah orang Arab liberal pertama yang secara eksplisit mengusulkan pemisahan agama dan politik. Berbeda dengan pemikir liberal yang lain, reformis Islam Muhammad Abduh, dia mengemukakan lima dasar untuk menjustifikasi konsep pemisahan tersebut. Pertama, kebebasan berpikir yang telah dibelenggu oleh agama. Kedua, kesetaraan seluruh warga negara. Praktik diskriminasi antara kaum kaum beriman dan tidak beriman dalam agama, bagi Antun, tidak sesuai dengan masyarakat yang adil dan modern. Ketiga, agama dan politik memiliki wilayah kerja yang berbeda, yang pertama fokus pada kehidupan setelah mati atau akhirat dan yang kedua mengurus urusan duniawi dan keseharian. Keempat, kemunduran sosial yang terus menerus terjadi karena ketergantungan kepada sesuatu atau seseorang di luar dirinya. Di sini Antun menjabarkan sejumlah sub-argumen antara lain menyangkut proteksi agama dari pencemaran yang dilakukan karena urusan politik keseharian.

Dasar kelima Antun kurang lebih sama dengan yang di kemudian hari ditulis oleh John Rawls mengenai ketidakcocokan masyarakat terbuka dengan resep “doktrin komprehensif” seperti agama. Sejauh ini, dasar tersebut berhubungan dengan yang kedua mengenai kesetaraan seluruh warga negara. Sebuah agama tertentu dan kemudian doktrin komprehensif tidak bisa mengambil suatu kebijakan bagi rakyatnya tanpa pertimbangan keyakinan atau ketidakkeyakinan agama mereka.

Ali Abd al-Raziq (1888-1962) tahun 1925 menerbitkan buku yang menggemparkan mengenai Islam dan dasar-dasar pemerintahan. Dia menolak kebutuhan Islam terhadap khalifah dan selanjutnya secara religius memanifestasikan otoritas politik. Dia menyatakan bahwa semua yang disebut otoritas pada kenyataannya selalu berdiri di atas pedang dan kekuasaan. Dia menggambarkan nabi Muhammad

sebagai pemimpin agama di mana kompetensi keduniaannya diperoleh secara kebetulan belaka, tetapi tidak berhubungan dengan misi dan kerasulannya. Argumen Abd Raziq adalah kombinasi menarik antara analisa keagamaan Islam dan ilmu politik dan filsafat, ketika dia menghubungkannya dengan John Locke dan Republik Plato.

4.6. Pendidikan

Sulaiman al-Bustani (1865-1925) terkenal dengan terjemahannya atas karya Homer Illiad dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Pada 1908, menyusul peristiwa dalam kekasisaran Utsmani ketika Konstitusi dipulihkan kembali, dia menulis buku mengenai perbandingan antara *status quo* sebelum dan *status quo* sesudah Konstitusi dan kemudian mengambil posisi optimistik. Dalam bab mengenai pendidikan dengan sangat tajam dia mengkritik sekolah-sekolah negeri Utsmani yang mengajarkan imitasi (peniruan), bukan inovasi, dan pengabdian, bukan kesadaran diri. Tidak mengherankan kemudian bahwa siapapun dapat beralih ke sekolah publik atau pesantren. Dia lebih jauh memasukkan pendidikan ke dalam arena politik, menganggapnya sebagai prakondisi yang dibutuhkan bagi liberalisasi dan modernisasi masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Al-Kawakibi pada bab penegakan hukum.

Rifa'a al-Tahtawi (1801-1873) muncul kembali dengan satu bab pendek dari bukunya "*al-Murshid al-Amint*" (Sang Mursyid Terpercaya), terbit pada tahun 1873, di mana ia menginginkan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Taha Husayn (1889-1973), yang juga masuk dalam bab demokrasi, kini muncul dengan pendapat mengenai pendidikan politik yang didasarkan pada kebebasan dan membandingkan antara apa yang berlaku di Mesir dengan kemajuan yang telah dicapai Eropa. Dia menyebut tanah airnya tertinggal di belakang. Dalam kehidupan

nyata, Taha Husayn, suatu kali menjadi menteri pendidikan Mesir era pra-Nasser, adalah penganjur gigih mengenai pendidikan yang setara dan sekuler. Tapi dengan begitu ia seringkali berseberangan pendapat dengan para syekh al-Azhar, universitas Islam tertua, mengenai kurikulum.

4.7. Hak-hak Perempuan

Hak-hak perempuan adalah bahasan yang paling penting bagi Qasim Amin (1863-1908). Dia menulis dua buku pada tahun 1899 dan 1900. Yang pertama, *Tahrir al-Mar'a* (Pembebasan Perempuan), adalah karya reformis yang cukup moderat yang berupaya mengharmoniskan liberasi perempuan dengan dasar-dasar doktrin Islam. Namun yang kedua adalah buku yang secara langsung melakukan serangan terhadap agama dan halangan-halangan sosial bagi pembebasan perempuan. Dia menyebut semua itu sebagai “semi-perbudakan.” Dia menyerang hukum Islam dalam perkara kesaksian dan hukum warisan (keduanya menempatkan perempuan tidak setara dengan laki-laki) dan bertanya kenapa hal ini tidak berlaku juga untuk laki-laki bodoh. Dalam teks yang dimasukkan dalam buku ini, dia juga menggunakan pendekatan utilitarian yang bertalian dengan pembebasan perempuan menuju masyarakat yang maju.

Artikel kedua dari Qasim Amin, diyakini ditulis bersama dengan Muhammad Abduh (1849-1905), pengarang memandang kewajiban mengenakan jilbab dari perspektif agama dan tidak ditemukan landasan apapun dari Qur'an dan Sunnah yang mengharuskan perempuan mengemukannya. Kemudian, larangan perempuan terlibat dalam kehidupan publik hampir tidak mungkin sesuai dengan keinginan Tuhan ketika Dia menurunkan aturan-aturan-Nya.

Mengutip hadits nabi dan ayat-ayat Qur'an, artikel ini memiliki argumen yang sangat kuat melawan jilbab dari perspektif Islam.

Argumen ini juga menjadi semakin kuat karena ia melawan argumen para ulama konservatif dengan menggunakan sumber yang sama.

5. Kesimpulan dan Sikap

Buku ini merangkum dan memaparkan gagasan-gagasan dari sejumlah pemikir liberal Arab papan atas dalam sejarah modern wilayah tersebut.

Buku ini telah dipresentasikan ke publik dan para audiens di Kairo, Beirut dan Amman. Kemungkinan besar juga akan dipresentasikan di Jerussalem. Pertama kali diedarkan, sebanyak 1000 buku dalam waktu singkat habis terjual dan edisi kedua sedang beredar.

Gagasan untuk memperkenalkan pemikir-pemikir liberal setempat kepada masyarakat non-Barat mungkin juga bisa dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Buku ini akan segera diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena para pengarang dan artikel-artikelnya sangat penting dan contoh yang baik bagi kalangan non-Barat dan tentu saja masyarakat Muslim.

Seiring dengan debat mutakhir di Jerman mengenai imigrasi dan peran masyarakat Muslim dan Arab di negara itu, usaha untuk mempublikasikan pengetahuan mengenai pemikiran liberal Arab adalah sesuatu yang sangat penting untuk membalikkan gambaran kebodohan dan *illiberal* yang selama ini diandaikan begitu saja pada dunia Arab. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris dan Jerman yang akan dilakukan akan memberi informasi kepada publik yang berbahasa non-Arab gambaran yang benar mengenai Timur Tengah yang tampak selalu berlawanan dengan liberalisme.

Clemens Recker

Beirut, 17 Januari 2011



Bab I

Kebebasan

Kebebasan merupakan pondasi pemikiran liberal. Istilah liberal berasal dari kata Latin “*liber*” yang berarti kebebasan. Kebebasan merupakan kebutuhan paling penting dan paling utama dalam liberalisme dibanding kebutuhan lainnya seperti negara hukum atau demokrasi. Liberalisme menuntut kebebasan individu yang merupakan pondasi bagi setiap masyarakat yang bebas. Hanya manusia yang bebas, dengan potensi dan kreatifitasnya, yang mampu menciptakan masyarakat yang maju dan beradab. Tidak akan pernah ada masyarakat bebas jika anggotanya tidak memiliki kebebasan. Dengan demikian, kebebasan individu lebih dahulu ada daripada kebebasan masyarakat, dan tidak mungkin ada masyarakat yang bebas jika setiap individu di dalamnya lemah.

Mengapa manusia bebas? Mengapa manusia harus bebas? Banyak sekali argumentasi yang dikemukakan untuk menjawab pertanyaan ini. Kadangkala argumentasi-argumentasi itu menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan yang tidak mungkin dicabut darinya. Sebagian orang memberikan argumentasi berdasarkan agama bahwa Tuhan memang menciptakan manusia sebagai makhluk yang bebas. Setiap upaya menghalangi kebebasan manusia berarti bertentangan dengan kehendak Tuhan.

Ada mazhab lain yang menyatakan bahwa kebebasan merupakan sifat orisinal manusia. Tidak mungkin memisahkan antara individu dan kebebasannya. Inilah mazhab hak-hak alami. Argumentasi kebebasan dalam mazhab ini tidak berdasarkan agama. Mereka menjadikan hak-hak alami sebagai argumentasi tertinggi dan paling utama dibanding hak-hak yang ditentukan oleh berbagai aturan dan konvensi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Bagian dari hak-hak alami adalah hak-hak manusia yang eternal yang menjadi tujuan dari deklarasi hak asasi manusia (HAM) kapan dan di mana pun. Kesimpulannya, kebebasan adalah bagian dari kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan.

Mazhab ketiga adalah utilitarianisme yang menegaskan bahwa sistem sosial, politik, dan pasar yang dibangun di atas pondasi kebebasan lebih banyak memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Kebebasan mendorong manusia untuk bersaing secara individual dan saling meningkatkan kecerdasan kemanusiaan. Kebebasan tidak dibangun berdasarkan kebebasan. Masyarakat akan maju dan berkembang ketika setiap individu di dalamnya dapat melakukan interaksi dan transaksi dengan aman dan damai. Kita ambil contoh Qasim Amin yang mengkampanyekan emansipasi perempuan sesuai dengan prinsip utilitarianisme. Ia mengatakan bahwa “perempuan yang bebas dan berpendidikan lebih besar manfaatnya bagi masyarakat karena ia mampu mendidik anak-anaknya”.

Dalam liberalisme, semua manusia memiliki kebebasan dan hak yang sama. Indikasi paling tegas dalam hal ini adalah kesetaraan semua manusia di hadapan hukum. Liberalisme tidak pernah memberikan keistimewaan pada siapa pun dan tidak pernah menganggap orang tertentu lebih mulia daripada yang lainnya.

Setelah kita ketahui kecenderungan berbagai argumentasi kebebasan, yang harus dipertanyakan adalah, apa yang diberikan kebebasan buat manusia? Apa keistimewaan kebebasan? Secara

umum, kita dapat membagi kebebasan menjadi dua: kebebasan negatif dan kebebasan positif. Tetapi bukan berarti yang kebebasan positif lebih baik daripada kebebasan negatif. Yang dimaksud dengan kebebasan *negative* adalah kebebasan membela diri sendiri melawan berbagai intervensi otoritarianisme yang datang dari orang lain, masyarakat, atau negara. Kebebasan negatif ini mencakup kebebasan pribadi, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan memilih profesi, kebebasan berdagang, kebebasan memiliki, dan kebebasan untuk bergabung dalam salah satu partai politik.

Adapun kebebasan positif adalah kebebasan aktif yang membuat seseorang dapat bergabung dalam masyarakat dan mengambil peran penting dalam mengatur urusan kemasyarakatan, seperti dengan mengikuti pemilihan umum yang demokratis.

Setiap orang berusaha menggapai kebebasannya pada level yang berbeda-beda. Dalam buku *Mafhûm al-Huriyyah*, Abdullah al-Urwi menyatakan, “Setiap individu memperjuangkan kebebasannya di hadapan keluarganya; perempuan memperjuangkan kebebasannya di hadapan suaminya; seorang anak memperjuangkan kebebasannya di hadapan orangtuanya; kelompok minoritas memperjuangkan kebebasannya di hadapan kelompok mayoritas; umat memperjuangkan kebebasannya di hadapan musuh-musuhnya.”

Liberalisme tidak bermaksud menculik setiap individu dari keluarga dan masyarakatnya. Liberalisme hanya ingin menegaskan bahwa setiap individu harus menjadi tuan bagi segala urusan, aktivitas dan masa depannya. Setiap orang memiliki hak untuk memilih jalan hidup dan bersikap sesuai kehendaknya sendiri, dengan satu syarat, kebebasan tersebut harus seiring dengan kebebasan orang lain. Konsep yang sangat berhubungan erat dengan liberalisme adalah konsep tanggung jawab. Setiap orang bebas menentukan jalan hidupnya dan tidak ada satu orang lain pun yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu, liberalisme berusaha mencipt-

takan manusia yang mampu mengemban kebebasan dan tanggung jawabnya dengan memberikan pendidikan (lihat Bab VI).

Sejarah Arab penuh dengan konflik dalam rangka perjuangan meraih kebebasan. Masyarakat Arab berupaya membebaskan diri dari berbagai intervensi negara. Para pemikir liberal Mesir berusaha melawan kekuasaan para *khedive* di satu sisi, dan di sisi lain mereka berjuang melawan penjajahan Inggris. Mereka menuntut kebebasan dalam dua level: *pertama*, kebebasan dalam negeri, yaitu kebebasan warga Mesir dan perlawanan terhadap otoritarianisme dari dalam. Pada level ini, tidak penting lagi siapa yang sedang menjadi penguasa; orang Arab atau bukan orang Arab. Yang terpenting adalah sikap penguasa terhadap hak-hak rakyat. Para pemikir liberal Arab lebih keras mengkritik penjajahan Inggris karena bersikap otoriter dibanding kritik mereka terhadap Inggris karena orang asing.

Pada level kedua—bersamaan dengan menyebarnya nasionalisme—asal-usul penguasa dan kebangsaannya menjadi lebih penting dibanding sikap politiknya terhadap kebebasan individu. Tujuan para pemikir liberal Arab adalah kemajuan dan modernisasi negara-negara Arab, dan kebebasan merupakan sarana yang paling efektif untuk mewujudkan tujuan ini, karena kebebasan membentangkan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Sebagian penguasa—yang paling menonjol adalah Muhammad Ali (berkuasa di Mesir pada tahun 1805–1848)—berusaha melakukan modernisasi di bidang manajemen, seni dan industri. Akan tetapi, bagi kaum liberal Arab, infrastruktur setiap kemajuan dan peradaban yang sesungguhnya adalah pemikiran yang membebaskan manusia dari perbudakan serta memberikan peluang pada manusia untuk mengembangkan potensi dan kreativitas.

Muhammad Ali mengimpor alat-alat modern dan model industri baru. Akan tetapi modernisasi ini tidak akan bertahan lama tanpa melakukan liberalisasi pemikiran manusia, karena kebebasan dan kemajuan saling menunjang satu sama lain.

Terakhir, kebebasan bukan kreativitas Eropa saja. Benar, bahwa Eropa modern lebih dahulu melakukan liberalisasi pemikiran dibanding peradaban lain. Akan tetapi kebebasan merupakan nilai penting bagi kemanusiaan. Ketika kaum liberal Arab mengkampanyekan dan menanamkan kebebasan di negara-negara Arab pada dua abad terakhir, mereka tidak meminta negara mereka menjadi negara Barat, tapi menjadi modern. Modernitas bukan milik bangsa Eropa. Setiap masyarakat atau peradaban dapat menjadi modern melalui jalan kebebasan.

Untuk para pembaca, dalam buku ini kami persembahkan dua orang penganjur kebebasan yang paling kuat di dunia Arab:

Pertama, Ahmad Luthfi Sayyid yang dijuluki sebagai Guru Generasi (*Ustâdz al-Jail*) karena ia memiliki murid yang banyak dan sangat berpengaruh. Luthfi Sayyid menulis berbagai karya tentang liberalisme dan kebebasan dalam lingkup yang luas. Ia dianggap sebagai tokoh liberal klasik.

Kedua, Salamah Musa yang berprofesi sebagai seorang jurnalis dan penulis naskah opera yang sangat perhatian pada kebebasan berekspresi. Karena ia lebih cenderung kepada sosialisme, maka karyanya tentang kebebasan sangat penting bagi kaum liberal. ■

Kebebasan (1912) *Ahmad Luthfi Sayyid*

Andai kita dapat hidup hanya dengan roti dan air, maka hidup kita sudah menyenangkan, bahkan lebih dari menyenangkan. Akan tetapi kebutuhan hidup yang paling mendasar yang membuat kita mencintai kehidupan bukan hanya mengenyangkan perut yang lapar, tapi kebutuhan alami yang mirip dengan roti dan air. Kebutuhan alami ini jauh lebih tinggi. Dan, saat ini kebutuhan itu menjadi kebutuhan yang sangat mahal dan sangat berharga. Kebutuhan itu adalah kepuasan akal dan jiwa yang tidak akan dicapai kecuali dengan kebebasan.

Ketika menuntut kebebasan, kami tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Kami hanya menuntut kebutuhan yang paling primer bagi kehidupan kami. Kami menuntut agar kami tidak mati. Tidak ada makhluk yang lebih sederhana daripada orang yang hanya menuntut kehidupan dan sarana kehidupan. Demikian pula, tidak ada orang yang lebih mulia dibanding orang yang menjamin makhluk hidup untuk mendapatkan bagiannya dalam kehidupan ini¹.

Aku tidak heran pada orang yang menganggap remeh kehidupan orang lain dengan membunuhnya. Aku justru sangat heran pada orang yang bersikap belas kasih pada mereka yang kelaparan dan telanjang, tapi sambil melecehkan kebebasan. Ia telah memisahkan antara akal dan segala sesuatu yang bermakna dengan tabir tebal. Ada penghalang antara perasaannya dan tema-tema kebutuhan rasional. Perasaannya tidak tersentuh sama sekali, bahkan telah mati. Aku sangat heran pada orang yang menganggap bahwa kehidupan adalah sesuatu, dan kebebasan adalah sesuatu yang lain. Ia tidak ingin memahami bahwa kebebasan merupakan pondasi pertama bagi kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa kebebasan.

Setiap orang pasti mempertahankan kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi. Ia akan selalu mempertahankan kebebasan alaminya walau ia berada dalam penjara. Ia selalu mempertahankannya dalam segala keadaan. Ia menjalani hidup di atas kebebasan tersebut selama hayat masih dikandung badan. Setiap orang diciptakan sebagai makhluk yang bebas; bebas berkehendak dan bebas menolak atau menerima. Ia bebas dalam segala hal, bahkan bebas memilih hidup atau mati. Akan tetapi kebebasan alami ini tidak akan berguna dan tidak ada pengaruhnya ketika orang dipenjara, dilarang bicara, dilarang menulis. Mereka tetap mendapatkan kebebasan dan

1 *Al-Jaridah*, 19 Desember 1912 edisi 1754. Kutipan ini juga terdapat dalam buku *Turâts Ahmad Luthfi Sayyib*, jilid I, Dâr al-Kutub wa al-Watsâ'iq al-Qaumiyah, Kairo, 2008, hal. 322-324.

keselamatan jiwa, tapi tidak dapat memanfaatkannya. Mereka telah kehilangan hak-hak sipil.

Begitu juga dengan orang-orang yang dibiarkan bebas sebagaimana Tuhan menciptakan mereka. Mereka bebas bicara dan menulis apa yang mereka inginkan. Mereka melaksanakan kebaikan yang mereka suka. Akan tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengelola organisasi. Mereka memiliki kebebasan alami dan kebebasan sipil, tapi mereka tidak memiliki kebebasan politik.

Saya tidak bermaksud memperumit definisi tentang berbagai kebebasan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kebebasan yang tidak dapat diekspresikan sama dengan tidak ada. Kebebasan alami yang ada pada manusia tidak dapat disebut kebebasan jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Apa gunanya orang berjalan dengan mata tertutup. Apa gunanya orang makan, minum dan memukul dengan tangan yang terbelenggu. Mata yang tertutup dan tangan yang terbelenggu sama dengan tidak ada. Manusia dikatakan bebas tergantung kadar sarana kebebasan yang yang dapat ia gunakan. Manusia dikatakan hidup sesuai kadar kemungkinan ia menikmati kebebasannya. Kebebasan yang tidak sempurna berarti kehidupan yang tidak sempurna. Hilangnya kebebasan berarti kematian. Kebebasan adalah arti dari kehidupan.

Kita diciptakan sebagai makhluk yang mencintai kesempurnaan dalam hidup ini dan selalu melawan setiap hambatan yang menghalangi jalan ideal untuk menciptakan kehidupan yang baik. Kita selalu berusaha mewujudkan berbagai sarana kebebasan dan dampak positif dari kebebasan. Tidak ada pilihan bagi kita selain kebebasan, walau kerinduan alami akan kebebasan ini akan menjadi sumber kebahagiaan atau sumber penderitaan. Kerinduan ini adalah api yang selalu membara di antara tulang manusia dan tidak akan pernah membeku sampai mendapatkan apa yang kita inginkan.

Benar, cita-cita bukanlah titik yang tidak bergerak dan bukan garis yang membentang dalam jarak tujuan yang ingin dicapai. Setiap kali mencapai satu titik, kita bahkan harus berpindah menuju titik yang lain sejauh mata memandang. Pandangan kita harus tetap tertuju padanya dan harus membawa kita menuju cita-cita itu dengan kesabaran walau harus menumpang di atas kendaraan penderitaan.

Oleh sebab itu, kita harus memahami berbagai kebatilan klasik yang merupakan keangkuhan rasialis yang disebarkan oleh para penulis untuk menjerumuskan kita dalam identitas yang kontradiktif. Mereka mengatakan bahwa sebagian manusia diciptakan untuk menjadi penguasa dan sebagian yang lain diciptakan untuk menjadi budak selamanya. Kita melihat kesalahan ini selalu diulang dalam kebijakan politik para kolonialis masa kini dalam bentuk yang lebih kejam dan dengan ungkapan yang menyesuaikan diri dengan masyarakat sipil yang modern. Mereka menutup mata walau kesimpulan dari premis yang mereka bangun adalah “sebagian manusia bukan manusia”.

Mereka membangun filosofi dusta. Yang benar adalah orang yang selalu merasakan kecenderungan untuk memajukan kehidupan dalam segala aspeknya. Terutama soal kebebasan. Inilah yang kami temukan pada seseorang yang baru keluar dari penjara yang ditahan karena aktivitas berpikrnya.

Penderitaan yang benar yang kami temukan pada seorang pemikir ilmiah yang memendam kebebasannya dalam dada. Ia tidak meneriakkan pemikirannya hingga ia mengalami kegelisahan yang menguasai seluruh perasaannya. Bahkan, akhirnya memilih kematian demi menuruti rasa cinta ini daripada hidup sambil menyimpannya dalam dada. Berapa banyak pemikir yang lebih memilih kematian daripada hidup sampa memendam kebebasan ilmiah mereka. Ada yang mati dibunuh, ada yang mati dibakar, dan ada yang dipenjara dan disiksa. Mereka merasakan penderitaan yang begitu berat akibat membela

masyarakat yang dikatakan tercipta bukan untuk menjadi pemimpin.

Jika ada orang yang memilih hidup sebagai budak dan tidak mau menjadi manusia yang bebas, maka itu merupakan contoh anomali yang jarang terjadi bagi manusia secara umum. Kasus ini bukan kaidah yang dapat dijadikan pegangan. Dalam hal ini kita dapat melihat bukti empiris bahwa prinsip mempertahankan eksistensi tanpa kebebasan tidak lebih sulit daripada mempertahankan eksistensi diri yang memuliakan kebebasannya. Orang dapat melihat pada masa lalu bahwa tidak ada masyarakat yang diciptakan sebagai budak. Yang ada adalah masyarakat yang telah membunuh kebebasan mereka sendiri.

Informasi yang paling valid adalah informasi yang disuguhkan oleh realitas yang terjadi. Informasi-informasi itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas walau terdapat filsafat kolonialisme. Manusia adalah bebas secara alami serta cenderung kepada kebebasan dan kemajuan dalam kebebasan hingga mencapai cita-cita yang paling tinggi. Dalam kebebasan, tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia lainnya, kecuali dalam kekuatan cita-cita dan sarana yang memungkinkan manusia untuk mencapai kebebasannya.

Kebebasan adalah alami. Kecenderungan manusia kepada kebebasan adalah sesuatu yang alami. Inilah kepastian yang tidak dapat ditolak. Kebebasan itu akan tampak dan menguat seiring dengan kekuatan spirit yang ada. Kebebasan akan melemah seiring dengan kelemahan spirit manusia. Kekuatan kesadaran tidak akan pernah mati, namun ia juga tidak akan cukup sabar untuk menjalani hidup yang jauh dari cita-cita kebebasan.

Di negara ini kita melihat keruntuhan kebebasan sejati bersamaan dengan kerusakan kemanusiaan di zaman ini. Kita telah menghancurkan setiap gagasan, hukum, dan aktivitas yang mengusung “kebebasan individu”. Kita melihat upaya penghancuran tanpa batas

terhadap kebebasan sipil yang dilakukan oleh negara. Di sisi lain kita meyakini bahwa satu-satunya negara yang paling bisa diterima adalah negara yang sesuai dengan harga diri masyarakat, yaitu negara hukum.

Di antara kita ada orang yang dengan berani menyatakan secara terbuka bahwa kemerdekaan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar dan harus menjadi orientasi semua anggota masyarakat. Tidak perlu berpikir bahwa kemerdekaan hakiki itu harus diwujudkan secara gradual. Semua sarana harus digunakan untuk dapat mewujudkannya. Akan tetapi, menginginkan perubahan adalah sesuatu, dan kemampuan mewujudkan perubahan adalah sesuatu yang lain.

Secara alami, kekuatan masyarakat berbeda di setiap zaman dan tempat sesuai dengan kondisi kehidupan ekonomi, keyakinan agama, budaya dan mental masyarakat. Hasil dari kekuatan itu pun selalu berbeda-beda karena perbedaan sarana-sarana alami yang dapat digunakan. Bagi kami, kekuatan yang paling penting adalah kekuatan informasi dan kekuatan ilmiah. Argumentasi-argumentasi ilmiah tidak akan menimbulkan pertentangan dengan kekuatan otoriter, terutama pada zaman sekarang ini. Ketika para pemikir menawarkan kehendak kebebasan secara ilmiah, berarti mereka melakukan gerakan fleksibel dan dapat bermanfaat bagi pendidikan mental masyarakat serta pembiasaan terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, mereka akan mampu bersikap sabar dalam menghadapi berbagai ancaman dan serangan yang selalu muncul sebagai reaksi kebebasan berpendapat. Ancaman dan serangan itu mungkin datang dari pemerintah atau dari sekelompok masyarakat yang lain.

Orang-orang yang menghalangi kita untuk mengekspresikan kebebasan yang telah Allah berikan menemukan kekurangan kita dalam mengekspresikan kebebasan berpikir secara ilmiah dan politik sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa kita tidak menginginkan

perubahan. Ketika mereka merasa bahwa kebebasan kita dalam berpikir dan berekspresi tidak menjadi bahan ejekan orang-orang bodoh, tidak membuat marah para elit dan tidak menggoyah sumber-sumber rezeki, mereka tidak menemukan alasan untuk mencegah kita mencapai cita-cita kebebasan.

Karena cara pandang yang terbatas, sebagian orang menilai kekuatan mental dalam berpegang pada kebebasan dan berjuang untuk mewujudkannya tidak cukup untuk menggapai cita-cita kebebasan. Aku pastikan bahwa satu kekuatan mental ini sangat cukup untuk meraih apa yang kita inginkan. Biarkan jiwa kita terus menerima kekuatan mental ini, dan kita tunggu hasilnya.

Kemajuan kita dalam merebut hak kebebasan alami harus dapat diwujudkan walau harus menghadapi kekuatan penindas yang sangat besar. Kita akan selalu dalam kondisi lemah jika tetap percaya pada berbagai pemikiran tanpa berisikap kritis hanya karena melihat status pembuat pemikiran tersebut. Jika kita tidak memotong tali yang membelenggu akal dan tidak menghancurkan mitos-mitos yang membuat kita tidak dapat menerima konsep-konsep baru, berarti kita mencoba mengangkat panji kebebasan di medan yang memberikan kebebasan berbuat tapi tidak ada teman dan pengunjung yang menghampiri kita. Akan tetapi ini merupakan langkah pembuka yang baik untuk memanifestasikan keharusan adanya kebebasan dan memperkuatnya. ■

Kebebasan Pribadi² (1913) *Ahmad Luthfi Sayyid*

Kita terus mempertajam harapan kita untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kita harus menggenggam kemuliaan rakyat dan menikmati apa yang kita yakini sebagai kebahagiaan kemerdekaan. Tujuan yang

2 *Al-Jaridah*, 28 September 1913, edisi 1990. Artikel ini juga dimuat dalam buku *Turāts Ahmad Luthfi Sayyid*, juz I, Dār al-Kutub wa al-Watsā'iq al-Qaumiyah, Kairo, 2008, hal. 569-576.

akan kita capai mengandung banyak hambatan dan tidak ada jalan pintas. Itulah tujuan hakiki bagi masyarakat Mesir yang mulia. Inilah yang harus dijadikan orientasi bersama semua warga masyarakat Mesir. Untuk mewujudkan orientasi tersebut, kita harus konsisten dan sabar menerima berbagai konsekuensi perjuangan. Kita harus menjadikan kebijakan pemerintah Mesir tidak bertentangan dengan kemajuan masyarakat dalam segala aspek, seperti peraturan hukum dan nilai-nilai sosial. Pemerintah harus aktif menciptakan pencapaian ekonomi yang cukup dan kebebasan berpolitik bagi masyarakat.

Berdasarkan tujuan ini, kami selalu berusaha mengingatkan setiap hati nurani pada langkah-langkah hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan problem sosial dan menggapai tujuannya yang besar. Baik langkah-langkah hukum oleh para pendukung kolektivisme atau para pendukung liberalisme. Fakta umum menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang yang lalu membuat kita menjadi budak dan pengemis di hadapan pemerintah dan selalu bersandar padanya dalam setiap upaya perbaikan, bahkan dalam pendidikan dan menjaga nilai-nilai pribadi. Kita selalu meminta segala sesuatu dari pemerintah. Bahkan, kita meminta pemerintah untuk menjadi penengah dalam mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang berikai. Kita berpikir bahwa intervensi adalah hak pemerintah dan mendamaikan adalah kewajiban pemerintah. Seolah-olah pemerintah memberikan segala sesuatu kepada kita. Kita tidak memiliki manfaat apa pun untuk diri sendiri, selain bahaya. Berjalan di bawah naungan sistem sosialisme pasti mengantarkan kita pada akibat yang buruk, yaitu membunuh gagasan bahwa manusia dapat mengurus dirinya sendiri secara umum selain kritik basa-basi terhadap sesuatu yang seluruhnya telah dikerjakan oleh pemerintah.

Sosialime telah membatasi ruang gerak setiap individu di tempat yang sangat sempit, di sekitar teras rumah mereka. Tidak mengherankan jika sosialisme juga masuk ke dalam halaman rumah.

Pemerintah menentukan susunan rumah setiap individu sesuai selera pemerintah, bukan selera mereka. Oleh sebab itu, kita meminta pemerintah menjaga anak-anak kita dari kebodohan para ibu; kita meminta pemerintah memberikan makanan yang layak kepada anak-anak kita; kita meminta pemerintah mengawasi anak-anak kita yang bermain di jalan agar mereka tidak tertabrak kendaraan. Pemerintah lantas mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Ketika kita melihat kemerosotan moral, kita serahkan tanggung jawab itu kepada pemerintah. Ketika gerakan ilmiah berjalan lamban di negara ini, kita melemparkan ilmu pengetahuan dengan sengaja. Kemudian kita kembali meminta pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi para pemuda yang tidak mau menjadi petani. Kita lantas meminta pemerintah membersihkan kebun-kebun kita dari benih-benih kapas atau memaksa kita untuk menanam sepertiga kebun-kebun kita dengan kapas. Kita meminta pemerintah menanam untuk mengajarkan cara menanam kepada kita. Kita meminta pemerintah untuk menutup kolam-kolam yang telah kita gali di pekarangan kita di kampung-kampung. Kita meminta segala sesuatu pada pemerintah, tapi kita tidak meminta apa pun pada diri sendiri.

Jelas, bahwa setiap tanggung jawab memberikan kekuasaan pada pemangkunya. Ketika kita menyerahkan semua tanggung jawab kepada pemerintah, berarti kita melepaskan kewajiban kita serta membuang hak-hak dan kebebasan untuk kita serahkan kepada pemerintah. Status kita menjadi tidak lebih dari seorang budak di hadapan tuannya atau pelayan yang taat di hadapan majikannya. Kita berbuat seperti itu tapi kemudian kita meminta kebebasan pribadi bagi setiap individu. Kebebasan itu tidak lain hanya kebebasan menjalani hidup dan bekerja sesuai kehendak pribadi dengan syarat tidak melanggar kebebasan orang lain. Dan saya tidak tahu akan sejauh mana batas-batas kehendak tersebut jika pemerintah memiliki kekuasaan untuk menciptakan ruang kehendak sesempit mungkin.

Bisa jadi kebijakan ini merupakan konsep yang sedikit mengandung bahaya bagi masyarakat yang berada di bawah pemerintahan demokratis (pemerintahan rakyat atau pemerintahan mayoritas). Akan tetapi langkah ini merupakan kebijakan yang sangat berbahaya bagi masyarakat kita, di mana kehendak masyarakat tidak dijadikan sumber acuan utama.

Jika mazhab kolektivisme ini terus diberlakukan di negara ini sebagai kebijakan pemerintah, maka kolektivisme akan menjadi penghambat terbesar bagi usaha kita dalam membentuk individu-individu yang bebas dan bertanggungjawab serta menjadi pendorong negara ini menuju kemajuan. Setiap individu akan hidup dan mati di bawah kungkungan kekuatan. Ia tidak dapat mengembangkan berbagai potensi karena selalu berada di bawah tekanan dan ancaman. Saya pikir kenyataan ini tidak dapat dipungkiri karena setiap undang-undang yang ditetapkan oleh negara selalu cenderung “mengurangi” hak dan kebebasan setiap individu. Setiap intervensi pemerintah terhadap berbagai urusan yang tidak seharusnya diintervensi berarti tekanan terhadap kebebasan dan pembatasan ruang ekspresi bagi setiap individu. Di negara ini, kami lebih membutuhkan penyembuhan terhadap orang-orang yang sakit akibat tekanan yang mereka rasakan. Walau bagi sebagian pemikir sosialis mazhab kolektivisme bermanfaat bagi sebagian masyarakat, tapi kolektivisme tidak berguna bagi kita. Karena, di wilayah lain ada kenikmatan bagi setiap individu yang dikarenakan adanya kebebasan berekspresi dalam batas yang luas. Oleh sebab itu, potensi mereka menjadi kuat dan berkembang hingga batas mengganggu keseimbangan antara mereka dan orang-orang yang lebih rendah dari mereka. Mereka dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan dan kebahagiaan masyarakat karena kekuatan mereka untuk menguasai masyarakat. Maka, sosialisme berhasrat untuk menyamakan manusia dalam kekayaan dan melakukan pembagian kekayaan di antara mereka berdasarkan

ideologi pembagian (*qasamiyin*) atau berdasarkan ideologi sosialis di mana setiap manusia hidup sama-rata secara sosial. Untuk memberlakukan sosialisme ini tidak ada jalan lain kecuali pemerintah menguasai segala sesuatunya, dan kehendak serta kebebasan individu jadi tidak ada sama sekali. Yang kita inginkan, dan ini selalu kita ulangi, adalah adanya pendidikan individu dan menyingkirkan berbagai hambatan hingga ia mampu membersihkan diri dari sifat lemah yang telah ia terima dari sistem pemerintahan yang lalu. Ia menjadi memiliki kesempatan untuk menyempurnakan kekuatannya hingga mampu bersaing dengan individu-individu dari bangsa lain. Generasi yang akan datang harus melihat sosialisme sebagai ideologi yang mungkin saja pantas diberlakukan di tengah masyarakat mereka. Karena kebijakan pemerintah harus berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan karakter penduduk sebuah negara.

Bagi liberalisme dan individualisme pemerintahan harus ada, baik dalam bentuk aristokrasi, demokrasi atau pemerintahan individu. Akan tetapi, ruang gerak pemerintah harus berada dalam batas-batas yang pasti. Pemerintah hanya memiliki tiga kewajiban: menciptakan institusi kepolisian, menegakkan keadilan, dan menjaga keamanan negara. Di luar konteks tersebut, pemerintah tidak punya hak melakukan intervensi. Dalam hal ini ada pendapat yang sangat menarik dari pemikir Inggris, John Stuart Mill, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi di luar wilayah tersebut, kecuali hanya untuk memastikan terpenuhinya tiga kewajiban di tersebut. Ini pendapat yang sangat masuk akal karena manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan tak terbatas. Keterbatasannya untuk tidak mengganggu kebebasan orang lain semata-mata untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan memperluas batasan kebebasan manusia hingga menganggap keterbatasan sebagai sifat dasar yang berlaku

secara umum sementara kebebasan individu adalah pengecualian yang sempit.

Jika tidak demikian, apa gunanya seseorang hidup dalam masyarakat (negara) sementara ia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang telah Tuhan berikan di dunia ini, yaitu kebebasan. Apa imbalan yang diberikan oleh masyarakat (pemerintah) kepadanya ketika masyarakat merampas semua kebebasannya berdasarkan pedoman demi kemaslahatan bersama? Saya yakin tidak banyak imbalan yang akan diberikan oleh pemerintah karena contoh-contoh yang terjadi setiap hari menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah melindungi mereka yang dibunuh secara lalim di dalam rumah, ladang dan jalan umum. Mereka akan berkata bahwa pemerintah akan serius menangkap dan menghukum pelaku pembunuhan. Kami katakan bahwa bisa jadi pemerintah melakukan tindakan tersebut, tapi apa manfaat yang didapatkan oleh korban pembunuhan dari penghukuman tersebut?

Contoh lain adalah pemerintah tidak melindungi harta setiap individu yang kebebasan mereka telah direnggut. Mereka (pemerintah) akan mengatakan bahwa polisi dengan sigap memburu pencuri. Jika itu benar-benar dilakukan, apa manfaat yang didapatkan oleh orang yang menjadi korban pencurian setelah pencuri dimasukkan ke dalam penjara beberapa waktu lamanya, kemudian kembali melakukan kejahatan setelah keluar dari penjara? Padahal, data pengadilan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku tindak pembunuhan tidak dijatuhkan sanksi hukum yang sepatutnya. Dalam kasus-kasus pencurian, saya yakin polisi tidak akan pernah mengembalikan barang curian kepada pemiliknya. Jika pemerintah—bentuk pemerintahan apa pun—tidak mampu melindungi kehidupan dan harta warganya, bukankah tindak kebodohan yang keji bila pemerintah membatasi kebebasan individu, melalui undang-undang yang dibuat, melebihi kadar yang dibutuhkan dalam kondisi darurat.

Baik daruat militer, darurat demi menegakkan keadilan, atau darurat demi membela negara.

Individu dan masyarakat (pemerintah) dua pihak yang memiliki kepentingan yang bersebarangan dari sudut undang-undang. Keduanya harus diselaraskan dan keselarasan tidak akan terjadi kecuali berdasarkan kehendak berdamai dan saling kompromi. Satu-satunya alasan yang dapat diterima untuk menciptakan kondisi seperti itu adalah demi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan sistem sosial. Pemerintah tidak dibenarkan membuat undang-undang yang mengandung semangat penguasaan terhadap individu, kecuali dalam batas-batas tertentu karena kebutuhan yang mendesak. Misalnya soal undang-undang pers yang diberlakukan karena ada sebagian media massa yang berlebihan dalam mengkritik hingga membahayakan pemerintah. Apakah undang-undang pers ini harus dipertahankan walau harus membatasi kebebasan pribadi dalam menulis dan menuangkan pikiran? Saya pikir tidak ada alasan yang masuk akal bagi pemerintah hingga harus memberlakukan undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, orang-orang yang optimis terhadap pemerintah mengharapkan pemerintah melakukan pembatalan undang-undang tersebut, hari ini atau besok. Contoh lain adalah undang-undang persekongkolan kejahatan. Misalnya, ada tiga orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana politik yang mengancam pemerintah kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan sewenang-wenang untuk menjerat mereka. Apa kesalahan setiap individu dalam masyarakat hingga mereka ikut terancam oleh undang-undang persekongkolan jahat tersebut?

Standar darurat tidak cukup ditentukan hanya dengan kecurigaan pemerintah bahwa para pejabat berada dalam ancaman hingga mereka merasa berhak mengekang kebebasan individu; melarang melakukan sesuatu pada hari ini yang kemarin sesuatu itu boleh

dilakukan; menghukum masyarakat berdasarkan sesuatu yang tidak dibenarkan.

Dari apa yang telah dijelaskan, kami memilih aliran kebebasan atau individualisme dibanding aliran kolektivisme yang menganggap berhak melanggar hak-hak setiap individu demi kepentingan kolektif tanpa batasan apa pun. Kolektivisme menganggap individu itu tidak ada; tidak ada ketenangan dan kebahagiaan individu karena ia bagian dari kolektivitas. Mereka meyakini itu sambil mengingkari kenyataan empiris bahwa dua aliran tersebut memiliki manfaat dan bahaya. Hanya saja, individualisme lebih bermafaat bagi negara kita pada masa sekarang ini dibanding aliran lainnya.

Meski demikian, kami masih melihat bahwa aliran individualisme tidak bisa diterapkan secara mutlak di negara kita. Masyarakat kita masih memerlukan perhatian pemerintah untuk melakukan intervensi dalam kasus-kasus tertentu, tapi intervensi yang hanya bersifat anjuran dan memberikan petunjuk, bukan intervensi hukum dan pemaksaan. Intervensi yang bersifat anjuran dan petunjuk kadang kala masih dibutuhkan untuk mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan yang akut.

Kami memaparkan argumentasi panjang ini tidak bermaksud sekadar menegaskan keunggulan satu konsep ilmiah dibanding konsep yang lain. Akan tetapi di negara ini kami merasakan ada kecenderungan kuat dari pemerintah dan sebagian orang untuk memberlakukan ideologi kolektivisme. Mereka menuntut pemerintah untuk melakukan intervensi yang kuat dalam berbagai urusan yang tidak seharusnya ada intervensi pemerintah. Dan, pemerintah tampaknya cenderung mengikuti arus ini hingga harus melakukan sesuatu yang remeh dan memperluas cakupan kekuasaannya demi memenuhi tuntutan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah justru tidak memenuhi tuntutan masyarakat yang sebenarnya sesuai dengan pedoman kehidupan bernegara. Ada yang lucu dalam hal ini dan kami

akan menyebutkan alasan yang membuat pemerintah mengesahkan undang-undang penerbitan.

Penyebabnya adalah, lembaga umum sejak lama menuntut dan seolah menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu khawatir untuk memenuhi keinginan lembaga umum yang mewakili masyarakat. Pemerintah tidak perlu mengekang kebebasan pribadi yang merupakan pondasi bagi seluruh kebaikan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan bimbingan dari pemerintah dalam segala aktivitas. Akan tetapi, kami sebagai individu menuntut pemerintah di negara ini untuk tidak berlebihan dan tidak melanggar kebebasan kami dengan berbagai undang-undang kecuali sekadar untuk keperluan mengatasi kondisi darurat. Pemerintah harus membantu setiap individu dalam masyarakat untuk menyempurnakan segala aktivitas dengan tidak melakukan tindakan intervensi dalam urusan yang merupakan hak pribadi. Meski intervensi tersebut memberikan manfaat bagi individu, namun tidak akan kebaikan yang menyamai kebaikan yang diperoleh oleh setiap individu berdasarkan kemampuannya sendiri dan persaingan yang sehat dalam kehidupan. Dalam hal ini contohnya adalah intervensi pemerintah dalam mengawasi para pelajar Mesir di Eropa. Ketika kita setuju bahwa pemerintah harus ikut andil dalam pendidikan dan pembelajaran yang merupakan urusan setiap individu—karena masyarakat selalu membutuhkan bantuan dalam hal ini—maka kita tidak dapat memahami sikap pemerintah mengontrol pengetahuan yang diperoleh oleh para pelajar Mesir di Eropa yang belajar atas biaya pemerintah. Ini merupakan intervensi yang tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak. Artinya, bantuan seperti ini tidak diharapkan oleh para pelajar Mesir dan lembaga-lembaga pendidikan tempat mereka belajar.

Jika kita setuju bahwa pemerintah adalah pemilik modal yang menguasai rel kehidupan bernegara dan tidak ada lembaga lain yang dapat ikut andil dalam mengelola proyek besar ini, maka tidak

mengherankan jika kita mendengar rumor bahwa pemerintah akan membuka lahan pertanian kemudian mengontrol secara eksploitatif para petani yang berebut untuk menggarap lahan tersebut.

Oleh sebab itu, kami selalu mengulangi bahwa aliran pemikiran yang saat ini menguasai pemerintah dan masyarakat dikhawatirkan akan menjerumuskan kita pada kesepakatan bahwa langkah pemerintah adalah langkah penguasaan terhadap setiap individu dan mempersempit kebebasan mereka dengan dalih kemaslahatan bersama. Tidak ada kemaslahatan bersama kecuali pemerintah menyadari bahwa dirinya hanya dibutuhkan dalam kondisi darurat. Pemerintah tidak boleh melanggar aturan yang menegaskan bahwa pemerintah hanya boleh bersikap dalam batas-batas darurat sebagai bentuk penghargaan terhadap kebebasan dan kebaikan setiap individu. ■

Argumentasi Kebebasan Berpikir (1927)³ *Salamah Musa*

Tidak ada argumentasi pentingnya kebebasan berpikir selain manfaatnya. Tidak ada alasan yang benar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dan membatasi kebebasan berpikir masyarakat selain karena kewajibannya membela dan menjaga keselamatan jiwa serta menjaga masyarakat dari ancaman langsung. Jika ancaman hanya diperkirakan akan terjadi pada masa yang jauh, maka pemerintah tidak dibenarkan melakukan intervensi. Misalnya, pemerintah tidak dibenarkan melarang seorang penceramah yang menyampaikan pidato tentang manfaat komunisme dan kelebihannya dibanding sistem bernegara yang ada saat ini. Pemerintah tidak boleh melarang hanya karena pidato komunisme tersebut akan

3 Artikel ini diambil dari buku karya Salamah Musa (1927) yang berjudul, *Hurriyat al-Fikr wa Abthāluhā fi at-Tārikh* (Kebebasan Berpikir dan Tokoh-tokohnya dalam Sejarah), Dārul Hilāl, Kairo, hal 198-200.

mempengaruhi masyarakat dan menciptakan gelombang demonstrasi pada suatu saat nanti. Akan tetapi pemerintah boleh melakukan intervensi ketika sang penceramah mengajak masyarakat melakukan perlawanan terhadap orang-orang kaya dan mengambil alih kekayaan mereka.

Pada kasus yang pertama, sang penceramah hanya menyampaikan tentang kelebihan sistem komunisme dibandingkan dengan sistem yang sedang berlaku. Ia tidak mengajak masyarakat untuk mempersenjatai diri dan tidak mengajak mereka untuk melakukan gerakan revolusi. Jika masyarakat merasa yakin akan kebenaran sistem yang telah dijelaskan kepada mereka dan merasa sistem yang ada sudah tidak relevan, maka mereka memiliki pintu untuk memperjuangkan keyakinannya melalui parlemen.

Sementara pada kasus yang kedua, sang penceramah melakukan hasutan yang jelas agar masyarakat melakukan gerakan demonstrasi. Masyarakat harus diselamatkan dari hasutan seorang penceramah. Masyarakat tidak boleh dibiarkan terbuai oleh kalimat-kalimat yang disampaikan penceramah penghasut seperti seorang pembunuh yang merasa senang bermain-main dengan pedangnya. Dalam hal ini, seorang penceramah bertanggungjawab atas gelombang demonstrasi yang ia gerakkan dan pemerintah dituntut untuk melakukan pencegahan.

Tak mudah bagi kita menjelaskan dan membedakan antara kasus-kasus kebebasan berpikir yang melahirkan gelombang demonstrasi langsung yang dibenarkan dan kasus-kasus lain yang melahirkan gelombang demonstrasi yang tidak dibenarkan. Kita akan memberikan beberapa contoh untuk menjelaskannya.

Ada dua orang penceramah yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif di parlemen dari satu wilayah yang sama. Salah satu penceramah itu memiliki pendukung mayoritas. Walau ia

mengatakan hal-hal yang berlebihan dan merusak dalam pidatonya, tidak ada seorang pun yang menentangnya. Sementara pesaingnya hanya memiliki sedikit pendukung (minoritas). Ketika menyampaikan gagasan tertentu, ia dianggap kafir serta disambut dengan teriakan cemooh dan demonstrasi. Dalam kasus seperti ini, walau kata-kata penceramah ini melahirkan gerakan protes, kami menyatakan bahwa pemerintah tetap harus melindunginya dari aksi demo masyarakat karena ia sedang berbicara tentang aspirasi kelompok minoritas. Dan, kelompok minoritas berhak menjelaskan berbagai pandangannya walau berdampak kemarahan besar pada kelompok mayoritas.

Ada contoh lain dalam pertunjukan panggung di mana salah satu pemain opera menjelaskan keburukan aturan pernikahan yang ada saat ini, hijab bagi perempuan dan lain-lain. Penjelasannya ini menimbulkan aksi protes dari para penonton. Dalam kasus ini pemerintah dituntut untuk mencegah aksi penolakan yang dilakukan oleh para penonton dan meminta mereka untuk diam. Bukan sebaliknya; melarang pagelaran opera tersebut.

Dalam dua kasus tersebut ada gelombang protes secara langsung yang sumbernya adalah ucapan calon anggota legislatif dan ucapan seniman opera. Akan tetapi gelombang protes tersebut tidak berlandaskan alasan yang benar karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang melakukan protes itu. Maka, pemerintah harus mendidik dan memaksa mereka untuk diam agar tidak terjadi penindasan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Kepada orang-orang bodoh yang tidak mampu menahan kemarahan karena mendengar atau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsunya, kita dapat mengatakan, “Tenang dan santailah. Anda tidak perlu datang ke gedung opera atau ke tempat yang membuat Anda mendengar kalimat-kalimat yang Anda benci.”

Tidak dipungkiri bahwa kebebasan berpikir mengandung bahaya. Tapi, di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mengandung bahaya.

Dan, bahaya dari kebebasan berpikir tidak berarti menghalangi masyarakat untuk mengambil manfaat darinya. Bisa jadi ada seorang penceramah yang meyakini bahwa ia telah menerima wahyu dan menyatakan bahwa hari kiamat segera datang hingga masyarakat meninggalkan pekerjaan, bahkan melakukan tindak bunuh diri karena takut menghadapi datangnya kiamat. Bisa jadi orang-orang yang terhasut menaati ucapan penceramah tersebut. Seorang yang mengaku al-Mahdi⁴ dari Sudan telah melakukan hal ini dan membuat Sudan menjadi seperti neraka selama puluhan tahun. Akan tetapi kasus seperti ini jarang terjadi. Ketika kelompok terdidik melihat dan memahami ada bahaya yang nyata bagi masyarakat, mereka akan mengajak masyarakat untuk berlindung seperti berlindung dari wabah kolera. Proses perlindungan ini dilakukan melalui perundang-undangan dan pengumuman darurat militer.

Para pemikir bersikukuh pada keharusan adanya kebebasan berpikir dan toleransi walau mengandung dampak negatif sejauh dampak negatif itu tidak parah. Karena, ada beberapa pandangan yang mencegah untuk mengatakan kebenaran. Mereka yang mengekang kebebasan berpikir dari dirinya sendiri adalah orang-orang yang salah. Meski demikian, hal ini masih dapat diterima karena kekuatan yang mencegah masyarakat dari sikap kritis terhadap pendapat tertentu terdiri dari orang-orang yang sangat mungkin berbuat salah. Tidak seorang pun dari mereka yang bebas dari kesalahan. Ilmu pengetahuan dan seni yang mendapatkan kebebasan pasti maju dan berkembang dengan baik sebagaimana yang kita lihat dalam ilmu kimia, ilmu alam, ilmu kedokteran dan teknologi. Kemajuan industri selalu didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan sebagaimana kemajuan peradaban

4 Al-Mahdi dari Sudan adalah Muhammad Ahmad yang hidup pada tahun 1844 sampai 1885. Ini mendaku sebagai al-Mahdi dan memimpin revolusi politik agama yang melawan pemerintahan Turki dan Inggris.

selalu berawal dari kemajuan ilmu pengetahuan. Kadangkala ada keluhan akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang terlalu cepat, bukan karena keterbelakangannya. Justru ilmu-ilmu akhlak dan syariat agama selalu terbelakang karena masyarakat tidak mendapatkan kebebasan untuk membicarakan dan membahasnya. Jika kita bandingkan perkembangan ilmu kimia hari ini dengan ilmu kimia yang ada pada zaman Sulaiman al-Hakim, maka ada perbedaan yang sangat jauh seperti perbedaan antara anak kecil yang bermain dengan api dan pengetahuan seorang insinyur yang mampu menggerakkan kereta. Tapi, perbedaan kita dengan Sulaiman al-Hakim dalam urusan keagamaan dan akhlak sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada bedanya sama sekali. ■

Bab II

Negara Hukum

Agar kebebasan individu dapat terjamin, kekuasaan politik harus dibatasi dengan undang-undang yang jelas dan aturan main demokrasi yang tegas. Kekuasaan politik juga harus dibagi tiga kekuasaan (trias politika), yakni: kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Jika hanya ada satu kekuasaan yang menentukan undang-undang dan mewajibkannya pada masyarakat serta mengontrol mereka tanpa batasan, kebebasan dan hak-hak individu berada dalam ancaman. Kekuasaan yang seperti itu pasti menjadi pemerintah yang otoriter yang tidak menerima pengawasan. Seperti yang dikatakan oleh tokoh liberal dari Inggris yang terkenal, Lord Acton, “Kekuasaan cenderung merusak dan kekuasaan absolut cenderung merusak secara absolut”.

Sarana paling baik yang dituntut oleh kaum liberal untuk menghindari pemerintah yang otoriter adalah undang-undang yang menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Undang-undang bukan hanya merupakan piagam dasar bagi sistem politik, tapi undang-undang merupakan bagan umum dan kerangka hukum bagi setiap kebijakan negara. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum dan semua warga setara di hadapan hukum. Berdasarkan jaminan undang-undang, liberalisme menerima kekuasaan politik yang terbatas.

Selain itu, membagi kekuasaan menjadi tiga akan menciptakan keseimbangan yang nyata di antara sayap-sayap negara. Kekuasaan politik akan selalu dibatasi oleh pengawasan dan masukan yang seimbang. Pembagian kekuasaan ini harus jelas dan tegas karena setiap kekuasaan memiliki ruang dan tugas tertentu yang diakui oleh undang-undang.

Sejarah Arab Islam modern penuh dengan usaha kaum liberal untuk membuat berbagai undang-undang di negara mereka seperti hukum dasar di dalam Daulah Utsmaniyah, perjanjian keamanan di Tunisia, serta revolusi undang-undang di Mesir pada tahun 1923 dan undang-undang musyawarah pada tahun 1930. Akan tetapi, para penguasa dan kekuatan imperialis dari Eropa selalu berupaya menghalangi pelaksanaan undang-undang tersebut.

Rifaah Rafi ath-Thahthawi menulis tentang undang-undang (*la charte*) Perancis (undang-undang Perancis tahun 1814-1830) dalam bukunya yang membahas tentang kota Paris. Dalam buku itu ia mengemukakan tentang pembagian kekuasaan dan pembatasan peran pemerintah sampai batas tertentu. Ath-Thahthawi merasa kagum pada sistem politik Perancis ketika itu karena telah meletakkan kekuasaan di atas banyak pundak. Tentu bagi kita undang-undang Perancis tahun 1830 bukan demokrasi dalam bentuk yang sempurna seperti saat ini. Akan tetapi, dalam konteks sejarah, dan bagi orang Mesir yang menyaksikannya pada pertengahan abad sembilan belas, undang-undang tersebut bagaikan mukjizat besar.

Dalam buku yang berjudul *Takhlish al-Ibrîs fi Talkhîsh Bâris*, ath-Thahthawi memaparkan sistem politik dan sosial Perancis. Buku ini memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan kelompok reformis Arab karena buku ini terbilang buku pertama di dunia Arab yang menceritakan tentang Eropa modern. Ath-Thahthawi mengajak masyarakat Mesir untuk meniru sistem politik Perancis sampai batas tertentu, sambil tidak melupakan kebudayaan Mesir yang khas.

Penulis kedua dalam bab Negara Hukum dan Pemerintahan yang Terbatas ini adalah Abdurrahman al-Kawakibi yang berpindah tempat dari Syria menuju Mesir. Ia menulis bukunya yang paling penting yang berjudul *Thabâ'i al-Istibdâd wa Mashâri' al-Isti'bâd* (Watak Otoritarianisme dan Lubang Kubur Perbudakan). Dalam buku ini ia memaparkan tentang akar-akar otoritarianisme dan jalan keluar untuk menyelamatkan diri otoritarianisme. Al-Kawakibi datang dari wilayah Arab yang jatuh di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah yang mengabaikan undang-undang. Para penduduknya hidup di bawah otoritanisme Sultan Abdul Hamid. Al-Kawakibi mengeritik sikap pasrah masyarakat terhadap kekuasaan absolut dan ketidakmampuan mereka melawan kekuasaan absolut tersebut. Ia menilai bahwa masyarakat yang tidak berani melakukan perlawanan terhadap penindasan berarti tidak berhak hidup dalam kebebasan. Berbagai analisa al-Kawakibi tentang bentuk-bentuk otoritarianisme masih sangat berpengaruh hingga hari ini. ■

Dalam Aturan Negara Perancis⁵ (1834) Rifaah Rafi ath-Thahthawi Tabir penutup aturan negara Perancis telah terbuka. Kita dapat melihat sebagian besar hukum yang mengatur mereka supaya dapat kita jadikan pelajaran yang baik bagi orang-orang yang menginginkannya. Kita sudah tahu bahwa Paris merupakan singgasana Perancis, tempat di mana Raja Perancis tinggal bersama kerabat dan keluarganya. Tempat tersebut bernama Bourbon⁶. Semua raja Perancis pasti dari keturunan keluarga ini. Kerajaan Perancis adalah kerajaan warisan. Tempat tinggal raja Perancis adalah istana Tolero. Biasanya

5 Dari buku Ath-Thahthawi, *Takhshish al-Ibrîz fi Talkhish Bâris*, Darul Hilal, Kairo, hal. 98-110.

6 Rumah raja Eropa yang berkuasa di Perancis pada abad 16 sampai revolusi Perancis tahun 1789 dan kembali berkuasa pada tahun 1814.

orang-orang Perancis menyebut Dewan Perancis dengan Kabin Toleri, yaitu Dewan Raja.

Sumber kekuatan dalam mengatur Kerajaan ada di tangan Raja Perancis lalu di tangan kelompok ahli Samper Du Beir, yaitu Dewan Beir yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki otoritas utama untuk musyawarah, kemudian berada di tangan Dewan Distrik-Distrik. Dewan pertama yang disebut Dewan Beir berada di istana di Paris yang disebut Istana Luksemburg. Dewan kedua berada di istana Bourbon, kemudian disusul oleh Dewan Distrik-Distrik, Dewan Menteri dan Dewan Para Deputi. Selain itu, ada pula dewan yang disebut Dewan Khusus. Ada juga dewan yang disebut dengan Dewan Rahasia Raja dan Dewan Negara untuk Musyawarah.

Raja Perancis, sebagai pemangku kekuasaan penuh dalam kerajaan, harus mendapatkan restu dari dewan-dewan yang tersebut. Akan tetapi, Raja Perancis memiliki keistimewaan lain yang akan kami jelaskan belakangan dalam pembahasan soal politik Perancis (...).

Jadi, jelas bahwa Raja Perancis tidak memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan kebijakan publik. Politik Perancis merupakan undang-undang yang mengikat di mana Raja harus tunduk pada undang-undang yang direstui oleh dewan-dewan yang ada. Dewan Beir bertugas memberikan rambu-rambu kepada Raja dan Dewan Distrik-Distrik bertugas memberikan advokasi pada rakyat.

Undang-undang yang berlaku bagi masyarakat Perancis saat ini dan dijadikan sebagai pondasi politik mereka adalah undang-undang yang disusun oleh raja mereka yang bernama Louis XVIII (berkuasa di Perancis pada tahun 1814 sampai 1824⁷). Undang-undang ini terus dipakai dan mendapatkan dukungan baik dari masyarakat Perancis. Tidak dapat dimungkiri oleh para pemikir bahwa dalam undang-undang tersebut terdapat semangat keadilan.

7 Clemens Recker

Buku yang memuat undang-undang tersebut disebut *la charte* yang dalam bahasa Latin berarti kertas, kemudian kata itu digunakan untuk undang-undang dan hukum yang tertuang dalam kertas tersebut. Kami akan menyebutkan undang-undang tersebut walau sebagai besar tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah agar kalian mengenal bagaimana akal mereka mengatur bahwa keadilan dan kesadaran budaya menjadi bagian dari penyebab kemakmuran kerajaan dan kesejahteraan rakyatnya; bagaimana para pejabat mengatur rakyat hingga negara mereka mengalami kesejahteraan, peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi, dan membahagiakan. Di negara tersebut tidak ada orang yang mengeluhkan akan kezaliman. Keadilan merupakan pondasi pembangunan.

Kami akan sebutkan sekelumit tentang apa yang dikatakan oleh sebagian ulama dan para bijak tentang keadilan atau lawannya: “zalim terhadap anak yatim dan janda adalah pintu kemiskinan”. “Kesabaran adalah tameng bagi penyakit sosial”. “Hati rakyat adalah gudang penyimpanan bagi rajanya; apa yang raja dititipkan, akan ia temukan di dalam gudang itu”.

Sebagian yang lain berkata, “tidak ada kekuasaan kecuali dengan ketokohan. Tidak ada ketokohan kecuali dengan harta. Tidak ada harta kecuali dengan kemakmuran. Tidak ada kemakmuran kecuali dengan keadilan.”

Ada juga ungkapan yang mirip dengan ungkapan di atas: “kekuasaan para raja hanya berlaku pada fisik rakyat, tidak pada hati rakyat”. “Jika Anda ingin ditaati, maka tuntutlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh rakyat. Ketika seorang tuan meminta hamba melakukan sesuatu yang ia tidak mampu, maka ia akan melakukan pembangkangan.” (...). Materi pertama: semua rakyat Perancis setara di hadapan hukum (...)

Materi ketiga: setiap orang berhak mendapatkan jabatan dan pangkat apa pun. Materi keempat: setiap individu memiliki

kemerdekaan dan mendapat jaminan kebebasan. Tidak seorang pun yang kebebasannya dibatasi kecuali sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Atau, dalam bentuk khusus, karena permintaan pemerintah.

Materi kelima: setiap orang yang tinggal di Perancis dapat melaksanakan kewajiban agamanya. Tidak ada orang lain yang boleh mengganggunya, bahkan ia harus dibantu dalam menjalankan kewajiban agamanya. Orang lain dilarang menentangnya dalam menjalankan ibadah.

Materi keenam: Negara harus berpedoman pada agama Katolik Romawi yang dialogis.

Materi ketujuh: memakmurkan gereja-gereja Katolik dan gereja Kristen yang dananya dikeluarkan dari bendahara kekristenan. Negara tidak wajib mengeluarkan dana untuk membangun tempat ibadah agama selain agama Katolik.

Materi kedelapan: setiap orang tidak dilarang untuk menyampaikan, menuliskan dan mencetak pemikirannya selama tidak membahayakan undang-undang. Jika membahayakan, maka akan dicegah.

Materi kesembilan: semua hak milik dan tanah dihormati. Tidak seorang pun dibenarkan melanggar hak kepemilikan orang lain.

Materi kelimabelas: mengatur semua urusan interaksi sosial dengan kebijakan raja, Dewan Beir dan Dewan Distrik-Distrik.

Jika Anda perhatikan, undang-undang tersebut sangat indah. Dalam setiap kondisi undang-undang tersebut berjalan dengan baik bagi masyarakat Perancis. Kami akan jelaskan keindahan tersebut dalam beberapa catatan berikut: ketika mereka menyatakan setia warga Perancis setara di hadapan hukum, artinya semua rakyat Perancis, baik dari kalangan elit atau kalangan jelata, tidak diperlakukan secara berbeda dalam pelaksanaan hukum yang tertera dalam undang-undang. Bahkan ketentuan hukum dapat diberlakukan

terhadap raja. Hukum berlaku bagi raja seperti berlaku bagi yang lainnya. Maka perhatikanlah materi pertama yang telah disebut di atas. Inilah alat hukum yang digunakan untuk menegakkan keadilan, menolong orang yang dizalimi, dan membesarkan hati orang miskin bahwa mereka pun terhormat di mata hukum. Kenyataan seperti ini menjadi kebanggaan masyarakat Perancis dan ini menjadi bukti yang jelas akan tercapainya keadilan yang ideal bagi masyarakat Perancis. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka telah maju dalam budaya pada masa itu. Yang mereka sebut sebagai kebebasan dan mereka cintai adalah inti dari apa yang kita sebut sebagai keadilan dan kesadaran budaya. Makna menjalankan pemerintahan secara bebas adalah menegakkan kesetaraan bagi warga negara di hadapan undang-undang dan hukum di mana pemerintah tidak bersikap lalim terhadap seorang pun. Undang-undang dan hukum menjadi lembaga keadilan yang diakui oleh semua elemen masyarakat. Inilah negara kebebasan seperti yang digambarkan oleh seorang sastrawan,

*“Keadilan memenuhi seluruh penjuru negeri
Di dalamnya terdapat kejernihan dan kesetiaan yang datang silih
berganti”*

Meski demikian, ketika ada keadilan di sebuah negara, maka itu berarti keadilan relatif, bukan keadilan yang utuh dan sejati. Karena, saat ini tidak ada keadilan yang sejati dan utuh di negara mana pun, keadilan yang mirip dengan iman yang sempurna dan kehalalan yang murni.

Materi yang ketiga tidak mengandung bahaya sama sekali. Materi ini justru menjamin setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan meraih jabatan yang tinggi. Dengan demikian setiap orang memiliki kesempatan untuk menggali ilmu pengetahuan dan keahlian yang beragam. Keahliannya dan hidayah tidak terbatas pada

satu keahlian seperti orang-orang China atau India yang menganggap keahlian sebagai warisan dari orang tua hingga setiap orang hanya memiliki keahlian yang didapat dari ayahnya.

Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa pada masa lalu kondisi Mesir seperti itu. Aturan tokoh-tokoh Koptik mengharuskan setiap orang hanya memiliki satu keahlian. Kemudian keahlian itu diwariskan kepada anak-cucu mereka. Alasan adanya aturan seperti itu karena mereka menganggap setiap keahlian dan keterampilan adalah sakral. Dan aturan seperti itu cocok bagi kondisi pada saat itu hingga banyak orang yang memiliki keahlian tertentu secara sempurna. Seorang anak akan menjadi ahli dalam bidang tertentu yang selalu dilakukan oleh ayahnya dan ia tidak memiliki ambisi untuk belajar keahlian yang lain. Tradisi ini benar-benar menghentikan ambisi dan setiap orang merasa puas dengan keahliannya. Ia tidak mengharapkan keahlian yang lain. Yang ia lakukan hanya menciptakan segala sesuatu yang mendukung keahliannya hingga sempurna. Akan tetapi tradisi seperti ini bertentangan dengan kenyataan bahwa tidak setiap orang dapat meniru keahlian ayahnya. Kadangkala ia justru gagal dalam menjalankan keahlian yang dimiliki oleh ayahnya. Padahal, jika ia sibuk dengan keahlian yang lain, justru ia mampu mengerjakannya dengan baik hingga kondisi hidupnya menjadi lebih baik dan ia dapat meraih impiannya.

Materi keempat, kelima, keenam dan ketujuh sangat bermanfaat bagi penduduk asli dan para pendatang. Oleh sebab itu, penduduk asli Perancis lebih banyak dan lebih sejahtera dibanding para pendatang.

Materi yang kedelapan memberikan jaminan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat, pengetahuan dan segala sesuatu yang ada dalam pikirannya selama tidak membahayakan orang lain. Dengan demikian, orang bisa saling mengenal apa yang ada dalam jiwa sahabatnya, terutama catatan harian yang disebut jurnal atau rekaman elektronik. Melalui jurnal dan rekaman elektronik, orang mengetahui

perkembangan berbagai berita, baik berita di dalam kerajaan atau di luar kerajaan. Walau mungkin banyak kebohongan dalam berita, tetapi jiwa manusia mendapatkan jaminan untuk mencari berita dan pengetahuan yang benar yang mengandung soal-soal ilmiah yang baru diteliti, peringatan yang berguna, dan anjuran-anjuran yang bermanfaat. Semua itu bisa didapatkan dengan mudah, baik dari orang mulia atau orang biasa. Kadangkala dalam jiwa orang biasa ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang mulia, seperti dikatakan, “Jangan meremehkan pengetahuan yang agung walau datang dari orang biasa. Sungguh mutiara tidak akan dianggap remeh hanya karena kerendahan status sosial penyelamnya.

Penyair berkata,

“Apa yang aku dengar, aku dengar satu

Ketika aku lihat, ternyata ia manusia dan jin

Aku temukan semua buruan dalam perut kegelapan

Aku temukan semua manusia dalam setiap orang”

Manfaat lain dari jurnal adalah memberitakan setiap perbuatan orang, baik perbuatan baik atau perbuatan yang remeh. Hal ini penting untuk ditulis sebagai pengetahuan bagi orang terdidik atau orang awam. Tujuannya agar setiap orang terdorong untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Ketika ada orang yang dizalimi oleh orang lain, jurnal akan mencatat kezaliman itu hingga berita tersebut dapat dibaca oleh orang terdidik dan orang awam dan mereka jadi tahu berita tentang orang zalim dan orang yang menjadi korban kezaliman. Pengetahuan itu menjadi lebih objektif karena bersumber dari dua pihak sehingga keputusan hukum akan berlaku secara adil sesuai undang-undang yang berlaku. Dan, kasus seperti ini akan menjadi pelajaran penting bagi mereka yang membutuhkannya.

Materi kesembilan adalah inti dari keadilan dan kesadaran budaya. Materi ini harus ada guna mencegah kejahatan orang-orang

kuat terhadap orang-orang lemah. Materi kesembilan ini harus digabungkan dengan materi kesepuluh yang menegaskan tentang kepantasan lahiriah.

Di dalam materi kelima belas terdapat catata kecil bahwa mengatur interaksi sosial dilakukan oleh tiga level:

Level pertama adalah raja dan para menteri. Level kedua adalah Dewan Beir yang lebih dekat kepada raja. Level ketiga adalah para utusan distrik yang menjadi wakil rakyat dan lebih dekat kepada rakyat. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Ketika para utusan distrik berdiri sebagai rakyat dan berbicara atas nama rakyat, maka seakan-akan rakyat menjadi pemerintah itu sendiri. Dalam kondisi apa pun, ia akan mencegah segala kezaliman yang akan menimpa dirinya sendiri. Rakyat akan merasa aman sepenuhnya. Hikmah di balik materi-materi yang lain cukup jelas bagi Anda.

Pada tahun 1831, ringkasan hak dan kewajiban warga Perancis termaktub dalam *la charte* setelah mengalami perubahan.

Semua warga Perancis setara di hadapan hukum walau status sosial mereka berbeda-beda. Keistimewaan ini berguna hanya dalam kesepakatan kemanusiaan dan keadaban. Oleh sebab itu, semua warga Perancis dapat memangku jabatan militer atau jabatan kenegaraan. Mereka juga akan membantu negara dengan harta sesuai kadar yang dibutuhkan. Undang-undang menjamin setiap orang dapat menikmati kebebasan pribadi. Tidak mungkin orang ditahan kecuali karena melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab hukum. Barang siapa menahan orang lain tidak berdasarkan ketentuan yang tertera dalam kitab-kitab hukum, maka ia akan dihukum dengan hukuman yang berat.

Termasuk dalam kebebasan bagi warga Perancis adalah kebebasan beragama sesuai pilihan setiap orang. Kebebasan beragama ini berada dalam lindungan negara. Orang yang mengganggu kebebasan beribadah

orang lain akan dikenakan sanksi hukum. Tidak boleh menghentikan kegiatan gereja atau memberikan bantuan untuk kegiatan gereja kecuali atas dasar ijin yang jelas dari negara. Setiap warga Perancis boleh mengemukakan pendapatnya dalam urusan politik dan agama selama tidak melanggar sistem yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab hukum.

Hak kepemilikan sangat dihormati dan tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh dipaksa menyerahkan sesuatu yang ia miliki kecuali demi kemaslahatan bersama. Dan, itu pun hanya boleh diambil sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh pengadilan.

Para hakim tidak boleh datang dari luar (orang asing bagi wilayah tertentu). Setiap keputusan hukum bagi seseorang harus ditetapkan oleh para hakim yang ada di wilayah yang sama dengan orang tersebut. Dakwaan harus disampaikan secara terbuka dan keputusan pidana dapat ditetapkan dengan adanya para saksi. Raja boleh mengampuni orang yang terpidana mati dan dapat meringankan hukuman yang berat.

Ketika menduduki singgasana, raja dan ahli warisnya harus bersumpah bahwa mereka akan menjalankan apa yang tertera dalam kitab undang-undang kerajaan.

Terlalu panjang bagi saya untuk menyebutkan undang-undang dan aturan hukum yang ada di dalam masyarakat Perancis. Akan tetapi, saya tegaskan bahwa undang-undang hukum itu tidak diambil dari Kitab Suci dari langit. Undang-undang tersebut diambil dari undang-undang wilayah lain yang telah dikalahkan secara politik. Dan, undang-undang ini sangat berbeda dengan berbagai syariat. Bahkan dikatakan bahwa hak-hak warga Perancis berlaku di antara mereka saja. Karena hak-hak bagi orang Eropa berbeda-beda.

Di Paris terdapat berbagai pengadilan. Setiap pengadilan memiliki hakim ketua yang bertindak sebagai kepala hakim. Di dalam pengadilan

tersebut ada hakim-hakim yang selalu diajak bermusyawarah, jaksa penuntut umum, jaksa pembela dan pengacara.

“Orang yang mendakwa sesuatu yang membuatnya menyimpang dari aturan hukum

Jangan kau menjadi temannya karena dia berbahaya dan tidak berguna”

Apa Otoritarianisme?⁸ (1902) *Abdurrahman al-Kawakibi*

Otoritarianisme secara kebahasaan berarti keterpesonaan seseorang pada pendapatnya dan tidak mau menerima pendapat dari pihak lain; ia merasa bebas menjalankan pendapatnya sendiri dalam mengatur hak-hak bersama.

Ketika kata otoritarianisme disebut, artinya adalah sikap otoriter sebuah pemerintah secara khusus. Karena, pemerintah otoriter adalah contoh paling berbahaya yang menciptakan kesengsaraan manusia dalam kehidupan. Ketika kata otoriter disematkan pada nafsu yang mendominasi akal atau dominasi bapak, guru, suami, tokoh agama, dan pemimpin perusahaan, maka otoritarianisme tersebut dalam pengertian majazi, bukan yang hakiki.

Otoritarianisme dalam pengertian politik adalah kebijakan individual atau sekelompok orang terhadap hak-hak masyarakat berdasarkan kehendak pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kadangkala otoritarianisme bersifat berlebihan hingga kata tersebut memiliki arti yang sama dengan perbudakan (*isti'bad*). Kata kekerasan (*isti'sâf*), penguasaan (*tasalluth*) dan kontrol yang ketat (*taḥakkum*) tercakup dalam makna kata otoritarianisme. Lawan dari kata-kata tersebut adalah kesetaraan (*musawâh*), kesadaran bersama (*ḥissun musytarak*), keseimbangan (*takâfu'*), dan kekuasaan bersama (*sulthah 'amah*).

8 Artikel ini diambil dari buku karya Abdurrahman al-Kawakibi, *Thabâ'i al-Istibdâd wa Mashâri'i al-Isti'bad*, Darul Syuruq, Kairo 2008, hal. 23-28.

Kata *mustabid* (penguasa yang memperbudak) kadangkala diwakili oleh kata *jabbâr* (penguasaan yang mengekang), *thâghiyah* (penguasa yang lalim), *hâkimun bi amrihi* (penguasaan yang sewenang-wenang) dan *hâkimun mutlaq* (penguasa absolut).

Lawan dari penguasa yang memperbudak adalah penguasa yang adil, penguasa yang bertanggungjawab, penguasa yang terbatas dan penguasa yang diatur oleh undang-undang. Sedang masyarakat yang diperbudak disebut dengan tawanan, orang-orang yang dilecehkan, orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang dianggap sebagai tumbuhan (*mustanabbitîn*)⁹. Lawan dari semua istilah tersebut adalah orang-orang merdeka, orang-orang yang hidup dan orang-orang yang punya harga diri.

Inilah definisi kata otoritarianisme dengan menjelaskan sinonim dan antonimnya. Definisi otoritarianisme adalah sikap sebuah pemerintahan yang absolut dan egois, baik secara praktis maupun dalam undang-undang. Pemerintahan yang otoriter membuat berbagai kebijakan untuk rakyat sekehendaknya sendiri tanpa ada rasa takut akan hari perhitungan dan siksa yang nyata. Penjelasannya adalah pemerintahan yang tidak mempertimbangkan aturan dalam setiap kebijakannya; pemerintahan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai mulia dalam masyarakat dan tidak mempertimbangan kehendak masyarakat. Inilah sifat dari pemerintahan yang absolut. Jika pun ada aturan yang membatasi, pemerintah otoriter dapat merusak aturan tersebut secara arbitrer. Inilah bentuk sebagian besar pemerintahan yang menyebut dirinya sebagai pemerintahan terbatas dan pemerintahan republik.

Bentuk-bentuk pemerintahan otoriter cukup banyak dan pembahasan kali ini tidak akan menjelaskannya secara detil. Dalam kesempatan ini saya cukup menjelaskan ciri-ciri otoritarianisme yang

9 *Mustanabbitîn* adalah istilah dari Eropa yang berarti menyamakan kehidupan manusia dengan kehidupan tumbuhan.

mencangkup pemerintahan individu absolut yang meraih kekuasaan dengan mengalahkan pihak lain atau karena menerima warisan. Termasuk dalam otoritarianisme juga, pemerintahan individu yang terbatas oleh undang-undang dan terpilih berdasarkan pemilihan umum yang curang. Ada juga bentuk otoritarianisme berupa pemerintahan kolektif walaupun dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Keasamaan gagasan memang tidak selamanya membuat sekelompok orang bersikap otoriter, akan tetapi dapat membuat mereka sepakat akan penyimpangan kekuasaan. Kadangkala, penyimpangan kolektif lebih berbahaya daripada otoritarianisme individual. Otoritarianisme juga dapat berbentuk pemerintahan yang berdasarkan undang-undang yang dipisahkan menjadi kekuatan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Otoritarianisme tidak akan pernah hilang selama tidak ada rasa saling bertanggungjawab. Lembaga eksekutif bertanggungjawab terhadap legislatif dan lembaga legislatif bertanggungjawab terhadap rakyat. Rakyat yang diakui sebagai pemilik kedaulatan penuh, selalu mengawasi dan selalu menuntut keadilan dalam hukum.

Otoritarianisme yang paling berbahaya adalah otoritarianisme individual yang absolut yang mendapatkan kekuasaan karena warisan; ia menjadi panglima militer dan menguasai kekuasaan agama. Setiap unsur-unsur ini berkurang, maka kadar otoritarianisme pun ikut berkurang sampai terbentuknya sistem pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa yang terpilih berdasarkan pemilihan umum, dalam masa jabatan yang terbatas, dan bertanggungjawab. Kadar otoritarianisme juga akan berkurang ketika jumlah rakyat semakin sedikit, hubungan kepemilikan yang tetap (monopoli) semakin mengecil, kesenjangan ekonomi semakin menyempit, dan ada pemerataan peningkatan pendidikan masyarakat.

Pemerintahan dalam bentuk apapun tidak mungkin bersih dari otoritarianisme selama tidak ada sistem pengawasan yang ketat dan sistem audit yang tidak mengenal toleransi, seperti yang pernah terjadi pada masa awal Islam dalam kasus balas dendam terhadap Utsman

kemudian Ali, dan seperti yang pernah terjadi pada masa republik saat ini di Perancis dalam kasus Panama¹⁰ dan Dreyfus¹¹.

Secara alami dan berdasarkan sejarah, tidak ada pemerintahan yang adil dan bertanggungjawab yang tidak mungkin terjerumus pada otoritarianisme. Hal ini bisa terjadi akibat kelalaian masyarakat atau adanya peluang bagi pemerintah untuk mengabaikan tanggungjawab. Jika pemerintah mendapatkan peluang tersebut, maka ia tidak akan menyia-nyiakannya. Untuk meraih kesempatan menjadi pemerintahan yang otoriter, ada dua sarana besar yang digunakan: kebodohan masyarakat dan kekuatan militer. Dua hal ini merupakan bencana terbesar bagi masyarakat dan ancaman besar bagi kemanusiaan. Bisa jadi sebuah masyarakat berbudaya telah bebas dari kebodohan. Akan tetapi mereka masih dikuasai oleh kerasnya kekuatan militer yang terampil dan merata. Dominasi kekerasan militer ini bisa jadi membuat masyarakat terdidik lebih menderita dibanding masyarakat yang bodoh. Dan, penindasan terhadap kemanusiaan secara terbuka merupakan bentuk paling buruk dari otoritarianisme, hingga benarlah apa yang dikatakan bahwa “jika setan yang membentuk kekuatan militer ini, maka inilah aksi balas dendam setan terhadap Adam dan keturunannya. Ia akan melancarkan bentuk dendam yang sangat kejam!”

-
- 10 Skandal Panama di Perancis pada tahun 1892 yang berhubungan dengan pembangunan Kanal Panama. Skandal ini dianggap sebagai skandal perusak yang paling besar di abad 19. Konsekuensinya, perusahaan harus membayar denda sangat besar kepada pemerintah Perancis karena sikap diamnya terhadap masalah-masalah ekonomi di dalam perusahaan tersebut (Clemens Recker).
 - 11 Alfred Dreyfus (1859-19350) adalah seorang polisi Perancis keturunan Yahudi. Ia dituduh melakukan pengkhianatan besar dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1894. Akan tetapi masyarakat menekan pengadilan hingga ia dibebaskan pada tahun 1906.

Benar, militerisme yang pernah berjalan selama dua abad atau lebih ini sudah menghancurkan kekuatan masyarakat dan membuat masyarakat runtuh dalam satu waktu. Siapa yang tidak tahu bahwa tokoh-tokoh masa depan sangat takjub pada perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan yang diiringi dengan bencana militerisme. Bencana yang tidak meninggalkan tempat bagi kebebasan sedikit pun hingga orang-orang Mesir secara terpaksa sangat taat terhadap Firaun dalam membangun Piramid. Akan tetapi hal itu hanya mengakibatkan kelelahan dan kesia-siaan waktu. Sedangkan militerisme mengakibatkan degradasi moral masyarakat, di mana mereka akan hidup di bawah ancaman dan ketaatan buta serta kepasrahan. Militerisme juga berakibat menghilangkan semangat, kehendak untuk merdeka serta memaksa masyarakat untuk menyepakati sesuatu yang berada di luar kekuasaan mereka. Semua itu diberlakukan untuk memperkuat otoritarianisme paling buruk: negara menjadi kekuatan yang menjalankan kebijakan tersebut, di satu sisi, dan sikap otoriter antar masyarakat, di sisi lain.

Kita kembali lagi ke pembahasan awal, bahwa dalam sejarah tidak ada pemerintahan yang bertanggungjawab mampu bertahan lebih dari setengah abad. Jarang sekali ada pemerintahan seperti itu kecuali pemerintahan Inggris¹² karena rakyat Inggris tidak pernah mabuk oleh kemenangan, tidak pernah putus asa karena kegagalan, dan tidak pernah lupa untuk selalu mengawasi raja-raja mereka. Bahkan yang memilhkan pembantu dan pelayan untuk raja adalah lembaga kementerian, apalagi soal istri dan perbesanan. Sejak berabad-abad yang lalu, raja-raja Inggris telah kehilangan segala sesuatu kecuali mahkota. Andai saat ini raja Inggris bertindak otoriter, maka

12 Yang dimaksud di sini adalah pemerintah persatuan dari tahun 1895 sampai 1905 yang dibangun oleh koalisi kelompok persatuan, konservatif dan liberal (*Clemens Recker*).

mahkota itu pun akan hilang. Rakyat tidak akan tertipu hingga mau menyerahkan komando militer kepada kerajaan.

Pemerintahan tradisional (badawi) yang rakyatnya terdiri dari berbagai suku tradisional mudah mengalami perpecahan dan mudah memisahkan diri ketika rakyat merasa pemerintah telah melanggar kebebasan pribadi mereka. Mereka tidak pernah mau tunduk sepenuh hati pada pemerintah. Maka, pemerintahan seperti ini sangat jarang berubah menjadi pemerintahan yang otoriter. Contoh paling tegas bentuk masyarakat seperti itu adalah masyarakat di Jazirah Arab yang hampir tidak mengenal otoritarianisme sebelum adanya raja-raja yang dipatuhi, Hamir dan Ghassan. Pada hakikatnya, kearifan masyarakat tradisional membuat mereka sangat jauh dari kemungkinan terjerumus pada otoritarianisme. Sikap hidup masyarakat tradisional adalah sikap merdeka. Mereka tumbuh dan berkembang dalam suasana kemerdekaan di mana setiap individu dapat berpegang teguh pada dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan. Berbeda dengan kaidah masyarakat yang berwatak madani yang cenderung dianggap sebagai pelecehan oleh para sosiolog mutakhir yang menyatakan bahwa manusia adalah bagian dari hewan yang hidup secara berkelompok di dalam goa atau panggung khusus. Dan sekarang manusia telah menjadi hewan yang bila masa susuannya telah habis, ia dapat menjalani hidup secara bebas, tidak sepenuhnya tergantung pada keluarga dan masyarakat; tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh rumah dan negaranya, seperti kehidupan orang-orang Inggris. Justru rakyat yang membuat pemimpin bergantung pada rakyatnya dan pemerintahannya tidak lain hanya serikat yang dibangun atas dasar kehendak bebas. Ini berbeda dengan masyarakat yang tunduk dan patuh pada pemerintahnya, bahkan dalam soal agama.

Jika diperhatikan, masyarakat yang terdiri dari para budak cenderung hidup dengan hubungan sosial yang sangat ketat dan mereka saling menjaga dari otoritarianisme. Mereka seperti kawan

domba yang saling melindungi dari serangan serigala. Sedangkan masyarakat suku adalah masyarakat yang bebas. Mereka berkuasa penuh atas kemerdekaan dan hidup secara terpisah-pisah.

Para cendekiawan, terutama cendekiawan kontemporer, telah menjelaskan tentang otoritarianisme dan cara menghindarkan diri darinya. Mereka menjelaskan dengan penjelasan yang tegas dan indah yang mampu menggambarkan bahaya kemanusiaan. Penjelasan tersebut seolah menegaskan, “inilah musuh Anda. Lihatlah apa yang Anda lakukan.”

Bagian dari penjelasan tersebut adalah pernyataan mereka berikut ini: “Penguasa otoriter mengatur urusan masyarakat berdasarkan kehendaknya pribadi, bukan berdasarkan kehendak masyarakat. Ia mengatur mereka berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan aturan yang mereka sepakati. Ia menyadari bahwa dirinya adalah perampas yang kejam, kemudian ia meletakkan telapak kakinya di mulut jutaan manusia untuk menutup mulut mereka agar tidak mampu mengatakan kebenaran dan tidak mampu meneriakkan tuntutan mereka.”

“Seorang otoriter adalah musuh kebenaran dan musuh kebebasan. Kebenaran adalah ayah bagi manusia dan kebebasan adalah ibu bagi manusia. Orang-orang awam adalah bocah yatim yang tertidur yang tidak mengetahui apa pun. Para cendekiawan adalah kawan yang selalu membimbing mereka. Jika para cendekiawan mengingatkan, mereka akan sadar. Jika mereka mengajak, mereka akan mengikuti. Jika tidak, maka tidur mereka akan berujung pada kematian.”

“Seorang otoriter selalu melampaui batas selama tidak ada pembatas dari besi. Jika orang zalim melihat pedang di tangan orang yang akan dijadikan korban kezaliman, maka ia tidak akan melakukan kezaliman. Sebagaimana dikatakan, ‘Siapa untuk perang dapat mencegah peperangan.’”

“Seorang otoriter adalah orang yang siap melakukan kejahatan dan siap berlindung di balik kebaikan. Rakyat harus mengerti arti kebaikan dan arti kejahatan hingga mereka dapat memaksa pemerintah untuk melakukan kebaikan walau watak dasarnya tidak demikian. Untuk melindungi diri, rakyat cukup menyuarakan tuntutan pemerintah harus mengetahui bahwa di balik ucapan ada perbuatan. Sebagaimana diketahui, sekadar menyiapkan diri untuk berbuat adalah perbuatan yang cukup untuk mencegah keburukan otoritarianisme.”

“Seorang otoriter senang jika rakyat menjadi seperti domba yang selalu taat; menjadi seperti anjing yang selalu merendah dan menjulurkan lidahnya pada majikan. Rakyat harus menjadi seperti kuda: jika dilayani, menjadi penurut; jika dipukul, menjadi marah. Rakyat harus seperti burung elang yang tidak dapat dipermainkan. Berbeda dengan anjing yang tidak dapat membedakan antara diberi makan atau tidak, bahkan diberi tulang. Rakyat harus mengetahui posisinya, apakah mereka diciptakan untuk menjadi pembantu penguasa yang harus ditaati, adil atau lalim, sementara penguasa diciptakan untuk mengatur rakyat sekehendak hatinya, adil atau kejam? Apakah rakyat harus datang kepada penguasa, lantas menjadi budaknya?

Rakyat yang cerdas akan selalu menghindarkan diri mereka dari keganasan otoritarianisme dan selalu menekan otoritarianisme agar tidak mengancam jiwa. Jika pemerintah mulai angkuh, rakyat harus menekannya. Jika pemerintah mulai bersikap liar, rakyat harus mengekangnya. Bentuk otoritarianisme yang paling buruk adalah otoritarianisme kebodohan terhadap pengetahuan dan otoritarianisme nafsu terhadap akal sehat. Inilah yang disebut otoritarianisme manusia terhadap jiwanya. Allah telah memberikan nikmat dengan menciptakan manusia sebagai makhluk merdeka dan diberi akal. Akan tetapi ia mengingkarinya dan justru menjadi budak bagi kebodohan.

Allah menciptakan manusia dan menjadikan ayah dan ibu sebagai orang yang mengasihinya sampai ia kuat menjalankan hidup sendiri. Allah menjadikan bumi sebagai ibu dan pekerjaan sebagai ayah baginya. Akan tetapi ia mengingkari dan memilih pemerintah sebagai ibu dan penguasa sebagai ayahnya. Allah menciptakan alat pengindra baginya agar ia dapat hidup dengan baik dan menghindarkan diri dari kehancuran. Allah menciptakan dua mata untuk melihat, dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja dan lisan sebagai alat mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi manusia malah mengingkari dan memilih menjadi orang dungu, buta dan lumpuh. Ia hanya menunggu segala sesuatu dari orang lain. Lisannya selalu berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya.

Allah menciptakan manusia sendirian dan tidak bergantung pada orang lain agar ia memiliki kehendak bebas dalam setiap aktivitasnya. Akan tetapi, ia mengingkari dan memilih bergantung pada belahan bumi yang terbatas yang disebut negara. Ia selalu besaing dengan orang lain, bersaing dalam kelaliman, bukan dalam kebaikan. Allah menciptakan manusia agar ia bersyukur atas nikmat dijadikan sebagai unsur yang hidup yang sebelumnya hanya berupa debu; ia berlindung pada debu setelah meninggal dunia sebagai ketenangan bagi jiwa; ia berkalang debu untuk memantapkan keyakinan dan melawan keraguan; agar ia percaya akan segala balasan dari segala perbuatan. Akan tetapi ia mengingkari dan tidak mau bersyukur. Ia mencampuradukkan agama fitrah yang benar dengan kebatilan untuk menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Allah menciptakan manusia sebagai pencari manfaat di masa depan dan terbimbing oleh perasaan, namun ia mengingkari dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ia tidak berusaha menahan diri dari larangan yang kecil yang akan mengantarkannya pada larangan yang besar. Allah menciptakan segala sesuatu yang alami untuk manusia. Semua yang ada di alam ini menyatakan bahwa pemberi kehidupan

adalah Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Akan tetapi ia mengingkari nikmat Allah dan tidak mau bersandar pada Allah dalam urusan rezeki. Ia justru menjadikan dirinya sebagai Tuhan serta melakukan kelaliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Inilah sikap manusia yang sangat zalim dan sangat kafur.

Orang-orang yang otoriter berarti mengambil hak Allah dan merampas kebesaran Allah. Mereka adalah penentang Allah secara terang-terangan sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, “Orang zalim adalah pedang Allah untuk membalas dendam kemudian Allah membalasnya.” Dalam hadis yang lain dijelaskan, “Barang siapa membantu orang zalim, maka Allah akan menjadikan orang zalim itu sebagai tuannya.” Dan, membantu orang zalim dimulai dengan hanya berdiam diri di hadapan kezaliman.

Otoritarianisme adalah api kemarahan Allah di dunia ini. Neraka Jahim adalah api kemarahan Allah di akhirat. Allah menciptakan api sebagai alat pembersih yang paling efektif. Maka, dengan otoritarianisme di dunia, Allah membersihkan kotoran yang ada pada makhluknya merdeka serta membentangkan bumi dan menyebarkan rezeki untuk mereka. Akan tetapi mereka mengingkari itu semua dan justru bertindak saling memperbudak dan saling berbuat zalim.

Otoritarianisme adalah bencana terbesar. Dengan otoritarianisme, Allah mempercepat kemarahan-Nya terhadap hamba-hamba yang pemalas. Allah tidak akan menghilangkan otoritarianisme dari mereka jika mereka tidak benar-benar bertobat. Benar, otoritarianisme adalah bencana terbesar karena ia merupakan wabah penyakit yang selalu menyebarkan fitnah dan selalu membuat manusia tidak mampu melakukan berbagai pekerjaan. Otoritarianisme selalu menjadi api yang membakar kemarahan dan menghancurkan kemakmuran; ketakutan yang menerkam akal manusia; kegelapan yang membutakan mata; penderitaan yang tak berujung; kisah kelam yang tidak pernah berakhir.

Ketika ada orang bertanya, “mengapa Allah menguji manusia dengan orang-orang yang otoriter?” Jawaban yang tepat adalah, “Allah Maha Adil dan tidak pernah berbuat zalim pada siapa pun. Orang yang otoriter tidak akan menjadi penguasa kecuali bagi orang-orang yang otoriter pula. Jika orang yang bertanya mampu melihat dengan penglihatan yang bijaksana, ia akan menemukan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok otoriter adalah individu yang bersikap otoriter terhadap dirinya sendiri. Andai ia mampu, maka istri, keluarga, masyarakat dan semua manusia—bahkan Tuhan yang telah menciptakannya—akan ia paksa menjadi pengikut pikiran dan perintahnya.”

Orang-orang otoriter akan dipimpin oleh orang yang otoriter. Orang-orang merdeka akan dipimpin oleh orang yang merdeka. Inilah makna dari adagium “pemimpin kalian adalah seperti kalian”.

Alangkah pantasnya seorang tawanan untuk segera mengubah dirinya agar ia menemukan kebebasan. Anjing yang bebas lebih baik daripada macan yang terkungkung! ■

Selamat dari Otoritarianisme Abdurrahman al-Kawakibi

Bagi kami, tidak ada sekolah yang lebih besar daripada sejarah alamiah dan tidak ada argumentasi yang lebih kuat daripada penelitian. Bagi orang yang mengamati dua hal tersebut, ia akan menemukan bahwa manusia pernah hidup pada masa panjang yang disebut dengan “fase berburu”. Mereka hidup di sekitar oase secara bergerombol untuk bertahan hidup dan mendapatkan ketenangan. Dalam hal rezeki, mereka bersandar pada tumbuhan alami dan memburu hewan-hewan yang lemah, baik di daratan atau di lautan. Mereka dikendalikan hanya oleh kehendak dan dibimbing oleh keinginan untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak.

Kemudian fase kehidupan manusia berkembang menjadi fase solidaritas yang disebut dengan “fase menetap”. Mereka hidup

bersuku-suku dan menyandarkan sumber rezki mereka dari penyimpanan hasil buruan sampai waktu membutuhkan, Maka, mereka bersatu dalam semangat menjaga harta dan hewan ternak. Mereka bersatu untuk melindungi semua harat simpanan, perkebunan dan air dari para pesaing mereka.

Pola hidup sebagian besar manusia kemudian berubah, bukan meningkat, menjadi pola bertahan hidup dengan menetap. Mereka menetap di sebuah wilayah dan berusaha melakukan kegiatan pertanian di lahan yang tandus. Akan tetapi mereka mengalami kesulitan karena ketandusan tanah yang mereka garap. Mereka memang pantas mendapatkan kesengsaraan seperti itu karena telah melanggar ketentuan Tuhan. Sejatinya manusia diciptakan sebagai makhluk yang bebas untuk melakukan berbagai perjalanan ke mana pun di muka bumi ini untuk mencari nikmat-nimat Allah. Akan tetapi mereka memilih menetap di tanah yang tandus karena kebodohan dan kebhinaan. Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang boleh ditinggali di mana pun. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Akibatnya Allah menjadikan orang lain merampas hak mereka dan menjadikan mereka sebagai tawanan. Jenis manusia seperti ini menjalani hidup tanpa organisasi dan aturan. Mereka dijajah oleh nafsu orang-orang yang tinggal di perkotaan. Aturannya adalah “menjadi orang zalim atau menjadi korban”.

Fase kehidupan sebagian manusia kemudian mengalami peningkatan menjadi fase kreativitas. Baik kreativitas di bidang materi, seperti perindustrian, atau kreativitas teori yang dilakukan oleh para cendekiawan. Mereka yang kreatif adalah para penduduk kota yang memenjarakan fisik mereka di dalam tembok-tembok, tetapi membebaskan akal mereka melanglang buana. Kadang-kadang kebutuhan mereka semakin meluas dan semakin banyak, akan tetapi sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk melangkah di jalan ideal dalam politik di tengah masyarakat yang

besar. Inilah yang menjadi penyebab lahirnya berbagai bentuk pemerintahan dan tidak adanya satu masyarakat yang tetap berada dalam satu bentuk umum. Setiap masyarakat selalu mengalami berbagai percobaan dalam politik; kadangkala kelompok-kelompok yang melakukan terobosan pemikiran dalam politik meraih kemenangan; kadangkala kemenangan diraih oleh kelompok otoriter.

Memastikan bentuk pemerintahan merupakan masalah paling besar dan paling klasik bagi umat manusia. Inilah medan pertempuran besar bagi para cendekiawan; medan di mana tidak sedikit orang yang memasuki dengan membawa segudang pemikiran, segudang kebodohan, segudang kebuasan, dan segudang kedunguan. Hingga datanglah masa terakhir, di mana orang-orang Barat melakukan petualangan penyerangan. Sebagian dari mereka lantas menetapkan beberapa kaidah dasar dalam hal ini yang dibentuk oleh berbagai pemikiran dan benturan. Dalam hal ini, kebenaran lebih menonjol hingga dipilih menjadi keputusan sosial yang ditetapkan bagi masyarakat yang telah mengalami kemajuan. Hal ini tidak bertentangan dengan keberadaan berbagai partai dan ideologi politik dalam masyarakat tersebut. Karena perbedaan hanya berada pada level aplikasi kaidah-kaidah dasar dan cabang-cabangnya dalam berbagai situasi dan kondisi mereka yang spesifik.

Kaidah-kaidah yang telah menjadi aturan pasti dan jelas di Barat tersebut tetap tidak dipahami di Timur; masih tampak aneh bagi Timur, bahkan tidak menarik perhatian mereka sama sekali. Kaidah-kaidah tersebut, bagi sebagian besar orang Timur, tidak familiar bagi pendengaran mereka. Bagi sebagian yang lain, kaidah-kaidah tersebut tidak menarik perhatian dan tidak perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sementara sebagian yang lain menganggap kaidah-kaidah tersebut tidak dapat diterima karena mereka memiliki tujuan tersembunyi atau hati mereka telah terkena virus penyakit.

Saya menganjurkan kepada para pelajar agar melihat lebih dalam pokok-pokok masalah yang adalah berbagai pembahasan tentang politik. Sebelum itu, saya ingatkan bahwa definisi otoritarianisme adalah “pemerintahan yang tidak memiliki hubungan tertentu, jelas dan terjamin melalui undang-undang yang tegas dengan rakyatnya.”

Saya juga mengingatkan bahwa segala janji dan sumpah penguasa tidak boleh dipercaya begitu saja. Baik janji untuk menjaga agama, ketakwaan, kebenaran, kemuliaan, keadilan, dan segala sesuatu yang menyangkut kemaslahatan bersama. Karena, semua itu merupakan konsep abstrak yang bisa saja keluar dari lisan orang yang baik atau lisan orang yang jahat. Semua itu sejatinya hanya pernyataan abstrak yang tidak berisi. Orang yang jahat selalu berupaya untuk berkilah dan watak kekuatan adalah mengekang pihak lain. Kekuatan tidak mungkin dihadapi selain dengan kekuatan pula. (...)

Tentang Usaha Menghilangkan Otoritarianisme

Apakah usaha menghilangkan otoritarianisme kita tunggu dari pemerintah? Atau usaha menghilangkan otoritarianisme sampai ke akar-akarnya adalah tugas para cendekiawan dan rakyat jelata?

Saya akan membatasi pembahasan ini hanya pada hal-hal yang menyangkut usaha menghilangkan otoritarianisme.

Masyarakat yang tidak merasakan dampak buruk dari otoritarianisme adalah masyarakat yang tidak berhak mendapatkan kebebasan.

Otoritarianisme tidak dapat dilawan dengan kekerasan, tapi harus dilawan dengan ketenangan dan dalam proses yang gradual.

Sebelum melawan otoritarianisme. Harus disiapkan konsep yang menjadi penggantinya.

Inilah kaidah-kaidah penting dalam usaha menghilangkan otoritarianisme. Inilah kaidah-kaidah yang menjauhkan orang-orang lemah dari ketertindasan dan menekan orang-orang yang

otoriter agar tidak dapat menjalankan sikap otoriter. Secara sederhana, kaidah-kaidah tersebut dapat menyelamatkan orang-orang lemah dari otoritarianisme. Oleh sebab itu, saya ingatkan dengan ungkapan yang pernah disampaikan oleh Alfieri Vittoria¹³, “Penguasa otoriter jangan pernah merasa bangga dengan kekuatannya. Betapa banyak penguasa otoriter dan kejam ternyata digulingkan oleh korbannya yang tampak kecil.” Saya mengatakan, “Berapa banyak orang yang kejam dan bengis yang dibalas oleh Allah dengan balasan yang keras!”

Bangunan dasar kaidah masyarakat yang tidak merasakan dampak buruk dari otoritarianisme adalah masyarakat yang tidak berhak mendapatkan kebebasan: masyarakat yang ditindas dan menderita selama berabad-abad akan menjadi masyarakat yang berkarakter rendah bahkan mereka menjadi seperti binatang. Mereka tidak pernah berusaha mencari kebebasan dan keadilan. Mereka menganggap kemerdekaan sebagai sesuatu yang tidak bernilai dan mereka tidak menganggap sistem sebagai sesuatu yang baik. Mereka menjalankan hidup hanya untuk tunduk pada orang yang mengalahkan mereka; baik atau buruk sama saja bagi mereka. Hanya kadangkala saja mereka melawan orang yang otoriter, sebatas melawan sosoknya, bukan berusaha menyelamatkan diri dari sistem otoritarianisme. Mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Tapi sebaliknya, mereka hanya mengganti satu penyakit dengan penyakit yang lain.

Kadangkala ada seorang otoriter melawan penguasa otoriter dalam suatu pertempuran. Ia berusaha menampakkan kekuatan lebih daripada yang dimiliki oleh penguasa otoriter. Ketika berhasil meruntuhkan penguasa otoriter, ia mencuci tangan dengan air otorita-

13 Reformis dan sastrawan Italia (1749-1803). Dalam buku *Thabâ'i al-Istibdâd* ada kesan bahwa Alfieri merupakan sumber rujukan al-Kawakibi dalam membahas masalah ini. (*Muhammad Imarah*).

rianisme pula. Maka, tidak ada artinya sama sekali. Yang terjadi hanyalah menyembuhkan penyakit dan menumbuhkan penyakit yang akan bertahan lebih lama. Dalam kondisi seperti itu, bisa jadi kebebasan dapat diraih. Tapi tidak ada gunanya karena Anda tidak dapat merasakan manisnya kebebasan dan tidak memiliki hasrat untuk mempertahankannya. Maka, kebebasan hanya bertahan sebentar saja kemudian berubah menjadi kekacauan: yaitu kondisi otoritarianisme yang lebih kuat. Persis seperti orang yang sedang sakit kemudian jatuh terjungkal. Oleh sebab itu, para bijak bestari menyatakan bahwa kebebasan yang berguna bagi masyarakat adalah kebebasan yang diraih setelah masyarakat menyiapkan diri untuk menerimanya. Kebebasan yang diraih karena revolusi orang-orang bodoh hanya memberikan manfaat yang sangat kecil bagi masyarakat. Karena, revolusi biasanya hanya memangkas dahan-dahan otoritarianisme, tapi tidak mencabut akar-akarnya. Dengan demikian, otoritarianisme akan muncul dan berkembang kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya.

Jika di tengah masyarakat yang mati muncul sosok yang berani mendorong mereka untuk bangkit, maka pertama ia harus menghembuskan kehidupan di tengah mereka dengan pengetahuan. Ia harus menyadarkan bahwa masyarakat dalam kondisi yang buruk dan mereka dapat mengubahnya dengan kondisi yang lebih baik. Ketika sudah mengerti kondisi yang ada, mereka mulai merasakan derita akibat otoritarianisme kemudian perasaan itu terakumulasi: dari kesadaran individual menjadi kesadaran kolektif hingga sebagian besar masyarakat itu menyadarinya. Mereka lantas akan membuat gerakan dan meneriakkan apa yang pernah disampaikan oleh seorang bijak, al-Ma'ari,

*“Jika pemerintah tidak memberikan keadilan kepada kami
Kami siap melakukan perubahan”.*

Ketika kesadaran masyarakat telah hidup, keadaran itu akan mengalir seperti aliran air di sungai. Tidak akan pernah kembali sampai ujung perjalanan.

Akan tetapi, dalam masyarakat yang mati jarang sekali ada orang-orang yang memiliki keberanian. Begitu pula dengan orang yang berusaha menempuh jalan menuju posisi yang strategis agar ia dapat melaksanakan gagasannya di tengah masyarakat. (...)

Bangunan dasar kaidah bahwa otoritarianisme tidak dapat dilawan dengan kekerasan, tapi dengan sikap bijak dan secara gradual: satu-satunya cara efektif untuk menghentikan otoritarianisme adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Peningkatan ini tidak akan terwujud kecuali dengan jalan pendidikan dan membangun motivasi. Selanjutnya, membangun gagasan agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan mengubah kebiasaan tidak akan terwujud kecuali setelah melalui waktu yang panjang. Secara umum, walau masyarakat sudah mengalami peningkatan kesadaran, tetapi mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan kebiasaan. Kecuali setelah mengalami pendidikan yang memakan waktu lama. Kadangkala juga harus dimaklumi ketika mereka tidak cepat percaya dan tidak cepat merespon gagasan kebangkitan karena mereka telah mengalami krisis kepercayaan. Bagi mereka, sebagian besar tokoh dan orang yang mengkampanyekan gagasan adalah penipu. Oleh sebab itu, sering kali para budak mencintai seorang otoriter ketika ia menekan mereka bersama-sama dengan para tokoh dan orang-orang terhormat. Sering kali para budak melampiaskan dendam hanya kepada para pembantu penguasa yang otoriter karena mereka merasakan kekejaman para pembantu itu secara langsung. Sementara penguasa otoriter itu tidak tersentuh oleh kemarahan mereka. Sering terjadi para budak membakar sebuah kota hanya karena sikap kejam para pembantu penguasa yang otoriter.

Di sekitar otoritarianisme ada beberapa kekuatan yang ikut mendukungnya. Di antaranya adalah kekuatan teror atas nama keagungan dan kekuatan tentara. Terlebih jika tentara berasal dari luar negeri. Selain itu, ada pula kekuatan harta, kekuatan pendekatan persuasif, kekuatan tokoh-tokoh agama, kekuatan orang-orang kaya dan kekuatan dari luar negeri. Semua kekuatan ini membuat otoritarianisme bagaikan pedang sangat tajam yang tidak mau menerima tongkat peringatan yang pada awalnya lebih mirip dengan suara burung gagak. Dan tabiat kesadaran umum, jika meluap satu tahun, akan hilang satu tahun; jika meluap satu hari, akan hilang satu hari. Oleh sebab itu, untuk melawan berbagai kekuatan besar tersebut, diperlukan sikap konsisten dan perlawanan yang diiringi oleh niat dan tindakan.

Otoritarianisme tidak dapat dilawan dengan kekerasan agar tidak menjadi bencana yang mengorbankan masyarakat. Benar, kadangkala otoritarianisme yang berlebihan akan menimbulkan ledakan sosial yang besar secara alami. Maka, kaum cendekiawan harus berusaha menghindarkan masyarakat dari ledakan sosial tersebut. Ketika masyarakat sudah tenang dan mereka dapat membedakan antara pejuang dan para munafik, barulah para cendekiawan melancarkan arahan pemikiran untuk membangun dasar-dasar keadilan. Cara terbaik adalah melancarkan gagasan membangun pemerintahan yang disertai kontrak politik anti otoritarianisme dan kekacauan. (...)

Bangunan dasar kaidah wajin menyiapkan kondisi sosial politik yang menggantikan otoritarianisme sebelum melawan otoritarianisme: memahami tujuan akhir adalah syarat alami bagi setiap tindakan. Memahami tujuan akhir tidak berguna jika jalan menujuinya tidak diketahui. Pemahaman secara global saja tidak cukup dalam hal ini. Akan tetapi, harus ada identifikasi tujuan akhir dan langkah secara pasti sesuai dengan pemikiran bersama atau pemikiran dari sebagian besar masyarakat, yaitu 3/4 kekuatan. Jika hal ini tidak terpenuhi,

maka rencana tidak akan berjalan. Jika tujuan akhir tidak jelas, tindakan pun akan tidak jelas. Jika tujuan akhir itu tidak dipahami oleh seluruh masyarakat atau bertentangan dengan sebagian masyarakat, maka mereka akan bergabung dengan kekuatan otoriter dan akan terjadi kekacauan. Jika pemahaman tentang tujuan akhir itu hanya dipahami oleh sepertiga masyarakat, maka kemenangan pasti berpihak pada kekuatan otoriter.

Jika tujuan akhir tidak jelas dan jalan yang ditempuh tidak jelas pula, maka sangat mungkin terjadi konflik di tengah jalan. Pergerakan menjadi berantakan dan kondisi berubah menjadi kekacauan. Oleh sebab itu, tujuan akhir harus dijelaskan secara pasti dan semua pelaku pergerakan harus ikhlas. Tujuan akhir harus disosialisasikan kepada masyarakat luas. Mereka harus merasa bangga, yakin dan semangat dalam mencapai tujuan akhir tersebut. Bahkan, masyarakat awam pun harus diajak untuk bergabung dalam pergerakan hingga mereka rela berkorban untuk perubahan. Kealpaan akan semua itulah yang menjadi penyebab kegagalan politik Imam Ali dan kelompoknya, Ahlul Bait. Kegagalan tersebut terjadi akibat dari sikap mereka sendiri, bukan karena kelalaian. Mereka tidak menyesuaikan diri dengan kondisi zaman itu di mana sarana informasi dan transportasi masih sulit hingga mereka tidak mampu menyebarkan ide-ide bersama kepada masyarakat melalui berbagai sarana.

Yang dimaksud dengan keharusan adanya ketentuan bentuk pemerintahan yang dihendaki sebagai pengganti otoritarianisme adalah dengan mengajukan rancangan termudah untuk melakukan perlawanan. Persiapan konseptual ini tidak boleh hanya dipahami oleh sekelompok elit cendekiawan. Akan tetapi konsep tersebut harus menjangkau masyarakat luas agar terhindar dari kesalahpahaman dan mereka dapat menerimanya secara utuh.

Kesimpulan: yang pertama harus dilakukan adalah menyadarkan masyarakat akan kesengsaraan akibat dari otoritarianisme.

Selanjutnya mengajak masyarakat untuk merumuskan kaidah-kaidah politik yang paling mendasar yang sesuai dengan kondisi mereka. Cara tersebut dapat dilakukan dengan mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskannya. Usaha ini sebaiknya dilakukan berdasarkan rasionalisme yang tegas dan dalam waktu bertahun-tahun hingga konsep tersebut benar-benar matang; sehingga kobaran perjuangan yang sejati mencapai kebebasan bagi masyarakat pada level atas dan memberikan harapan bagi masyarakat pada level bawah.

Dalam kondisi seperti itu, para penuntut perubahan harus bersikap penuh hati-hati. Jangan sampai mereka berada dalam bahaya dengan menghadapi ancaman dan serangan balik dari penguasa otoriter. Jika itu terjadi, kekacauan akan menguasai keadaan dan sangat mungkin negara lain mengambil kesempatan tersebut untuk menancapkan kekuasaan. Yang terjadi kemudian adalah masyarakat akan masuk pada era perbudakan baru. Inilah nasib sebagian masyarakat di Timur pada abad-abad terakhir ini. Agar masyarakat terhindar dari kerakusan pihak asing, masyarakat harus disiapkan sebagai masyarakat yang mampu memimpin negaranya sendiri. Para cendekiawan harus menekan penguasa otoriter agar meninggalkan unsur-unsur otoritarianisme dan tunduk pada undang-undang dasar yang dituntut oleh masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, penguasa otoriter yang kuat tidak akan mampu melakukan perlawanan. Dia akan tunduk dan inilah harapan yang diinginkan. Jika penguasa otoriter tetap mempertahankan kekuatannya, masyarakat akan menghancurkan negara hingga terpecah belah. Ketika itu akan muncul para pemimpin baru yang bertanggungjawab di wilayahnya masing-masing. Mereka akan hidup dengan aman tanpa gangguan dari orang-orang serakah. Mereka akan hidup dengan kebebasan sebagaimana nasib berbagai masyarakat yang hidup secara sempurna. Oleh sebab itu, para cendekiawan diharapkan untuk bersabar dan bertakwa kepada

Allah agar terhindar dari ketertipuan. Mereka harus menyadari bahwa masalah ini sangat berat dan penuh tantangan. Akan tetapi, membayangkan tantangan tidak boleh membuat mereka berdiam diri. Tantangan justru harus lebih membangkitkan semangat seorang laki-laki yang gagah berani. ■

Bab III

Ekonomi Pasar

Ekonomi pasar ada dalam jantung konsep liberalisme. Prinsip dasar dari ekonomi pasar adalah hak khusus manusia dalam kepemilikan. Hak kepemilikan yang pertama adalah hak manusia memiliki semua hasil kerjanya. Seorang petani berhak atas hasil sawahnya dan keuntungan yang ia dapatkan dari pertanian. Begitu pula dengan pekerja pabrik dan pedagang. Mereka berhak memiliki apa yang mereka hasilkan dari kerja-kerja mereka. Syarat utama dalam konsep ini adalah setiap orang tidak boleh melanggar hak-hak kebebasan orang lain dan setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan sukarela.

Liberalisme juga menjamin kebebasan alami lainnya, seperti kebebasan beragama, kebebasan memilih ideologi politik dan kebebasan ekonomi. Liberalisme juga mengajak manusia untuk mandiri dalam mengatur dirinya sendiri dan menjalankan kehidupannya. Manusia tidak mungkin mencapai kebebasan seperti ini kecuali ia sudah mendapatkan kebebasan dalam ekonomi.

Tuntutan liberalisme berhubungan erat dengan tuntutan lainnya, seperti tuntutan demokrasi dan negara hukum. Karena, manusia yang menggantungkan hidupnya pada Negara tidak akan menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Liberalisme menetapkan—ideologi kapitalisme—kebebasan manusia dalam ekonomi melalui konsep kepemilikan.

likan khusus terhadap berbagai sarana produksi. Kebebasan ini tidak hanya berlaku di dalam negeri tertentu, akan tetapi berlaku antar negara. Setiap negara boleh melakukan jual-beli di antara mereka. Inilah yang disebut dengan perdagangan bebas.

Semua unsur-unsur penting liberalisme saling berhubungan. Tidak ada kebebasan dalam bidang ekonomi tanpa undang-undang yang pasti dan jaminan kebebasan berinteraksi. Hal ini sesuai dengan pondasi-pondasi dasar liberalisme yang menjamin persaingan secara sehat dan tidak ada monopoli. Khususnya ketika terjadi perubahan dari ekonomi sosialis yang dikontrol dan diatur oleh negara menjadi ekonomi pasar. Kepastian undang-undang menjadi unsur terpenting bagi suksesnya perubahan ini.

Dalam konteks ini, negara mengambil peran penting dalam menjaga keberlangsungan sistem ekonomi. Negara boleh menentukan pajak yang menguntungkan rakyatnya. Negara adalah sarana, bukan tujuan. Pemerintah boleh menentukan pajak yang wajar untuk mewujudkan apa yang harus dipenuhi oleh negara.

Liberalisme mendorong ekonomi pasar bukan hanya karena ekonomi pasar sesuai dengan kebebasan masyarakat, tapi sistem ini lebih bermanfaat dibanding sistem lainnya; sistem ekonomi pasar ini sangat membantu dalam mempercepat kemajuan masyarakat karena sistem ini selalu menerima kritik dan perbaikan. Bentuk sistem kapitalisme yang desentralistik mampu berubah setaip hari sesuai dengan perubahan lingkungan.

Dalam pandangan liberalisme, semua manusia orang setara dalam hak-hak ekonomi dan dalam segala aktivitasnya. Pajak yang dipungut harus didistribusikan secara adil kepada rakyat. Kelompok liberal pernah menentang kebijakan Muhammad Ali di Mesir yang menentukan pajak besar terhadap para petani sedang mereka hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, sebagian dari pemilik lahan yang luas tidak membayar pajak sama sekali atau hanya membayar pajak

dalam jumlah kecil. Sistem sosial ini jelas tidak sejalan dengan liberalisme.

Dalam liberalisme tentu kewajiban dan bentuk negara dapat berbeda-beda. Akan tetapi semua sepakat bahwa negara ada untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Sebagian masyarakat menentukan peran negara hanya sebatas pada tanggung jawab tertentu yang prinsipil, seperti keamanan dalam negeri dan luar negeri. Sebagian masyarakat memperluas tanggung jawab negara pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Tokoh-tokoh liberal Arab mengkampanyekan kebebasan ekonomi sejak lama. Mereka mengajukan gagasan tersebut kepada pemerintahan-pemerintahan yang otoriter di wilayah Arab dan negara-negara imperialis Eropa. Kita ambil contoh Muhammad Ali di Mesir. Banyak tokoh liberal yang menerima gagasan modernisme Muhammad Ali dalam rangka meningkatkan daya saing Mesir. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, mereka mengkritik pembesaran peran negara dan monopoli negara dalam produksi kapas yang membuat rakyat Mesir tidak tercekik. Karena, dengan demikian pemerintah menghambat proses modernisasi yang lebih dalam dan berkelanjutan di Mesir.

Contoh lain adalah Daulah Utsmaniyah yang memberikan peluang kepada negara-negara Eropa untuk membuka kantor konsulat dagang mereka di berbagai kota Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah tidak menentukan pajak mereka dan mereka boleh membuat hubungan dagang dengan para pedagang lokal. Mereka membuat kebijakan dengan menciptakan medan dagang yang sejajar, sementara para pedagang asing itu tidak memberikan masukan bagi kas Daulah Utsmaniyah. Tentu keuntungan dagang seperti ini tidak adil dalam pandangan tokoh-tokoh liberal.

Kita dapat melihat ungkapan Ahmad Luthfi Sayyid yang menyatakan bahwa “negara tidak boleh menjadi pelaku ekonomi secara langsung karena aktivitas ekonomi dilakukan oleh berbagai individu yang ada dalam pemerintahan.”

Sedangkan dalam soal pengaruh dan hasil dari aktivitas ekonomi yang mencekik, Ibnu Khaldun—salah satu bapak ilmu sosial—menganalisisnya dalam buku *Muqaddimah*. Ia menulis tentang pemberlakuan pajak dan intervensi ekonomi penguasa terhadap kekayaan masyarakat. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mendahului Adam Smith yang dianggap sebagai peletak ilmu ekonomi klasik pada abad delapan belas.

Ibnu Khaldun menganjurkan kesejajaran individual dalam ekonomi. Ia menjelaskan tentang hubungan antara proses pengumpulan pajak dan pendapatan. Hubungan ini, pada abad dua puluh dikenal dengan pajak profesi. Artinya, konsep ini sudah diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun sejak enam ratus tahun yang lalu. Setiap pajak yang ditetapkan bagi setiap individu akan membatasi aktivitas ekonomi mereka. Oleh sebab itu, ketentuan pajak harus ditetapkan secara wajar dan tidak boleh menjadi penghalang aktivitas ekonomi setiap individu. Ketentuan pajak tidak boleh diperbesar karena keberhasilan ekonomi individu hingga keuntungan mereka menjadi mengecil. Hal ini membuat masyarakat kehilangan semangat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi karena keuntungan dapat mengecil akibat peningkatan jumlah pungutan pajak. Kesimpulan-kesimpulan Ibnu Khaldun ini adalah temuan baru yang terungkap berdasarkan pengamatan terhadap transaksi-transaksi di masa lalu dalam kaca mata ilmu sosial, politik dan ekonomi. ■

Tentang Pungutan Pajak dan Jumlahnya (1377)¹⁴ *Ibnu Khaldun*

Ketahuilah bahwa pungutan pajak dalam negara pertama berlaku pada bidang yang sedikit tapi dalam jumlah yang banyak dan pungutan pajak dalam negara terakhir berlaku pada bidang yang banyak tapi

14 Dikutip dari buku *al-ʿIbru wa Diwān al-Mubtadaʿ wa al-Khabar*, karya Ibnu Khaldun yang terkenal dan merupakan ringkasan dari buku *al-Muqaddimah*, bab 38.

dalam jumlah yang sedikit. Penyebabnya adalah negara, jika berdiri di atas ketentuan agama, hanya menetapkan pungutan pajak pada hal-hal yang ditentukan oleh syariat seperti sedekah, pajak dan jizyah. Ini adalah bagian yang kecil karena kadar zakat harta hanya sedikit, sebagaimana diketahui. Begitu pula dengan zakat pertanian, zakat ternak, jizyah, pajak dan semua bidang yang ditentukan oleh syariat. Itulah batas-batas yang tidak boleh dilanggar walau berada dalam kondisi kemenangan dalam perang atau fanatisme.

Begitu pula yang terjadi pada masa tradisional. Kehidupan tradisional menerapkan pola hidup yang toleran, saling menghargai, saling rendah hati dan berusaha menghindarkan tangan dari harta orang lain. Pelanggaran terhadap hal-hal tersebut sangat jarang terjadi. Dengan demikian, prosedur dan bidang yang dikenakan pajak hanya sedikit yang otomatis membuat masyarakat termotivasi untuk berbuat dan membangun kesejahteraan. Kesejahteraan semakin bertambah karena kewajiban pajak tidak menjadi beban.

Jika ketergantungan masyarakat besar terhadap negara, maka bidang yang dikenakan pajak semakin besar dan pungutan pajak pun semakin besar.

Jika sebuah negara dipimpin oleh raja-raja yang berpola hidup hedonistik, maka tradisionalitas dan kesederhanaan akan hilang. Masyarakat akan ikut terjerumus pada pola hidup hedonistik dan terciptalah tren budaya yang mendorong masyarakat jatuh pada hedonisme. Para pejabat negara menjadi contoh dalam semangat hidup hedonistik. Mereka tenggelam dalam kesenangan dan hiburan. Dengan demikian, maka bidang yang harus dikenakan pajak semakin banyak dan prosedurnya pun semakin rumit dan hal ini justru dirasakan oleh para petani, peternak dan profesi lainnya. Negara akan menambahkan bidang yang harus dikenakan pajak dan besaran pajaknya hingga negara dapat melakukan pungutan pajak lebih besar.

Negara akan mengangkat para pemungut pajak di setiap transaksi jual-beli dan di pintu-pintu untuk menambah penghasilan negara secara perlahan-lahan. Semua itu dikumpulkan untuk membiayai pola hidup hedonistik para penguasa dan sangat memberatkan masyarakat. Anehnya, karena berjalan lama, semua itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena penambahan jumlah pajak itu berjalan secara perlahan hingga tidak ada seorang pun yang menyadari siapa pelaku semua itu.

Masyarakat akan tetap membangun jika mereka merasakan manfaat yang mereka terima. Jika kerja keras mereka tidak menghasilkan kesejahteraan, semangat akan mengendur dan banyak tangan yang tidak mau terlibat dalam pembangunan. Dengan demikian, jumlah pungutan pajak pun semakin berkurang karena bidang yang dikenakan pajak semakin mengecil. Namun kemudian negara akan menambahkan besaran kewajiban pajak jika bidang-bidang yang dikenakan pajak semakin mengecil. Mereka menganggap kenaikan besaran itu sebagai penutup kekurangan jumlah pungutan pajak. Hal itu terus diupayakan dan pada akhirnya hasil pungutan pajak tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat karena digunakan untuk membiayai pola hidup hedonis para pejabat. Kondisi ini terus berlanjut hingga menciptakan kehidupan yang abai pada kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, yang dampak negatif dari semua itu akan kembali kepada negara sebagaimana manfaat kesejahteraan pun kembali kepada negara.

Jadi, penyebab paling dominan bagi terciptanya kehidupan yang sejahtera adalah pungutan pajak yang kecil terhadap masyarakat. Dengan demikian, jiwa masyarakat merasakan ketenangan karena merasa percaya pada negara dalam pengelolaan kesejahteraan. Allah memiliki segala sesuatu dan semua kerajaan berada dalam kekuasaan-Nya. ■

Pemungut Pajak di Negara Terakhir¹⁵

Pada awalnya negara bersifat tradisional sebagaimana telah kami jelaskan. Oleh sebab itu, tidak banyak kebutuhan negara karena tidak ada kemewahan hingga tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan. Pungutan pajak yang dilakukan negara akan kembali kepada masyarakat karena tidak digunakan untuk biaya hidup para pejabat negara. Kemudian negara mulai mengikuti budaya kemewahan dan berjalan di atas landasan negara-negara sebelumnya. Maka, pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi besar dan pengeluaran penguasa semakin besar untuk kebutuhan pribadi. Pungutan pajak yang ada tidak cukup untuk menutupi kebutuhan penguasa hingga negara membutuhkan tambahan masukan untuk memenuhi kebutuhan para penjaga (tentara) dan belanja penguasa.

Langkah pertama negara akan memperluas bidang yang dikenakan pajak dan memperbesar jumlah pajak secara perlahan. Negara kemudian mengalami masa tua dan lemah dalam melakukan pemungutan pajak hingga hasil pajak berkurang. Di sisi lain, keperluan semakin besar karena negara harus membiayai para tentara. Maka, negara berupaya menciptakan cara-cara baru dalam pemungutan pajak yang ditetapkan atas berbagai transaksi. Negara menentukan bilangan yang pasti dan mengontrol harga-harga di pasar dan barang-barang di kota. Kebutuhan itu semakin membesar seiring bertambahnya jumlah tentara dan pembantu penguasa. Pertambahan jumlah itu akan menjadi sangat besar dalam negara terakhir. Terjadilah kekacauan dalam pasar akibat kerusakan harta dan hal ini mengindikasikan hancurnya kesejahteraan yang akhirnya harus ditanggung oleh negara. Kondisi ini terus berjalan sampai negara menghilang. Kondisi seperti ini telah terjadi pada kota-kota di Timur

15 Dikutip dari buku *al-Ibru wa Diwān al-Mubtada' wa al-Khabar*, karya Ibnu Khaldun yang terkenal dan merupakan ringkasan dari buku *al-Muqaddimah*, bab 39.

pada akhir-akhir masa Daulah Abasiah dan Abidiyah. Para pejabatnya bahkan bahkan menetapkan kewajiban membayar pajak terhadap para haji yang kemudian ketetapan itu dihapuskan oleh Shalahuddin al-Ayubi. Begitu juga di Andalusia telah terjadi penetapan pajak haji yang kemudian dihapuskan oleh Yusuf bin Tasfin, Amir al-Murabitin¹⁶. Di kota-kota Afrika pun pajak haji pernah ditetapkan ketika kota-kota itu dikuasai oleh pejabat-pejabat otoriter. Wallahu a'lam. ■

Perdagangan yang dikuasai penguasa berbahaya bagi rakyat dan pungutan pajak¹⁷:

Ketahuilah, jika negara mengalami kekurangan pajak akibat pengeluaran karena gaya hidup mewah para pejabatnya, negara tersebut akan berusaha menambah pemasukan pajak. Negara akan membuat peraturan pajak atas semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan dalam pasar-pasar mereka, seperti yang telah kami jelaskan. Kadang-kadang negara membuat penambahan dalam bentuk-bentuk pajak yang baru. Negara akan membuat kebijakan pajak bagi setiap pekerja dan petugas pajak serta berusaha menguasai sebagian besar penghasilan mereka karena mereka dianggap telah mendapatkan keuntungan besar dari pekerjaan mengumpulkan pajak. Kadang-kadang negara membuat kebijakan baru yang menyangkut perdagangan dan pertanian agar lebih menguntungkan penguasa. Kebijakan tersebut mengatasmakan pungutan pajak. Negara menganggap para pedagang dan petani telah mendapatkan keuntungan besar dari usaha mereka dengan modal harta yang sedikit. Negara lantas mengambil pajak dari mereka atas nama pajak binatang dan pertanian karena kekuasaan

16 Berkuasa antara tahun 1061 hingga 1106 di wilayah Maghrib dan Andalus (Clemens Recker).

17 Dikutip dari buku *al-ʿIbru wa Dīwān al-Mubtada' wa al-Khabar*, karya Ibnu Khaldun yang terkenal dan merupakan ringkasan dari buku *al-Muqaddimah*, bab 40.

negara terhadap transaksi perdagangan dan melakukan berbagai intervensi untuk mengontrol pasar. Negara menganggap semua itu sebagai kebijakan pemungutan pajak dan memperbesar pemasukan negara. Anggapan ini jelas salah dan masyarakat berada dalam bahaya dari segala sisi. Pertama, mempersulit para petani dan pedagang dalam melakukan jual-beli binatang dan barang-barang. Sebab-sebab kesulitan tersebut menjadi sangat mudah. Sejatinya masyarakat berusaha untuk saling mempermudah segala urusan dan berusaha saling mendekatkan pemahaman. Persaingan di antara mereka akan berujung pada tujuan keberadaan mereka.

Jika penguasa ikut campur dalam perdagangan, maka harta penguasa akan bertambah besar. Tidak ada satu rakyat pun yang dapat mencapai target perdangan mereka dan ini akan menyusahkan hati masyarakat. Penguasa akan melakukan segala cara untuk merendahkan harga barang-barang yang ada di tangan para pedagang. Dan tidak ada orang yang berani melakukan kritik terhadap kehendak penguasa. Ketika penguasa sudah menguasai seluruh hasil pertanian dan perdagangan seperti sayuran, kain sutra, madu, gula dan lain-lain, masyarakat tidak mampu lagi menguasai pasar dan ketentuan harga. Mereka telah berada dalam kesulitan akibat berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh penguasa. Akibatnya, para petani dan pedagang terpaksa membeli barang-barang tersebut dengan harga yang tinggi. Di sisi lain, harga barang-barang yang ada di tangan mereka ditetapkan sangat murah hingga mereka tidak dapat menjualnya karena tidak mendapatkan keuntungan yang layak. Barang-barang itu akhirnya menjadi tidak berharga. Mereka menjadi pengangguran dan tidak mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupan. Ketika dalam keadaan darurat, terpaksa mereka menjual barang-barang tersebut dengan harga yang sangat murah.

Bisa jadi kebijakan ini berlaku berulang kali terhadap para pedagang dan petani hingga modal mereka habis. Mereka lantas tidak

dapat melakukan aktivitas di pasar dan mengakibatkan kehidupan yang sulit buat masyarakat. Hilangnya keuntungan membuat mereka kehilangan harapan dalam berusaha. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian pungutan pajak karena sebagian besar pungutan pajak diambil dari para pedagang dan petani, terutama setelah ada pegawai pajak dan peningkatan pungutan pajak. Jika para petani dan sektor pertanian mengalami kemandekan dan para pedagang tidak dapat berdagang, maka pungutan pajak akan hilang secara total dan terjadi kebangkrutan yang akut.

Ketika penguasa membandingkan antara pungutan pajak dan keuntungan yang sedikit, maka ia menemukan bahwa jumlah pungutan pajak lebih sedikit. Ia akan memanfaatkan sebagian besar pungutan pajak untuk kepentingannya sendiri dalam melakukan transaksi jual-beli. Dalam transaksi yang dilakukan oleh penguasa ini, tidak mungkin ada pegawai pemungut pajak yang mengawasinya. Jika ada pihak lain yang mengawasi setiap transaksi tersebut, maka pungutan pajak akan didapatkan. Kasus seperti ini akan merusak proses pembangunan dan negara akan mengalami kerugian serta kerusakan.

Jika rakyat tidak dapat mengembangkan harta mereka melalui perdagangan dan pertanian, mereka tidak akan mengalami kerugian karena harus tetap membiayai kehidupan mereka. Kondisi mereka akan semakin sulit dan hancur. Pahami hal ini dengan baik. Orang yang cerdas tidak akan memilih penguasa kecuali yang memiliki karakter istimewa, beragama, beradab, berhati mulia, berani, dan dermawan. Orang-orang yang cerdas mensyaratkan bahwa penguasa harus bersikap adil dan tidak membuat sesuatu yang membahayakan tetangganya. Penguasa tidak boleh melakukan perdagangan karena ia akan membuat harga-harga barang semakin melambung. Penguasa tidak boleh memanfaatkan para budak karena mereka tidak akan bekerja demi kebaikan atau kemaslahatan.

Ketahuiilah bahwa kekayaan penguasa tidak akan berkembang dan eksistensinya tidak akan bertahan kecuali dengan adanya pungutan pajak. Ia harus mengatur kebijakan pungutan pajak dengan adil terhadap para pemilik kekayaan. Dengan demikian mereka merasakan ada harapan dalam mengembangkan dan menginvestasikan harta mereka. Karena itu, hasil pungutan pajak penguasa menjadi besar. Jika hal ini tidak diperhatikan dalam perdagangan dan pertanian, maka akan melahirkan kondisi yang berbahaya bagi masyarakat; jumlah pungutan pajak akan mengecil dan pembangunan akan terhambat.

Kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh para makelar dalam perdagangan dan pertanian. Para makelar itu akan menguasai berbagai barang impor dan menetapkan harga jual sekehendak mereka serta menimbun berbagai barang untuk dijual pada waktunya kepada masyarakat yang telah mereka kuasai. Kondisi seperti ini lebih berbahaya dan lebih menghancurkan masyarakat dibanding kondisi sebelumnya.

Bisa jadi penguasa yang mengajak para pedagang dan petani untuk menciptakan kondisi seperti itu. Ia membuat kebijakan tersebut sambil menentukan bagian untuk dirinya sendiri dalam rangka memperkaya diri dengan jalan yang cepat. Apalagi perdagangan yang dilakukan oleh penguasa tidak akan dikenakan pajak dan retribusi apapun. Hal ini tentu sangat cepat bagi proses pengembangan kekayaan dan keuntungan investasi. Mereka tidak pernah peduli pada jumlah pungutan pajak yang semakin mengecil dan akan membahayakan penguasa sendiri. Oleh sebab itu, penguasa harus bersikap ekstra-hati-hati terhadap para makelar dan harus menghindarkan diri dari usaha mereka yang membahayakan jumlah pungutan pajak dan kekuasaannya sendiri. Allah telah memberikan kecerdasan kepada kita dan Allah telah memberikan manfaat yang besar dalam setiap kerja yang positif. Wallahu a'lam. ■

Kebebasan dan Ideologi Pemerintahan (1913)¹⁸

Ahmad Luthfi Sayyid

Dalam sejarah, bentuk-bentuk pemerintahan silih berganti dengan model dan tujuan yang berbeda-beda. Fenomena dan tujuan bentuk-bentuk pemerintahan berbeda satu dengan yang lain. Karena perbedaan tersebut, lahirlah berbagai mazhab (ideologi) politik. Setiap ideologi politik memiliki pendukung dan tokoh intelektual yang mendukungnya melalui berbagai tulisan. Setiap pendukung bersikap fanatik terhadap ideologinya masing-masing. Mereka berpendapat bahwa manifestasi ideologi politik yang mereka dukung akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kami memperhatikan semua ideologi pemerintahan. Kami berpendapat bahwa ideologi politik yang sejati dan yang tepat untuk dunia Arab dalam kondisi sekarang ini adalah ideologi kebebasan, walau ideologi ini lebih dahulu lahir di perkotaan dibanding ideologi sosialisme yang diterapkan secara berbeda-beda di berbagai negara.

Kita tidak memungkiri bahwa tidak ada satu masyarakat yang benar-benar konsisten menerapkan satu ideologi dengan berbagai aturannya dalam sebuah negara. Pasti ada percampuran antara satu ideologi dengan ideologi yang lain hingga ada satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip ideologi kebebasan dan prinsip-prinsip ideologi sosialisme. Persis yang terjadi pada pemerintahan liberal di Inggris. Sebutan sebuah negara sebagai negara liberal, kerajaan atau sosialis hanya karena sebagian besar prinsip-prinsipnya yang berlaku. Pandangan ini sesuai dengan watak pembangunan dan diperkuat oleh akal sehat. Ironisnya, kadangkala semua prinsip tersebut digabungkan dalam satu sistem di bawah satu prinsip tertentu.

18 Artikel ini diambil dari buku *Turāts Ahmad Luthfi Sayyid*, juz I, Darul Kutub wa al-Watsa'iq al-Qaumiyah, Kairo 2008, hal. 424-427.

Dari penelitian modern kita tahu secara alami atau secara sosiologis bahwa pengecualian memiliki tempat dalam prinsip-prinsip umum dan keberadaan pengecualian ini tidak dapat dianggap remeh. Prinsip keterwakilan (representasi) dalam negara demokratis adalah prinsip mayoritas. Meski demikian, tetap ada ruang kosong dalam kerangka prinsip tersebut. Sebagian masyarakat demokratis memasukkan prinsip pengecualian baru, yaitu representasi minoritas sesuai kebutuhan.

Untuk menjelaskan semua itu, kami katakan bahwa prinsip setiap ideologi pemerintahan adalah asas manfaat. Setiap prinsip berlaku berdasarkan prinsip kemaslahatan masyarakat.

Jika kita harus memastikan prinsip kemaslahatan dalam memilih ideologi yang pantas untuk pemerintahan Mesir, tidak diragukan sedikit pun bahwa ideologi yang pantas untuk diikuti adalah ideologi kebebasan (liberal). Liberalisme secara mendasar menjamin bahwa masyarakat di negara-negara liberal, atau pemerintahan di negara Arab, tidak boleh mengorbankan kebebasan dan kepentingan individual dalam segala kebijakan umum. Ideologi ini secara mendasar menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kekuasaan kecuali untuk sesuatu yang didorong oleh keadaan terpaksa atau dalam kondisi darurat yang hanya berlaku dalam tiga kewenangan: kewenangan polisi, kewenangan pengadilan (hukum) dan kewenangan membela negara. Selain tiga kewenangan tersebut, ada di tangan setiap individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang bebas.

Pada dasarnya, keberadaan pemerintah dalam bentuk apapun hanya dibutuhkan karena kondisi darurat. Maka, kekuasaan negara harus tetap berada dalam batas-batas darurat dan negara tidak boleh melanggar batas-batas ini seperti mengontrol pekerjaan setiap individu. Ketika kewenangan negara ditambah, sejatinya negara sedang mengurangi hak-hak individual. Ketika kekuasaan negara

bertambah besar, sejatinya negara sedang melakukan penindasan terhadap kebebasan individual.

Apa yang kami katakan dan apa yang kami tegaskan tentang ideologi ini bukan sekadar teori-teori abstrak yang tidak memiliki bukti-bukti nyata. Ideologi ini bukan hanya asumsi-asumsi logis semata. Tidak demikian. Pengalaman kita telah membuktikannya dengan contoh-contoh keseharian bahwa pemerintah yang memiliki kewenangan melebihi tiga wilayah tersebut pasti cenderung bersifat negatif dan akan mengalami kegagalan. Kita memiliki contoh kongkrit di Mesir di mana pemerintah mengambil kewenangan besar dalam pertanian. Pemerintah menguasai tanah dan melakukan eksploitasi. Pemerintah memberikan benih-benih dan alat pertanian kepada kita untuk kita gunakan dalam melakukan aktivitas pertanian di bawah kontrol pemerintah. Hasilnya, pertanian tersebut mengalami kegagalan dan bumi tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan.

Pemerintah kemudian menyadari kesalahan tersebut dan mencabut kewenangannya dalam pertanian dalam waktu yang panjang. Hal ini terjadi karena pertanian adalah aktivitas individual dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, bukan wewenang pemerintah. Contoh lain adalah soal kontrol pemerintah terhadap ladang-ladang makanan dalam hal takaran, impor dan distribusinya. Dapat dipastikan dengan mudah bahwa produk makanan yang dihasilkan oleh sawah-sawah yang dikontrol oleh pemerintah lebih sedikit dibanding produk makanan yang dihasilkan oleh sawah-sawah yang digarap oleh individu-individu atau perusahaan swasta yang bebas. Produk makanan yang dihasil oleh ladang-ladang masyarakat lebih memenuhi standar dibanding produk makanan yang dihasil oleh ladang-ladang yang dikontrol oleh pemerintah.

Ketika pemerintah melakukan praktek perdagangan garam atau barang-barang lainnya, pemerintah tidak akan sanggup menjadi

pedagang yang baik dan tidak akan menghasilkan manfaat yang merata. Jika pemerintah sibuk dalam perindustrian, maka pemerintah tidak akan menjadi pelaku industri yang baik dan bahkan akan merugi. Jika pemerintah bertindak sebagai guru, maka hasil dari pengajaran pemerintah adalah menyamakan semua akal yang Allah ciptakan dalam kondisi yang jauh lebih beragam dari fisik kita. Hingga saat ini tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak istimewa dalam ilmu pengetahuan. Kita melihat setiap hari bahwa para intelektual dan ilmuwan yang bebas menghasilkan berbagai teori baru dalam berbagai disiplin ilmu. Mereka berhasil melakukan berbagai kreatifitas kemanusiaan yang baru yang memperkaya temuan-temuan yang sudah ada. Kami tidak pernah tahu bahwa pemerintah berhasil menetapkan teori ilmiah baru yang memperkaya teori-teori matematika atau ilmu astronomi. Pemerintah juga tidak pernah menambahkan teori baru dalam akhlak dan perilaku sehari-hari. Jika pemerintah tidak pantas menjadi guru atau pendidik, maka sepantasnya aktivitas itu dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pemerintah tidak boleh menghalangi kehendak masyarakat untuk belajar. Akan tetapi tetap diakui bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi pendidikan yang ada di tengah masyarakat hingga tidak ada sesuatu yang mencederai kearifan umum yang harus dijaga oleh polisi.

Bisa jadi pemerintah sosialis atau pemerintah yang melakukan intervensi dalam selain tiga wilayah yang telah disebutkan memberikan manfaat bagi negara demokratis. Apakah intervensi pemerintah di luar batas-batas yang telah ditentukan bermanfaat di negara lain? Pada kenyataannya, kita menyaksikan bahwa tidak ada manfaatnya sama sekali ketika hak-hak individu dirampas untuk diserahkan kepada pemerintah. Hak-hak individual itu memang harus dilindungi dan tidak boleh dikuasai oleh pemerintah.

Penyebab utama dari segala kerusakan yang kita alami saat ini, baik dalam aspek akhlak, ekonomi, dan politik adalah hilangnya kebebasan dalam jiwa kita. Kita hidup sangat lama dalam praktek-praktek perbudakan klasik atau sistem sosialis yang terbalik. Jika ada negara yang perlu untuk menyerahkan hak-hak individu kepada pemerintah hingga pemerintah dapat intervensi dalam hal-hal yang di luar kewenangannya, maka kami lebih membutuhkan perluasan lahan untuk aktivitas kebebasan individual untuk mengambil kembali hak-hak kami demi kesejahteraan dan keadaban. Pada akhirnya, kita harus mampu membuang sifat ketergantungan pada pemerintah untuk hal-hal yang mulia dan kompleks. Kita harus keluar dari kesadaran yang merata di dunia Timur, kesadaran bahwa masyarakat adalah domba sedangkan pemerintah adalah gembala. Pemerintah dapat berbuat apa saja terhadap domba-domba yang digembalanya. Kesadaran inilah, yang telah kita jadikan sebagai kaidah politik dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat kita semakin jauh dari pola hidup modern dan beradab. Kesadaran inilah yang telah memecah-belah persatuan kita dan memperberat langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. Kesadaran ini membuat kita semakin tidak percaya diri. Padahal rasa percaya diri merupakan sumber kesuksesan dalam setiap aktivitas individu dan masyarakat.

Para wakil kami yang terhormat. Kalian lebih tahu kebutuhan masyarakat kalian. Masyarakat telah mengangkat kalian sebagai wakil mereka untuk memperjuangkan kemaslahatan mereka. Kalian memiliki kebebasan untuk menentukan ideologi yang paling baik yang kalian jadikan sebagai kaidah dalam perumusan hukum-hukum. Meski demikian, kalian harus menyadari bahwa perumusan hukum memiliki pengaruh besar terhadap akhlak, tradisi dan kesadaran masyarakat. Jika prinsip perumusan hukum adalah kebebasan individual, maka cahaya kebebasan akan berpendar dalam jiwa

masyarakat. Dan pengaruh kebebasan itu akan tampak dalam segala aktivitas dan kreativitas mereka. Kebebasan adalah asas tanggung jawab dan jalan menuju kesuksesan hidup.

Jika ada orang bertanya, apa urusan saya membuat tulisan ini sedangkan saya bukan seorang anggota legislatif? Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan jawaban seorang penulis besar yang menyatakan, “Jika aku seorang perumus hukum, maka aku tidak akan menyia-nyiakkan waktu dengan menulis. Aku justru akan lebih banyak bekerja.”

Setiap orang harus berbuat sesuai kapasitasnya masing-masing. Kita harus berusaha membedakan antara yang benar dan yang batil. Balasan kita dari mereka adalah mereka mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik.

Para wakil kami yang terhormat. Kami tahu bahwa negara dan pemerintahan kita kadangkala menjadi penghalang untuk merealisasikan obsesi kalian yang mulia. Kami percaya bahwa kalian selalu berusaha memenuhi harapan orang-orang ikhlas di tengah masyarakat yang mulia ini. Akan tetapi obsesi kalian akan ideologi kebebasan merupakan obsesi yang tampak sangat jelas di mata masyarakat dan dapat diraba oleh tangan mereka. Ideologi kebebasan itulah yang bermanfaat bagi pendidikan politik kami dan memiliki pengaruh yang positif bagi kehidupan nasional.

Kami melihat bahwa tetap ada peluang bagi para wakil kami untuk memperjuangkan kebebasan di dalam lembaga legislatif walau berada dalam kondisi negara yang sekarang ini. Kami yakin jika pemerintah sadar, mereka akan melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan dan menegakkan supremasi hukum. Kami yakin bahwa pemerintah dapat kembali memperkuat kebebasan individual, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan bekerja di dalam batas undang-undang kolektif. Kami

berhak menuntut pemerintah untuk memberikan semua kebebasan tersebut. Kami juga harus membuat pemerintah yang tegas dan kuat dalam melaksanakan kewenangan yang telah ditentukan. Kami tidak keberatan dengan sikap tegas dalam menegakkan kebenaran dan kemaslahatan bersama. Akan tetapi kami tidak terima sikap penekanan terhadap hak-hak individual walau dibungkus dengan baju toleransi dan kesantunan. ■

Bab IV

Sekularisme

Tema sekularisme, atau hubungan agama dan negara, menjadi salah satu tema perdebatan tersengit di dunia Arab yang mempengaruhi semua tema politik lainnya. Pertentangan ini menyentuh akar-akar kebudayaan Arab dan identitasnya. Kita tidak hanya melihat perbedaan pendapat antara kalangan salaf (generasi terdahulu) dengan kalangan kekinian (generasi belakangan) saja, namun juga di dalam barisan kalangan liberal Arab. Dalam liberalisme Arab, terdapat dua aliran penting; moderat-optimistik dan sekular-pesimistik. Aliran pertama, yang dikomando oleh Muhammad Abduh dan ‘Ali ‘Abd Râziq, meyakini bahwa Islam menerima pembaharuan dan dimungkinkan menyelarasi negara sekular.

Jadi, aliran pertama mendiskusikan masalah sekularisme dari dalam akidah Islam itu sendiri. Mereka menafsirkan ulang ushul fikih, sebagaimana telah dilakukan ‘Ali ‘Abd Râziq di buku kontroversialnya *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, mengungkap temuan-temuan dan sisi-sisi baru, lalu sampai pada kesimpulan non-konvensional tentang syariat Islam. ‘Ali ‘Abd Râziq menegaskan bahwa Islam adalah agama dan bukan negara, dan pondasi dasar kekhalifahan adalah kekuatan bersenjata (militer).

Adapun aliran kedua tidak mau mencoba memberikan penafsiran baru terhadap agama. Mereka bahkan meragukan sepenuhnya peran

agama dalam ranah politik dan berupaya memlimitasi agama hanya pada ruang privat semata. Mereka melihat sekularisme dari sudut pandang sosiologis, psikologis, dan realitas sembari menegaskan, “Agama bertanggungjawab atas akhirat, sementara negara atas dunia. Mencampuradukkan keduanya akan merusak masing-masing dari keduanya.” Farah Anton, misalnya, berpendapat bahwa campur-tangan agama terhadap politik akan merusak agama itu sendiri. Itu karena agama masuk ke satu ranah yang penuh dengan intrik dan tipudaya, hal mana membuat agama tidak mungkin bisa tetap suci dan bersih.

Jadi, tindakan memisahkan agama dari negara tidak menunjukkan bahwa kalangan sekular memusuhi agama, tapi justru melindungi agama dari tantangan-tantangan politik. Tapi, bagaimana sikap liberalisme umum terhadap masalah sekularisme?

Salah satu hak individu di tengah-tengah masyarakat liberal adalah kebebasan untuk memilih tujuan dan orientasi hidupnya, lalu bekerja keras merealisasikan tujuannya itu dalam batasan-batasan tertentu yang menghormati kebebasan orang lain. Negara tidak berhak memaksa warganya untuk mengambil jalan hidup yang wajib ditempuh. Negara tidak boleh menentukan dari mana dan ke mana warganya harus datang dan pergi, tetapi hanya membatasi ruang pergaulan dan menentukan undang-undang bagi mereka, dan itu pun dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.

Di sisi lain, agama sudah mendefinisikan jalan hidup yang mesti ditempuh oleh individu-individu sejak mereka lahir hingga meninggal dunia, menentukan tujuan dan orientasi hidup sejak penciptaan manusia hingga hari kiamat. Selain itu, agama juga telah menyediakan bagi para penganutnya hukum-hukum yang detail dan terperinci perihal cara hidup mereka. Hukum-hukum atau syariat-syariat ini tidak hanya berhenti pada kebebasan “yang lain” saja, tapi jauh lebih sempit dari itu. Memakan daging babi, misalnya, tidak menyentuh

kebebasan “yang lain”, tetapi dilarang keras bagi umat Islam. Kami tidak mengatakan bahwa hukum-hukum ini pasti buruk. Apabila setiap orang mukmin sungguh-sungguh menaati syariat agama maka hal itu tidaklah berseberangan dengan pemikiran kaum liberal. Permasalahan baru muncul ketika syariat agama menjadi hukum negara, sementara hukum negara wajib diberlakukan terhadap semua warga negara tanpa kecuali, di mana pun dan kapan pun. Dengan mencampuradukkan hukum agama dan negara, syariat agama menjadi diberlakukan terhadap kalangan non-mukmin, dan itu berarti membelenggu kebebasan individu dan hak-hak dasar manusia.

Syariat agama hanya berlaku bagi penganutnya saja, sementara hukum negara berlaku bagi semua warga negara secara keseluruhan. ■

Pemisahan antara Dua Kekuasaan, Negara dan Agama (1902)¹⁹ Farah Anton

Tuntutan dipisahkannya kekuasaan negara dari kekuasaan agama dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting.

Pertama, dan ini yang paling penting, membebaskan aktifitas berpikir manusia dari belenggu apapun demi masa depan manusia sendiri. Hal ini tentu saja menuntut dipisahkannya dua kekuasaan, yaitu agama dan negara.

Apa sebenarnya tujuan agama di bumi? Tujuan agama-agama adalah mendidik manusia untuk beribadah kepada Tuhan, menyeru mereka pada kebaikan dan kebajikan, serta memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui jalan-jalan yang telah disuratkan di dalam kitab-kitabnya. Lalu, apa tujuan pemerintahan negara di bumi? Tujuan negara adalah menjamin terwujudnya rasa aman di antara manusia, dalam arti menjamin kebebasan setiap individu di bawah payung

19 Artikel ini diambil dari buku *Adhwā' 'ala al-Ta'ashshub* yang merupakan kumpulan tulisan beberapa penulis terkemuka. (Beirut: Dār Amwāj, tt.), hlm. 72-85.

konstitusi. Konstitusi tidak boleh merampas secuil pun kebebasan mereka kecuali demi kemaslahatan orang banyak atau publik.

Artinya, seorang individu bebas sebebaskan-bebasnya di bawah kolong langit ini; bebas melakukan apapun dan meyakini keyakinan apapun. Jadi, tak ada kaedah-kaedah baku atau aturan-aturan tersurat yang mengatur perilaku dan menentukan pemikiran. Sebab, tujuan hakiki negara adalah menjamin kebebasan tiap warga negara beserta semua turunannya; harta, darah, dan kehormatan mereka. Hal ini berbeda dengan agama. Agama telah menyediakan aturan-aturan tersurat, kaedah-kaedah baku, dan prinsip-prinsip tekstual yang wajib diyakini dan dipatuhi oleh setiap mukmin. Jika menolak, mereka berhak dihina dan dirampas hak-haknya. Dengan demikian, tujuan asli negara berbeda seratus persen dengan tujuan agama.

Perbedaan mendasar agama dan negara tersebut mungkin bisa ditunjukkan oleh pandangan keduanya terhadap ilmu pengetahuan. Apabila kita bertanya kepada kalangan agamawan mana pun, “Bagaimana pendapatmu jika di abad ini atau setelah dua, lima, atau sepuluh abad yang akan datang, ilmu pengetahuan berhasil mengungkap temuan besar bahwa kehidupan di muka bumi ini sebenarnya adalah produk dari benda-benda mati sesuai dengan teori generasi spontan (organisme hidup berasal dari benda mati). Apakah saat itu engkau akan meyakini prinsip ini sembari meninggalkan prinsipmu sebelumnya?” maka kita tentu sudah tahu apa jawaban mereka. Bahkan, sebelum kita mengetahui jawaban mereka, kita mungkin akan melihat ekspresi sedikit kemarahan dan semangat yang menyala-nyala dari wajah mereka.

Tapi, negara takkan marah menghadapi hal seperti itu. Negara juga tidak akan menuntut perbuatan itu karena itu memang bukan tugasnya. Tugas negara hanya melindungi semua warga, termasuk kebebasan berpikir mereka. Setiap orang berhak menggunakan akalunya untuk mengungkap rahasia terdalam, apapun rahasia itu.

Jika sebuah rahasia terungkap atau diungkap, tugas negara bukan menentang rahasia tersebut, bukan pula melindunginya, namun membiarkannya saja. Jika ada sesuatu yang baru, pemerintahan sipil-sekular (baca: negara) harus menghormatinya secara negatif, dalam arti harus tidak memedulikannya. Sebab, istilah “kebenaran absolut” (*al-haqīqah al-muthlaqah*) tidak dikenal di dalam kamus negara. Negara melihat bahwa akal manusia tidak memiliki batasan tertentu dan bahwa ilmu pengetahuan ibarat anak kecil yang masih menyusui. Dalam konteks ini, agama memiliki pandangan sebaliknya. Bagi agama, kebenaran bersifat absolut dan tidak ada kebenaran lain setelahnya. Oleh sebab itu, ketika memegang tali kendali pemerintahan, agama akan memaksakan kebenarannya dengan cara menekan pemikiran manusia dan melawan setiap pemikiran baru, sebagaimana yang terjadi di Eropa.

Itulah alasan kenapa di dalam Islam dan Kristen terjadi penindasan besar-besaran terhadap kalangan ulama dan kaum filsuf. Galileo, misalnya, harus mendekam di penjara hanya karena telah menyuarakan satu teori yang hari ini banyak diketahui anak kecil, yaitu teori perputaran bumi. Bruno²⁰, contoh lainnya, dibakar sampai mati karena telah menyatakan satu pendapat seperti pendapat sang Professor²¹ terkait konsep panteisme (*wuḥdah al-wujūd*). Masih banyak lagi agamawan dan filsuf yang mengalami nasib serupa atau bahkan lebih buruk. Semua itu tak lain disebabkan oleh ketakutan atas sesuatu yang baru. Seandainya Eropa tidak memisahkan kekuasaan agama dan kekuasaan negara, yaitu melalui pengibaran bendera perang melawan kekuasaan gereja hingga berujung pada pengasingan

20 Bruno (1548–1600 M), seorang pemikir Italia yang dipenjarakan dan dieksekusi mati pada tahun 1600 M karena pandangan-pandangan filsafat dan keagamaannya.

21 Sang Professor yang dimaksud adalah Muhammad ‘Abduh yang pernah melakukan perdebatan dengan Farah Anton. Dan, makalah ini adalah sanggahan Farah Anton terhadap pemikiran Muhammad ‘Abduh.

dan pengusiran kaum pendeta dan agamawan dari setiap inci ruang kekuasaan, tentu saja Eropa takkan pernah memiliki peradaban yang mengakar kuat seperti yang bisa kita lihat sekarang. Bahkan, di Eropa saat ini, terdapat jenis peradaban lain yang tidak kita ketahui jenisnya.

Kedua, keinginan mewujudkan persamaan mutlak di antara semua individu umat tanpa melihat perbedaan aliran dan keyakinan. Ini dimaksudkan agar mereka bisa menjadi satu umat yang senasib dan sepenanggungan, yang sebagiannya benar-benar bisa merasakan penderitaan sebagian yang lain. Untuk mencapai itu, tak ada jalan lain kecuali merobohkan tembok-tembok pembatas di antara mereka atau mengendalikan mereka dengan kendali kekuasaan yang tidak mengekor pada satu aliran tertentu dari aliran-aliran mereka. Artinya, para pemegang kendali kekuasaan bisa dari kalangan Islam, Kristen, atau bahkan ateis.

Dengan kata lain, pemegang kendali kekuasaan hendaknya tidak terjun ke panggung penghakiman—yang nyata-nyata merupakan panggung Tuhan—untuk membela agama tanpa agama dan mengokohkan prinsip-prinsip agama tanpa agama. Sebab, “hak-hak dasar manusia”, yang mesti dibela oleh para pemegang kendali kekuasaan, tidak dikuasakan pada agama, tetapi berada di atas agama. Tidak ada seorang pun yang berhak menindas “hak-hak dasar manusia” kecuali hanya Tuhan semata. Jika tidak demikian, masih tegaknya tembok-tembok pembatas akan membuat keunggulan dan keuntungan selalu berada di pihak kekuatan, sehingga kebenaran menjadi milik kekuatan dan bukan milik kebenaran. Akibatnya, umat menjadi lemah tidak berdaya akibat konflik-konflik internal dan berbagai kekacauan, selain akan terjadi penghinaan terhadap kemanusiaan yang telah diciptakan Tuhan sebagai sesuatu yang agung nan mulia, dan pengebirian terhadap hak asasi manusia yang dilarang disentuh oleh syariat Tuhan dan akal budi manusia.

Ketiga, kekuasaan agama tidak perlu turut-campur dalam mengurus persoalan-persoalan dunia. Sebab, agama disyariatkan untuk mengatur persoalan akhirat, bukan persoalan dunia beserta segala tetek-bengeknya. Jika agama memaksakan diri untuk mengurus dunia maka yang dihasilkan hanyalah sebuah kegagalan, meski pada awalnya tampak berbuah keberhasilan. Ruang lingkup agama adalah keimanan dengan hati atau penerimaan terhadap Allah. Kapan pun agama keluar dari ruang lingkungannya ini, ia takkan pernah bisa menghadirkan sesuatu pun yang bisa dibanggakan. Apakah saat ini ada yang percaya jika keadaan di masa-masa kemunculan agama, itu sama dengan keadaan di masa kini beserta semua tuntutan kekinianya, demi membenarkan pandangan bahwa masa depan mungkin bisa diatur dengan masa lalu?!

Keempat, kelemahan dan ketidakberdayaan umat yang terus saja terjadi dan berlangsung terus-menerus selama mereka (umat) masih menyatukan kekuasaan agama dengan kekuasaan negara. Termasuk di dalamnya adalah empat poin berikut ini. Poin pertama, penindasan terhadap akal dan kecerdasan. Akibatnya, kita bisa melihat banyaknya pemikir dan intelektual yang menjauhkan diri dari sebagian besar kalangan agamawan karena yang disebut terakhir tidak bisa menjangkau kekuatan kecerdasan dan akal kalangan intelektual.

Kita tidak bisa memungkirkan bahwa yang salah dalam konteks ini adalah kalangan agamawan berikut kelemahan, ketamakan dan keangkuhan mereka, dan bukan hanya agama saja. Tapi, apa yang mesti dilakukan?! Agama tidak akan bisa menyentuh umat, khususnya mereka yang lemah secara finansial, kecuali dengan cara-cara kemanusiaan seperti ini. Jadi, kalangan agamawan akan menentang kecerdasan di dalam umat setiap kali kecerdasan itu cenderung bebas, meskipun hanya sedikit.

Umat butuh kecerdasan semua individu penganutnya. Kemaslahatan umat teletak pada pengasahan kecerdasan, bukan pada

pembelengguan terhadapnya. Jika tidak, umat hanya akan menjadi alat di tangan pemilik kepentingan saja. Menyatukan agama dengan kekuasaan negara hanya akan mengurangi sumber-sumber kecerdasan dan kehidupan di dalam tubuh umat, serta memerosokkan pemerintahan umat ke jurang ketidakberdayaan dan kebodohan.

Poin kedua, kekuasaan agama pada dasarnya lemah. Oleh sebab itu, ia harus mendapatkan dukungan dari rakyat (*'āmmah*). Tanpa rakyat, kekuasaan agama takkan memiliki kekuatan sedikit pun. Rakyat adalah tulang punggung dan pondasi umat. Setiap pemerintahan, baik berbentuk monarki maupun republik, pasti memiliki musuh. Pemerintahan berbasis agama (teokrasi) tahu bahwa setiap kekeliruan yang dilakukannya pasti akan digunakan musuh sebagai senjata untuk memprovokasi rakyat agar memusuhinya. Oleh karena itu, pemerintahan teokrasi tidak mempunyai agenda lain kecuali berupaya menuruti semua kemauan rakyat. Inilah alasan kenapa ia selalu menjaga hati rakyat dan berjalan seiring dengan mereka dalam semua persoalan, *hatta* dalam persoalan yang membahayakan rakyat sekalipun. Di sini, tujuan utamanya adalah menjaga eksistensinya, bukan memajukan dan menyejahterakan rakyat. Untuk itu, segala sesuatu boleh dan akan dilakukan, *hatta* mengobarkan fanatisme keagamaan sekalipun, demi menjaga kecintaan rakyat terhadapnya. Sementara itu, pemerintahan sipil-sekular Barat sudah melangkah lebih jauh ke depan di jalan kekuatan dan pembangunan, karena tujuan utamanya hanyalah memajukan dan menyejahterakan rakyat.

Poin ketiga adalah rentetan tuntutan dari poin kedua yang telah kami paparkan barusan. Poin ketiga adalah menanamkan virus di dalam tubuh umat yang bisa menggerogoti kekuatan, vitalitas, dan kehidupannya, yaitu virus pertikaian keagamaan.

Pertikaian keagamaan takkan pernah berhenti dan hilang kecuali ketika terwujud neraca keadilan dan persamaan mutlak di antara seluruh elemen umat. Lalu, neraca keadilan takkan bisa terwujud

kecuali melalui pemerintahan sipil-sekular yang tidak membedakan seluruh anggota umat berdasarkan aliran atau keyakinan. Adapun di dalam pemerintahan teokrasi, orang yang menuntut persamaan mutlak ibarat menginginkan sesuatu di luar batas kemampuannya. Andai saja pemimpin-pemimpinnya itu para malaikat atau tuhan-tuhan yang tidak mempunyai nafsu dan keinginan manusia! Tapi, sungguh sangat malang bagi manusia, para malaikat dan tuhan-tuhan tidak pernah turun ke bumi untuk memimpin pemerintahan mereka, meskipun hanya setahun. Setiap kali virus pertikaian keagamaan memakan organ-organ tubuh umat, umat pasti akan lemah dan terjatuh. Itu karena di dalam tubuh umat terdapat dua kelompok; kelompok yang bisa menikmati seluruh haknya dan kelompok yang terampas hak-haknya. Mengingat manusia, melalui fitrah dan nalurinya, bisa mengerti bahwa “hak manusia” tidak boleh dikurangi atau dirampas, maka manusia akan memaksimalkan semua kekuatan yang bisa membantunya dalam mempertahankan hak-hak tersebut. Seperti diketahui, negara-negara di muka bumi ini sama seperti sekawan burung elang yang selalu berputar mengelilingi mangsanya dari atas. Setiap kali satu negara memiliki kesempatan untuk mengintervensi urusan-urusan negara lainnya, negara itu pasti akan langsung segera mengambil kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pertama kali yang akan dilakukannya adalah mencari sesuatu yang sesuai dengan kepentingannya, baru kemudian menolong negara lain yang meminta bantuannya. Terkadang, negara peminta tolong ini ditipu oleh negara penolongnya dan hanya dijadikan sebagai alat peraih kepentingannya. Di sinilah terjadi bencana besar, bukan hanya bagi satu kelompok saja, melainkan semua kelompok kecuali kekuatan-kekuatan pengintervensi. Dan, tujuan hakiki kelompok pengintervensi ini tak lain adalah “menyerang” agar kepentingannya terealisasi.

Poin keempat adalah juga rentetan tuntutan dari poin kedua, yaitu mengetengahkan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang suci ke ranah politik yang sarat dengan kerendahan, kebohongan, dan kerusakan. Di sinilah muncul masalah paling penting dari semua masalah yang ada. Apa pengertian dari politik di masa sekarang ini? Politik memiliki defenisi seperti defenisi yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Abduh, “Aku berlingdung kepada Allah dari politik, dari lafazh politik, dari makna politik, dari setiap tanah yang disebut di dalamnya politik, dan dari orang yang berbicara, mempelajari, menutupi, atau berpikir tentang politik. Barang siapa yang berpolitik memimpin maka ia akan terganggu. Sungguh, politik ibarat pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka jahim. Buahnya seperti kepala-kepala setan. Mereka semua memakan buah itu, dan memenuhi perut mereka dengannya.” Kenapa Abduh sampai menyebut kiamat bagi politik? Itu karena politik menimbulkan kejumudan dalam agama-agama. Adapun menurut kami, kami mencela politik karena hal lain. Kami mencela politik karena ia tidak dibangun di atas dasar ketulusan (*ikhhlâsh*) dan persaudaraan. Saat ini, semua negara di belahan bumi manapun, utamanya negara-negara besar, seperti monster-monster menakutkan bersenjatakan pemusnah. Setiap negara akan memburu negara tetangganya, merayunya dengan satu mata dan menyerangnya dengan mata yang lain. Seandainya di dunia saat ini terdapat satu negara super kuat dan super kokoh, ia pasti sudah menyerang, memaksa dan mengumpulkan semua negara lain di bawah kendali kekuasaannya, sebagaimana pernah dicita-citakan oleh Napoleon I. Hipokrisi (kemunafikan) adalah asas politik di zaman sekarang. Hipokrisi termasuk kekuatan sekaligus kelemahan. Seperti diketahui, hipokrisi menyimpan banyak kekurangan dan kehinaan di belakangnya. Jika demikian, bagaimana mungkin pemerintahan-pemerintahan teokrasi bisa masuk ke ranah politik dan keluar

sebagai pemenang dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip keagamaannya?! Kami katakan “pemenang” karena tujuan akhirnya adalah keluar dari persaingan dan perlombaan dengan membawa kemenangan, dan bukan hanya bisa keluar saja. Setiap orang pasti bisa keluar dari setiap perlombaan. Tapi, hal tersulit adalah keluar dari perlombaan sebagai pemenang. Bagaimana mungkin pemerintahan teokrasi bisa meraih kemenangan tanpa memerangi pemerintahan sipil-sekular dengan menggunakan senjatanya, yaitu hipokrisi, kebohongan, dan rekayasa?! Persoalannya kemudian, apakah agama-agama membolehkan para pemimpinnya untuk memainkan hipokrisi dan terjun ke ranah politik?! Jika membolehkan, bukankah agama-agama sendiri berarti terjerembab ke kubangan lumpur politik?! Bukankah kaedah-kaedah agama kemudian menjadi berbunyi “sarana telah berubah menjadi tujuan”?! Siapa teladan yang mesti diikuti rakyat dalam kondisi seperti itu? Lalu, di mana prinsip-prinsip kesempurnaan agama yang semestinya menjadi cermin tindakan para pemimpin? Dari sisi ini, politik benar-benar menjadi ancaman serius bagi prinsip-prinsip agama dan keimanan. Oleh karena itu, agama dan para pemimpinnya harus dijauhkan dari politik. Jika ini bisa dilakukan, maka semuanya bisa mudah terlaksana. Tapi, ada satu permasalahan lain. Ketika Napoleon I merasa frustrasi dan tidak sanggup lagi menuruti keinginan Paus, ia langsung menyerang kota Roma, menahan Paus dan menjadikannya sebagai tawanan yang hina di Paris. Apakah ada hantaman lain yang lebih menyedihkan melebihi hantaman ini, yaitu hantaman terhadap kekuasaan agama yang merupakan khalifah (wakil) Allah di bumi?! Dalam posisi seperti ini, pemimpin-pemimpin agama (ulama) terlihat rendah, hina dan lemah di bawah kaki para raja dan penguasa. Bukankah lebih baik memisahkan kekuasaan agama dari kekuasaan sekular, sehingga ketika terjadi tekanan dan kehinaan maka itu hanya akan menimpa

pemerintahan sipil-sekular saja, sementara kepemimpinan agama akan tetap berada di level yang tinggi dan mulia, seolah seperti berada di pintu-pintu langit yang takkan tersentuh oleh debu-debu bumi?!

Kelima, “kemustahilan kesatuan agama” (*al-wuḥdah al-diniyyah*). Hal ini menjadi faktor terpenting yang memicu timbulnya berbagai fitnah dan kekacauan di dalam Islam dan Kristen. Karena hal ini juga, peristiwa-peristiwa berdarah terjadi di kedua agama tersebut.

Penjelasannya adalah sebagai berikut. Setiap agama memiliki syariat sendiri-sendiri. Syariat ini kemudian menjadi pijakan seorang pemimpin yang mempresentasikan kekuasaan tertinggi. Pemimpin tunggal inilah yang menjadi simbol kekuasaan tertinggi bagi seluruh pengikutnya di setiap pelosok negeri. Dalam konteks ini, tentu terdapat berbagai kepentingan dan persaingan dalam memperebutkan kekuasaan dan kepemimpinan tersebut. Bumi ini tidak hanya diisi oleh satu umat, tetapi oleh banyak umat dengan kepentingan dan aliran yang berbeda-beda; Inggris, Perancis, Jerman, ‘Utsmeni, Amerika, Italia, dan umat-umat lain. Masing-masing umat tentu mempunyai kepentingan yang berbeda, atau bahkan bertolak-belakang dengan kepentingan umat-umat selainnya. Seorang Paus, misalnya, yang menjadi pemimpin Kristen (Katolik) dan penguasa negara Italia, serta yang mempunyai barisan tentara dan kekuatan yang dihibahkan oleh sejumlah negara, tentu bisa melakukan intervensi terhadap semua urusan negara-negara pengikutnya tersebut. Ini karena penganut Kristen Katolik tersebar di negara-negara itu, dan mereka sepenuhnya tunduk pada kepemimpinan Paus. Orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaan, di dalam agama dan aliran apapun, terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama biasa disebut *al-khāshshah*, yaitu yang mengutamakan kepentingan kebangsaannya di atas segala sesuatu. Adapun kelompok kedua biasa dikenal dengan sebutan *al-‘ammah*, yaitu mereka yang mengutamakan persoalan-persoalan keagamaan di atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, ketika sebagian *‘ammah* yang

tahun ini pernah bergejolak di Perancis—akibat penutupan sekolah-sekolah keagamaan oleh pemerintah—ditanya “Apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian warga negara Perancis?” maka mereka menjawab, “Memang benar. Tetapi, yang pertama dan utama, kami adalah penganut agama Kristen.” Seandainya pemimpin Gereja Katolik saat itu, Paus Leon XIII, memerintahkan mereka untuk melawan dan menentang pemerintah, dan bukan hanya diam saja, tentu saja perang saudara akan meletus di provinsi-provinsi Perancis yang takkan bisa diredam oleh pemerintah kecuali dengan kekuatan militer yang besar. Semua penduduk di sana tahu bahwa Paus Leon XIII tidak memiliki daya dan kekuatan sedikit pun kecuali kekuatan dan pengaruh spiritual. Seandainya Paus mempunyai kekuatan sipil atau barisan pasukan perang yang sudah terlatih—sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu sebelum negara merebut itu semua dari Paus dengan disatukannya Italia dan sebelum kepemimpinan Roma dipegang oleh Viktor Immanuel—tentu saja Paus bisa berbuat lebih dari sekadar diam saja. Tentu akan terjadi peperangan antara Paus dan Perancis yang melibatkan dua pasukan tentara, pasukan Paus dan pasukan negara, sebagaimana peperangan-peperangan yang sebelumnya pernah berkobar antara Paus dan para raja di Eropa karena sebab yang serupa atau bahkan yang lebih remeh. Oleh karena itu, semua pemerintahan di Eropa sepakat untuk melawan Paus, melemahkan kekuatannya, dan memborgol tangannya agar tidak lagi mengintervensi urusan internal negara-negara mereka. Inilah yang wajib dilakukan terhadap kekuasaan agama.

Selain intervensi tangan asing terhadap urusan-urusan umat, ada hal lain yang juga tak kalah penting. Akal manusia diciptakan di atas dasar perbedaan dan ketidakseragaman. Renungkanlah! Apakah kalian pernah menemukan dua keluarga, dua orang, atau bahkan dua bersaudara yang memiliki pemikiran dan etika yang sama persis? Tidak! Dunia diciptakan atas dasar kemajemukan. Kemajemukan inilah yang

telah membuat dunia menjadi indah. Seandainya saja seluruh isi dunia ini sama dan tidak berbeda, tentu pasti akan sangat membosankan. Inilah yang oleh kaum filsuf diistilahkan sebagai “kemajemukan dalam bingkai kesatuan” (*al-tanawwu‘ fi al-wuhdah*). Dengan demikian, kemajemukan dan ketidakseragaman harus terdapat di dalam segala hal, orang, pemikiran, dan keyakinan. Demikianlah manusia dan akal mereka diciptakan. Orang yang menginginkan keseragaman mereka, sama seperti orang yang berharap pada kemustahilan. *Sekiranya Tuhanmu berkehendak, niscaya Dia telah menjadikan manusia satu umat*. Hal inilah yang menyebabkan keterpecahan Kristen menjadi Ortodoks, Katolik, Nestorian, Protestan, Koptik, dan sebagainya. Hal yang sama juga menjadi sebab keterpecahan Islam menjadi Ahlu Sunnah, Syiah, dan sebagainya. Semua aliran ini (di dalam Islam dan Kristen) muncul akibat perbedaan pemahaman, kepentingan, kebiasaan, dan moral-etika para penganutnya masing-masing. Setiap kelompok dari mereka ingin hidup bebas di negaranya dan memotong semua tangan asing yang mengintervensi urusan-urusan mereka. Lalu, bagaimana mungkin menyatukan aliran-aliran ini di bawah satu payung kepemimpinan tunggal?! Cara apa yang bisa ditempuh untuk menyatukan mereka semua?

Sejak kemunculan agama-agama hingga sekarang, manusia sebenarnya sudah berusaha mencari cara tersebut, meski pada akhirnya tidak menemukannya. Sebelumnya mereka mengira bahwa cara untuk menyatukan dan menyeragamkan semua aliran adalah “kekuatan”. Atas dasar itu, pada zaman dulu, kaum Katolik memerangi kaum Protestan dan menumpahkan darah mereka di hari Santo Bartolomeus, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Abduh. Atas dasar itu pula, Raja Louis XIV yang dijuluki Raja Agung (*Le Grand Monarque*) memerintahkan pengusiran semua penganut Protestan dari negeri jika mereka tidak mau meleburkan diri ke dalam Kristen Katolik. Saat itu, peradaban Inggris lebih maju beberapa langkah

ketimbang peradaban Perancis. Oleh sebab itulah kaum Protestan yang diusir oleh Raja Louis XIV, yang hampir semua dari mereka berasal dari kalangan pekerja, mengungsi dan meminta suaka perlindungan ke Inggris. Pertanyaannya kemudian, apakah Raja Louis XIV mengusir kaum Protestan dari kerajaannya karena faktor fanatisme keagamaan? Sama sekali Tidak! Faktor mendasarnya tak lain adalah politik—politik yang sangat dibenci oleh Muhammad Abduh. Politik-lah yang membuat Raja Louis XIV mengidamkan kesatuan agama. Ia menganggap bahwa kaum Protestan adalah ancaman serius bagi kerajaannya dan bisa membantu Inggris. Politik juga-lah yang membuat Raja Louis XIV mendirikan dewan penyelidikan di Spanyol untuk memerangi orang-orang yang berseberangan dengan Gereja. Jadi, kesatuan agama (atau politik) adalah tujuan tunggal dari semua peristiwa berdarah dan memilukan tersebut. Tak seorang pun menyangkal jika kalangan pemuka agama (Katolik) yang bodoh, saat itu, memaksudkan pembantaian mereka sebagai rasa haus mereka akan darah “orang-orang kafir”. Tetapi, bagi semua sejarawan yang melihat setiap persoalan secara berimbang, tujuan utama Gereja pada waktu itu tak lain adalah kesatuan agama. Sikap Gereja saat melihat prinsip-prinsip baru dan keragaman baru yang ada di hadapannya, kala itu, sama seperti sikap seseorang yang melihat banyaknya musuh di sekitar rumahnya, lalu khawatir akan masa depan diri dan rumahnya. Ia pun tidak mempunyai pilihan lain kecuali dua; memerangi musuh-musuhnya dan membinasakan mereka semua, atau pergi meninggalkan rumahnya untuk dimiliki dan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Pilihan terakhir ini tentu takkan pernah diambil oleh manusia, bahkan oleh malaikat sekali pun.

Apa yang terjadi di ranah agama Kristen, seperti yang telah kami paparkan barusan, juga terjadi di ranah agama Islam. Tapi, kami tidak akan menjelaskannya secara terperinci di sini. Kami hanya ingin mengatakan bahwa sebab utama kejatuhan dinasti Abbasiyah adalah

ketidakmampuannya menjaga “kesatuan” dinastinya melalui jalan agama dan keputusannya untuk membentengi diri dengan kesatuan lain, terlepas dari semua usaha yang telah dilakukan oleh Khalifah al-Ma'mūn. Mengingat negara-negara besar tidak akan mampu untuk tetap eksis kecuali dengan “kesatuan”, sementara kesatuan agama adalah sesuatu yang mustahil terjadi, maka sudah barang tentu dinasti Abbasiyah runtuh. Keruntuhan dinasti Abbasiyah ini menjadi petanda runtuhnya kejayaan bangsa Arab di muka bumi.

Demikianlah cara yang ditempuh oleh manusia pada zaman dulu, yaitu menaklukkan manusia melalui kesatuan agama yang coba diwujudkan dengan “kekuatan”. Dengan “kekuatan”, para raja dan penguasa membangun kepentingan dan kehidupan umat di atas pondasi kesatuan agama. Akan tetapi, hari ini, kemanusiaan telah maju dan berkembang pesat. Setelah sejumlah pengalaman masa lalu, baik yang berdarah maupun yang tidak, mereka mengambil kesimpulan bahwa bangunan di atas pondasi kesatuan agama adalah seperti bangunan di atas debu. Oleh sebab itu, agama disingkirkan (karena beberapa hal yang telah kami sebutkan di awal) dan kesatuan umat hendak dibangun di atas pondasi “kebangsaan” (nasionalisme, *al-wathaniyyah*). Inilah yang dilakukan oleh Perancis saat ini, hal mana yang kemudian menimbulkan gejolak hebat di berbagai daerah di Perancis. Perinciannya adalah sebagai berikut. Partai radikal dan partai sosialis, yang saat ini mendominasi pemerintahan republik Perancis (karena memang mereka adalah mayoritas di dewan perwakilan atau parlemen), berencana menutup semua sekolah agama yang ada di Perancis. Itu akan dilakukan dengan legitimasi peraturan baru yang telah diundangkan tahun lalu, dengan alasan bahwa sekolah-sekolah agama tidak diizinkan oleh pemerintah. Sebenarnya, tujuan hakiki partai radikal dan partai sosialis adalah menghapus dan menghilangkan semua sekolah agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa para pelajar di sekolah-sekolah agama—setelah

lulus—sangat membenci republik, kebebasan, dan selalu mengunggulkan pemerintahan otokrasi dan teokrasi. Oleh sebab itu, mereka selalu berseteru dan berselisih pendapat dengan kelompok pelajar di sekolah-sekolah negara (republikan). Ketika kedua kelompok ini tumbuh besar dan dewasa, keduanya seolah seperti dua kelompok yang saling tikam di dalam satu umat. Jadi, tujuan utama kaum republikan menghapus sekolah-sekolah agama adalah untuk menyatukan kedua kelompok tersebut dan mendidik keduanya di sekolah-sekolah publik-republikan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan agama dan politik. Di antara peraturan sekolah-sekolah ini adalah dilarangnya penyebutan agama secara mutlak di dalam materi semua pelajaran, karena kaum republikan bertekad memisahkan semua kepentingan dan kehendaknya dari segala hal berbau agama. Bahkan, presiden sendiri dilarang keras menyebut nama Tuhan atau meminta pertolongan Tuhan pada saat berpidato. Jika presiden sampai melanggar, kelompok ekstrim (yang juga merupakan penganut Kristen) akan menuduhnya telah menciderai kehormatan konstitusi yang sudah dipercayakan kepadanya. Inilah yang mereka sebut sebagai “netralitas”, yaitu bahwa agama tidak memiliki tempat sedikit pun di ranah negara, dan bahwa tempat agama hanyalah di ranah keluarga dan gereja. Tujuan utama dari pemisahan absolut ini adalah menghilangkan sebab-sebab pertikaian di antara umat sehingga mereka—melalui pondasi kebangsaan (nasionalisme)—bisa menjadi satu umat yang hanya menginginkan kemaslahatan negeri mereka.

Akan tetapi, cara baru yang ditempuh oleh pemerintahan sipil-sekular untuk membentuk kesatuan umat ini juga tak luput dari kecaman dan penentangan. Kaum republikan moderat menentang keras tindakan kaum republikan radikal dan republikan sosialis yang menekan para rahib dan melarang pendidikan mereka. Sebab, menurut kaum republikan moderat, tekanan dan pelarangan tersebut sama saja dengan menciderai hak dasar manusia, kebebasan warga

negara, dan kebebasan berpendidikan dan berkayakinan. Jika pemerintah sampai melakukannya maka pemerintah sama saja dengan pemerintahan teokrasi (agama) yang memaksa satu kelompok dari warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Masing-masing pihak (republikan moderat dan republikan radikal atau sosialis) memiliki dasar argumentasi sendiri-sendiri dalam menguatkan pandangannya. Dua tahun belakangan ini kami telah meneliti pandangan-pandangan kedua belah pihak di surat-surat kabar seperti *Le Figaro*, *Dés Débats*, dan lain-lain. Dan, kami tidak ingin masuk ke pembahasan ini karena memang bukan pada tempatnya.

Dari semua paparan di atas telah jelas, seluruh pertikaian yang terjadi di masa lalu dan juga di masa sekarang dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan politik. Dan, tujuan utama dari pertikaian-pertikaian tersebut adalah “membentuk kesatuan” dan melindungi umat berikut semua kepentingannya dari hal-hal baru yang mereka sebut sebagai “bid’ah”. Demikianlah sejarah semua agama dan semua umat. Karakter dan watak masing-masing umat tentu akan mempengaruhi cara-cara mereka dalam merealisasikan tujuan utama tersebut. Umat yang elemen-elemen dasarnya keras dan buas tentu akan menggunakan cara-cara kekuatan yang masif hingga di batas maksimalnya, sementara umat yang mempunyai karakter lebih lunak tentu akan menggunakan cara-cara yang lembut, sekalipun saat memakai kekuatan. Apabila kaum Kristen di Spanyol, kaum Barbar, dan elemen-elemen Barat di Andalusia, daerah Maghrib dan Masyriq telah melakukan tindakan-tindakan mengerikan yang hampir memberangus kemanusiaan, maka kami berada di garda depan dari orang-orang yang tidak mengharapkan tindakan-tindakan mengerikan tersebut dipraktikkan oleh semua orang Arab, semua penganut Islam, dan semua penganut Kristen. Sebab, syariat kemoderatan harus dimiliki oleh bangsa, umat, dan elemen yang saya berada di dalamnya.

Semua itu adalah persoalan psikologi-ekonomi, dalam arti bahwa semua tindakan-tindakan mengerikan tersebut banyak dipengaruhi oleh karakter, moral-etika, dan kepentingan umat.

Berpijak dari lima faktor yang menuntut pemisahan agama dan negara, seperti telah kami jelaskan secara gamblang di awal, kami ingin kembali menegaskan bahwa takkan ada peradaban hakiki, keadilan, persamaan, kesetaraan, keamanan, kasih-sayang, kebebasan, ilmu pengetahuan, filsafat, atau kemajuan dari internal umat kecuali dengan kebajikan kekuasaan agama. Dan, takkan ada eksistensi bagi negara-negara, kejayaan, dan kemajuan dari luar kecuali dengan memisahkan kekuasaan sipil-sekular dari kekuasaan agama. ■

Konsep Khilafah, Tinjauan Sosiologis (1925)²² ‘Ali ‘Abd al-Râziq

Doktrin Ijma’—Kemunduran ilmu politik di kalangan umat Islam—Perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan Yunani—Revolusi umat Islam terhadap sistem khilafah—Khilafah berbasis kekuatan militer dan pemaksaan—Islam agama kesetaraan dan kemuliaan—Khilafah, posisi prestisius yang menimbulkan kecemburuan besar terhadap pemegangnya—Khilafah, penindasan dan kezaliman—Tekanan berat terhadap kebangkitan ilmu pengetahuan dan politik—Jangan menerima doktrin Ijma’—Dalil terakhir mereka terkait konsep khilafah—Manusia butuh jenis hukum tertentu—Agama mengakui pemerintahan—Penyimpangan khilafah dalam Islam—Khilafah simbolis di Mesir—

Kesimpulan.

1. Dengan melandaskan diri pada kitab Allah dan sunnah rasul-Nya, mereka beranggapan bahwa kesepakatan bersama (ijma’) umat

22 Artikel ini diambil dari buku ‘Ali ‘Abd al-Râziq yang berjudul *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, (al-Mu’assasah al-‘Arabiyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr, 1972), hlm. 70—86.

Islam generasi pertama, setelah wafatnya Rasulullah SAW, menegaskan larangan tidak boleh tidak ada imam (pemimpin) di setiap waktu. Abu Bakar bahkan sampai berkata dalam sebuah pidato terkenal, sesaat setelah Nabi SAW wafat, “Ingatlah, Muhammad sudah wafat, dan agama ini harus memiliki seorang yang menegakkannya”. Semua sahabat kala itu langsung menerima Abu Bakar sebagai pemimpin dan menyerahkan ke tangannya satu persoalan paling penting, yaitu proses pemakaman jenazah Nabi SAW. Orang-orang, di masa itu dan hingga hari ini, masih meyakini keharusan untuk mengangkat seorang pemimpin panutan di setiap masa.²³

2. Kami menerima jika dikatakan bahwa ijma' termasuk dalil keagamaan. Kami tidak menentang kalangan yang berbeda pendapat dengan itu, lalu menerima pandangan bahwa ijma' pada dasarnya adalah sesuatu yang mungkin dilakukan dan ditetapkan.²⁴ Kami pun tidak menentang kalangan yang berpendapat bahwa orang yang mengklaim bahwa ijma' pasti bisa dilakukan adalah seorang pembohong. Adapun terkait doktrin ijma' dalam masalah ini (khilafah), kami tidak menemukan satu alasan pun untuk menerimanya, apapun alasan itu. Mustahil jika kami meminta mereka untuk bisa menghadirkan dalil argumentasi, sementara kami sendiri meyakini bahwa doktrin ijma' dalam

23 *Al-Mawâqif wa Syarhuh*, 'Ali 'Abd al-Râziq.

24 Beberapa pengikut aliran Rawâfith dan al-Nazhzhâm dari Mu'tazilah menolak konsepsi pemberlakuan ijma' dalam persoalan yang tidak penting. Dâwud dan sejumlah pengikutnya dari Zhâhiriyyah juga berpendapat serupa. Ahmad Ibnu Hanbal, dalam salah satu atau dua riwayatnya, menegaskan bahwa tidak ada ijma' kecuali oleh sahabat Nabi saw. Kalangan Zaydiyyah dan Imâmiyyah dari aliran Rawâfith juga menyatakan bahwa ijma' tidaklah sah kecuali dari keluarga Nabi Muhammad saw dan kerabat dekat beliau. Diriwayatkan dari Mâlik bahwa ia pernah berkata, “Tidak ada ijma' kecuali oleh penduduk Madinah.” Lihat; *Kasyf al-Asrâr* karangan 'Abd al-'Aziz al-Bukhârî, dan *Ushûl al-Imâmah* karangan Fakhr al-Islâm Abu al-Husayn 'Ali ibn Muhammad ibn Husayn al-Bazdadari ('Ali 'Abd al-Râziq).

masalah khilafah adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak pernah terdengar, baik yang dimaksud mereka adalah ijma' kalangan sahabat Nabi SAW saja, atau kalangan sahabat dan tabi'in, maupun semua kalangan agamawan Islam.

3. Penting dicatat, dalam sejarah gerakan keilmuan umat Islam, ilmu politik mendapatkan porsi terburuk jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Keberadaan ilmu politik di tengah-tengah mereka adalah yang terlemah. Kami belum pernah mendapati satu karya buku politik, baik berupa karangan sendiri maupun terjemahan, di lingkungan mereka. Kami pun belum pernah mendapati satu pembahasan terkait sistem-sistem pemerintahan atau dasar-dasar politik yang mereka cetuskan. Perhatian mereka terhadap disiplin ilmu politik sangatlah minim sekali jika dibandingkan terhadap disiplin ilmu-ilmu lainnya.
Ada beberapa faktor penting yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan penelitian mendalam terhadap ilmu-ilmu politik. Lembaran berikut akan mencoba menyelami itu semua.
4. Faktor terlemah dari faktor-faktor pendorong tersebut adalah keterpanaan mereka—melalui kecerdasan bawaan dan greget keilmuan yang dimiliki— terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan bangsa Yunani. Buku-buku Yunani yang mereka terjemahkan dan pelajari sudah cukup membuat mereka tergoda untuk menyelami ilmu politik. Ilmu politik sendiri adalah disiplin ilmu kuno. Banyak kaum filsuf Yunani terdahulu yang memiliki kedudukan tinggi di dalam disiplin ilmu filsafat, bahkan di dalam perjalanan hidup mereka.
5. Faktor lain yang lebih penting adalah bahwa kedudukan kekhalifahan Islam, semenjak khalifah pertama Abu Bakar hingga saat ini, selalu dirongrong oleh para pembangkang dan penentang

kekhalifahan. Sejarah Islam hampir tidak pernah mengenal satu khalifah pun tanpa memiliki pembangkang dan penentang. Tak ada satu generasi pun dari generasi-generasi terdahulu tanpa menyaksikan pertarungan-pertarungan perebutan kekuasaan. Memang benar bahwa barangkali itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi di setiap umat, di setiap agama, dan di setiap generasi. Tapi, kami tidak menyangka jika tidak ada satu umat pun yang bisa menyamai umat Islam dalam konteks itu. Penentangan mereka terhadap khilafah muncul ketika sistem khilafah juga muncul, dan tetap seperti itu selama khilafah masih ada.

Gerakan penentangan (oposisi) tersebut merupakan sejarah besar yang layak untuk diungkap. Oposisi terkadang mengambil bentuk kekuatan besar dan tersistem rapi, seperti praktik kelompok Khawarij di masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib. Oposisi terkadang juga mengambil bentuk kekuatan besar, namun bergerak dengan sistem bawah tanah alias tersembunyi, seperti praktik kelompok *ittihâd* dan *taraqî*. Gerakan oposisi terkadang sangat lemah di satu kesempatan sampai-sampai tak tercium keberadaannya, tapi kemudian menguat hebat di kesempatan lainnya sampai sanggup mengguncang singgasana para raja. Gerakan oposisi mungkin saja melakukan aksi riil dan nyata jika keadaan memungkinkan, dan mungkin juga melakukan gerakan keilmuan dan keagamaan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Bentuk gerakan opisisi—yang bergerak di bidang keilmuan dan keagamaan—akan meneliti sistem hukum, menganalisa sumber-sumber dan aliran-alirannya, mengkaji berbagai konsep pemerintahan berserta segala sesuatu yang terkait dengannya, lalu mengkritik sistem kekhalifahan hingga masalah-masalah terpelik di dalam disiplin ilmu politik. Tak perlu disangsikan lagi, bangsa Arab adalah yang paling berhak atas disiplin ilmu ini dan yang paling mumpuni dalam menguasainya.

6. Mereka (bangsa Arab) tidak bingung ketika berhadapan dengan ilmu politik dan tidak gentar atau memilih mundur dalam keadaan menyesal sebelum melakukan penelitian atasnya. Mereka pun tidak mengesampingkan penelaahan terhadap buku *Republic*-nya Plato dan buku *Politics*-nya Aristoteles. Mereka bahkan menaruh kekaguman luar biasa pada sosok Aristoteles sampai-sampai menjulukinya dengan predikat Sang Guru Pertama (*al-mu'allimm al-awwal*). Mereka tidak mau membiarkan umat Islam buta akan prinsip-prinsip politik dan jenis-jenis pemerintahan yang sudah lama dipelajari oleh bangsa Yunani. Mereka pun mengonsepsikan konsep-konsep Suryani di dalam ilmu gramatika bahasa Arab (*nahwu*) bagi umat Islam, mengajarkan pendidikan akhlak Baidabâ' asal India di kitab *Kalilah wa Dimnah* kepada mereka, dan bahkan menyisipkan ke dalam ilmu-ilmu keagamaan mereka konsep baik-buruk dan konsep iman-kafir versi filsafat Yunani. Pengabaian ulama kita terhadap ilmu politik dengan lebih memperhatikan ilmu-ilmu lainnya sebenarnya bukan disebabkan karena mereka lupa terhadap ilmu politik atau karena tidak mengetahui urgensinya, tetapi karena sebab-sebab lain yang akan kami paparkan di lembaran berikutnya kepada pembaca.
7. Bagi umat Islam, khilafah pada dasarnya dirujukkan pada hak pilih *ahl al-hill wa al-'aqd*.²⁵ Sebab, kepemimpinan (*al-imâmah*) adalah sebuah kontrak kesepakatan (akad) yang dilakukan dengan cara baiat oleh *ahl al-hill wa al-'aqd* terhadap orang yang mereka pilih sebagai pemimpin umat, setelah sebelumnya mereka mengadakan musyawarah terlebih dahulu.²⁶

25 Ibnu Khaldûn, *Muqaddimah*, (Ali Abd al-Râziq)

26 Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Khilâfah*, hlm. 24, 25. (Ali Abd al-Râziq)

Hal itu mungkin bisa mengandung pengertian bahwa khilafah, di dalam bangunan umat Islam, berdiri di atas asas baiat selektif (*al-bay'ah al-ikhtiyâriyyah*) dan berpusat pada keinginan *ahl al-hill wa al-'aqd* yang berasal dari kalangan umat Islam. Mungkin saja dan masuk akal jika di dunia terdapat khilafah dalam pengertian seperti ini. Tetapi, faktanya, ketika merujuk pada sejarah dan realitas, kita hanya akan mendapati bahwa khilafah di dalam Islam tidaklah berdiri kecuali di atas asas kekuatan mengerikan—yang di hampir semua kesempatan berupa kekuatan bersenjata dan pemusnah, kecuali di sedikit kesempatan saja.

Dalam meraih posisinya, seorang khalifah tidak dikelilingi kecuali oleh tombak dan pedang, pasukan penghancur dan tragedi mengerikan. Dengan ini semua, pusat kekuatannya bisa tenang dan dirinya bisa menduduki kursi khalifah.

Mungkin mudah untuk menyanggah pandangan bahwa tiga khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, misalnya, meraih posisinya sebagai khalifah dengan asas kekuatan materiil dan pembangunannya di atas pondasi penaklukan dan pemaksaan. Akan tetapi, jauh lebih mudah untuk meragukan pandangan bahwa Ali dan Mu'awiyah tidak menduduki kursi khalifah kecuali di bawah tebasan pedang dan di atas lemparan tombak; begitu pun dengan khalifah-khalifah berikutnya hingga sekarang. Sultan Mehmed V, penguasa Turki Ottoman, takkan tinggal di pengasingan jika bukan karena tentara militer telah merampas istananya, merebut kursi singgasananya, dan membelot lalu menentanginya.

Kami tidak pernah meragukan sedikit pun jika penaklukan selalu menjadi tiang penyangga khilafah. Sejarah tidak pernah menyebut seorang khalifah pun kecuali terbayang di benak kita kengerian banjir darah yang mengitarinya, kekuatan penghancur yang menaunginya, dan pedang-pedang terhunus yang mengikutinya.

Seandainya saja tidak diperlukan penjelasan yang panjang lebar, kami tentu akan menyebutkan setiap fase dari semua fase kekhalifahan di dalam Islam sehingga bisa terlihat jelas bahwa di setiap arenanya terdapat cetak biru kekerasan dan penaklukan, bahwa apa yang disebut dengan tahta tidaklah berdiri tegak kecuali di atas kepala manusia dan tidaklah bisa bertahan kecuali di atas leher mereka, dan bahwa apa yang disebut dengan mahkota tidaklah memiliki kehidupan kecuali dengan mengambil paksa kehidupan manusia. Tidak ada kekuatan kecuali dengan membunuh kekuatan mereka, tidak ada kemuliaan dan keagungan bagi khalifah kecuali dengan merampas kemuliaan dan keagungan mereka—seperti malam panjang yang dicuri oleh waktu subuh secara paksa. Kilatannya adalah kilatan pedang dan bara peperangan.

Beberapa periode sejarah mencatat bahwa kekuatan bersenjata, yang merupakan tiang penyangga khilafah, tidak tampak secara riil dan tidak terendus oleh masyarakat banyak. Tapi, jangan pernah sekali pun mengira jika itu benar. Kekuatan bersenjata tersebut benar-benar ada dan riil, satu kekuatan yang menjadi basis inti kedudukan khalifah. Hanya saja, beberapa periode kekhalifahan terkadang tidak memerlukan kekuatan ini sehingga tidak menggunakannya. Bersembunyiya kekuatan ini dalam waktu yang lama membuat banyak orang kemudian sering melupakannya, bahkan sebagian dari mereka menganggapnya tidak ada. Yang jelas, kerajaan tak lain merupakan penaklukan dan pemerintahan berunsur kekerasan, seperti dikatakan oleh Ibnu Khaldūn; kerajaan adalah tentara dan pasukan, seperti dikatakan oleh Anusyrwan; dan kerajaan adalah sistem yang ditopang oleh tentara, seperti dikatakan oleh Aristoteles.

8. Adalah sesuatu yang lumrah jika kerajaan di setiap umat tidak bisa berdiri kokoh kecuali di atas penaklukan dan kekerasan.

Kerajaan adalah sebuah posisi prestisius dan menggiurkan, meliputi semua kenikmatan duniawi, syahwat ragawi, dan kepuasan diri. Hampir di semua kesempatan terjadi persaingan dan pertarungan sengit dalam memperebutkannya. Hanya sedikit orang saja yang sukarela menyerahkan posisi itu ke tangan sahabatnya tanpa perang. Adalah sesuatu yang juga wajar jika di dalam umat Islam, dalam lingkup khusus, tidak ada satu pun kerajaan kecuali didirikan dengan hukum penaklukan dan kekerasan. Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan kepada umatnya pemikiran tentang persaudaraan dan persamaan saja, atau hanya menanamkan ke benak mereka satu pandangan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama seperti gigi-gigi sisir, bahwa budak yang menjadi tangan kanan mereka adalah saudara seagama, dan bahwa sebagian kaum mukmin itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Islam tidak hanya mengajarkan pandangan teoritis *an sich* seperti ini saja. Tapi, Islam juga mengajarkan umatnya untuk bertindak nyata dan praksis, mendidik mereka dengan aturan-aturan, melatih mereka dengan latihan-latihan rill, mensyariatkan kepada mereka sejumlah hukum yang berasaskan persamaan dan persaudaraan, serta menuntun mereka pada ragam realitas dan kejadian nyata sehingga mereka bisa merasakan persaudaraan dan menyentuh persamaan. Rasulullah SAW pun tidak meninggalkan diri mereka kecuali setelah menancapkan agama Islam di hati mereka dan meresapkan pandangan-pandangan teoritis tersebut ke dada mereka. Negara mereka juga takkan berdiri kecuali ketika salah seorang dari mereka menyeru khalifahnyanya di atas mimbar, “Jika sampai ada penyimpangan yang engkau lakukan, kami pasti akan meluruskannya dengan pedang-pedang kami.” Adalah lumrah dan wajar jika di antara mereka (umat Islam) terdapat orang-orang yang menganut kebebasan berpendapat,

mempraksiskan aliran-aliran secara konkrit, memilih tidak tunduk selain kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, bermunajat kepada Tuhan demi tegaknya keyakinan mereka tersebut di setiap hari minimal sebanyak tujuh belas kali dalam shalat lima waktu. Adalah lumrah dan wajar jika di antara umat Islam terdapat orang-orang yang abai dan memilih tunduk pada salah satu dari mereka atau dari selain mereka. Dan, ketundukan yang dituntut oleh para raja dari rakyatnya tak lain hanyalah ketundukan terhadap kekuatan dan kepasrahan terhadap hukum pedang.

Oleh sebab itu, kami menyebutkan di awal bahwa khilafah di dalam Islam tidaklah bersandar kecuali pada asas kekuatan mengerikan, dan bahwa kekuatan tersebut—kecuali di sedikit kesempatan saja—berupa kekuatan materiil bersenjata.

Tidak terlalu susah bagi kami untuk mengetahui semua rahasia di balik persoalan itu. Barangkali rahasianya adalah apa yang telah kami sebutkan barusan. Barangkali juga ada sebab-sebab lain yang tidak kami sebutkan. Tapi, dalam konteks ini, yang membuat kami sedikit susah adalah memastikan kepada pembaca semua bahwa kebersandaran khilafah pada kekuatan bersenjata adalah sebuah realitas, benar-benar terjadi, dan tak diragukan lagi. Susah juga bagi kami untuk mengetahui apakah realitas yang kasat mata tersebut bisa diterima oleh akal atau tidak, dan sesuai dengan hukum-hukum agama atau tidak.

Tegaknya khilafah di atas asas kekuatan dan pemaksaan tidak memiliki makna lain kecuali bahwa khilafah akan memburu orang yang mengusik kedudukannya atau memusuhinya, dan akan menyiapkan pedang bagi orang yang mencoba menyentuh kerajaan dan merobohkan tiang-tiang penyangganya.

Pembaca mungkin bisa memahami, misalnya, kisah seputar pembaiatan Zayd. Saat pesta merayakan pengangkatan Zayd sebagai khalifah, salah seorang pendukungnya berdiri dan

mengatakan beberapa kata yang takkan mungkin terlupakan—bagi orang yang memiliki ketajaman pikiran. Ia berkata, “Amirul Mukminin adalah ini” sambil mengacungkan tangannya yang memegang pedang.

9. Segala sesuatu yang diambil dan dilindungi dengan tajamnya pedang akan menjadi kebanggaan diri yang sangat luar biasa, yang tidak mudah dinegosiasasi, dan tidak boleh diusik sedikit pun oleh siapapun. Posisi penguasa dan sultan adalah sebuah kebanggaan diri, meskipun itu diraih bukan dengan pedang. Logikanya, jika posisi seperti itu didapat melalui jalan kekuatan dan penaklukan maka kebanggaan diri atasnya akan semakin kuat, perlawanan untuk mempertahankannya akan jauh lebih besar dan keras, nafsu terhadapnya akan jauh lebih berkobar ketimbang nafsu terhadap harta dan kehormatan, serta kecintaan atasnya akan jauh melebihi kecintaan terhadap seluruh isi dunia.
10. Jika di kehidupan dunia ini terdapat sesuatu yang mendorong seseorang melakukan penindasan dan kezaliman, yang mudah memicu permusuhan dan kelaliman, maka itu adalah posisi khalifah. Pembaca sudah melihat bagaimana posisi khalifah menjadi sesuatu yang paling menggiurkan dan membanggakan. Jika cinta yang berlebihan berpadu dengan nafsu yang berkobar-kobar, lalu keduanya ditopang oleh kekuatan besar, maka sudah bisa dipastikan bahwa yang akan terjadi adalah kekerasan dan hukum pedang.
Biarkan semua pemaparan kami di awal menjadi kaedah-kaedah umum dan teori-teori belaka, dan ambillah realitas-realitas sejarah konstan di *lauh al-mahfūzh*.
Bukankah karena cinta khilafah, nafsu merengkuhnya dan kekuatan melimpah yang telah membuat Yazīd ibn Mu‘awiyah

menghalalkan darah Husayn ibn Fâthimah binti Rasulullah saw?! Bukankah karena faktor-faktor itu yang membuat Yazîd ibn Mu'awiyah terdorong untuk menguasai ibu kota kekhalifahan pertama dan kemudian menginjak-injak kehormatannya, padahal itu adalah kota Nabi SAW?! Apakah Abdul Malik ibn Marwân menduduki Baitullah bukan karena kecintaannya terhadap khilafah, nafsunya untuk merengkuhnya, dan kekuatan besar yang dimiliki dirinya?!

Apakah bukan karena faktor-faktor itu Abu al-'Abbâs 'Abdullâh ibn Muhammad ibn Ali ibn 'Abdillâh ibn al-'Abbâs berubah menjadi *al-saffâh* (sang penumpah darah)?! Tak ada apapun kecuali hanya darah umat Islam, dan tidak ada Bani Umayyah kecuali dari darah kerabatnya sendiri.

Bani Abbasiyah juga saling menyembelih dan menyelakai satu sama lain. Begitu pun dengan Bani Sabaktekin. Shâlih Najmuddîn al-Ayyûbî juga memerangi saudaranya yang adil, Abu Bakr ibn al-Kâmil, lalu melengserkan dan memenjarakannya. Negara Mamalik dan Jarâkisyah pun dipenuhi dengan pelengseran paksa dan pembunuhan. Semua itu tak lain disebabkan oleh cinta khilafah, nafsu merengkuhnya, dan kekuatan pemaksa yang berada di belakang keduanya. Hal yang sama juga terjadi di negara Ibnu Utsmân (Turki Ottoman).

11. Nafsu kekuasaan akan membuat raja berusaha menjaga tahtanya dari segala sesuatu yang mungkin bisa mengguncang tiang-tiang penyangganya, atau menciderai kewibawaannya, atau mengurangi kesuciaannya. Oleh karena itu, wajar jika seorang raja berubah menjadi buas, penumpah darah, dan setan pembangkang ketika tangannya berlumuran darah orang-orang yang mencoba membangkangnya dan mengusik kursinya. Wajar juga jika seorang raja akan berubah menjadi musuh besar bagi

setiap pembahasan yang mungkin bisa menyentuh tiang-tiang penyangga kerajaannya atau menghembuskan angin kebencian terhadap dirinya, meski angin itu jauh.

Dari sinilah, setiap kali ada kesempatan, muncul tekanan kerajaan terhadap kebebasan ilmu pengetahuan dan penindasan atas lembaga-lembaga pendidikan. Dan, tak diragukan lagi, ilmu politik adalah disiplin ilmu yang paling berbahaya bagi kerajaan karena mengungkap jenis-jenis pemerintahan, karakteristik-karakteristiknya, sistem-sistemnya, dan seterusnya. Oleh sebab itu, para raja dan penguasa pasti akan terus memusuhi disiplin ilmu ini dan menyumbat alirannya ke tengah-tengah rakyat.

Itulah penafsiran dari sebab kemunduran kebangkitan Islam di ranah ilmu politik beserta cabang-cabangnya, kevakuman penelitian-penelitian terhadapnya oleh gerakan keilmuan umat Islam, dan keengganan ulama untuk menyentuhnya seperti menyentuh disiplin-disiplin ilmu lainnya.

12. Kami tidak heran—dan pembaca pun sudah tahu—dengan lemahnya gerakan keilmuan politik di kalangan umat Islam dan mundurnya kondisi politik mereka. Tapi, yang mengherankan, disiplin ilmu politik tetap tidak mati di lingkungan mereka dan tidak bisa dimusnahkan semuanya. Yang sungguh sangat mengherankan lagi, di tengah-tengah tekanan keras dan kekuatan buas dari pihak kerajaan-kerajaan, sejumlah pembahasan seputar disiplin ilmu politik masih bisa bergema di majlis-majlis ilmu dan masih bisa sampai ke tangan sedikit ulama, di samping pendapat politik yang tidak sejalan dengan kemauan penguasa dan raja yang masih bisa ditemui.

Seandainya saja kami mau menjelaskan tekanan-tekanan kekuasaan Islam terhadap disiplin ilmu politik, setiap gerakan politik atau kecenderungan politik, pasti lembaran ini takkan

pernah cukup untuk mengungkap semuanya sehingga kami pun tidak bisa memaparkannya secara utuh. Tapi, kami sudah menyebutkannya secara global dan semoga persoalan ini bisa disentuh di pembahasan selanjutnya.

Sekarang kita kembali lagi ke poin semula, poin tentang pernyataan mereka bahwa, “Umat telah sepakat perihal pengangkatan imam (pemimpin), dan kesepakatan (*ijma'*) mereka tersebut menunjukkan bahwa status hukumnya adalah wajib.”

Apabila sebuah umat di satu masa bersikap diam atas pembaiatan seorang imam maka itu dinamakan *ijma' sukūti* (kesepakatan yang diperoleh dengan persetujuan melalui sikap diam). Bahkan, apabila seluruh komponen umat di satu masa nyata-nyata turutserta dalam proses pembaiatan seorang imam, lalu mereka semua mengakuinya, maka itu dinamakan *ijma' sharīh* (kesepakatan yang jelas dan diperoleh melalui keterlibatan setiap kepala di dalam umat). Akan tetapi, apabila itu disodorkan kepada kami, kami menolak jika itu dikatakan sebagai *ijma' haqīqi* (kesepakatan yang sesungguhnya). Kami pun pasti akan menolak untuk mengambil darinya sebuah hukum agama dan menolak menganggapnya sebagai hujjah (dalil argumentatif) keagamaan. Pembaca pasti sudah mengetahui kisah Yazīd ibn Mu'awiyah, bagaimana proses baiat yang dilakukan, dan bagaimana terjadi perampasan keputusan di dalamnya.

Kisah Yazīd ibn Mu'awiyah mengingatkan kami akan kisah Faishal ibn Husayn ibn Ali. Ayahnya, yaitu Husayn ibn Ali, merupakan salah satu pemimpin Arab yang berpihak kepada sekutu di Perang Dunia, membelot dari Turki, dan menentang sultan Turki yang merupakan khalifah umat Islam. Anak-anak Husayn di negara Arab dan di negara-negara sekitarnya bahu-membahu membantu dan memenangkan pasukan sekutu, lalu mempermalukan pasukan musuh dan Jerman. Salah satu anak Husayn,

yaitu Faishal, memiliki kedekatan dengan Inggris karena loyalitas dan bantuannya yang besar terhadap pasukan Inggris. Sebagai balas budi, Inggris kemudian menyerahkan wilayah Syam kepada Faishal dan mengangkatnya sebagai raja di sana. Tapi, belum lama menjadi raja, kerajaannya sudah diserang dan dihancurkan oleh bala pasukan Perancis. Faishal pun kabur melarikan diri, meninggalkan kerajaan dan tahtanya, hingga akhirnya sampai di wilayah Inggris. Dari sana, Inggris melakukan agresi terhadap negara Irak, lalu kembali menempatkan Faishal sebagai penguasa di sana. Inggris menyatakan bahwa *ahl al-hill wa al-'aqd* Irak telah memilih Faishal sebagai raja melalui mekanisme *ijma'*. Hanya saja, itu ditentang oleh segelintir orang yang tak diperhitungkan, yang pernah disebut oleh Ibnu Khaldūn sebagai penyimpang (*syawwâdz*).

Demi hidupmu, Inggris tidaklah berbohong. Mereka benar-benar telah melangsungkan pemilihan yang bebas dan sesuai dengan undang-undang. Saat itu, Inggris sudah meminta pendapat kalangan pembesar negeri Irak yang akhirnya memutuskan memilih Faishal sebagai pemimpin mereka.

Tetapi, tak perlu diragukan juga bahwa “hal” yang digunakan oleh para pendukung Yazīd ibn Mu'awiyah dalam proses pembaiatannya adalah “hal” yang juga digunakan oleh Inggris dalam memunculkan kesepakatan masyarakat Irak atas kepemimpinan Faishal. Apakah itu bisa dinamakan *ijma'*?

Jika itu bisa dinamakan *ijma'* sebagaimana anggapan mereka, kenapa kalangan Khawarij sampai menegaskan bahwa mengangkat imam pada dasarnya tidaklah wajib, sebagaimana juga diutarakan oleh al-Ashamm dari kalangan Mu'tazilah dan beberapa orang lainnya?! Dalam konteks ini, sebagai penyangkalan atas klaim *ijma'*, kami memilih sejalan dengan penentangan

al-Ashamm dan Khawarij, dan sepakat dengan pernyataan Ibnu Khaldūn yang menyebut mereka sebagai penyimpang.

13. Pembaca mungkin sudah tahu jika Al-Qur'an tidak pernah menyinggung atau menyebut perihal khilafah, begitu pun dengan sunnah Nabi SAW. Ijma' juga tidak pernah membakukannya. Apakah mereka masih memiliki dalil keagamaan lain selain Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'?

Ya, mereka masih memiliki satu dalil lagi sebagai dalil terakhir sekaligus dalil terlemah yang mereka miliki.

Mereka mengatakan bahwa khilafah menjadi harga mati bagi tegaknya syariat agama, terwujudnya kemaslahatan rakyat, dan seterusnya.

14. Satu hal yang pasti disepakati oleh kalangan pakar ilmu politik ialah keharusan adanya jenis pemerintahan tertentu di dalam sebuah umat yang beradab, baik umat yang memiliki agama maupun yang tidak, baik memeluk agama Islam, Kristen, Yahudi, maupun ateis. Di dalam sebuah umat—apapun keyakinan, bangsa, warna kulit dan bahasanya—harus ada pemerintahan yang mengatur urusan mereka. Bentuk pemerintahan di tiap-tiap umat mungkin berbeda-beda; ada yang konstitusional, diktatorial, republik, komunis, dan sebagainya. Para pakar ilmu politik berbeda pendapat seputar definisi dari masing-masing jenis pemerintahan tersebut. Tapi, kami tidak pernah mendapati salah satu pun dari mereka atau orang lain yang menentang pendapat bahwa sebuah umat harus mempunyai jenis pemerintahan tertentu. Dalam konteks ini, mereka tentu memiliki alasan-alasan argumentatif yang tidak mungkin kami jelaskan secara mendetail di lembaran-lembaran ini.

Yang jelas dan tak perlu disangsikan lagi adalah bahwa pendapat mereka itu benar, bahwa manusia tentu tidak menginginkan kekacauan dan huru-hara. Barangkali pendapat inilah yang dimaksudkan oleh Abu Bakar dalam pernyataannya sesaat setelah Nabi saw wafat, sebagaimana telah kami singgung di awal, “Agama ini harus memiliki seorang yang menegakkannya.” Barangkali Al-Qur’an juga mengisyaratkan hal yang sama di beberapa ayatnya.

Allah swt berfirman, *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami-lah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan beberapa derajat sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, agar sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (Al-Zukhruf [43]: 32)

Allah swt berfirman, *Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang fasik.* © Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikanmu satu umat saja, tetapi Allah hendak mengujimu melalui karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. © Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayaimu terhadap sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa sebagian dari mereka. Dan sungguh, sebagian manusia adalah orang-orang fasik. © Apakah hukum Jahiliah yang

mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?²⁰ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nashrani sebagai teman setiamu; mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. (Al-Mâ'idah [5]: 47-51)

15. Dari sini mungkin bisa dikatakan, “Umat Islam, jika dimaknai sebagai satu komunitas yang berdiri sendiri, sebagaimana umat-umat lain di dunia, membutuhkan pemerintahan yang mengontrol dan mengatur urusan-urusan mereka.”

Jika imamah dan khilafah yang dimaksudkan oleh kalangan fukaha itu adalah yang juga dimaksudkan oleh kalangan pakar politik terkait makna pemerintahan, maka itu tentu bisa dibenarkan. Artinya, tegaknya syariat-syariat keagamaan dan terjaminnya kemaslahatan rakyat bergantung penuh pada khilafah dalam arti pemerintahan, apapun bentuk dan jenisnya; absolut atau parlementer, otokrasi atau republik, dikatatorial atau konstitusional, demokrasi, sosialis atau komunis. Akan tetapi, jika imamah dan khilafah yang dimaksud adalah jenis tertentu dari pemerintahan yang mereka ketahui, maka dalil mereka jauh lebih dangkal ketimbang doktrin dan klaim mereka, selain alasan argumentatif (hujjah) mereka tidak mengenai sasaran.

16. Fakta konkrit yang dikuatkan oleh akal dan disaksikan oleh sejarah—dulu dan sekarang—mengatakan bahwa syariat-syariat Allah SWT dan implementasi-implementasi agama-Nya tidaklah bergantung penuh pada jenis pemerintahan yang oleh kalangan fukaha dinamakan khilafah, dan tidak pula bergantung penuh pada orang-orang yang diberi gelar khalifah. Fakta konkrit lainnya juga mengatakan bahwa kemaslahatan umat Islam di

dunia tidaklah bergantung penuh pada sesuatu pun dari itu semua. Jadi, kita tidak membutuhkan khilafah untuk urusan agama dan dunia kita. Seandainya dibolehkan, kami akan berkata lebih keras lagi. Khilafah—dulu dan sampai saat ini—adalah tragedi bagi Islam dan umat Islam, juga sumber keburukan dan kerusakan. Mungkin pernyataan keras ini akan kami jelaskan di lembaran-lembaran yang akan datang. Kali ini kami hanya akan menjelaskan realitas dan fakta konkrit bahwa agama dan dunia kita tidak membutuhkan khilafah dalam pengertian fikih.

17. Pembaca sekalian mungkin sudah tahu pernyataan Ibnu Khaldûn ini, “Khilafah dan jejak-jejaknya telah hilang bersama hilangnya kesukuan (fanatisme) bangsa Arab, musnahnya generasi mereka, dan tercerai-berainya kondisi kehidupan mereka. Yang tersisa hanya kerajaan belaka, sementara khalifah tidak memiliki kuasa apa-apa.” Apakah pembaca sekalian sudah tahu jika hal itu telah menggoyahkan tiang-tiang agama dan menghilangkan kemashlahatan umat Islam, yaitu pada tataran di mana semua itu mungkin bisa diperbaiki oleh khilafah seandainya saja ada?!

Sejak pertengahan abad 3 Hijriah, khilafah Islam di Baghdad sudah mulai terserak dan menjadi kepingan-kepingan kecil *hatta* tidak lebih dari kawasan sempit di antara dua lembah di sekitar Baghdad. Khurasan dan daerah di belakang sungai menjadi milik Ibnu Sâ mân dan dilanjutkan oleh keluarganya, Bahrain menjadi milik Qarâmithah, Yaman menjadi milik Ibnu Thabâthabâ, Isfahan dan Persia menjadi milik Bani Buwaih, Bahrain dan Oman menjadi milik salah satu keluarga Bani Qarâmithah, Ahwâz dan Wâsith menjadi milik Ma'izz al-Dawlah, Halb menjadi milik Sayf al-Dawlah, Mesir menjadi milik Ahmad ibn Thûlûn dan lalu menjadi milik raja-raja yang berhasil menaklukan dan merebutnya, seperti

Ikhsyīdiyyīn, Fathimiyyīn, Ayyūbiyyīn, Mamalik, dan seterusnya.²⁷ Ketika itu semua terjadi, agama di Baghdad tidak menjadi lebih baik jika dibanding di negara-negara lain yang memisahkan diri dari khilafah. Begitu pun dengan syariat-syariat agama yang juga tidak menjadi lebih semarak. Dunia di Bagdad pun tidak menjadi lebih baik, begitu juga kesejahteraan dan kemashlahatan rakyat.

18. Khilafah Abbasiyah benar-benar telah menguap dari Baghdad pada pertengahan abad 7 Hijriah setelah diserang dan dikalahkan oleh pasukan Tartar. Khalifah Baghdad saat itu, al-Musta'shim Billāh juga dibunuh bersama seluruh anggota keluarganya dan pejabat-pejabat tinggi khilafah. Setelah itu, selama tiga tahun, Islam pun tanpa khilafah.²⁸
19. Saat itu, kerajaan di Mesir dipegang oleh al-Zhāhir Baybars. Karena beberapa alasan, Baybars meneliti dan mengambil pelajaran dari keruntuhan Bani Abbasiyah di Baghdad. Sultan Baybars kemudian mendapati seorang laki-laki yang oleh khalayak banyak saat itu dianggap sebagai salah satu orang penting di Khilafah Abbasiyah yang masih hidup. Baybars pun lantas membaikinya sebagai khalifah dan membuatnya istana khilafah di Mesir. Hanya saja, pucuk pimpinan Mesir yang sesungguhnya tetap berada di tangan Sultan Baybars. Ia memegang kunci semua pintu masuk dan pintu keluar dari dan ke Mesir, membuat simbol-simbol sejumlah khalifah umat Islam, dan menuntun umat Islam untuk mengagung-agungkan kemuliaan para khalifah tersebut. Baybars mengatur semua gerak kehidupan rakyat Mesir saat

27 *Tārīkh al-Khulāfā'*, diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Nakhlah Bik Shālih Syafrāt, hlm. 64 dan setelahnya.

28 *Tārīkh al-Khulāfā'*, hlm. 27.

itu, menentukan tempat tinggal mereka dan bagaimana mereka berbicara. Kondisi serupa terus berlangsung setelah kekuasaan Baybars berakhir dan berpindah ke raja-raja Jarâkisah, hingga kemudian khilafah di Mesir direbut dan diambil-alih oleh para raja dinasti Utsmani pada tahun 923 Hijriah.

Apakah kemashlahatan agama dan dunia bagi umat Islam—meskipun hanya sedikit—bisa didapatkan pada monumen-monumen lumpuh seperti itu, yaitu monumen raja-raja Mesir yang diberi gelar khalifah oleh umat, atau bahkan pada patung-patung yang mereka gerakkan dan binatang-binatang yang mereka tundukkan?! Lalu, bagaimana kabar negara-negara Islam selain Mesir yang melepaskan diri dari simpul khilafah, yang menentukan sendiri kekuasaannya, yang hidup—dan masih banyak yang tetap hidup—jauh dari bayang-bayang khilafah dan dari ketundukan pagan terhadap kemuliaan agama yang dimaksud?! Apakah pembaca sekalian melihat syariat-syariat keagamaan di negara-negara non-khilafah itu terabaikan dan urusan-urusan rakyat terpinggirkan?! Apakah dunia mereka langsung berubah menjadi gelap setelah bintang khilafah jatuh dan hilang dari mereka?! Apakah rahmat bumi dan langit langsung lenyap dari mereka setelah mereka memisahkan diri khilafah?! Jawabannya, tidak!

Mereka telah hilang, dan dunia tidak menanggapi kematian mereka. Perayaan-perayaan dan orang-orang juga tidak berhenti berdetak.

20. Mohon perlindungan kepada Allah SWT. Allah SWT tidak menghendaki agama ini, satu agama yang dijamin-Nya akan tetap abadi (Islam), memiliki kemuliaan dan kehinaan yang tergantung penuh pada jenis pemerintahan tertentu atau model pemimpin tertentu. Allah SWT juga tidak menghendaki kemaslahatan dan kebinasaan umat Islam digantungkan di atas khilafah atau di bawah rahmat para khalifah. Allah SWT adalah sebaik-baik Dzat

yang akan memelihara agama-Nya dan merahmati hamba-hamba-Nya.

Tentu saja susah bagi pembaca sekalian untuk menerima apa yang telah kami paparkan di awal, yaitu bahwa apa yang mereka klaim sebagai khilafah atau imamah pada dasarnya tidaklah berdiri di atas landasan agama yang lurus atau akal yang selamat, dan bahwa apa yang mereka anggap sebagai dalil argumentatif (*burhân*) itu bukanlah dalil argumentatif.

Sekarang, pembaca sekalian mungkin berhak bertanya tentang pandangan kami seputar konsep khilafah dan bangunannya, dan kami pun wajib menjelaskannya—tentu saja dengan meminta pertolongan, hidayah, dan taufik dari Allah SWT.

Bab V

Demokrasi

Dunia Arab mengenal sejumlah perdebatan sengit seputar tema demokrasi. Sebagian berpendapat bahwa demokrasi adalah konsep Barat yang mustahil dipraktikkan di negara Arab dan bahwa mengimpor demokrasi adalah sesuatu yang berbahaya bagi peradaban Arab. Ini ditambah dengan pandangan bahwa pengimporan demokrasi dilakukan bersama upaya negara Barat dalam menelurkan konsep demokrasi melalui kekuatan ke dunia Arab, hal mana yang telah menjadikan pemikiran tentang demokrasi sebagai sebuah metode dalam mendekati kawasan yang mempunyai tradisi-tradisi lain selain demokrasi.

Tetapi, di sisi lain, kalangan reformis Arab terus berupaya menancapkan peran rakyat di dalam urusan-urusan pemerintahan, di samping terus mengembangkan pemikiran-pemikiran Arab seputar demokrasi. Mungkin kita bisa memilah tiga aliran terkait upaya mempraktikkan demokrasi di negara-negara Arab. *Pertama*, penerapan demokrasi seutuhnya di negara-negara Arab karena itu sudah terbukti memiliki banyak manfaat di Barat.

Kedua, penerapan demokrasi di dalam kerangka Islam. Pendukung pendapat ini menyatakan bahwa demokrasi sebenarnya sudah terdapat di dalam landasan-landasan dasar Islam, yaitu melalui konsep syura dan ijma'. Mungkin kedua konsep Islam ini memiliki

sedikit kesamaan dengan konsep demokrasi karena sama-sama menekankan pembatasan kekuasaan dan keikutsertaan rakyat di dalamnya. Hanya saja, sangat sulit untuk menerapkan demokrasi dalam kerangka keagamaan. Sebab, demokrasi sendiri adalah sebuah kerangka, yakni pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat yang tidak mengenal kuasa lain selain kuasa rakyat.

Adapun syura, pada dasarnya, bukanlah lembaga dalam arti yang sesungguhnya karena hanya memberi saran dan masukan kepada penguasa. Ia juga tidak mempunyai kekuatan legislatif (perundang-undangan) tunggal yang harus didapatkan melalui proses pemilihan umum yang bebas, rahasia, dan langsung. Di sisi lain, konsep *ijma'* tidak mencakup seluruh warga negara, tapi hanya terbatas pada sekelompok ulama dan fukaha.

Tapi, persamaan suara mereka adalah hal sentral dalam demokrasi. Setiap suara memiliki timbangan yang sama; tidak ada perbedaan antara suara orang kaya dan miskin, antara suara orang pandai dan bodoh.

Demokrasi bukan hanya sistem pemilihan umum. Lebih dari itu, demokrasi adalah sebuah lembaga dengan perundang-undangan yang melarang mayoritas memaksakan keinginannya terhadap minoritas.

Ketiga, aliran yang berpendapat bahwa demokrasi pada dasarnya bukanlah berasal dari Barat modern, dan bahwa demokrasi tidak perlu diupayakan untuk diterapkan di dalam kerangka dan *frame* agama. Tetapi, lanjut aliran ini, demokrasi sebenarnya sudah terdapat di dalam bangunan tradisi dunia kuno, semenjak kota-kota Yunani dan republik Romawi kuno. Mereka-lah yang mengambil filsafat kemanusiaan dari tradisi Yunani dan Romawi dan melihat bahwa dunia Arab atau kawasan-kawasan tertentu juga masuk ke dalam lingkup tradisi tersebut. Thaha Husayn, misalnya, menyatakan di buku *Mustaqbal al-Tsaqâfah fi Mishr* bahwa “Mesir adalah bagian dari peradaban laut tengah, dan beberapa fir’aun Mesir tentu saja ada yang datang dari

Yunani. Oleh karena itu, konsep demokrasi Yunani tidak ditransfer bangsa Arab dari Barat, tapi mereka hanya menghidupkan kembali tradisi-tradisi kuno yang sudah ada.”

Dengan demikian, kita bisa mencatat bahwa problem demokrasi, sebagai kekuasaan rakyat atas urusan-urusannya, terkait dengan kekuasaan-kekuasaan lain, seperti kekuasaan penguasa absolut atau kekuasaan Tuhan. Tetapi, seperti telah kami singgung di bab pertama di awal, liberalisme mengenal kekuasaan individu atas urusannya dan bagaimana dimungkinkannya harmoni antara kekuasaan individu dan kekuasaan rakyat. Sebagian kaum liberalis khawatir jika kebebasan individual akan dikorbankan demi kepentingan kalangan mayoritas demokratis, khususnya setelah kejadian-kejadian revolusi Perancis yang menelurkan hukum tiran dan despotik. Oleh sebab itu, banyak kaum liberalis yang menolak penerapan demokrasi secara utuh hingga abad 19 M. Di sini, terdapat persamaan antara demokrasi dan kekuasaan rakyatnya dengan kebebasan individual yang masuk ke dalam lingkup demokrasi berdasarkan konstitusi yang menjamin kebebasan individual di satu sisi dan sistem demokrasi di sisi lain. Berangkat dari sini, demokrasi menjadi lebih dari sekadar sarana individual dan berkembang ke arah sistem politik penuh. ■

Demokrasi dan Kehidupan Sosial (1945)²⁹ Thaha Husayn

Jika Anda menanyakan mereka tentang keadilan sosial, mereka akan mengangkat bahu, menggelengkan kepala, dan melemparkan senyum sinis yang sebagiannya menyiratkan keputus-asaan dan sebagiannya lagi menyiratkan harapan semu tentang kehidupan akhirat yang di dalamnya Allah SWT menjanjikan pahala terbaik dan ganjaran terbesar bagi orang-orang yang bersabar.

29 *Al-Balāgh*, edisi 16 Agustus 1945. Tulisan ini juga terdapat di buku *al-Dīmuqarāṭiyyah*, satu buku karya Thaha Husayn yang tidak diterbitkan (Kairo: Dār Nafrū, tt.), hlm. 139—151.

Yang terhormat tuan-tuan sekalian:

Di antara keistimewaan kehidupan sosial di setiap umat adalah bahwa kebenaran-kebenaran yang mengitarinya banyak yang keliru besar. Jadi, sebelum tuan menteri menyampaikan pandangannya, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk terlebih dulu menyepakati beberapa kebenaran. Saya tidak tahu mana yang harus saya ungkapkan dari dua hal ini; apakah rasa senang dan bahagia saya karena telah diberi kesempatan dan fasilitas untuk berbicara tentang kehidupan sosial oleh tuan menteri sosial, atautkah rasa takut saya karena hadirnya perwakilan dari kekuasaan eksekutif yang ditakuti atau harus selalu ditakuti. Terlebih lagi bahwa pembicaraan seputar kehidupan sosial di Mesir, apapun niat baik para pembicaraanya dan bagaimana pun mereka sangat menginginkan kebaikan dan menghindari keburukan, selalu menghadirkan kritik terhadap para pejabat di lingkungan kekuasaan eksekutif. Tuan menteri sosial tentu juga mendengar kritik setiap hari. Kapan pun saya pergi ke dewan perwakilan rakyat atau ke parlemen, saya berharap agar kehadiran menteri sosial ini bisa menjauhkan kritik terhadap kementerian sosial atau kebijakan-kebijakan negara, baik menyangkut pemerintah maupun parlemen.

Jika beliau (menteri sosial) mendengar kritik yang diarahkan ke kekuasaan legislatif yang masuk ke wilayah kerjanya, saya berharap beliau tidak marah dan tidak mengeluarkan perintah khusus untuk menyeret saya ke penjara setelah pertemuan ini selesai.

Kebenaran pertama yang saya ingin kita sepakati bersama dari sekarang adalah tentang arti demokrasi. Di masa modern ini, orang-orang melihat demokrasi sebagai salah satu fenomena kehidupan politik dan salah satu warna pemerintahan atau satu sistem yang menjadi pilar pemerintahan di negara-negara di dunia. Setelah itu, mereka mengatakan atau mencoba mengatakan, “Demokrasi di masa modern telah berkembang, meluas, dan melunak sedikit demi sedikit. Ia telah melewati politik dan menjalar hingga ke persoalan

ekonomi, lalu ke persoalan-persoalan sosial. Melalui perkembangan ini, muncullah sejumlah aliran yang menyangkut sistem kehidupan di luar urusan pemerintahan.” Pemikiran semacam ini tidak bisa dibenarkan, terlebih ketika kita melihat pertumbuhan demokrasi di sepanjang sejarah klasiknya. Demokrasi, di dalam sejarah klasiknya, adalah sebuah sistem sosial-ekonomi sebelum kemudian menjadi sistem politik. Fakta menunjukkan bahwa bangsa Yunani-lah yang kali pertama menghendaki sistem demokrasi kepada dunia. Fakta juga menunjukkan bahwa ketika bangsa Yunani memikirkan sistem yang telah dicetuskannya, yakni demokrasi, mereka tidak memaksudkannya hanya untuk memperbaiki sistem-sistem pemerintahan saja, tetapi pertama-tama untuk memperbaiki sistem kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Mereka selalu menyikapi politik sebagai sarana dan bukan tujuan, dan melihat sistem pemerintahan sebagai alat untuk memperbaiki beberapa kesalahan dan keburukan yang telah merusak kehidupan ekonomi saat itu.

Sebab terpenting meletusnya revolusi di Athena yang dikomandoi oleh Solon, peletak pertama sistem demokrasi yang dikenal bangsa Yunani, adalah bobrok dan rusaknya kehidupan sosial: dominasi kaum aristokrat atas rakyat, dominasi orang kaya atas orang miskin papa, dominasi yang kuat atas yang lemah tak berdaya. Hal inilah, yang menjadi sumber penderitaan rakyat Athena, yang kemudian memicu pemberontakan sekelompok rakyat Athena dengan pimpinan Solon, peletak sistem demokrasi untuk kali pertama. Solusi yang ditawarkan Solon untuk memperbaiki keadaan di Athena lebih banyak terkait dengan kehidupan sosial dan ekonomi, kecuali pada periode-periode akhir pemerintahannya. Solon menghapuskan semua hutang dan membebaskan tanah, sebagaimana diutarakannya di beberapa syair. Pada saat yang sama, Solon melarang penjualan budak dalam proses hutang-piutang dan membatasi sistem penahanan budak dalam proses hutang-piutang.

Dari sini kita bisa menggarisbawahi bahwa reformasi yang diciptakan Solon adalah reformasi yang terkait erat dengan sisi sosial dan hubungan antarkelas di satu sisi, dan dengan sistem ekonomi di sisi lain. Adapun politik tak lebih dari sekadar sarana untuk merealisasikan reformasi ini. Setelah era Solon, demokrasi—yang tumbuh di masa klasik—terus berkembang hingga mencapai titik puncaknya seperti dikenal banyak orang. Demokrasi kemudian terkait dengan urusan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan juga kehidupan politik. Menurut hemat saya, orang-orang telah melupakan sejarah ketika mereka mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik *an sich* dan bahwa sistem politik-lah yang menginspirasi reformasi sosial-ekonomi. Jadi, tak ada keburukan sedikit pun ketika kita berbicara tentang demokrasi dan kehidupan sosial. Pada dasarnya, demokrasi terkait dengan kehidupan sosial dan hubungan antarkelas secara umum, dan dengan sistem ekonomi secara khusus. Demokrasi juga terkait dengan politik dari sisi bahwa politik-lah pewujud pemerintahan yang mungkin bisa menerapkan keadilan bagi semua lapisan rakyat (orang lemah, miskin, kaya) dan merealisasikan hubungan-hubungan yang berasaskan keadilan antarindividu, antarkelompok, dan antarkelas. Kebenaran ini harus diketahui dan disepakati bersama sebelum kita berbicara tentang kehidupan sosial, dalam arti bahwa kebenaran ini memiliki keterkaitan dengan sistem demokrasi.

Apabila demokrasi terkait dengan kehidupan sosial sebelum kemudian terkait dengan persoalan politik, kehidupan sosial tentu saja harus menjadi acuan utama dan poin inti di dalam sistem demokrasi, kapan pun dan oleh siapa pun sistem demokrasi diterapkan. Faktanya, setiap sistem yang terkait dengan kehidupan sosial terbukti tidak memiliki nilai dan tidak membawa kebaikan jika sistem-sistem tersebut tidak ditujukan demi mewujudkan keadilan atau mengupayakan terwujudnya keadilan, baik tujuan mewujudkan keadilan sebagai sesuatu yang riil dan konkrit maupun tujuan yang diidamkan oleh

orang-orang yang meletakkan sistem-sistem tersebut dan menyeru pada reformasi. Intinya, setiap sistem yang terkait dengan kehidupan sosial antarindividu takkan mendatangkan kebaikan apapun kecuali jika itu ditujukan demi terwujudnya keadilan antarindividu.

Dengan demikian, contoh ideal bagi sistem kehidupan sosial di negara mana pun dan di bawah kendali apapun adalah keadilan sosial; yaitu memperlakukan secara sama antara satu individu dengan individu lain yang menjadi pesaingnya dan antara satu kelompok dengan kelompok-kelompok lain yang menjadi pesaing mereka, serta mewujudkan keseimbangan rasional di antara orang-orang yang hidup di satu negeri dan tunduk pada satu konstitusi atau sejumlah konstitusi yang serupa. Apabila demokrasi memiliki semacam karakteristik dasar jika dibandingkan dengan sistem-sistem lain, maka karakteristik dasarnya tersebut adalah bahwa demokrasi merupakan sistem di mana para pengusungnya menganggapnya sebagai yang paling memungkinkan dan terdekat untuk bisa mewujudkan keadilan, dari sisi bahwa sistem demokrasi berdiri di atas asas yang tak perlu didiskusikan lagi. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit orang yang mendiskusikan tentang persamaan dan kesetaraan, yang sebagian dari mereka bersikap pesimis dan bahkan memastikan bahwa persamaan adalah sesuatu yang mustahil terjadi.

Mereka mengatakan bahwa manusia itu berbeda-beda dalam konteks pemberian Tuhan dan bakat yang dimiliki. Ada yang memiliki kecerdasan luar biasa dan yang memiliki kecerdasan pas-pasan dan biasa-biasa saja, ada yang pintar dan ada yang bodoh, ada yang mampu berkarya di bidang tertentu dan ada pula yang tidak mampu berkarya. Ini sebagaimana bahwa manusia berbeda-beda dalam hal fisik; ada yang berperawakan tinggi, sedang dan ada yang pendek, ada yang gemuk dan ada yang kurus. Sebagaimana bahwa persamaan mustahil direalisasikan dalam konteks bakat bawaan dan fisik, maka tidak masuk akal pula jika kita menuntut direalisasikannya

persamaan dalam konteks kehidupan sosial dan hubungan-hubungan antarindividu dan antarkelompok selama persamaan masih menjadi sesuatu yang diimpikan oleh manusia.

Pandangan seperti ini telah dan akan selalu diutarakan. Barangkali demokrasi menjadi sebab kenapa pandangan seperti ini telah dan akan diungkapkan. Menurut mereka, demokrasi mendorong terciptanya kebebasan. Setiap orang tentu diperbolehkan untuk mengungkapkan semua yang ada di benaknya. Tetapi, jika persamaan dalam hal bakat bawaan dan bentuk fisik bukan termasuk kebenaran konkrit, maka di tempat lain pasti ada persamaan yang menurut saya tidak bisa diperdebatkan lagi. Dan, selama masih ada persamaan maka itu harus ditimbang dan diperhitungkan. Manusia, meskipun kelas sosial, bakat bawaan dan nasib mereka berbeda-beda, tetap memiliki persamaan saat memasuki kehidupan dunia ini. Mereka semua lahir dengan cara yang sama, bernafas dan makan dengan cara yang sama, tumbuh dan berkembang dengan cara yang hampir sama pula. Mereka semua juga butuh bernafas agar bisa hidup, menyantap makanan dan minuman agar bisa tumbuh, dan hidup sampai akhir hayatnya. Mereka pun memiliki persamaan dalam hal kematian. Mereka semua akan meninggal dunia dengan satu cara. Jadi, mereka memiliki persamaan saat memasuki kehidupan dunia, saat meninggalkan kehidupan dunia, dan saat menikmati hidup di dunia ini. Dengan demikian, ada perbedaan di antara manusia di satu sisi, dan ada juga persamaan di antara mereka di sisi lain.

Orang-orang yang mengingkari bahwa persamaan bisa menjadi kebenaran konkrit karena lebih mempertimbangkan perbedaan manusia di beberapa sisi, harus mencatat beberapa poin mendasar yang manusia memiliki persamaan di dalamnya. Menurut hemat saya, selama kita masih memasuki dan meninggalkan kehidupan dunia melalui satu cara, maka kita bisa dimaafkan ketika menuntut adanya persamaan pada beberapa hal sekunder di hidup kita.

Hal ini memungkinkan setiap orang melaksanakan kewajibannya masing-masing dan menelurkan karyanya masing-masing dengan berdasarkan pada satu sistem yang berdiri di atas asas harmoni, solidaritas, dan persamaan hak-kewajiban. Bersamaan dengan itu, ide persamaan bukanlah asas dasar bagi demokrasi klasik di setiap sisinya. Orang-orang yang menyebut demokrasi Yunani atau demokrasi Romawi mestinya harus mengingat bahwa demokrasi ini sangat jauh berbeda dengan demokrasi yang kita konsepsikan di masa modern seperti sekarang ini. Sebab, demokrasi yang hendak mewujudkan persamaan di kalangan penduduk negeri di kota Yunani, seperti Athena, hanya hendak menyasar kelompok kecil dari semua penduduk Yunani. Mereka hanya segelintir orang saja jika dibandingkan dengan penduduk Athena atau orang-orang yang tinggal di daerah Atika. Orang-orang yang bisa menikmati hak-hak warga negara dan yang terdapat persamaan penuh di antara mereka dalam hal hak-kewajiban, hanyalah segelintir orang saja. Sementara itu, mayoritas warga negara tidak bisa menikmati hak-haknya dan tunduk di bawah segelintir orang itu. Mayoritas yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari kalangan budak, dari kalangan orang asing yang tidak bisa menikmati sistem politik diplomasi, dari kalangan pendatang yang tidak memiliki kewarganegaraan asli Yunani. Jadi, di kota seperti Athena, rakyat yang bisa menikmati hak-hak politik dan persamaan hanyalah 20 ribu orang, sementara total penduduk Athena lebih dari 100 ribu orang. 100 ribu orang lebih inilah yang tidak mempunyai hak politik sedikit pun dan tidak bisa menikmati hak apapun atau persamaan apapun. Dengan demikian, demokrasi Athena atau demokrasi klasik di bentangan sejarah klasik berdiri di atas asas persamaan sempit segelintir orang di kelas sosial tertentu yang merupakan salah satu jenis dari aristokrasi. Klimaksnya, aristokrasi ini memang sempit di periode-periode pertama, kemudian meluas hingga akhirnya berujung pada abad 4 SM—tapi aristokrasi di abad ini adalah demokrasi dalam arti yang kita pahami sekarang.

Di masa modern, demokrasi yang telah tersebar ke Eropa hingga akhirnya sampai ke negeri kita (Mesir) tidaklah berdiri di atas asas persamaan dalam arti yang sebenarnya. Orang-orang yang bisa menikmati hak-hak warga negara, yang bisa turut-serta di dalam hak-hak tersebut, dan yang terdapat persamaan di antara mereka, pada awalnya hanyalah kalangan kelas sosial terbatas saja. Hak-hak tersebut hanya terbatas pada orang-orang yang, misalnya, mau membayar pajak ke negara. Kelas sosial terbatas ini lalu meluas sedikit demi sedikit hingga akhirnya, di beberapa negara, terwujud persamaan di antara semua kelas sosial dan hilanglah perbedaan-perbedaan yang muncul akibat revolusi atau akibat kekayaan yang dimiliki tiap individu. Bersamaan dengan itu, di sejumlah negara penganut demokrasi—dan kita (Mesir) termasuk di dalamnya—terdapat sejenis demokrasi yang di dalamnya tidak terwujud persamaan dalam arti sesungguhnya. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan persamaan hak politik, tidak bisa ditemukan dan tidak terwujud di Mesir. Hal serupa juga terjadi di sejumlah negara yang menganut paham demokrasi. Hak-hak hanya dimiliki oleh sebagian orang saja, sementara sebagian yang lain tidak mendapatkannya sama sekali. Jika ada sebuah negara yang di dalamnya terwujud persamaan secara penuh, maka ada juga negara-negara yang di dalamnya tidak ditemukan dan tidak terwujud persamaan politik secara penuh, yaitu negara-negara yang di dalamnya perempuan tidak memiliki hak-hak politik.

Lebih dari itu semua, dan sebagai inti dari pembicaraan kita tentang demokrasi dan sistem sosial atau kehidupan sosial, fakta-fakta konkrit menunjukkan bahwa kebenaran-kebenaran yang berkaitan dengan lingkup demokrasi, di sejumlah negara yang menganut paham demokrasi atau bahkan di negara yang terwujud di dalamnya persamaan secara penuh, tidaklah bisa kita temui.

Demikian itu karena persamaan hak-kewajiban harus dipahami dalam arti yang luas. Persamaan tersebut tidak mengandaikan

persamaan setiap individu warga negara dalam tugas kemiliteran. Tapi, persamaan itu mengandaikan bahwa setiap individu harus memiliki persamaan hak dalam—misalnya—memberikan suara pada pemilihan dewan perwakilan rakyat atau parlemen. Mereka juga memiliki hak yang sama di depan hukum atau pengadilan. Akan tetapi, ada jenis persamaan lain yang paling penting dari jenis-jenis persamaan yang telah disebutkan barusan, yaitu persamaan dalam menikmati hidup, persamaan dalam menanggung penderitaan, persamaan bahwa kita harus sama-sama menderita jika memang tidak ada jalan keluar dari penderitaan, persamaan bahwa kita harus sama-sama senang karena semua manusia berhak senang dan tidak melihat sebagian yang lain dengan perasaan takut atau dengki.

Persamaan seperti ini akan terwujud ketika keadilan sosial juga terwujud dalam batas maksimal keterwujudannya. Itu terjadi ketika seseorang tidak lapar demi mengenyangkan orang lain, ketika seseorang tidak kenyang demi membuat lapar orang lain, atau ketika tidak ada ungkapan “Zayd menjadi kaya karena Umar telah jatuh miskin.” Jenis persamaan ini akan terwujud, dan demokrasi belum pernah bisa mewujudkannya. Saya tidak meragukan bahwa contoh kehidupan ideal dalam kehidupan sosial yang baik menuntut terwujudnya persamaan manusia dalam jenis persamaan tersebut, menuntut tidak adanya satu kelompok saja yang bahagia, sementara kelompok lainnya menderita. Dengan demikian, demokrasi bukanlah sesuatu yang global yang bisa kita konsepsikan atau ungkapkan dengan kata-kata sehingga kita bisa menilainya baik atau buruk. Demokrasi adalah jalan untuk mewujudkan contoh ideal bagi kehidupan yang terus diupayakan oleh manusia. Di sini, demokrasi baru bisa mewujudkan sebagiannya saja, tapi belum bisa mewujudkan contoh kehidupan ideal itu secara penuh dan total. Jika terdapat perbedaan antarnegeri dan antarumat dalam konteks penerapan demokrasi, maka hal tersebut (tidak terwujudnya contoh kehidupan

ideal secara penuh) tidaklah aneh. Jika terjadi perbedaan antarkelas di satu negeri dalam konteks merasakan keadilan sosial atau mengkonsepsikan demokrasi, maka hal tersebut juga tidaklah aneh. Sebab, demokrasi mempunyai karakteristik dasar menerima perkembangan dan peningkatan. Ia bisa berkembang secara terus-menerus tanpa henti dan bisa mencapai tujuannya tanpa batas. Jika kita memastikan bahwa sebuah negara telah mencapai keberhasilan luar biasa dalam hal mewujudkan keadilan sosial, maka—dari sekarang—kita harus percaya bahwa negeri tersebut takkan pernah yakin jika dirinya sudah berhasil mencapai tujuannya dan telah memenuhi kebutuhannya akan keadilan sosial. Ini semua tak lebih karena alasan yang sederhana, yaitu bahwa kebutuhan hidup takkan pernah habis dan bahwa contoh kehidupan ideal akan selalu berada beberapa langkah di depan kita sekali pun kita sudah melangkah cepat untuk mengikutinya. Jadi, kita harus terus berupaya mewujudkan keadilan sosial. Kita mungkin sudah berhasil mewujudkan keadilan sosial dalam banyak aspek, tetapi kita takkan pernah bisa meningkatkan dan mengembangkannya lagi kecuali berambisi kuat untuk terus meraih itu. Kita juga takkan pernah sampai pada posisi tertentu kecuali jika kita berambisi kuat untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Dengan demikian, tak ada salahnya jika kita mencatat dua poin penting berikut ini.

Pertama, di Mesir, kita sudah bisa mewujudkan kemajuan yang tak perlu dipermasalahkan lagi di dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tetapi, tidak ada salahnya jika kita memperhatikan poin kedua ini, yaitu bahwa kemajuan yang telah kita raih bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kemajuan kita tersebut pada hakekatnya bukanlah kemajuan, melainkan sesuatu yang memiliki dua level; kita bisa merasakan kemajuan itu dan karenanya kita pun senang, kita bisa merasakannya tetapi langsung merasa bahwa kita masih sangat jauh sekali dari keadilan sosial yang mungkin bisa

kita upayakan terealisasi. Demikian itu karena salah satu karakteristik dasar keadilan sosial yang sah adalah ketika semua orang bisa merasakannya sendiri. Jika mereka bisa merasakannya sendiri maka mereka akan bisa merasakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Kita memang maju dalam kehidupan sosial kita. Tetapi, karena kita ingin lebih maju dalam kehidupan politik dan sosial kita, kita mencela pemerintahan dan negara kita dan menuntutnya agar mewujudkan keinginan dan ambisi kita. Sebagai contoh paling tepat dan paling dekat, kita bisa melihat keadaan kita (warga Mesir) di awal abad abad 20 M. Di awal abad ini, kita tidak banyak menuntut pemerintah karena kita belum mengetahui kebutuhan-kebutuhan pemerintah yang mendesak dan yang perlu diupayakan. Ini bisa dimaklumi karena kita belum berada di dalam abad yang di dalamnya kita melihat kemajuan. Dulu kita melupakan manfaat besar dari pemerataan pendidikan dan mengabaikan hak warga negara yang miskin untuk mendapatkan pelayanan air bersih dan tempat tinggal layak. Dulu kita mengabaikan semua ini. Ketika pendidikan sudah merata, sekelompok orang lalu bisa merasakan hak-hak mereka dan hak-hak rakyat secara keseluruhan yang belum terpenuhi. Mereka pun lantas menuntut pemerintah dengan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka tuntut. Dan sekarang, kita juga menuntut pemerintah dengan sesuatu yang di awal abad tidak pernah kita impikan jika sesuatu itu termasuk hak rakyat, jika rakyat berhak menuntutnya terhadap pemerintah dan pemerintah wajib memenuhinya. Setiap kali kita berkembang dan maju maka tekanan perbaikan akan ikut meningkat, tuntutan-tuntutan kita terhadap pemerintah akan ikut bertambah, dan tugas-tugas yang kita bebankan ke pundak pemerintah juga akan ikut bertambah berat. Orang-orang yang memikul tugas-tugas pemerintahan di Mesir (kalangan pejabat negara) meyakini bahwa suatu saat nanti mereka pasti bisa mendapatkan hati rakyat, memperoleh kepercayaan dari mereka secara penuh, dan menerima pujian dari mereka. Mulai

sekarang, saya ingatkan kepada mereka bahwa mereka takkan pernah bisa memperoleh itu semua. Mereka harus percaya bahwa mereka akan selalu mendapatkan celaan dan tuntutan dari rakyat karena tidak mampu memenuhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat. Setiap kali rakyat maju, kebutuhannya akan ikut bertambah dan tuntutannya akan ikut meningkat. Hari demi hari, bisa dipastikan bahwa kebutuhan, tuntutan, dan tekanan rakyat terhadap negara dan pemerintah akan meningkat dan bertambah banyak. Jika Anda sekalian sampai mendapati rakyat yang tidak mengkritik pemerintahannya dan tidak mencelanya, percayalah bahwa rakyat tersebut masih diam dan jauh dari hidup, dan percayalah bahwa mereka sangat butuh seseorang untuk membangunkan mereka dari tidur panjangnya.

Setelah semua penjelasan di atas, kita mungkin bisa mempertanyakan demokrasi di negeri kita (Mesir) dan kaitannya dengan kehidupan sosial. Apakah demokrasi kita di Mesir telah mengerjakan kewajiban-kewajiban awalnya kepada rakyat? Sesuai dengan kaedah yang telah saya utarakan di awal, saya yakin bahwa demokrasi di Mesir masih jauh dari melakukan kewajiban paling sederhananya dalam memenuhi hak-hak rakyat karena sebab yang sederhana pula, yakni masih terzalimnya mayoritas rakyat. Mayoritas rakyat sebagai mayoritas yang menentukan, yang menjadi sandaran demokrasi, yang mengirim para anggota parlemen ke parlemen dan yang merupakan representasi dari parlemen, yang mengirim pemerintah ke dewan menteri, dan yang menjadi sandaran bagi pemerintahan demokratis—sungguh sangat disayangkan—telah benar-benar terzalimi. Saya harus mengatakan bahwa mayoritas yang menjadi pondasi dasar kekuasaan rakyat dan kekuatan konstitusional, telah benar-benar terzalimi. Mereka pertama-tama telah terzalimi dari mereka sendiri ketika mengetahui hak-haknya tidak dipenuhi atau sengaja tidak dipenuhi. Mayoritas ini telah terzalimi karena tidak mengetahui diri mereka sendiri; dan itu akibat pemerintah yang tidak memberikan

hak pendidikan kepada mereka. Mayoritas ini telah terzalimi karena kesehatannya selalu terancam; dan itu akibat meminum air yang mengandung berbagai penyakit atau bahkan barangkali mengandung kematian. Mereka tinggal di rumah-rumah yang tak layak huni dan tak patut dihuni oleh manusia. Setiap saat mereka menggumuli kemiskinan, keputusasaan, dan penderitaan. Mereka menggumuli itu semua karena negara dan pemerintah tidak pernah memenuhi sebagian hak-hak mereka; bantuan kesehatan, pengaturan tempat tinggal yang layak, distribusi air minum yang bersih, dan seterusnya. Inilah yang setiap hari kita tuntutan dari pemerintah. Jadi, masuk akal atau mendekati masuk akal jika dikatakan bahwa demokrasi di negeri Mesir belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Yang terjadi hingga detik sekarang adalah terus dikatakannya kepada mayoritas, “Rakyat berhak menjadi bangsa yang besar, merdeka, dan berkuasa. Dan di antara wujud kemerdekaan, kekuatan, dan kekuasaan itu adalah pemilihan umum dan parlemen; dan ini adalah salah satu jenis sistem pemerintahan.” Orang-orang yang mengatakan retorika ini kepada rakyat, sebenarnya telah melupakan satu hal yang cukup sederhana, yaitu bahwa undang-undang, parlemen, dan sistem pemerintahan yang kita kenal pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan hanya sarana. Saya tegaskan kepada Anda sekalian, saya tidak peduli apakah parlemen atau pemerintahan parlementer yang ada di negeri ini. Yang saya pedulikan hanyalah bagaimana saya bisa hidup nyaman dan tenteram, dan bagaimana saya bisa jauh dari penderitaan sebagaimana setiap orang ingin menjauhinya. Jika parlemen tidak bisa mewujudkan itu, pemerintahan parlementer mungkin bisa. Dengan kata lain yang lebih tepat, “Jika demokrasi tidak bisa memberi saya kebebasan dan kenyamanan dalam hidup, saya tentu tidak membutuhkan parlemen ataupun pemerintahan parlementer.”

Yang terjadi di Mesir adalah sesuatu yang sederhana. Sarana telah berubah menjadi tujuan, sementara tujuan benar-benar telah dilupakan. Dalam hal pakaian, misalnya, kita ingin merasa nyaman kapan pun kita memakainya; terhindar dari panas di musim panas dan dari dingin di musim dingin. Lalu, akan lebih bagus jika pakaian tersebut memiliki corak yang elegan dan cocok di badan kita. Hanya saja, ada sejumlah orang yang melupakan bahwa tujuan utama dari pakaian adalah kenyamanan dan bisa melindungi tubuh dari cuaca panas dan dingin. Mereka sangat yakin bahwa tujuan utama dari pakaian itu adalah elegansitas dan kepantasan. Inilah yang sebenarnya tengah menimpa sistem sosial dan politik kita. Keduanya dijadikan tujuan, bukan sarana. Dikatakan kepada rakyat, “Sungguh, kehidupan baru atau kehidupan modern menuntut Mesir menjadi Mesir yang baru, yaitu yang menganut Eropa. Kehidupan modern menuntut Mesir harus memiliki konstitusi (perundang-undangan), dewan perwakilan rakyat, dewan syeikh, dan lembaga kementerian. Semua urusan pemerintahan harus mengacu pada praktik yang berlaku di Britania Raya, Perancis, Amerika, dan di negara-negara demokratis lainnya. Jika kita tidak mau melakukan ini semua, kita akan tetap berada di kubangan radikalisme dan konservatisme, atau tetap terjerembab ke jurang kemunduran. Oleh sebab itu, kita harus hidup dengan cara seperti bangsa-bangsa selain kita, sebagaimana setiap negara dunia ketiga yang telah berhasil meniru apa yang dilakukan oleh negara-negara kaya.” Pernyataan ini pernah dikatakan ke kita, rakyat Mesir. Akhirnya, kita bisa mendapati adanya konstitusi, dewan perwakilan rakyat, lembaga kementerian, dan sistem yang dikenal di Eropa. Tetapi, kita benar-benar telah tertipu dan terperdaya dengan anggapan bahwa ketika kita sudah berhasil mengadakan pemilihan umum, ketika dewan perwakilan rakyat sudah duduk di kursi-kursi panas mereka dari November hingga Mei atau Juni, ketika anggota-anggota parlemen sudah mendesak adanya mosi tidak percaya,

dan ketika para menteri sudah bisa menjawab semua pertanyaan parlemen dengan memuaskan; kita menganggap diri telah berhasil mencapai tujuan dari kehidupan. Faktanya, kita hanya disibukkan oleh sarana dan menjadikan sarana sebagai tujuan. Kita meyakini bahwa kita telah berhasil mencapai semuanya, padahal sebenarnya kita belum berhasil mencapai apa-apa. Jadi, perkenankan saya untuk bertanya, “Apakah demokrasi Mesir itu ada?” Jika yang dimaksud adalah hak-hak rakyat yang diundang-undangkan di dalam konstitusi, maka tak diragukan lagi bahwa demokrasi memang ada. Artinya, hak-hak rakyat telah diakui oleh undang-undang, diakui di dalam dan di luar negeri. Hak-hak demokratis adalah satu hal yang tak usah dipertanyakan lagi keberadaannya. Tapi, dari segi realisasi, hak-hak tersebut adalah satu hal yang diragukan keberadaannya, bahkan sangat diragukan karena berbagai sebab.

Demokrasi yang hakiki harus berwujud dan ber-etika (*khalqan wa khuluqan*) di semua lapisan masyarakat dan rakyat, di semua warga negara. Artinya, setiap warga negara harus merasa aman dan nyaman, harus merasa bahwa tak ada seorang pun yang tengah memata-matainya. Ia harus merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban semua warga negara. Demokrasi tidak boleh memonopoli hak-kewajiban warga negara, dan tidak boleh berbohong kepada mereka semua.

Apakah etika demokrasi ini, yang menjadi syarat utama bagi demokrasi yang sah, telah benar-benar ada di Mesir atau belum? Menurut saya, orang-orang yang bisa mengatakan bahwa etika tersebut telah ada di Mesir, mungkin bisa dihitung dengan jari. Etika demokrasi belum pernah ada di Mesir.

Saya tidak sedang membicarakan hari-hari kita sekarang ini dan yang setiap saat kita rasakan. Di antara penduduk Mesir, ada sekelompok orang yang bisa menikmati hidup dalam batas maksimal kemewahan dan ada juga yang selalu menderita dalam batas maksimal

kesusahan. Mereka yang disebut terakhir selalu hidup berdampingan dengan penderitaan hingga maut menjemput. Mereka yang disebut pertama juga terus hidup dengan bergelimang kenikmatan dan kemewahan hingga maut menjemput. Persamaan dalam hal kematian ini akan terjadi selama persamaan dalam hal kondisi kehidupan rakyat tidak terjadi. Masalah yang harus diperhatikan ketika kita ingin menjawab pertanyaan di atas (Apakah etika demokrasi sudah ada di Mesir atau belum?) adalah perihal keharusan bagi kita untuk mempedulikan rakyat, memperbaiki keadaan hidup mereka, membuat mereka sehat, kuat, dan mampu beraktivitas dan berkarya.

Tapi, di sini ada dua jenis kepedulian terhadap rakyat. Ada kepedulian terhadap rakyat yang identik dengan kepedulian seseorang terhadap apa yang dimilikinya. Pemilik kerbau dan sapi, misalnya, akan mempedulikan kerbau dan sapinya agar tetap sehat bugar. Ketika sapi dan kerbaunya sakit, ia akan sangat bersedih karena tidak bisa mengeksploitasinya. Ia menggantungkan hidup pada kesehatan hewan ternaknya yang—jika sehat—bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya.

Ada juga jenis lain dari kepedulian terhadap rakyat, yaitu kepedulian yang datang dari orang-orang yang meminta bantuan kepada rakyat dengan maksud tidak untuk mengeksploitasi rakyat atau tidak dalam rangka agar rakyat melakukan semua yang diinginkan. Mereka mempedulikan rakyat karena itu memang sudah menjadi hak rakyat, dan karena keberadaan mereka juga demi mempedulikan rakyat. Jadi, ketika mereka tidak mempedulikan rakyat, mereka tidak hanya berdosa pada diri mereka sendiri, pada hati nurani, dan pada Tuhan saja, tetapi juga berdosa kepada rakyat. Jika sudah demikian, rakyat berhak untuk menghukum mereka dan menanyakan kenapa hak-hak rakyat tidak dipenuhi.

Bisa dipastikan, hewan ternak takkan bisa menghukum pemiliknya jika si pemilik sampai tidak mempedulikannya. Akan

tetapi, rakyat yang bebas-merdeka pasti bisa menghukum negara jika tidak mempedulikan dan memperhatikan keadaan mereka. Jadi, jenis kepedulian yang mana yang diberikan ke rakyat kita, rakyat Mesir?

Apakah kita memberikan kepedulian yang memang sudah seharusnya kita berikan dan yang memang sudah menjadi hak rakyat? Atau, apakah kita memberikan kepedulian karena semata-mata kita membutuhkan orang yang mau melayani kita? Pemerintah dan parlemen sama-sama mempedulikan rakyat karena kepedulian tersebut memang menjadi hak rakyat. Tetapi, menurut hemat saya, seperti yang telah saya kemukakan di awal, demokrasi bukan hanya berupa lembaga-lembaga kementerian atau dewan parlemen, melainkan etika. Setiap warga negara harus diperlakukan dengan baik dan mulia, dari dekat maupun dari jauh. Apakah rakyat dipedulikan karena itu memang sudah menjadi hak mereka? Atau, apakah rakyat dipedulikan karena pemerintah dan parlemen membutuhkan sesuatu dari rakyat? Ketika seorang tuan tanah mempedulikan kaum petani, misalnya, apakah kepeduliannya itu karena kaum petani memang berhak untuk dipedulikan, atau apakah karena ia takut jika hasil pertaniannya terancam rusak dan gagal panen?

Persoalan inilah yang semestinya kita semua pikirkan matang-matang, yaitu bahwa kepedulian yang kita berikan kepada rakyat adalah karena itu memang sudah menjadi hak rakyat. Kita hendaknya tidak memberikan kepedulian karena mempertimbangkan si fulan dan si fulan, atau karena kita tengah membutuhkan rakyat demi kepentingan-kepentingan kita sendiri. Berikan apa yang menjadi hak rakyat, dan jika kita tidak memberikannya, rakyat berhak menghukum apa yang telah kita lakukan.

Jika persoalannya demikian, apa yang seharusnya diberikan oleh demokrasi yang sah kepada rakyat? Secara sederhana,

masing-masing dari kita sudah mengetahuinya. Salah seorang menteri Perancis yang saat ini mendekam dipenjara, Leon Bloom³⁰, pernah meringkas itu semua dalam sebuah pernyataan yang selalu didengungkannya di beberapa pertarungan politiknya saat pemilihan. Menurutnya, demokrasi harus bisa memberikan tiga jaminan kepada rakyat; kebebasan, pangan, dan keselamatan (keamanan).

Demokrasi wajib menjamin kebebasan rakyat Mesir. Mereka tidak boleh diancam dalam setiap pekerjaan yang digelutinya dan setiap perkataan yang dikatakannya, tentu saja selama tindakan mereka tidak menyalahi undang-undang atau bersifat kriminal.

Demokrasi Mesir wajib menjamin pangan rakyat Mesir. Masalah ini menjadi salah satu masalah yang masih dihadapi hingga sekarang. Demokrasi Mesir tidak merasa bahwa di antara hak rakyat adalah dipenuhinya kebutuhan pangan mereka. Saya tidak ingin menunjukkan bahwa demokrasi Mesir, sampai detik ini, masih meyakini bahwa sudah semestinya ada orang-orang yang baik dan dermawan, dan jika tidak ada orang-orang dermawan maka bisa dimaklumi apabila sebagian orang mengalami kelaparan dan kekurangan pangan.

Apabila demokrasi Mesir benar-benar ada dan apabila demokrasi Mesir benar-benar sah, maka sudah seharusnya jika tak seorang pun warga Mesir yang kelaparan, tak seorang warga Mesir yang terserang penyakit atau bahkan meninggal dunia karena kelaparan. Untuk itu, demokrasi Mesir harus mengambil tindakan apapun yang bisa diambil dan menempuh cara apapun yang bisa ditempuh. Demokrasi, yang direpresentasikan oleh parlemen dan pemerintah, bertanggung-jawab penuh atas itu semua. Pemerintah dan parlemen diperbolehkan menggunakan segala cara agar semua rakyat terbebas dari

30 Leon Bloom (1872 – 1950), mantan perdana menteri Perancis selama beberapa periode yang berasal dari partai sosialis. Ia dimasukkan ke penjara oleh kelompok Nazi karena merupakan salah satu pemimpin dalam peperangan Perancis melawan penjajahan Jerman di Perang Dunia II.

kelaparan. Ia boleh mewajibkan pajak, memaksa orang-orang kaya untuk menurunkan sebagian harta kekayaannya, atau mengeluarkan kebijakan apa saja demi menjamin rakyat Mesir terhindar dari kelaparan. Hak inilah yang tanpanya demokrasi takkan pernah ada.

Jaminan ketiga adalah jaminan keamanan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di antara hak rakyat adalah tidak terjadinya kelaliman dan kesewenang-wenangan oleh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Ketika demokrasi atau pemerintah telah berhasil menjamin kebebasan rakyat, berhasil melindungi mereka dari bahaya kelaparan, berhasil menjamin tidak terjadinya kelaliman oleh sebagian kelompok terhadap sebagian yang lain, dan telah berhasil melindungi mereka dari permusuhan di dalam negeri atau luar negeri, maka pada saat itu kita mungkin bisa mengatakan bahwa demokrasi Mesir telah berhasil menunaikan kewajibannya. Akan tetapi, saya tegaskan di sini, meskipun telah berhasil mencapai itu semua, demokrasi Mesir belum bisa dikatakan telah berhasil menunaikan seluruh kewajibannya. Demokrasi Mesir masih harus tetap mempersilahkan rakyat Mesir untuk menuntutnya dengan kewajiban-kewajiban baru yang lain. Demikian ini karena ciri utama kehidupan manusia adalah ambisi dan keinginan untuk terus maju dan berkembang. Setiap kali kita sampai pada posisi tertentu, kita pasti berambisi mencapai posisi lain. Di sinilah demokrasi harus berperan menjamin tersedianya posisi tersebut setelah berhasil menjamin kebebasan, pangan, dan keamanan kita sebagai rakyat. Lalu ada pertimbangan lain antara diri kita dan demokrasi kita di Mesir. Itu karena kita akan menuntut agar, misalnya, orang miskin bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang kaya.

Demokrasi Mesir harus memberi kita peluang untuk bisa berambisi meraih kesempurnaan dan memperbaiki keadaan hidup, memberi peluang pada pekerja untuk bisa mengambil libur selama beberapa

hari dalam setahun dengan gaji ditanggung, memberi peluang pada kaum petani untuk beristirahat selama beberapa hari dalam setahun dengan gaji ditanggung, dan seterusnya.

Tuan-tuan sekalian, ketika kita berbicara tentang demokrasi dan kehidupan sosial di Mesir, kita sebenarnya bukanlah berada di inti permasalahan, melainkan berada di tahapan-tahapan awal. Demokrasi kita, seperti telah saya kemukakan di awal, telah ada secara teoritis dan sudah berupaya untuk ada secara praktis. Tapi, hasil-hasil konkrit dari keberadaan praksis demokrasi baru akan tampak dan terlihat belakangan.

Hemat saya, jalan menuju hasil-hasil konkrit dari keberadaan praktis demokrasi Mesir tidaklah mudah dan sangat terjal. Salah satu karakteristik dasar demokrasi adalah bahwa demokrasi memberi penganutnya hak untuk menuntut, mendesak, dan sungguh-sungguh dalam tuntutan dan desakannya. Apabila kita ingin demokrasi kita benar-benar ada dan benar-benar menghasilkan; apabila kita ingin menyentuh hasil-hasil pertama dari keberadaan demokrasi kita, maka tak ada jalan lain bagi kita kecuali menuntut dan mendesak. Jika tidak, kita bisa mulai dengan mengarahkan tuntutan dan desakan kita kepada menteri sosial yang kita hormati. Kita menuntutnya agar kementerian sosial menunaikan apa yang wajib ditunaikannya di negara demokratis ini, lalu mengambil langkah-langkah strategis yang bisa menjamin kebebasan, ketersediaan pangan, dan keamanan warga Mesir, yang bisa membuat warga Mesir merasa bahwa hidup tidak hanya penuh dengan penderitaan saja, tapi hidup juga harus bisa menjadi sumber kebahagiaan dan senyuman.³¹

31 Ceramah Thaha Husayn ini tidak diketahui keotentikannya, dan disebar oleh peneliti dan kritikus sastra Nabil Faraj di Majalah *al-Dimûqarâtiyyah* terbitan lembaga al-Ahrâm, (edisi April, 2001). Tulisan ini juga dimuat di serial "Ceramah-ceramah demokrasi" oleh sejumlah pemikir di Mesir, yang disebar oleh divisi humas Universitas Amerika di Kairo (1945).

Bab VI

Pendidikan

Manusia tidak mungkin bebas dalam arti yang sesungguhnya jika tidak terdidik dan terpelajar. Dengan terdidik dan terpelajar, mereka dimungkinkan bisa berperan serta di dalam masyarakat dan politik. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan individu, membuat mereka terbebas dari setiap intervensi, dan menjadikan mereka sebagai subjek, bukan objek. Kemampuan ini, di masyarakat liberal, akan semakin meningkat karena liberalisme menaruh kepercayaan penuh terhadap kreasi manusia dan memberi mereka ruang kebebasan seluas-luasnya. Dengan kemampuan ini, manusia akan bisa bertahan dan tenang dalam keadaan apapun. Liberalisme tidak mengatur kehidupan manusia dan semua urusan mereka. Jika negara menentukan semua kemashlahatan warga negaranya, maka pendidikan menjadi sesuatu yang tak penting. Kebodohan adalah cara pemerintah untuk menindas. Sebaliknya, liberalisme berdiri di atas pondasi individu-individu yang mampu dan kreatif, sementara kemampuan dan kreatifitas bergantung penuh pada pendidikan. Contoh ideal bagi liberalisme adalah manusia yang menjalani hidupnya dengan bebas, bertanggungjawab, tercerahkan, terdidik, memahami sistem-sistem politik, dan mengerti hak-hak politiknya, lalu mempertahankan hak-haknya tersebut. Oleh karena itu, pendidikan adalah syarat utama bagi sebuah masyarakat yang

demokratis dan bebas. Pendidikan tentu mempunyai hasil-hasil yang berguna lainnya di lingkup ekonomi. Misalnya, pendidikan akan bisa mendorong dan mempermudah gerak antarkelas dengan memperbaiki hasil-hasil produksi kalangan miskin. Pendidikan adalah pencapaian manusia dan salah satu bagian terpenting dari kemajuan dan revolusi.

Oleh sebab itu, bukan sebuah kebetulan jika banyak dari kalangan liberal Arab di abad 19 dan abad 20 yang memilih menjadi pendidik dan aktivis di lingkup pendidikan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah modern yang mengajarkan ilmu fisika, bahasa, filsafat, geometri, dan berbagai disiplin ilmu modern lainnya.

Kaum reformis Arab tetap bergeliat melalui sekolah-sekolah modern ini meskipun mereka sudah tiada. Kaum liberal Arab mencermati modernitas Eropa, lalu memahami bahwa pencapaian-pencapaian Eropa merupakan produk dari reformasi dan modernisasi pendidikan, dan bahwa semua pencapaian teknologi terkait erat dan berdiri di atas pondasi pendidikan. Sisi teknis modernisasi hanya akan terus berlanjut ketika kaedah-kaedah epistemologisnya juga terpenuhi. Oleh karena itu, meneladani Eropa tidak cukup hanya dengan meniru teknologi-teknologinya atau mengimpor alat-alat produksinya saja, tetapi harus memodernisasi pendidikan agar menghasilkan kemodernan Arab yang hakiki.

Rifa'at Thahthawi, salah satu bapak kebangkitan Arab di abad 19 yang memiliki banyak generasi penerus setelahnya, mendirikan sekolah bahasa pada tahun 1835 sepulangannya dari Paris. Di akhir hayatnya, Rifa'at Thahthawi menuliskan penjelasannya tentang pendidikan di buku *al-Mursyid al-Amîn li al-Banât wa al-Banîn*. Judul buku ini menunjukkan dengan sendirinya bahwa Rifa'at Thahthawi telah berusaha meratakan pendidikan bagi kalangan laki-laki dan perempuan.

Sependapat dengan Rifa'at Thahthawi, Muhammad Abduh melihat bahwa pendidikan adalah salah satu sarana penting dalam mereal-

isasikan modernitas Arab, dan bahwa reformasi harus dilakukan secara gradual dan berangsur-angsur. Muhammad Abduh menyerukan dipelajarinya ilmu-ilmu alam, dan melihat bahwa Islam jauh lebih selaras dengan ilmu-ilmu tersebut ketimbang agama Kristen. Abduh juga telah mencoba mereformasi sekolah-sekolah keagamaan dan mengubah orientasi konvensional ke arah pendidikan ijthadi yang bebas dan rasional.

Dari Libanon, kita mengenal buku *'Ibrah wa Dzikhra: al-Dawlah al-'Utsmaniyyah Qabl al-Dustur wa Ba'dahu* yang ditulis oleh Sulaymân al-Bustânî pada tahun 1908 dan berisi tentang penekanan akan pentingnya kebebasan pendidikan. Al-Bustânî pernah menyaksikan sendiri bagaimana Turki Utsmâni mengontrol sekolah-sekolah negeri, lalu mengkritiknya karena itu bisa membunuh kebebasan ilmiah dan kreatifitas murid. Menurutnya, ilmu pengetahuan tidak boleh dibatasi dengan agenda-agenda politik, karena ilmu pengetahuan tidak mengenal batas-batas politik. Pendidikan dan ilmu pengetahuan harus bebas agar bisa menciptakan warga negara yang bebas pula. Tapi, kontrol Turki Utsmâni telah mencekik kebebasan ini sehingga yang dihasilkan adalah orang-orang yang terkekang dan bukan bebas.

Thaha Husayn melanjutkan tongkat estafet dalam mendorong pendidikan di abad 20 dan menekankan pentingnya pendidikan politik di samping pendidikan modern secara umum. Menurutnya, pendidikan politik akan membuka jalan menuju masyarakat yang benar-benar demokratis. Sebab, demokrasi memberi hak pilih kepada manusia, dan pada saat sama menuntut mereka untuk mampu menggunakan hak-hak tersebut. Seperti pada pendahulunya, Thaha Husayn berupaya memodernisasi dan memperbaharui sistem pendidikan di Mesir. Termasuk agenda reformasi pendidikan Thaha Husayn adalah Universitas Al-Azhar yang akhirnya membuat dirinya harus melakukan perdebatan sengit dengan guru-guru di sana pada

tahun 40-an. Thaha Husayn diangkat menjadi menteri pendidikan pada tahun 1950, lalu menghapus biaya sekolah dan mengatakan sebuah pernyataan yang sangat masyhur, “Pendidikan itu seperti air dan udara”. Ia pun memberi kesempatan belajar baru yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin Mesir.■

Independensi Pendidikan (1908)³² Sulaymân al-Bustânî

Ketika menyebut ilmu pengetahuan dan pendidikan, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengatakan kebenaran. Kita semua mengakui bahwa keduanya telah maju dan berkembang pesat. Mayoritas warga negara Turki Utsmâni juga demikian, memiliki porsi ilmu pengetahuan tertentu. Sejumlah orang yang bisa baca-tulis juga telah mengajari sejumlah orang yang buta huruf di banyak wilayah. Tetapi, orang yang mau mengamati tahu bahwa kemajuan ini tidaklah pada jalur semestinya. Alasannya, arus ilmu pengetahuan ibarat aliran deras yang akan menyibak setiap hal yang menghalangi jalannya, seperti kebodohan dan kejumudan. Aliran tersebut telah mengelilingi kita dari setiap sisi, tetapi aliran itu tetap tidak bisa meluas, bagaimana pun kerasnya upaya yang dilakukan. Seandainya aliran itu menemukan jalan yang mudah, aliran air itu—dalam kurun waktu selama 30 tahun—pasti akan bisa menghilangkan semua tanaman pengganggu dan batu karang yang menghalangi jalannya, akan bisa menciptakan taman-taman pengetahuan yang elok, indah, dan memikat. Ironisnya, garis kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan terdahulu telah mengubah sebagian kebaikan pendidikan menjadi keburukan dan sebagian manfaatnya menjadi bahaya. Pemerintahan terdahulu telah mengambil satu kebijakan dalam hal pendidikan. Alangkah bagusnya jika pemikiran pemerintahan ini mengandung maksud yang baik

32 Artikel ini diambil dari buku Sulaymân al-Bustânî berjudul, *‘Ibrah wa Dzîkrâ: al-Dawlah al-‘Utsmâniyyah Qabl al-Dustûr wa Ba`dah*, (Beirut: Mathba’ah al-Akhhâr, 1908).

dan cara yang lurus. Pemikiran tersebut adalah pemikiran klasik yang pada dasarnya bermuara pada masa kekuasaan Sultan Salim. Alih-alih membawa pendidikan ke arah yang lebih baik, pemikiran itu di masa Sultan Salim justru menjadi salah satu sebab kebodohan dan kejumudan. Pemikiran kuno tersebut lalu diemban oleh Sultan Mahmud dan masih memenuhi kepala para pengambil kebijakan Turki Utsmânî. Pada perkembangan selanjutnya, didirikanlah sejumlah sekolah-sekolah persiapan di beberapa wilayah dan sejumlah sekolah tinggi (sekelas universitas) di Astana pada masa kekuasaan Sultan Abdul Aziz, lalu ditambah lagi dengan didirikannya sekolah-sekolah lain oleh Sultan yang sekarang (Abdul Hamid II). Sayangnya, metode-metode pendidikan dicerderai oleh ketatnya kontrol dari pemerintah. Metode-metode yang sebenarnya bermanfaat langsung disingkirkan seperti disingkirkannya para tawanan ke Fazan. Bahkan, para murid dan pelajar diharamkan mempelajari ilmu sejarah *hatta* sejarah negeri mereka sendiri. Geografi dan peta negara Turki Utsmânî diubah sedemikian rupa, lalu dimasukkan ke dalamnya beberapa nama yang mencerminkan kebanggaan dan keagungan keluarga para sultan Turki Utsmânî. Mengajarkan atau bahkan membaca ilmu filsafat dan ilmu sosial, diharamkan. Guru-guru dilarang keras menyampaikan penjelasan yang jelas kepada murid-muridnya, hal mana membuat para guru menjadi bingung. Mereka takut terhadap tekanan pemerintah, *hatta* ketika menyampaikan materi pelajaran nahwu atau hitung-hitungan sekali pun. Mereka bahkan memakai bahasa isyarat ketika menjelaskan bilangan tertentu, tanda *fathah*, dan *kasrah*. Semua ini dilakukan agar otak para murid tidak terisi oleh ilmu pengetahuan yang bisa membuat mereka mengerti bahwa diri mereka termasuk umat manusia yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi. Ketika pemerintah berhasil mencapai tujuan ini sehubungan dengan murid-murid pemula, bagaimana kira-kira perlakuan mereka terhadap murid dan pelajar di sekolah-sekolah tinggi di Astana, seperti sekolah

kerajaan, sekolah kesultanan, akademi militer, dan semua pemuda-pemuda yang cerdas dan pintar? Apa yang kira-kira akan dikatakan oleh para murid di sekolah hukum (dan ilmu hukum termasuk cabang ilmu filsafat) jika setiap hari guru-guru mereka selalu mengubah metode pengajaran, mengganti konsep, membuang materi pelajaran hukum Romawi, dan hal-hal lain yang bisa menambah keengganan para murid mempelajari ilmu-ilmu hukum? Atau, apa yang kira-kira akan dikatakan oleh para murid di akademi militer jika mereka dilarang membahas jenis-jenis pemerintahan dan hanya diberi materi pelajaran yang sangat sedikit dan dibatasi? Para pemuda dan murid yang kebetulan memiliki kecerdasan dan kepintaran tinggi, dikumpulkan menjadi satu dan lalu ditanya mengenai jenis pemerintahan yang diinginkan; dan hanya yang paling cerdik di antara mereka yang menjawabnya dengan menyebut pemerintahan tirani. Adapun sisanya, yang mengungkapkan isi hati mereka dan lalu menjawab dengan menyebut pemerintahan konstitusional, diusir dari sekolah dan dibuang ke satu tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Sedangkan murid tercerdik dari mereka, yang menjawab dengan menyebut pemerintahan tirani dan yang menggunakan kecerdikannya untuk kepentingan diri sendiri, diberi fasilitas istimewa dan diangkat posisinya di sekolah ke level yang lebih tinggi dengan sangat cepat.

Kekerasan dan tekanan pemerintah ini dimaksudkan tak lain untuk menutup mata kalangan pemuda. Mereka sengaja ditumbuhkan menjadi alat yang disfungsi di tangan pemerintah. Penglihatan mereka dihalang-halangi dari kilatan cahaya sehingga mereka tidak bisa melihat persamaan di antara diri mereka. Apakah pemerintah lupa bahwa ketika cahaya telah keluar maka cahaya itu akan memecah kegelapan dan menembus apa yang ada di balik tabir kegelapan, dan bahwa kejamnya kekerasan justru akan mempersempit dan lalu menghilangkan rasa takut? Apakah pemerintah lupa bahwa sebagian besar penyeru reformasi dan revolusi di Eropa itu dulu juga pernah

mengalami intimidasi dan diskriminasi dalam pendidikan awal mereka?

Kita tinggal membicarakan tentang sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah asing. Sekolah-sekolah swasta, yang sangat kita perhatikan dan yang didirikan oleh kalangan pribumi, hanyalah sedikit dan tidak dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Ini karena sebagian besar sekolah swasta berada di bawah kontrol dan pengawasan pemerintah setempat. Adapun sekolah-sekolah asing, yang mempunyai independensi, justru dilarang keras. Sekolah-sekolah asing banyak diserbu oleh pelajar dan murid dari berbagai negara dan agama seperti orang haus yang menyerbu air dingin nan segar. Sekolah-sekolah ini memancarkan cahaya ilmu pengetahuan ke banyak kalangan pemuda kita. Tapi, kita tahu betul bahwa sekolah-sekolah ini juga tidak banyak bermanfaat. Kita hanya bisa mengatakan terus terang bahwa di dalam sekolah-sekolah asing tersebut terdapat rekahan yang sangat luas yang mustahil disumbat kecuali dengan mengubah hukum-hukum yang berlaku di negeri. Para pemilik sekolah-sekolah ini seharusnya menaruh perhatian penuh dalam menyebarkan semangat nasionalisme ke dada para murid-muridnya. Tapi, sayangnya, mereka justru berafiliasi kepada umat-umat pesaing sehingga mereka tidak berusaha sedikit pun menciptakan para pelajar dan murid yang gigih membela umat dan negeri. Demikianlah, para pelajar dan murid memiliki pemikiran dan aliran yang berbeda-beda. Demikianlah, pihak-pihak asing membelah akal-akal kita melalui jalan ilmu pengetahuan dan membelah negeri kita melalui jalan politik.

Musibah bertambah parah lagi dengan tidak diizinkan para lulusan berbagai sekolah untuk mengadakan seminar-seminar atau pertemuan-pertemuan ilmiah, meskipun itu diadakan hanya dalam rangka bertukar pendapat dan pemikiran. Pemerintah takut jika pertemuan-pertemuan ilmiah seperti ini akan menyebabkan bercampurnya akhlak dan minuman.

Mengingat kita masih sangat bersedih atas kemuraman masa lampau, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyambut senyuman masa depan dengan penuh kebahagiaan, yaitu ketika sudah disatukannya metode pendidikan di sekolah-sekolah negeri; diberikannya medan yang seluas-luasnya bagi sekolah-sekolah swasta; dibolehkannya pengajaran ilmu filsafat, ilmu sosial dan ilmu sastra, terlebih sejarah negara Turki Utsmâni dan geografinya; dimudahkannya jalan bagi para pelajar semua sekolah, baik negeri, swasta, maupun asing, untuk membuka kran pengetahuan dan mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah sehingga mereka semua bisa saling membantu dan menyokong satu sama lain dalam mengabdikan diri kepada umat yang semenjak 24 Juli telah menjadi satu umat. ■

Keikutsertaan Kaum Perempuan Dalam Belajar, Mengajar, dan Mencari Ilmu Pengetahuan (1873)³³ Rifa'at Thahthawi

Perhatian yang besar mesti dicurahkan pada pendidikan kaum perempuan dan kaum laki-laki demi kebaikan hubungan pasangan suami-istri. Kaum perempuan harus belajar membaca, menulis, berhitung, dan seterusnya. Hal ini akan menjadikan mereka lebih berakal dan beretika, membuat mereka bisa menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, dan membuat diri mereka bisa bersanding dengan kaum laki-laki dalam mengutarakan pandangan dan pendapat. Pada akhirnya, mereka akan mendapat tempat dan posisi yang tinggi di hati kaum laki-laki karena hilangnya kejumudan akal dan kecerobohan, hal mana yang sebelumnya telah menciptakan anggapan bahwa kaum perempuan bisa dipergauli dengan sesuka

33 Artikel ini diambil dari buku karangan Rifa'at Thahthawi yang berjudul, *al-Mursyid al-Amîn li al-Banât wa al-Banîn*, (Kairo: al-Majlis al-A'lâ li al-Tsaqâfah, 2002), hlm. 66 – 68.

hati. Agar supaya kaum perempuan dibutuhkan, mereka harus diberi kesempatan untuk memikul berbagai macam kesibukan dan pekerjaan seperti yang diberikan kepada kaum laki-laki, tapi tentu saja yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Apa yang bisa dikerjakan perempuan maka itu harus diberikan, hal mana yang kemudian membuat perempuan bisa terhindar dari pengangguran. Tidak adanya pekerjaan di tangan seorang perempuan akan membuat lidahnya sibuk dengan perkataan-perkataan bohong dan hatinya sibuk dengan hawa nafsu dan asumsi-asumsi. Jadi, pekerjaan akan menjaga perempuan dari ketidakpantasan dan mendekatkannya ke arah kebaikan. Apabila keadaan menganggur adalah sesuatu yang dicela bagi kaum laki-laki, keadaan yang sama adalah sesuatu yang juga dikecam keras bagi kaum perempuan. Perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan akan banyak menghabiskan waktu untuk menggunjing tetangganya, membicarakan makanan, minuman, pakaian, dan apa saja yang mereka dan orang lain miliki. Pandangan bahwa perempuan tidak perlu belajar baca-tulis dan bahwa baca-tulis adalah sesuatu yang makruh bagi mereka, yang kesemuanya didasarkan pada beberapa riwayat, seharusnya tidak digunakan untuk menggeneralisir semua persoalan. Tak perlu dipertanyakan lagi, pengusung pandangan seperti ini melandaskan diri pada asumsi dasar bahwa perempuan pada hakikatnya sangat dekat dengan tipu muslihat, kelicikan, dan penipuan. Pendapat-pendapat perempuan, menurutnya, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan karena daya pikir dan akal mereka lemah alias tidak sempurna. Mengajarkan baca-tulis pada perempuan barangkali akan membuat perempuan menjadikan ilmunya itu sebagai sarana-sarana komunikasi yang tidak pantas dan tidak diperbolehkan, seperti untuk menulis surat kepada Zaid dan semisalnya. Seandainya Allah SWT mau menciptakan perempuan sama seperti laki-laki dalam hal ketajaman nalar dan ketepatan pandangan, niscaya Allah SWT sudah melakukannya. Akan tetapi,

Allah SWT menciptakan perempuan untuk menjadi perhiasan rumah dan wadah bagi terpeliharanya keturunan. Pernyataan seperti ini tidak serta-merta mengandung pengertian bahwa semua perempuan memiliki sifat-sifat yang seragam. Pendek kata, pernyataan tersebut tidak bisa diarahkan ke semua individu perempuan. Berapa banyak riwayat yang menyebutkan larangan mencintai dunia, berdekatan dengan penguasa, dan menumpuk kekayaan, yang kesemuanya menjadi penyebab hakiki munculnya keburukan dan kerusakan yang nyata. Bukanlah perempuan penyebab kerusakan. Pendidikan perempuan sama sekali tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan. Bagaimana mungkin itu terjadi, sementara istri-istri Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk orang-orang yang mahir baca-tulis, seperti Hafshah binti Umar, 'Aisyah binti Abu Bakar, dan selain keduanya. Di samping itu, sejarah tak pernah mencatat bahwa banyak perempuan yang telah membuat malu bangsanya karena mereka memiliki etika tinggi dan pengetahuan luas. Di sisi lain, banyak laki-laki yang telah dibutakan oleh beragam ilmu pengetahuan yang pada akhirnya membuat mereka melakukan berbagai penyimpangan dan kerusakan. Kerasnya larangan atas perempuan untuk tidak mempelajari baca-tulis tak lain disebabkan oleh sikap kecemburuan yang berlebihan terhadap mereka. Ini dilakukan agar supaya perempuan tidak sampai memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak merebut lahan kerja kaum laki-laki. Sikap cemburu berlebihan ini pada dasarnya bersumber dari tradisi-tradisi lokal dan fanatisme Jahiliyah. Seandainya saja tradisi lain dicoba, hasil yang akan didapatkan pasti memuaskan. Seorang ayah, misalnya, mempercayakan anak gadisnya yang masih kecil ke seorang guru untuk diajari ilmu baca-tulis, ilmu hitung, dan ilmu-ilmu lain yang pantas dipelajari oleh perempuan, seperti menjahit dan menenun, hingga sang anak berumur lima belas tahun. Setelah itu, sang ayah menikahkannya dengan seorang laki-laki yang berakhlak baik dan berpendidikan sama. Di sini, kita tentu saja tidak

bisa mengatakan bahwa anak perempuan tersebut tidak layak untuk bersanding dengan laki-laki suaminya itu, dan tidak pantas untuk dipercaya. Jadi, memberi kesempatan pendidikan kepada kaum perempuan adalah kata lain dari upaya menerangi akal-akal mereka dengan lampu ilmu pengetahuan yang berguna. Tak bisa diragukan lagi, seorang perempuan yang bisa menguasai ilmu baca-tulis, memiliki akhlak yang mulia, dan rajin menelaah ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat adalah ciri-ciri kesempurnaan paling indah dan kecantikan paling memikat yang didambakan oleh laki-laki berpendidikan. Bagi perempuan, etika sudah lebih dari cukup daripada kecantikan fisik. Tapi, kecantikan membutuhkan etika karena ia hanyalah sesuatu yang bersifat sementara dan akan hilang. Etika dan kecantikan seorang perempuan akan banyak mempengaruhi akhlak anak-anaknya di kemudian hari. Anak perempuan yang melihat ibunya sering menelaah buku, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, dan sibuk mendidik anak-anaknya, maka sang anak akan berkeinginan agar bisa menjadi seperti ibunya. Ini berbeda ketika ia melihat ibunya sering bersolek, berdandan, dan membuang-buang waktu dengan obrolan-obrolan tak penting dan jalan-jalan yang tak bertujuan. Ia akan langsung mempersepsikan bahwa semua perempuan itu sama seperti ibunya. Betapa jauhnya perbedaan antara kedua pemikiran anak tersebut. Perempuan yang menyandarkan dirinya pada ilmu pengetahuan dan etika, lalu bertindak demi meraih ridha suaminya dan demi mendidik anak-anaknya, pasti akan dicintai semua orang dan memperoleh apa yang diinginkan, sebagaimana dikatakan oleh al-Bushayrî.

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa manfaat pendidikan perempuan itu jauh lebih banyak ketimbang madharatnya. Bahkan, bisa dikatakan, pendidikan perempuan pada hakikatnya tidak mengundang madharat apapun. Tidak sedikit nama perempuan yang diabadikan di dalam hadits dan riwayat. Di masa Rasulullah SAW, terdapat banyak perempuan yang belajar dan mengajar ilmu

baca-tulis, seperti al-Syifâ' Ummu Sulaymân. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah berkata kepada al-Syifâ' Ummu Sulaymân, "Ajarilah Hafshah cara meruqyah penyakit *namlah* sebagaimana engkau telah mengajarkan kepadanya ilmu tulis-menulis." Abu al-Dardâ' meriwayatkan bahwa Ummu Sulaymân pernah berkata, "Suatu ketika Nabi SAW menemuiku saat aku sedang bersama Hafshah. Beliau lalu bersabda, "Tidakkah engkau mengajarnya cara meruqyah penyakit *namlah* sebagaimana engkau telah mengajarnya ilmu tulis-menulis'." *Namlah* adalah benjolan kecil yang sedikit menyembul keluar, yang setelah beberapa lama akan bernanah dan meluas. Kalangan medis menyebut penyakit *namlah* dengan bisul/kudis. Hadits di atas menunjukkan bahwa perempuan boleh mempelajari ilmu baca-tulis dan bekerja bersama laki-laki. Adapun adanya larangan perempuan mempelajari ilmu baca-tulis hendaknya dipahami bukan dalam kerangka keharusan dan kepastian. Hendaknya masing-masing pihak, laki-laki dan perempuan, berpegang pada hadits-hadits tentang keutamaan belajar dan mengajar ilmu pengetahuan. Kedua pihak juga harus sama-sama menyandarkan diri pada penelaahan dan penelitian sehingga mereka bisa memetik buah manis dari ilmu pengetahuan. ■

Pendidikan Politik (1946)³⁴ Thaha Husayn

Saya tidak tahu sejauh mana generasi ini, kalangan terpelajar Mesir dan kalangan Mesir yang bergantian memangku urusan-urusan pemerintahan dan perwakilan parlemen, memiliki kemauan dan keberanian untuk menunaikan kewajiban pertama yang tak bisa ditawar lagi, yaitu pendidikan politik terhadap rakyat. Kita sudah sering berbicara perihal demokrasi Mesir. Kita pun sudah seringkali mendiskusikan

34 Artikel ini dimuat di Majalah *al-Tashawwur* (edisi 22 November 1946) dan di buku *Turâts Thaha Husayn: al-Maqâlât al-Shuhufiyyah min 'Âm 1908 – 1907* (Mesir: Dâr al-Kutub wa al-Watsâ'iq al-Qawmiyyah, 2002), hlm. 202 – 206.

pandangan bahwa umat adalah sumber kekuasaan. Tapi, di satu sisi, kita belum banyak bekerja untuk mewujudkan demokrasi Mesir pada tataran praksis. Di sisi lain, kita pun belum banyak mendidik rakyat tentang bagaimana cara mereka memperlakukan kekuasaan konstitusionalnya dan mempraksiskannya demi kemashlahatan hidup dan negara mereka.

Ketika kita membicarakan, mendiskusikan, atau melontarkan kritik atas kehidupan demokrasi di Mesir, kita baru akan menyentuh jantung persoalan tatkala kita berani menegaskan bahwa demokrasi takkan pernah berjalan di jalurnya yang benar kecuali ketika kebodohan dan buta-huruf sudah berhasil diperangi, pendidikan dan keterdidikan rakyat sudah merata, dan domain hak dan kewajiban sudah didefinisikan. Sayangnya, kita mendapati beberapa catatan yang menyatakan sebaliknya; pendidikan di Mesir belum merata sebagaimana semestinya, banyak rakyat yang masih buta huruf, dan demokrasi di Mesir masih berada di level bayi—saya tidak mengatakan di level anak kecil! Para pengusung demokrasi dari kalangan kita sudah banyak membuat catatan, lalu meneriakkan perang melawan kebodohan dan mendesak pemerataan pendidikan bagi rakyat. Tujuannya adalah agar demokrasi menjadi kebenaran praksis di Mesir, agar orang-orang yang lidah dan hatinya mempercayai dan memikirkan demokrasi bisa menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan satu hal; bahwa kita masih mengharapkan kehidupan demokratis di Mesir sampai kita bisa menyiapkan dan memberdayakan rakyat. Apabila harapan ini tidak mungkin, maka minimal kita harus tetap mengawal demokrasi, meluruskan apa yang perlu diluruskan untuknya, dan berharap agar konstitusi berjalan pada jalurnya. Kita tidak bisa menuntut realisasi ini semua kecuali ketika kita meyakini bahwa rakyat masih benar-benar menginginkan kehidupan yang demokratis.

Saya tidak meragukan bahwa pemerataan pendidikan adalah cara paling tepat dan kuat untuk membawa demokrasi ke tataran praksis dan menyiapkan rakyat agar bisa menggunakan hak-hak politik mereka sebagaimana semestinya. Saya tidak meragukan bahwa salah satu kewajiban terpenting bangsa Mesir adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mendidik rakyat dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan cara seefektif mungkin. Tapi, saya juga tidak meragukan bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya cara untuk membawa demokrasi pada tataran praksis dan menancapkannya ke hati rakyat. Saya yakin bahwa ada cara-cara lain di luar pendidikan yang juga tak kalah efektif dalam mendidik rakyat. Bahkan, boleh jadi, cara-cara itu jauh lebih efektif, lebih kuat, dan lebih penting karena tidak terkait dengan kehidupan teoritis, melainkan kehidupan praksis sehari-hari yang selalu dialami oleh manusia setiap pagi dan setiap malam.

Anda tentu saja tidak mengajarkan ilmu baca tulis dan hitung kepada anak kecil agar supaya ia bisa makan, minum, lari, jalan dan bicara; atau mengajarkan kepadanya ilmu nahwu, geografi, dan sejarah. Tetapi, insting dan naluri yang sudah dibawanya semenjak lahir akan mendorongnya untuk melakukan semua aktifitas tersebut. Pembelajaran dan pendidikan lalu akan menyempurnakan naluri ini; mendorongnya untuk terus maju jika ia berhenti, dan mengembalikannya ke arah keseimbangan jika ia tidak terkendali atau melampaui batas.

Termasuk tindakan sangat tolol jika Anda mengajarkan teori bagaimana berjalan dan berlari kepada anak berusia satu atau dua tahun! Melalui kehidupan praksis sehari-hari, seorang anak kecil belajar sendiri tentang banyak hal yang tak mungkin bisa dibandingkan dengan hal yang dipelajarinya di sekolah atau di buku.

Jika kita berani menegaskan bahwa demokrasi Mesir masih berada di level anak kecil, maka sudah semestinya kita mendidiknya

sebagaimana kita mendidik anak kecil. Pertama-tama kita bersandar pada kehidupan praksis sehari-hari, baru kemudian pada pelajaran-pelajaran teoritis.

Kehidupan praksis ini adalah sesuatu yang sangat jauh berbeda dengan apa yang telah kita bentuk semenjak kehidupan demokratis dikenal di tengah-tengah kita. Kita semua, misalnya, meyakini bahwa kita akan membawa rakyat ke arah kehidupan politik modern ketika kita menyeru mereka untuk turut serta dalam pemilihan umum yang diselenggarakan dari waktu ke waktu, atau ketika kita mengajak mereka untuk menyaksikan rapat-rapat parlemen dan kemudian menyebarkan hasil-hasil rapat tersebut ke berbagai jurnal dan majalah. Ini semua mungkin bisa bermanfaat, bahkan bisa dipastikan bermanfaat. Tapi, ada hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat, berfaedah, dan menyasar ke semua individu rakyat. Tidak semua orang Mesir bisa menyaksikan rapat-rapat parlemen dan membaca hasil-hasilnya. Mereka pun tidak semuanya bisa pergi ke tempat-tempat pemungutan suara di pemilihan umum lima tahun sekali seperti yang diinginkan oleh konstitusi, atau dua tahun sekali seperti yang dikehendaki oleh tradisi Mesir semenjak konstitusi dibuat. Ini semua bukanlah cara yang tepat untuk mendidik rakyat bagaimana cara menggunakan wewenang konstitusionalnya dengan baik. Cara yang tepat untuk itu, satu cara yang hampir tidak pernah terpikirkan oleh kita atau tidak pernah kita lakukan di kehidupan demokrasi kita, adalah diajarkannya kepada penduduk desa dan kota perihal penggunaan hak dan kewajiban politik mereka, yaitu melalui sekolah-sekolah atau dewan-dewan desa! Pembaca tidak usah takut, begitu pun dengan menteri sosial. Sekolah-sekolah ini tidak bermaksud menakut-nakuti siapa pun, tetapi hanya mencoba merealisasikan pendidikan politik bagi rakyat pada level sebaik dan sesempurna mungkin.

Memang baik jika semua warga Mesir mengetahui hak-hak politik kewarganegaraannya, lalu memilih wakil-wakilnya di parlemen dan

senat, atau bahkan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen atau senat. Tetapi, ada dewan-dewan lain yang jauh lebih dekat dengan rakyat, jauh lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan jauh lebih menyentuh kepentingan mereka secara langsung. Dewan-dewan inilah yang nantinya akan mengatur semua urusan desa dan kota setiap harinya, mengadakan evaluasi tahunan, rakyat pun akan belajar bagaimana proses pemilihan yang baik ketika memilih para anggota dewan-dewan tersebut, rakyat juga akan belajar bagaimana proses pengawalan terhadap opini publik saat mengawal dan mengawasi kerja mereka, hingga pada akhirnya rakyat bisa benar-benar terlatih dan terdidik, sementara wakil rakyat di dewan-dewan tersebut bisa mengerti bahwa mereka bukanlah majikan rakyat yang bisa seenaknya memerintah rakyat, melainkan pelayan rakyat yang akan melakukan kemauan rakyat dan mewujudkan keinginannya; jika mereka melakukan pelanggaran maka mereka akan kehilangan kepercayaan rakyat dan rakyat pun akan memberhentikan mereka!

Pembaca cukup membayangkan sebuah penduduk desa kecil yang memilih wakil-wakilnya di desa sebagai pengurus dan pengatur semua urusan desa, lalu mengawasi dan mengontrol kerja mereka, bahkan juga melontarkan kritik saat mereka mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia yang tak ada sangkut-pautnya dengan urusan desa. Pembaca cukup memperkirakan bagaimana ini bisa memberi penduduk desa pendidikan politik yang baik, mengajarkan kepada mereka tentang makna hak dan kewajiban, makna perwakilan rakyat dan makna pemilihan wakil-wakil rakyat, serta makna pengawalan dan kontrol wakil rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Bisa dipastikan, kita benar-benar telah kehilangan banyak waktu yang berharga. Seandainya dulu cara seperti di atas diundangkan bersama konstitusi atau diundangkan segera sesudah pembekuan parlemen Mesir, rakyat Mesir tentu sudah bisa merasakan hak dan kewajiban politiknya sejak dua puluh tahun lampau, bisa

mengetahui nilai-nilai demokrasi sebagaimana semestinya, dan bisa memaksimalkan kekuasaan tingginya dalam memilih parlemen, mengawal kerja parlemen, atau bahkan memberi arahan kepada parlemen sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju. Tetapi, sayangnya, kita membangun kehidupan demokrasi kita tanpa pondasi; kita membangun lantai terakhir rumah kita tergantung di atas awan yang setiap saat bisa roboh terkena hembungan angin!

Orang-orang yang bertanya tentang sumber penderitaan ini—satu penderitaan yang membuat kehidupan Mesir jauh dari ketentraman dan yang membuat dewan-dewan perwakilan rakyat menjadi mirip sesuatu yang sia-sia dan lebih baik tidak usah mengemban tugas apa-apa—mungkin akan mendapatkan jawaban yang cukup sederhana. Sumbernya tak lain adalah diri kita sendiri yang tidak menanam pohon demokrasi di setiap desa dan di setiap kota di Mesir. Seandainya saja kita melakukan itu sejak dua puluh tahun lampau, keadaan kita tentu takkan serumit seperti sekarang ini dan Mesir tentu akan jauh lebih kebal dari terpaan gejolak-gejolak politik yang tidak sehat.

Seandainya saja kita melakukan itu semenjak dua puluh tahun lampau, seluruh penduduk Mesir pasti benar-benar tahu bahwa mereka mempunyai hak yang mesti dipenuhi dan kewajiban yang mesti ditunaikan, bahwa urusan-urusan publik yang dipikul oleh parlemen sebenarnya merupakan rangkuman dari urusan-urusan khusus yang dipikul oleh dewan-dewan desa, dan bahwa hak rakyat atas parlemen dan para menteri itu sebenarnya identik dengan hak penduduk desa atas dewan desa.

Jika seandainya Anda ingin membubarkan dewan perwakilan rakyat, maka tindakan tersebut takkan pernah bisa membawa manfaat apa-apa kecuali hanya akan menimbulkan dampak-dampak yang berbahaya seperti yang bisa kita lihat sekarang ini, yang memindahkan problema-problema rakyat secara mendadak dari ujung

selatan ke ujung utara atau dari ujung timur ke ujung barat, dan yang memberi kesempatan pada pemerintah untuk membuat dewan-dewan perwakilan seperti halnya membuat makanan! Seandainya saja kita sudah membangun sistem demokrasi yang mendasar di desa-desa dan di kota-kota, pembubaran dewan perwakilan rakyat hanya akan menjadi sesuatu yang takkan menyentuh jantung permasalahan, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Prof. Luthfi Sayyid Bâsyâ. Demikian itu karena ketika rakyat sudah menaruh kepercayaan penuh terhadap dewan perwakilan yang dibubarkan, maka rakyat pasti akan memilih mereka kembali dan takkan menerima rekayasa atau pemalsuan hasil pemilihan. Tapi, jika rakyat sudah tidak lagi mempercayai mereka, rakyat pasti akan memilih dewan lain sesuai dengan kehendak dan kemauan tulusnya.

Orang bijak dari Perancis pernah mengatakan, “Terlambat mengerjakan itu jauh lebih baik ketimbang tidak bertindak sama sekali.” Kita telah kehilangan waktu lebih dari dua puluh tahun. Apakah ada cara lain bagi kita selain mencoba mencari apa yang telah terlewatkan, lalu mulai berjalan di jalan yang semestinya ditempuh, dan menetapkan undang-undang yang menjadikan dewan-dewan desa sebagai sistem utama demokrasi di Mesir dan yang merealisasikan kekuasaan rakyat sebagai kebenaran praksis, bukan hanya pernyataan yang hilang diterpa angin?!■

Bab VII

Perempuan

Kelompok reformis liberal tentu menaruh perhatian besar pada peran perempuan di dalam masyarakat dan pada sarana-sarana penguatnya. Hak-hak perempuan termasuk hak-hak manusia yang tidak butuh penjelasan tambahan apa-apa. Hanya saja, realitas sehari-hari sungguh jauh berbeda dengan teks-teks teoritis. Jadi, hak-hak perempuan bukanlah persoalan teoritis atau filosofis, melainkan persoalan praksis dan realistis. Hak-hak dan kebebasan perempuan tidak sepenuhnya bisa direpresentasikan oleh undang-undang dan konstitusi. Kalangan liberal Arab telah mendiskusikan sarana-sarana penguat bagi kemuliaan perempuan dari berbagai perspektif yang berbeda. Perbedaan perspektif ini bisa kita lihat, misalnya, pada kerja Qâsim Amîn di buku masyhurnya *Tahrîr al-Mar'ah* yang ditulis pada tahun 1899. Di beberapa tema di buku ini terdapat peran serta Muhammad Abduh yang sebelumnya memang tidak diketahui, meskipun pada akhirnya diungkap oleh Muhammad 'Imârah. Amîn dan Abduh mendiskusikan perihal perempuan dari perspektif keagamaan Islam. Kedua pemikir ini tegas menyatakan bahwa syariat Islam tidak pernah menyuratkan kewajiban hijab bagi perempuan. Ketentuan diwajibkannya hijab bagi perempuan hanya berasal dari taklid dan tradisi, bukan dari ushul fikih. Muhammad

‘Abduh, yang di buku tersebut mematahkan argumentasi berbagai aliran dan tradisi serta mempraktikkan ijhtihad yang bebas-rasional, mencoba menghadirkan makna-makna dan dimensi-dimensi baru di dalam syariat Islam. Di buku terakhirnya yang berjudul *al-Mar’ah al-Jadidah*, Qâsim Amîn menyangkal para pengritik buku pertamanya dan membaca persoalan perempuan dari perspektif sosiologis. Qâsim Amîn memilih tidak melihat karakter-karakter agama, tapi etika keduniawian dan asas manfaat dari perspektif sosiologis. Setiap orang mempunyai sekumpulan hak dan kewajiban yang sama, tidak peduli apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Oleh sebab itu, tidaklah masuk akal jika sebagian hak dasar manusia itu dipangkas dan dilarang. Qâsim Amîn menegaskan manfaat kebebasan perempuan saat menyatakan, “Perempuan yang bebas, *capable*, dan berpendidikan adalah partner utama laki-laki, dan begitu pun sebaliknya. Kebebasan perempuan akan menyokong kemajuan sebuah masyarakat. Dan, satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan perempuan, satu hal yang mambawa segudang manfaat bagi perempuan dan seluruh anggota masyarakat.”

Sebagian orang berpendapat bahwa mendidik anak dimulai sejak dua puluh tahun sebelum lahir melalui pendidikan ibu-ibu mereka. Tetapi, termasuk sebuah keharusan adalah kebebasan perempuan di setiap level kehidupan dan keikutsertaannya di ranah politik dan ekonomi. Demi mencapai tujuan ini, kalangan liberal Arab ingin menghapus beberapa undang-undang yang nyata-nyata merugikan kaum perempuan, seperti soal poligami dan warisan. Qâsim Amîn mengatakan, “Sebuah masyarakat takkan bisa bebas jika kaum perempuannya tidak bebas atau bahkan terbelenggu, sebagaimana dituturkan oleh sastrawan Nazzâr Qubbânî³⁵:

35 Hidup antara tahun 1923 hingga 1998. Lihat, *Yawmiyyât Imra’ah*, hlm. 23.

*Aku akan menulis tentang sahabat-sahabat perempuanku
Dan kisah masing-masing dari mereka
Aku melihat mereka, aku melihat diriku sendiri
Tragedi seperti tragediku
Aku akan menulis tentang sahabat-sahabat perempuanku
(...)
Tentang jutaan syuhada' perempuan
Yang dikubur tanpa nama
Di kuburan tradisi
Sahabat-sahabat perempuanku.”*

Kebebasan Perempuan³⁶ (1900) Qâsim Amîn

Kaum filsuf kuno tidaklah salah ketika mengemukakan pandangan keliru tentang makna kebebasan manusia. Demikian itu karena mereka meyakini bahwa Tuhan telah menciptakan manusia ke dalam dua kelompok; kelompok yang diberi keistimewaan berupa kebebasan dan kelompok yang ditakdirkan sebagai budak.

Kehidupan orang-orang bebas-merdeka jauh dari kebebasan dan terbelenggu oleh kekuasaan kepala rumah tangga dan pemimpin-pemimpin pemerintahan.

Sejarah membuka mata kita bahwa pemerintah pada masa-masa itu mengintervensi semua hal menyangkut kehidupan privat. Pemerintah memegang kendali penuh atas sistem keluarga, pendidikan, keagamaan, moral-etika, dan hubungan-hubungan antar-individu, bahkan menentukan harga komoditi beserta transaksi-transaksi perdagangan.³⁷ Intervensi pemerintah terhadap urusan

36 Artikel ini diambil dari buku Qâsim Amîn yang berjudul *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Kairo: al-Majlis al-'Alâ li al-Tsaqâfah al-Qâhirah, 1999), hlm. 27–73.

37 Analisa ini dikemukakan oleh Benjamine Conestan (1767 – 1830), seorang pemikir dan filsuf liberal terkemuka yang membedakan antara kebebasan versi kaum filsuf kuno dan kebebasan modern yang memberi ruang lebih luas pada individu-individu.

privat hingga pada tataran di mana konstitusi Yunani menetapkan larangan keluar rumah bagi perempuan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kehidupan sosial lebih mirip seperti kehidupan militeristik; pemimpin bebas memerintah apa saja dan kapan saja, sementara bawahannya tidak punya pilihan lain kecuali menaati dan mengerjakan perintah itu.

Ketika dunia mulai maju dan berkembang, individu sedikit demi sedikit mulai terbebas dari belenggu kekuasaan lembaga sosial dan ruang kebebasannya mulai meluas. Semuanya berbalik 180 derajat. Apa yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, kini dianggap sebagai pengecualian. Dari sini, individu diberi kebebasan hingga pada batas maksimalnya.

Semua itu disebabkan karena manusia mulai berkembang pemikirannya. Individu-individu sudah mulai berpikir bahwa kepatuhan terhadap kebijakan penguasa tidak serta-merta membuat diri mereka harus menyerahkan derajat kemanusiaannya ke tangan penguasa. Atas dasar ini, mereka takkan pernah membiarkan seorang pun memangkas atau membelenggu kebebasannya, meskipun orang itu adalah karib terdekat mereka. Mereka juga takkan membiarkan kebebasannya diambil oleh pemerintah, kecuali bagian-bagian tertentu dari kebebasan yang memang harus diserahkan ke tangan pemerintah sehingga pemerintah bisa melaksanakan fungsinya, yakni menjaga keamanan publik dari dalam dan memagarinya dari bahaya luar. Diserahkannya bagian-bagian tertentu dari kebebasan ke tangan pemerintah juga bisa membantu kerja pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya, di samping menciptakan kepatuhan individu atas ketentuan-ketentuan umum pemerintah. Akan tetapi, ketika pemerintah atau perorangan mengintervensi aktivitas personal atau urusan privat mereka, mereka akan tertekan dan merasa dizalimi. Ini karena dua sebab.

Pertama, pandangan pemerintah, meski biasanya identik dengan keinginan individu, terkadang bertolakbelakang dengan pandangan dan keinginan publik. Alasannya, tiap individu mempunyai watak, karakter, naluri, dan perasaan yang berbeda-beda satu sama lain, sesuai dengan umur, ruang dan waktu. Jadi, menetapkan satu kaedah tunggal bagi semua aktivitas personal tiap individu adalah sesuatu yang tak mudah diterima oleh naluri kemanusiaan.

Kedua, intervensi penguasa terhadap urusan-urusan privat akan melemahkan kekuatan individu, menghalanginya menjalankan tugas-tugas personalnya, dan memunculkan rasa malas, ketidakmampuan bekerja, serta ketergantungan pada orang lain. Meskipun sebagian orang menikmati kemalasan dan keadaan tanpa aktivitas, tapi mereka pada akhirnya akan mengalami kesusahan dan penderitaan dalam hidup.

Kebebasan adalah kaedah kemajuan manusia dan pembimbingnya ke arah kebahagiaan. Oleh sebab itu, umat-umat yang telah berhasil mengungkap rahasia kebahagiaan menganggap kebebasan sebagai nafas hak asasi manusia.

Seperti diketahui, yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan manusia dalam berpikir, berkehendak dan bekerja, yakni selama mereka masih mengikuti batasan-batasan syariat keagamaan, memperhatikan moral-etika, dan tidak tunduk pada kehendak lain selain Allah kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti gila atau masa kanak-kanak. Kalangan pakar pendidikan berpendapat bahwa tekanan terhadap seorang anak hanya akan mematikan greget kemauannya. Anak-anak hendaknya dibiarkan mengekspresikan kebebasannya. Tugas orang tua hanya membimbing dan mengarahkannya saja.

Kebebasan inilah yang mesti menjadi pondasi dasar bagi pendidikan kaum perempuan di kalangan kita.

Sebagian orang mungkin bingung ketika mengetahui kekukuhan saya untuk membebaskan perempuan, lalu bertanya-tanya apakah

perempuan memang tengah terbelenggu dalam perbudakan. Seandainya saja mereka bisa memahami makna kebebasan, mereka pasti akan sependapat dengan pandangan saya.

Kami tidak hendak mengatakan bahwa saat ini perempuan diperjualbelikan di pasar-pasar. Budak bukan hanya berarti orang yang boleh diperdagangkan saja. Setiap orang yang berakal lurus pasti mengetahui bahwa setiap orang yang tidak memiliki kendali pemikiran, kehendak, dan aktivitasnya juga bisa disebut budak.

Sebagian pembaca mungkin sependapat dengan saya ketika saya mengatakan, “Sebagian besar umat Islam melihat perempuan sebagai makhluk tak sempurna. Keyakinan seperti ini lalu memunculkan keyakinan lain bahwa laki-laki memiliki hak kuasa atas diri perempuan. Banyak dalil untuk ini.”

Di banyak keluarga, perempuan tidak dibolehkan membalas uluran tangan seorang laki-laki yang hendak menyalaminya, duduk berdampingan bersama laki-laki, atau makan bersama laki-laki. Saya sudah seringkali melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang laki-laki dengan santai duduk di meja makan, sementara istrinya berdiri sambil di sampingnya mengusir alat yang hendak mengerubung makanan di meja, lalu anaknya memegang kendi air. Ya! Perlakuan laki-laki terhadap perempuan dengan cara keji dan rendah seperti ini biasanya bisa disaksikan di daerah-daerah pinggiran dan pedesaan. Perlakuan yang sama juga bisa disaksikan di daerah-daerah perkotaan besar, meski dalam bentuk yang berbeda. Laki-laki yang melarang keras istrinya keluar rumah tanpa tujuan, dan hanya mengizinkannya keluar rumah jika dia menginginkannya keluar, jelas tidak menghormati kebebasan istrinya. Di sini, sang istri laksana budak, bahkan tawanan penjara; dan penjara jauh lebih merampas kebebasan ketimbang perbudakan. Tidak dapat dikatakan bahwa saat ini jumlah laki-laki yang memenjarakan istrinya sangat sedikit. Meskipun jumlahnya berkurang jika dibandingkan dengan

masa lalu, tetapi kita semua tahu bahwa sangat jarang sekali perempuan diberi kebebasan penuh untuk memilih ke mana dan kapan mereka pergi keluar rumah. Bagaimana pun, kita sekarang tengah membicarakan soal kedudukan perempuan di mata mayoritas kaum laki-laki, soal apa yang wajib dikerjakan dan dipenuhi oleh perempuan menurut keyakinan mayoritas tersebut. Jadi, tidak ada bedanya apakah fenomena pengekangan perempuan itu sedikit atau banyak. Seorang perempuan yang terkurung di dalam rumahnya sendiri, masih mereka dudukkan sebagai sebaik-baik umat.

Seandainya umat Islam mengambil pandangan fukaha-fukaha bodoh mereka, mereka pasti akan berpendapat bahwa mereka wajib mengurung istri di rumah, tidak mengizinkannya keluar rumah kecuali untuk mengunjungi kerabat dekat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan, menurut mereka, istri sama sekali tidak diizinkan keluar rumah, kapan pun dan dalam keadaan bagaimana pun, kecuali saat ditandu menuju kuburannya!

Tak bisa dimungkiri, dilegalkannya hak laki-laki untuk mengurung istrinya di rumah itu sama saja dengan dilegalkannya perampasan kebebasan yang merupakan hak asasi manusia.

Seorang perempuan yang digiring ayahnya seperti seekor binatang menuju rumah suami yang sama sekali belum pernah dikenalnya, tidak bisa dikatakan sebagai orang bebas-merdeka, tetapi pada hakikatnya budak belian. Seperti diketahui, para orang tua di semua kelas sosial biasa menikahkan putri-putri mereka dengan cara seperti ini. Mereka mendatangi rumah pihak laki-laki untuk melamar, lalu menentukan tanggal pernikahan. Sementara itu, putri mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk turut campur dalam persoalan pernikahannya, yang akan menentukan kebahagiaan dan penderitaannya di masa depan. Dalam konteks ini, tidak bisa dikatakan jika posisi laki-laki sama dengan posisi perempuan. Laki-laki memang tidak mengetahui hal-hal tentang calon istrinya itu, tetapi ia masih

bisa melepaskan diri dari akibat buruk ketidaktahuannya itu dengan menceraikan istrinya kapan saja atau menikahi perempuan lain sampai empat. Tetapi, bagi perempuan, yang diuji hidup bersama laki-laki yang tidak diinginkannya, tidak memiliki jalan untuk berpisah dari suaminya. Pernikahan perempuan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya, terhalanginya haknya untuk bisa berpisah dari suami, dan kemutlakan hak suami dalam mengekang dan mengatur hidupnya, tentu merupakan penjajahan yang sesungguhnya.

Seorang perempuan yang diharamkan mempelajari selain kewajiban-kewajiban beribadah, atau yang diharamkan mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan kecuali hanya dasar-dasarnya saja, bisa dikatakan seperti budak. Sebab, memaksa watak-naluri dasar dan anugerah Tuhan agar mengikuti batasan-batasan tertentu, atau melarangnya tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin, dianggap sebagai penjajahan dalam arti sesungguhnya.

Seorang perempuan yang diharuskan menutup rapat-rapat semua anggota tubuhnya sampai-sampai membuatnya susah berjalan dan naik kendaraan, bahkan membuatnya susah bernafas, melihat, dan berbicara, bisa juga dikatakan seperti budak. Sebab, memaksanya untuk mengenakan jenis pakaian tertentu berarti mencederai penampilannya dan menghilangkan bentuk fisiknya dari pandangan semua laki-laki selain ayah dan suaminya.

Pendek kata, perempuan—semenjak dilahirkan sampai kematiannya—adalah budak. Sebab, ia tidak hidup dengan dirinya sendiri, tetapi hidup dengan dan untuk laki-laki. Ia membutuhkan laki-laki dalam semua urusannya; tidak keluar rumah kecuali ditemani laki-laki, tidak bepergian kecuali di bawah pengawasan laki-laki, tidak berpikir kecuali dengan akal laki-laki, tidak melihat kecuali dengan mata laki-laki, tidak mendengar kecuali dengan telinga laki-laki, tidak berkeinginan kecuali atas dasar keinginan laki-laki, serta tidak bekerja dan bergerak kecuali melalui arahan laki-laki. Perempuan

bukanlah manusia yang bebas-merdeka, tapi hanya “barang” yang melekat pada diri laki-laki.

Hingga saat ini, hijab masih terus menjadi titik perdebatan. Hijab mengikuti fenomena sosial masa lampau kita dari sisi politik, nalar dan sastra. Di masa lampau, kita pernah mengalami penindasan dan penjajahan. Kita lalu menyangka bahwa kekuasaan keluarga tidak dibangun kecuali di atas asas penjajahan. Kita pun kemudian memenjarakan istri-istri kita, merampas kebebasannya, memonopoli hak untuk meneruskan atau memutuskan pernikahan, dan mendidik anak-anak kita dengan model perintah, larangan, ancaman, dan pukulan. Kita pernah bodoh, lalu membayangkan bahwa perempuan tidak mempunyai fungsi dan tugas apa-apa kecuali hanya sebagai objek pelampiasan nafsu laki-laki dan media penyalur hasrat birahi. Kita melupakan jika perempuan juga manusia seperti kita yang memiliki hak untuk meraih kebahagiaannya sendiri, yaitu melalui jalan yang telah disyariatkan oleh Allah dan di bawah bimbingan laki-laki. Ketika kita merendahkan kedudukan perempuan dengan tidak memberikan haknya, hak akan membalas dendam ke diri kita sendiri dengan pembalasan yang lebih besar. Kita pun akhirnya juga tidak bisa merasakan kebahagiaan hakiki, akhlak kita menjadi rusak, pendidikan anak-anak kita berantakan, hati kita selalu dipenuhi rasa keputusasaan dan kesedihan. Akhirnya, banyak dari kita yang beranggapan bahwa kehidupan umat Islam sudah mencapai titik nadir dan tidak akan pernah berhasil dalam persaingan global. Tidak sedikit dari kita yang kemudian selalu membangga-banggakan kota-kota Islam masa lampau setiap kali bangsa Eropa berbicara tentang keilmuan dan teknologinya, atau selalu menyebutkan peradaban Arab di masa-masa lampau setiap kali bangsa Eropa menyebut peradaban Barat modern—sama seperti manula yang menceritakan ketampanannya saat masih muda.

Akan tetapi, kondisi sosial kita sekarang ini telah berubah total. Kita menjadi bangsa yang bebas-merdeka dan mencintai kebebasan. Pendidikan mulai merata di tengah-tengah umat kita. Akal kita sudah mengambil ancang-ancang untuk menemukan derajat tinggi manusia dan kedudukan perempuan di ruang keluarga dan di dunia. Apakah setelah ini kita masih pantas memelihara adat kebiasaan dan tradisi-tradisi klasik, lalu memaksakan pemberlakuan tradisi hijab dan menganggapnya sebagai satu-satunya cara untuk menjaga perempuan? Atau, apakah tidak lebih baik jika kita mencoba mencari cara lain yang selaras dengan kondisi kekinian kita dan yang bisa membuat kita semakin maju? Dengan kata lain, ada dua aliran di sini; aliran yang menyarankan umat agar tetap memberlakukan hijab, dan aliran yang menyarankan agar kewajiban hijab digugurkan. Aliran mana yang harus kita pilih? Apakah ada panduan bagi kita agar supaya nantinya kita tidak salah pilih?

Apabila kita menjadikan akal dan pemikiran yang sah sebagai panduan, kita pasti akan memilih aliran yang menyelarasi kemashlahatan dan membawa manfaat besar bagi kita. Setelah itu, kita takkan lagi khawatir jika pilihan kita bertentangan dengan kebenaran. Sebab, kemashlahatan yang didasarkan pada pemikiran yang sah adalah kebenaran yang dibela oleh agama. Dan, mustahil jika kebenaran yang dibela oleh agama itu menjadi sumber madharat bagi manusia, atau kebajikan itu memiliki keburukan yang lebih banyak ketimbang manfaat.

Lalu, aliran mana yang menyelarasi kemashlahatan dan membawa manfaat besar bagi kita?

Madharat hijab adalah terhalangnya perempuan menggunakan hak asasinya, menyempurnakan pendidikannya, dan mencari penghidupannya saat terdesak, serta membuat pasangan suami-istri tidak bisa menikmati kehidupan rasional dan moral.

Adapun keuntungan hijab hanyalah satu, yakni bisa meminimalisir perzinahan. Ini karena hijab akan mencegah dua jenis kelamin berbeda bertemu secara fisik atau bergaul, meskipun kecenderungan untuk bertemu dan bergaul masih ada di hati. Jadi, apa yang mereka sebut dengan fungsi hijab hanya berkisar pada ungkapan, “Di antara bentuk pencegahan adalah ketidaktahuan.” Tubuh memang dijaga, tapi mayoritas hati berkhianat. Sementara itu, kebebasan mempunyai keuntungan bisa menghilangkan seluruh potensi madharat yang mungkin ditimbulkan hijab. Adapun satu-satunya madharatnya adalah kemungkinan bahwa kebebasan tersebut akan disalahgunakan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, seorang perempuan akan bisa mengerti tanggung jawabnya, memikul dan menjalankan tugas-tugasnya, dan terbiasa dalam mengandalkan diri sendiri dan membela kehormatannya. Pada akhirnya, tumbuh di dalam diri perempuan ketulusan yang hakiki. Satu ketulusan yang membersihkan jiwa dari keburukan, yang tidak takut atas setiap celaan, yang tidak tamak terhadap pujian dan ganjaran, dan yang melihat bahwa tak ada penghalang yang mustahil tidak bisa disingkirkan. Derajat mulia seperti ini takkan mungkin didapatkan oleh perempuan melalui hijab, tapi akan sangat mudah ia dapatkan melalui kebebasan.

Kaum perempuan kita akan mencapai derajat tersebut sebagaimana kaum perempuan di Barat. Kita semua melihat bahwa semakin luas ruang kebebasan yang diberikan kepada mereka, semakin bertambah pula kehormatan yang dirasakan oleh dirinya, suaminya, dan keluarganya.

Mantegazza³⁸ menuturkan, “Hal terpenting yang mempengaruhi moral-etika anak perempuan adalah kebebasan yang diberikan kepadanya sejak usia dini.” Mantegazza menambahkan, “Kebajikan-kebaikan mulia yang bisa Anda lihat pada diri kaum perempuan yang

38 Paolo Mantegazza (1831 – 1910), psikolog-antropolog terkemuka asal Italia.

menikmati kebebasan, tidak bisa Anda kaitkan dengan faktor cuaca atau iklim. Sebab, saya juga menemukan kebajikan-kebajikan ini di Buenos Aires, satu daerah dengan tingkat panas yang cukup tinggi dan permukaan tanah yang bisa menghasilkan beragam kekayaan. Seandainya faktor iklim berpengaruh besar pada pembentukan moral-etika, tentu moral-etika kaum perempuan di daerah tersebut rusak. Anak-anak perempuan di kalangan kita, di abad lalu dan di permulaan abad ini, tidak keluar rumah kecuali saat pernikahan mereka. Mereka sama sekali tidak tahu segala sesuatu tentang cinta. Mereka tidak menerima pelajaran-pelajaran cinta dari selain suami mereka. Bahkan, keterpaksaan mereka untuk menerima suami telah mengambil setengah perjalanan mereka menuju kekeliruan. Tak ada kerusakan yang lebih besar pada diri perempuan seperti ketika ia memilih suaminya sendiri setelah mengenal dan membandingkannya dengan laki-laki lain.”

Paolo Mantegazza lalu bercerita tentang kaum perempuan di negerinya, “Perempuan Italia, jika dibandingkan dengan perempuan negeri-negeri lainnya, memiliki ketulusan yang paling minim. Sebab, perempuan Italia biasanya menikah tanpa didasari oleh perasaan cinta terhadap suaminya. Keadaan serupa juga hampir berlaku bagi perempuan Perancis.”

“Adapun perempuan Inggris dan Amerika, saya salut kepada mereka karena ketulusan mereka yang sempurna, selain karena metode-metode pendidikan dan keleluasaan serta kebebasan mereka dalam aktivitas kehidupan. Hijab dan kebebasan adalah dua cara untuk menjaga seorang perempuan. Tapi, hasil dari keduanya sangat jauh berbeda. Cara pertama memosisikan perempuan di rak barang dan perhiasan, dan mencederai kemanusiaan. Adapun cara kedua menyelarasi kemanusiaan, menuntun perempuan ke jalan kemajuan nalar dan kesempurnaan moral.”

Dari paparan kami di awal, pembaca pasti sudah bisa mengetahui bahwa pilihan kami mendidik perempuan dan menjaga kehormatannya adalah bukan berasaskan pada teori-teori yang jelas terpisah dari realitas, melainkan pada fakta-fakta konkrit dan pengalaman praksis.

Penghormatan laki-laki Barat atas kebebasan perempuan hingga pada batas di mana seorang ayah mencoba untuk tidak memulai pembicaraan yang bisa menyakiti perasaan anak perempuannya, atau seorang suami yang tidak membuka pembicaraan mengenai sosok istrinya. Persoalan terakhir ini bahkan pernah menjadi isu penting yang dibahas oleh lembaga advokat Perancis sejak 20 tahun lalu. Lembaga ini lalu menetapkan bahwa kekuasaan suami tidak sertamerta memberi suami hak untuk membuka rahasia-rahasia istrinya, karena itu dianggap sebagai pelecehan atas kebebasan dan harga diri perempuan.

Sikap penghormatan laki-laki Barat atas kebebasan perempuan juga terlihat dari diberikannya kebebasan penuh kepada anak-anak perempuan yang sudah berusia 20 tahun untuk meninggalkan keluarga, bepergian ke tempat mana pun yang diinginkan—baik sendirian maupun ditemani pelayan—dan menghabiskan berbulan-bulan atau bertahun-tahun demi *traveling* dari satu negara ke negara lain. Tak pernah sekali pun terlintas di benak keluarga dekat bahwa kesendirian mereka di luar rumah akan membawanya ke marabahaya.

Di antara bentuk kebebasan perempuan Barat adalah hak untuk berteman selain dengan teman-teman suaminya, berpendapat dengan selain pendapat suami, dan bergabung ke partai politik yang bukan partai suaminya. Di sini, suami meyakini bahwa istrinya berhak memilih apa yang sesuai dengan naluri, akal dan perasaannya, serta hidup sesuai dengan cara yang dianggapnya baik dan nyaman.

Bersamaan dengan itu, kita bisa melihat bagaimana bangunan keluarga di tengah-tengah masyarakat bangsa Barat berdiri di atas pondasi yang kokoh. Masyarakat Barat pun terus melangkah maju ke depan.

Masyarakat Barat juga belum pernah ditimpa tragedi-tragedi yang selalu diancamkan ke kita oleh para penulis dan fukaha umat Islam. Seperti diketahui, fukaha kita selalu menjelaskan panjang lebar akan bahaya-bahaya akibat pemberian kebebasan mutlak pada perempuan! Kita sering mendengar dari mereka bahwa bercampurnya (*ikhtilâth*) laki-laki dan perempuan dalam pergaulan bisa mendorong pada bercampurnya nasab, dan ketika nasab sudah tercampur-aduk maka umat pasti akan hancur.

Seluruh penduduk negara-negara Eropa, baik laki-laki maupun perempuan, bergaul menjadi satu di semua bidang kehidupan. Saudara-saudara kita dan warga negara kita dari Kristen dan Yahudi juga baru saja meninggalkan tradisi hijab, dan menyarankan kaum perempuannya untuk menampakkan wajah secara penuh dan bergaul bersama laki-laki. Apakah mereka semua hancur dan binasa?!

Kita akan tinggalkan teori-teori utopis yang mungkin, bagi banyak orang, tak bernilai ini. fakta-fakta konkrit dan pengalaman praksis telah menunjukkan bahwa kebebasan adalah sumber kebaikan, jantung kemajuan, dan pondasi utama kesempurnaan moral-etika bagi umat manusia. Kebebasan berkehendak adalah elemen moral-etis terpenting dalam kebangkitan laki-laki, dan itu takkan pernah dicapai kecuali perempuan juga diberikan hal yang sama, yakni kebebasan berkehendak.

Setiap perubahan pasti menghadirkan pandangan-pandangan dalam bentuk proyek yang menuntut penerimaan. Pada hakikatnya, perubahan adalah sebuah pemikiran yang waktunya mendahului waktu pemaparannya. Oleh sebab itu, hanya segelintir orang saja yang bisa mengerti dan memahaminya, yaitu mereka yang jauh-jauh hari sudah mencoba mengungkap kejadian-kejadian yang masih disembunyikan oleh masa depan.

Lihatlah bangsa Mesir. Dari generasi ke generasi, mereka hidup di bawah payung perbudakan politik. Akibatnya sudah bisa ditebak, yaitu

kemunduran total di setiap dimensi kehidupan; kemunduran nalar, moral-etika, kerja nyata. Semua ini terus-menerus berlangsung hingga membuat kehidupan mereka mencapai titik terendah, dan membuat mereka seperti tubuh yang lemah dan lumpuh total, yang lebih seperti menjalani kehidupan tumbuh-tumbuhan ketimbang kehidupan binatang. Lalu, ketika telah terbebas dari tali kekang perbudakan, mereka bingung dan tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan kebebasan barunya. Semua orang tidak mengerti makna dari kata “kebebasan” dan tidak bisa memperkirakan nilai-nilai kandungannya. Mereka semua meremehkan dan mengejek kebebasan, bahkan merasa sedih karenanya dan menganggapnya sebagai sebab keterpurukan hidup mereka. Kita sudah seringkali mendengar bahwa sebab penderitaan Mesir adalah kebebasan dan persamaan yang dianutnya. Sedikit demi sedikit, bangsa Mesir mulai terbiasa dengan kebebasan dan mulai merasa bahwa keterpurukan hidup mereka tidak mungkin disebabkan olehnya, tapi oleh sebab-sebab lain. Tidak sedikit dari kita yang kemudian mencintai kebebasan sampai-sampai kita tidak bisa memahami makna eksistensi tanpa melibatkan kebebasan. Kita berharap agar anak-anak kita, yang nantinya merasakan kebebasan penuh, bisa memetik semua buah kebebasan yang salah satu wujud terpentingnya adalah kesiapan diri bekerja secara nyata. Saat itu, mereka akan benar-benar mengetahui bahwa kebebasan adalah pondasi dasar setiap kemajuan dan kesejahteraan.

Demikianlah fenomena kebebasan perempuan. Saat fenomena tersebut tumbuh di generasi pertama kita, komplain pasti akan banyak bermunculan dan tidak sedikit dari kita yang menganggap bahwa bencana besar telah menimpa kita. Ini karena perempuan memang masih melatih diri untuk menggunakan kebebasannya. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit perempuan mulai terbiasa menggunakan kebebasannya, mengetahui kewajiban-kewajibannya, dan merasa bahwa kemampuan nalar dan moral-etiknya

mulai berkembang. Setiap kali moral-etikanya cidera maka itu akan langsung diobati dengan pendidikan hingga dirinya menjadi manusia yang tahu diri. Sebab, perkembangan moral-etika tidak jauh berbeda dengan perkembangan fisik-material. Seorang anak kecil yang belum bisa berjalan, misalnya, akan merangkak dan belajar berjalan sedikit demi sedikit. Ia akan merambat dinding atau dituntun ibunya sambil berjalan. Lalu, ia baru bisa berjalan setelah latihan terus menerus selama beberapa bulan. Sesekali ia pasti akan jatuh dan jatuh lagi sampai beberapa kali. Begitu pun juga dengan perkembangan moral-etika kemanusiaan, yang takkan meningkat dari satu level ke level lainnya kecuali secara gradual, sedikit demi sedikit, dan setelah latihan panjang yang dibarengi dengan kejatuhan, keterpurukan, dan pengalaman-pengalaman pahit memilukan. Itulah hukum alam. Mustahil kita bisa melepaskan diri darinya atau kabur menghindarinya. Bukanlah termasuk kebijaksanaan jika kita kembali ke belakang atau berhenti tanpa sedikit pun maju ke depan.

Apabila kita ingin meraih impian dan harapan, kita tidak mempunyai jalan lain kecuali mematuhi hukum alam (*sunnah ilâhiyyah*) dan menerima kesukaran atau penderitaan. Jika tidak, kita hanya akan seperti seorang ayah yang mengkhawatirkan anaknya jatuh ke tanah saat belajar berjalan, kemudian melarangnya berjalan hingga dewasa, dan akhirnya anaknya hidup dengan dua kaki yang lumpuh.■

Hijab, Perspektif Keagamaan (1899)³⁹ Qâsim Amîn & Muhammad Abduh

Seandainya terdapat teks-teks keagamaan yang mewajibkan hijab, seperti teks-teks yang sekarang populer di kalangan sebagian umat Islam, tentu saya takkan pernah membahasnya dan takkan menulis

39 Artikel ini diambil dari dua buku; (1) *Tahrîr al-Mar'ah* karya Qâsim Amîn, dan (2) *al-A'mâl al-Kâmilah* karya Muhammad Abduh (Muhammad Imârah, ed.), (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2008), hlm. 105 – 113.

satu baris kalimat pun yang menentangnya. Sebab, perintah Tuhan wajib dipatuhi tanpa harus diperdebatkan atau dipertanyakan lagi.

Tetapi, kita tidak menemukan satu teks pun di dalam syariat Islam yang mewajibkan hijab. Teks-teks keagamaan yang oleh sebagian umat Islam dijadikan dalil atas diwajibkannya hijab, hanyalah tradisi dari beberapa umat. Mereka menganggap baik, meyakini, dan melebih-lebihkan tradisi tersebut, lalu membungkusnya dengan baju agama, sebagaimana tradisi-tradisi sesat lainnya yang sudah tertanam di otak manusia atas nama agama. Oleh sebab itu, kita tidak melihat adanya larangan untuk membahas persoalan hijab, bahkan kita wajib mengujungnya dan mencari kejelasan hukum agama tentangnya.

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, *Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau pura-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Muslim) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentikan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.* (Al-Nûr [24]: 30-31).

Dalam ayat ini, syariat memperbolehkan perempuan untuk memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan laki-laki asing. Hanya saja, syariat tidak menyebut secara detail apa saja anggota-anggota tubuh tersebut. Menurut sekelompok ulama, pemahaman dan penentuan atasnya diacukan pada tradisi yang biasa berlaku

saat ayat terkait diturunkan. Sejumlah imam sepakat bahwa wajah dan kedua telapak tangan termasuk pengecualian dalam ayat di atas. Perbedaan pendapat muncul ketika mereka membahas beberapa anggota tubuh lainnya, seperti dua lengan dan dua telapak kaki.

Dalam *Ibnu 'Ābidīn* disebutkan, “Aurat perempuan bebas-merdeka adalah seluruh tubuh *hatta* rambutnya, kecuali wajah, dua telapak tangan, dan dua telapak kaki (versi *mu'tamad*, ditetapkan), dan juga suaranya (versi *al-ashahh*, yang paling kuat), serta dua lengan (versi *al-marjuh*, yang kuat). Perempuan yang muda dilarang memperlihatkan wajahnya, bukan karena wajah termasuk bagian aurat, melainkan demi menghindari timbulnya fitnah. Hal ini sebagaimana dilarangnya mengelus-elus wajah, meskipun tanpa disertai syahwat, karena kemungkinan timbulnya fitnah itu lebih besar. Oleh sebab itu, pernikahan di kalangan kerabat sendiri (*mushāharah*) diharamkan, sebagaimana disebutkan di larangan-larangan keagamaan. Memandang wajah perempuan muda disertai syahwat juga tidak diperbolehkan, sebagaimana memandang wajah perempuan yang tidak mempunyai rambut (botak). Tetapi, jika tanpa disertai syahwat, diperbolehkan untuk memandangnya, secantik apapun bentuknya.”

Di kitab *al-Rawdh* di kalangan mazhab al-Syafi'i disebutkan, “Seorang laki-laki boleh memandang wajah dan dua telapak kaki perempuan ketika itu dipastikan takkan menimbulkan fitnah. Begitupun sebaliknya. Diperbolehkan juga memandang wajah seorang perempuan ketika ia bertransaksi bisnis dan menyampaikan kesaksian. Ia dituntut untuk memperlihatkan wajahnya saat melakukan itu semua.”

Di kitab *Tabyīn al-Haqā'iq Syarh Kanz al-Daqā'iq* karangan Utsman ibn Ali al-Zayla'i disebutkan, “Tubuh seorang perempuan bebas-merdeka adalah aurat, kecuali wajah, dua telapak tangan, dan dua telapak kaki. Ini didasarkan pada firman Allah swt, *Dan jangan menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa*

terlihat. Maksud dari ‘perhiasan mereka yang biasa terlihat’ adalah wajah dan dua telapak tangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu ‘Abbās dan Ibnu ‘Umar. Di kitab *al-Mukhtashar* disebutkan bahwa pengecualian tiga bagian tubuh tersebut (wajah, dua telapak kaki, dan dua telapak kaki) dimaksudkan sebagai ujian atas ketertampakkannya. Ini didasarkan pada praktik Rasulullah saw yang melarang pemakaian sarung tangan dan *niqāb* (cadar/penutup muka) bagi perempuan yang tengah mengerjakan ihram. Seandainya wajah dan dua telapak tangan itu termasuk bagian aurat, tentu saja Rasulullah SAW takkan melarang menutup keduanya dengan kain berjahit. Adapun tentang bagian dua telapak kaki, terdapat dua riwayat. Dan, riwayat yang terkuat menyebutkan bahwa dua telapak kaki bukanlah termasuk aurat.”

Pengelompokkan wajah dan dua telapak tangan sebagai bagian tubuh yang bukan termasuk aurat, sudah populer. Kalangan mazhab Maliki dan Hanbali juga berpendapat demikian. Kami tidak perlu menjelaskan panjang lebar pandangan kedua mazhab ini.

Diriwayatkan dari A’isyah bahwa Asmā’ binti Abu Bakar pernah datang menemui Rasulullah SAW. Ketika itu, Asmā’ mengenakan pakaian yang cukup tipis. Beliau lalu bersabda kepadanya, “Wahai Asmā’, saat seorang perempuan sudah mulai memasuki masa haid, tidak pantas bagian-bagian tubuhnya dilihat kecuali ini dan ini.” Beliau sambil menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.

Di kitab *Husn al-Uswah* karya Sayyid Muhammad Shiddiq Hasan Khân disebutkan, “Keringanan yang diberikan pada perempuan dalam konteks aurat, didasarkan pada argumentasi bahwa dirinya tidak mempunyai jalan keluar dari tuntutan untuk menggunakan kedua tangan dan memperlihatkan wajah, terutama dalam persaksian, pengadilan, dan pernikahan.”

Syariat memberi perempuan hak-hak yang sama seperti yang juga diberikan pada laki-laki, dan tanggungjawab untuk memikul

aktivitas-aktivitasnya sendiri. Perempuan berhak penuh untuk mengatur dan membelanjakan hartanya sendiri. Lalu, bagaimana mungkin seorang laki-laki mengadakan perjanjian pernikahan dengan seorang perempuan tanpa melihat wajahnya dan mengetahui kepribadiannya?!

Di antara cara paling aneh dalam transaksi bisnis adalah seorang perempuan datang sambil mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya dari atas kepala hingga dua telapak kakinya, atau berdiri di balik kain penghalang (tabir) atau pintu. Lalu, seseorang berkata kepada para laki-laki yang hadir, “Inilah perempuan yang ingin menjual rumahnya ke kalian.” Setelah masing-masing penawar menyebutkan tawarannya, perempuan tadi berkata, “Aku bersedia menjualnya kepada fulan.” Transaksi pun selesai dengan dua orang saksi dari kerabat dekat atau orang luar. Bagaimana pun juga, cara transaksi seperti ini tentu takkan menjamin kepuasan seorang pun dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Fakta-fakta pengadilan juga menunjukkan mudahnya penipuan dan pemelintiran jika kondisi perempuan seperti itu. Berapa banyak perempuan yang menikah tanpa terlebih dulu mengetahui sosok dan kepribadian suaminya, yang menyewakan harta benda miliknya tanpa pernah merasakan hasilnya, bahkan yang kehilangan semua harta miliknya tanpa mengetahui sedikit pun ke mana hartanya itu berpindah tangan?! Semua ini tak lain adalah akibat dari tertutupun tubuhnya oleh hijab dan ketidakikutsertaannya dalam berbagai hal.

Bagaimana mungkin perempuan berhijab nan miskin bisa bekerja di pabrik atau berdagang demi menyambung hidupnya?! Bagaimana mungkin pelayan perempuan bisa maksimal bekerja di rumah laki-laki asing?! Bagaimana mungkin pedagang perempuan berhijab bisa menjalankan perdagangannya di kalangan laki-laki?! Bagaimana mungkin petani perempuan berhijab bisa sukses dalam pertaniannya?! Bagaimana mungkin pekerja perempuan berhijab bisa

menuntaskan pekerjaannya jika diberi tugas membangun sebuah rumah atau selainnya?!

Pendek kata, Allah SWT telah menciptakan dunia ini, lalu mengisinya dengan makhluk bernama manusia untuk semaksimal mungkin mengeksplorasi dan mengambil manfaat-manfaat yang ada di dalamnya, menetapkan ketentuan-ketentuan dalam mengeksplorasinya, menyamakan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati manfaat-manfaatnya, tidak membagi dunia menjadi dua bagian, dan tidak menjadikan separuh dunia milik kaum laki-laki dan separuh lainnya milik kaum perempuan. Allah SWT telah menciptakan kehidupan agar dinikmati oleh kedua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, di bawah kendali orang-orang terkuat dari keduanya. Bagaimana mungkin perempuan bisa bekerja dan menikmati apa yang telah disiapkan untuknya di dunia dan kehidupan, jika ia dilarang memperlihatkan wajahnya di hadapan semua laki-laki selain muhrimnya?! Tak diragukan lagi, hal tersebut tentu takkan disetujui oleh agama dan oleh akal.

Kita telah melihat bagaimana hijab menjadi sesuatu yang dipastikan dan diwajibkan di kalangan mayoritas umat Islam, sebagaimana bisa kita saksikan pada pelayan-pelayan perempuan, pekerja-pekerja perempuan, penduduk desa, *hatta* kalangan kelas menengah dan kelas orang-orang mapan, serta seluruh umat Islam. Bahkan, agama terkadang dianggap telah mewajibkan hijab!!

Bagaimana mungkin seorang perempuan yang mengikuti persidangan sebagai pihak berselisih atau sebagai saksi, itu diizinkan menutup wajahnya?! Bertahun-tahun, para pihak berselisih dan hakim-hakim pengadilan seolah mengabaikan permasalahan ini dan meremehkan kewajiban mereka. Mereka menerima perempuan yang menutup rapat wajahnya berdiri di hadapan mereka, padahal perempuan tersebut adalah pihak penuntut, atau tertuntut, atau saksi. Mereka menyerah kepada tradisi, bukannya khawatir jika

toleransi yang mereka berikan akan menimbulkan kecurangan dan semisalnya. Mereka tidak ingin terlebih dahulu mengetahui sosok yang ada di balik hijab. Dan, saat itulah kecurangan mudah dilakukan.

Setiap laki-laki yang berperkara dengan seorang perempuan, misalnya, pasti ingin mengetahui sosok lawannya. Dengan begitu, banyak keuntungan yang akan didapatkannya, seperti munculnya perasaan yakin terhadap perkataan si lawan. Saya tidak yakin jika ia mengizinkan hakim memutuskan perkaranya dengan perempuan yang tidak terlihat wajahnya. Saya juga tidak yakin jika ia mengizinkan hakim mendengarkan saksi perempuan yang tertutup wajahnya. Tapi, menurut saya, hal pertama yang pasti ingin diketahuinya adalah mengetahui wajah saksi atau lawan berperkaranya, terutama dalam perkara kriminal. Jika tidak demikian, tidaklah ada artinya syariat dan undang-undang mewajibkan hakim untuk menanyakan nama, umur, dan tempat kelahiran saksi atau pihak berperkara?! Apa untungnya itu semua jika hakim tidak mengetahui wajah saksi dan pihak berperkara?!

Syariat menganjurkan perempuan agar memperlihatkan wajah saat menyampaikan kesaksian. Ini dilakukan agar hakim bisa menganalisa gerak tubuh dan mimik wajahnya, lalu memperkirakan apakah kesaksian yang diberikannya itu benar atau tidak.

Tak diragukan lagi, apa yang telah kami sebutkan barusan termasuk hikmah syariat Islam yang memperbolehkan perempuan untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Kami tidak ingin lebih dari itu.

Imam-imam mazhab juga sepakat tentang diperbolehkannya pelamar laki-laki melihat wajah perempuan yang ingin dinikahnya. Bahkan, mereka menganggap hal tersebut sebagai kesunnahan. Ini didasarkan pada sabda Nabi SAW kepada salah seorang laki-laki Anshar yang telah melamar seorang gadis, “Apakah engkau sudah melihatnya?” “Belum,” jawab laki-laki tersebut. Beliau lalu bersabda

lagi, “Lihatlah wajahnya, karena itu akan lebih bisa melanggengkan hubungan kalian berdua.”

Demikianlah teks-teks Al-Quran, redaksi-redaksi hadits, dan pernyataan-pernyataan para imam fikih. Semuanya menunjukkan dengan jelas bahwa Allah SWT memperbolehkan seorang perempuan untuk memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangannya. Semua ini karena hikmah-hikmah yang tak sulit dimengerti dan dipahami oleh orang berakal.

Demikianlah hukum-hukum syariat Islam. Semuanya mudah dan tidak menyulitkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, serta tidak membatasi kedua pihak dengan hijab, tidak menyembunyikan kekurangan kedua pihak dalam mengerjakan apa yang telah dibebankan ke pundak keduanya, baik berupa kewajiban keagamaan maupun kewajiban duniawi demi melangsungkan hidup.

Klaim bahwa hijab termasuk salah satu etika kesopanan perempuan, menurut saya, tidaklah bisa dibenarkan. Tak ada dasar yang menguatkan klaim ini. Apa hubungannya etika kesopanan dan menutup atau membuka wajah?! Atas dasar apa laki-laki dan perempuan dibeda-bedakan?! Bukankah kesopanan itu pada hakikatnya satu, bagi laki-laki dan perempuan?! Bukankah jantung etika kesopanan itu tindakan dan tujuan, bukan bentuk formal dan pakaian?!

Adapun alasan kekhawatiran akan timbulnya fitnah yang selalu mengemuka di banyak buku tentang hijab, sebenarnya hanyalah terkait dengan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang mengkhawatirkan timbulnya fitnah, hendaknya menahan pandangan matanya. Begitu pun dengan perempuan yang mengkhawatirkan hal serupa, yang juga dianjurkan untuk menahan pandangannya. Perintah yang terdapat di beberapa ayat Al-Quran tentang hijab, diarahkan kepada kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, agar menahan pandangan dari setiap

keburukan. Ini menunjukkan dengan gamblang bahwa perempuan tidak lebih diutamakan ketimbang laki-laki untuk menutup wajahnya.

Aneh! Kenapa laki-laki tidak diperintahkan memakai *burqu'* dan menutup wajahnya jika dirinya mengkhawatirkan timbulnya fitnah dari perempuan?! Apakah keteguhan hati laki-laki memang dianggap lebih lemah ketimbang ketetapan hati perempuan?! Apakah laki-laki dianggap lebih lemah ketimbang perempuan dalam hal menahan diri dan mengendalikan hawa nafsunya?! Apakah perempuan memang lebih bisa mengendalikan diri daripada laki-laki, sehingga laki-laki diperbolehkan memperlihatkan wajahnya di hadapan perempuan, sementara perempuan dilarang keras memperlihatkan wajahnya di hadapan laki-laki karena dikhawatirkan bisa membuat tali hawa nafsu laki-laki terlepas dari kontrol akal nya?!

Apabila semua anggapan itu benar, berarti itu sama saja dengan mengakui bahwa perempuan lebih teguh ketimbang laki-laki. Lalu, jika perempuan lebih teguh ketimbang laki-laki, kenapa perempuan selalu diposisikan di bawah laki-laki?! Tetapi, apabila semua anggapan tersebut tidak benar, kenapa perempuan masih diwajibkan menutup wajahnya, sementara laki-laki tidak?!

Bisa dikatakan, *niqâb* (pakaian longgar yang menutup seluruh tubuh dari ujung kepala hingga telapak kaki) dan *burqu'* (cadar) justru malah menambah kekhawatiran timbulnya fitnah. *Niqâb* adalah kain putih tipis yang di balik nya terlihat keindahan-keindahan sekaligus tersembunyi keburukan-keburukan, sementara *niqâb* adalah kain yang di bawah nya tersembunyi ujung hidung, bibir dan dua rahang, dan yang hanya memperlihatkan dua mata dan dua pelipis. Penutup tubuh ini pada hakikat nya adalah perhiasan yang menarik dan bisa menimbulkan rasa penasaran bagi orang yang melihat nya. Seandainya seorang perempuan memperlihatkan wajahnya secara utuh, tentu rasa penasaran takkan muncul.

Sebab-sebab timbulnya fitnah bukanlah bagian tubuh perempuan yang terlihat, melainkan gerakan-gerakan tubuh perempuan saat berjalan dan aksen-aksen dirinya. *Niqâb* dan *burqu'* termasuk sarana termudah yang membantu perempuan untuk menampakkan apa yang bisa ditampakkkan dan melakukan apa yang bisa dilakukan dalam menarik hasrat. Ini karena keduanya menyembunyikan sosok perempuan pemakainya. Ia pun tidak merasa takut dikenali oleh kerabat dekat atau orang luas. Dikatakan, "Perempuan itu, atau anak perempuan si fulan, atau istri si fulan, telah melakukan ini dan itu." Di sini, ia bisa melakukan apa saja yang diinginkannya dengan perlindungan *burqu'* dan *niqâb*. Tapi, jika wajahnya terbuka dan terlihat, ia akan mudah dikenali dan dikaitkan dengan keluarga tertentu, hal mana yang akan membuatnya merasa malu dan bisa mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji.

Memakai *niqâb* dan *burqu'* bukan termasuk tuntunan-tuntunan agama Islam, bukan sebagai bentuk ibadah ataupun bentuk etika kesopanan. Keduanya hanya tradisi klasik yang ada sebelum Islam dan masih tetap ada hingga sekarang. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa tradisi *niqâb* dan *burqu'* tidak dikenal di banyak negara Islam, tapi masih dikenal di sebagian besar negara-negara belahan Timur yang mayoritas penduduknya belum memeluk agama Islam.

Tuntunan Islam adalah menahan diri dan mengendalikan hawa nafsu, sebagaimana ditunjukkan secara gamblang oleh beberapa ayat Al-Quran, dan bukan memakai *niqâb* atau *burqu'*. Demikianlah permasalahan seputar memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan. Adapun pembicaraan mengenai masalah hijab, dalam arti mengurung perempuan di rumah dan melarangnya bergaul bersama laki-laki, bisa dibagi menjadi dua bagian; yang terkait dengan istri-istri Nabi SAW dan yang terkait dengan semua perempuan muslim selain mereka.

Bagian pertama telah disebutkan dan dijelaskan oleh beberapa ayat Al-Quran berikut ini.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (malu) kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah. (Al-Ahzâb [33]: 53)

Wahai istri-istri Nabi! Kalian tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemahkan/lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Al-Ahzâb [33]: 32-33)

Tidak ada perbedaan pendapat di semua kitab fikih setiap mazhab atau di semua kitab tafsir bahwa ayat-ayat barusan hanya diarahkan secara khusus kepada istri-istri Nabi SAW. Allah SWT telah memerintahkan mereka agar menutup diri (*tahajjub*), dan menjelaskan kepada kita mengenai dasar argumentasi perintah tersebut, yaitu karena mereka tidaklah sama seperti satu pun perempuan lainnya. Jadi, objek pembicaraan dikhususkan bagi istri-istri Nabi SAW, dan sebab penurunannya juga dikhususkan bagi mereka. Oleh karena itu, ketentuan hijab tidak berlaku bagi seorang pun perempuan muslim selain istri-istri Nabi SAW.

Adapun bagian kedua terkait pembicaraan masalah hijab, sejumlah kitab fikih telah menyebut sebuah hadits Nabi SAW yang melarang perempuan berduaan (*khalwat*) dengan laki-laki asing. Redaksi hadits tersebut berbunyi, “Tidaklah berduaan seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali bersama muhrimnya.” Di katakan, “Hukum berduaan dengan orang asing adalah makruh yang hampir haram. Menurut Imam Yûsuf, itu tidaklah haram.” Mereka mengatakan, “Berduaan yang diharamkan bisa digugurkan dengan adanya tabir, atau muhrim, atau perempuan yang bisa dipercaya. Hukum keharamannya juga bisa digugurkan dengan adanya laki-laki lain yang tidak dilihatnya.”

Barangkali dikatakan, apa yang diwajibkan Allah swt kepada istri-istri Nabi saw hendaknya diikuti dan ditiru oleh seluruh perempuan muslim. Pernyataan seperti ini bisa ditanggapi seperti berikut ini. Firman Allah SWT, *Kalian bukan seperti perempuan-perempuan lainnya*, menunjukkan bahwa tidak ada indikasi persamaan di dalam hukum hijab. Firman ini juga mengingatkan kita semua bahwa tidak adanya hukum hijab mengandung hikmah-hikmah tersembunyi yang mesti diperhatikan dan dihormati. Tidaklah bisa dibenarkan tindakan mengabaikan hikmah-hikmah tersebut demi mengikuti panutan atau teladan. Ini sebagaimana tidak baiknya sebuah tindakan memperluas kemudahan dan keringanan, atau tindakan melebih-lebihkan kesukaran dan kesulitan, atau tindakan menggugurkan sesuatu demi kemashlahatan hidup. Beberapa ayat Al-Quran secara gamblang menjelaskan ini semua. *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.* (Al-Baqarah [2]: 185) *Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.* (Al-Hajj [22]: 78) *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkanmu.* (Al-Mâ'idah [5]: 101) Seandainya mengikuti teladan merupakan sebuah tuntutan kewajiban, kita tentu takkan melihat

satu pun orang terkemuka yang sangat menekankan ketakwaan dan berpegang pada sunnah Nabi SAW, yang mengurus keluarganya dengan tanpa mempraktikkan hijab (mengurung istri di rumah dan melarangnya bergaul dengan laki-laki asing). Ini ditunjukkan oleh fakta konkrit berikut ini.

Suatu ketika, Salmah ibn Qays mengutus seorang laki-laki untuk datang menemui Umar ibn al-Khattab dan memberinya kabar tentang jalannya peperangan. Setibanya di rumah Umar, laki-laki itu berkata, “Aku meminta izin masuk dan mengucapkan salam. Amirul Mukminin mengizinkanku, dan aku pun masuk ke dalam. Ia tengah duduk di atas kain mori kasar dan bersandar di dua bantal dari kulit yang direnda dengan sabut. Aku kemudian diberi satu bantal dan aku pun duduk di atasnya. Kami berada di ruang tamu dengan rak dari batu dan korden (kelambu).” Amirul Mukminin berkata, “Wahai Ummu Kultsum, makanan kami.” Ummu Kultsum pun mengeluarkan roti dengan minyak zaitun dan garam yang belum dihaluskan, dan menaruhnya di atas rak dari balik kelambu. “Tidakkah engkau keluar dan menyantap makanan ini bersama kami?” kata Umar. Ummu Kultsum berkata, “Sungguh aku mendengar suara pelan seorang laki-laki sedang bersamamu.” Umar menjawab, “Ya, benar. Aku tidak melihatnya dari penduduk kota.” Ummu Kultsum lalu berkata, “Itu ketika aku sudah mengetahui bahwa dia belum mengenalku. Tapi, seandainya aku ingin keluar menemui laki-laki, engkau pasti akan memakaikan pakaian penutup kepadaku (menutupi diriku), sebagaimana Ibnu Ja’far menutupi diri istrinya, Zubair menutupi diri istrinya, dan Thalhaf menutupi diri istrinya.” Laki-laki utusan Salmah itu kemudian berkata, “Apakah tidak cukup dikatakan: Ini adalah Ummu Kultsum anak perempuan Ali ibn Abu Thalib sekaligus istri Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab?” Ummu Kultsum menjawab, “Tidak. Seandainya saja dia (Ummu Kultsum) ridha, dia pasti akan menyuguhimu lebih baik dari ini!”

Sekilas tentang Penulis

Salâmah Musa (1887–1958). Lahir di kampung Banhabî, di tengah-tengah keluarga Koptik. Setelah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi, Salâmah pergi merantau ke Eropa. Selama 3 tahun tinggal di Perancis, mendalami filsafat dan pemikiran politik-sosial Eropa. Setelah Perancis, Inggris menjadi tempat persinggahannya berikutnya. Sekembalinya ke Mesir, banyak buku bertemakan sosial dan reformasi telah ditulisnya, utamanya tentang kebebasan individu dan hubungan agama dan negara. Pernah bekerja sebagai pemimpin redaksi dan penulis tetap di media cetak. Salâmah menyerukan pembaharuan masyarakat Mesir dengan meneladani cara Eropa. Rasionalisme dan sosialisme memainkan peran besar dalam bangunan pemikirannya. Menulis sebuah buku tentang kebebasan berjudul *Hurriyyah al-Fikr wa Afkârûha fi al-Târikh*.

Ahmad Luthfi Sayyid (1873–1963). Lahir di Barqîn, Mesir, di keluarga terhormat. Menimba ilmu di *Madrasah al-Huquq* di Kairo. Di sinilah pertemuannya dengan Muhammad Abduh (1849–1905) terjadi, hal mana membuat pemikirannya banyak terpengaruh oleh pemikiran reformasi Abduh. Luthfi Sayyid memulai aktifitas jurnalistik dan politiknya pada tahun 1907, yaitu dengan menerbitkan sebuah

harian dan membentuk partai umat (*hizb al-ummah*). Di harian ini, ia banyak menulis artikel tentang kebebasan. Artikel-artikelnya inilah yang bisa dianggap sebagai warisan pemikiran terbesarnya. Ia terus melanjutkan menulis di harian ini selama tujuh tahun. Ia mengkritik aliran-aliran sosialisme dan Islam radikal. Kita bisa melihat keterpengaruhan dirinya atas kaum liberal klasik Eropa di banyak tulisannya. Luthfi Sayyid sependapat dengan Abduh bahwa pemerataan pendidikan kebangsaan merupakan satu-satunya cara untuk merevitalisasi dan membebaskan masyarakat Mesir. Ia pernah ditunjuk sebagai menteri pendidikan dalam negeri Mesir, meski hanya singkat. Ia juga pernah memegang jabatan sebagai rektor Universitas Mesir dari tahun 1925 hingga 1941. Mengingat pemikirannya yang banyak mewarnai pemikiran-pemikiran para pemikir sezamannya, Luthfi Sayyid dijuluki dengan “Professor Lintas-Generasi” (*Ustâdz al-Ajyâl*).

Rifâ‘at Râfi‘ Thaḥṡhawî (1801–1873). Salah satu pionir kebangkitan Arab di abad 19. Tak bisa dimungkiri, Thaḥṡhawî adalah penulis dan pemikir pertama di barisan kaum reformis Arab yang mengagendakan proyek kebangkitan Arab. Ia mulai belajar di Al-Azhar tahun 1817, dan menjadi murid Prof. Hasan Aththâr (1766–1834) yang mengajarkan ilmu filsafat Barat di luar pelajaran resmi Al-Azhar. Penguasa Mesir waktu itu, Muhammad Ali, mengirim rombongan pelajar ke Perancis pada tahun 1826, dan Thaḥṡhawî termasuk salah satu di dalamnya. Di Paris, Thaḥṡhawî mendalami bahasa Perancis, pemikiran Eropa, dan sistem politik-sosial Perancis. Sekembalinya ke Mesir, ia menulis sebuah buku terkenal berjudul *Takhlîsh al-Ibrîz fi Talkhîsh al-Bâriz*, yang berisi gagasan-gagasan pemikirannya selama tinggal di Paris (1826–1831). Ia diasingkan ke Khurthûm setelah Muhammad

Ali wafat. Saat ‘Abbās Bayn berkuasa, Thaḥṯhawī kembali lagi ke Mesir dan menjadi kepala sekolah bahasa di Kairo.

Farah Anton (1873–1922). Lahir di daerah Syāhim dan tinggal di Mesir, lalu pindah ke Amerika Serikat. Ia kembali lagi ke Mesir paska revolusi Turki tahun 1908. Banyak menulis tentang pentingnya reformasi di negeri Arab dan pemisahan agama, politik, dan negara. Farah Anton pernah mengadakan perdebatan sengit bersama Syeikh Muhammad Abduh seputar persoalan agama dan negara, dunia dan akhirat. Bangunan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran revolusi Perancis yang menyuarakan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Thaha Husayn (1889–1973). Salah satu tokoh penting di garda depan kaum liberal Arab di abad 20. Budayawan, sejarawan, jurnalis, menteri pendidikan, penerjemah, dan guru. Thaha Husayn menimba ilmu di Al-Azhar, bertemu dengan sosok dan pemikiran Muhammad Abduh, dan tergabung ke dalam kelompok reformis di bawah bimbingan Ahmad Luthfi Sayyid. Ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Mesir, lalu Sorbonne di Paris. Meraih gelar doktor pada tahun 1919. Tahun 1926, ia menulis buku kontroversialnya berjudul *Fi al-Syi’r al-Jāhili*. Ia menyerukan reformasi dan demokrasi liberal di Mesir, selain menaruh perhatian penuh pada permasalahan keadilan sosial di tahun 40-an. Menjabat sebagai menteri pendidikan dari tahun 1950–1952.

Sulaymān al-Bustānī (1856–1925). Lahir di tengah-tengah keluarga terpendang. Menimba ilmu di sekolah negeri setempat, mendalami bahasa Perancis, Inggris, dan Turki. Pernah merantau ke banyak negara, lalu menetap di Baghdad selama delapan tahun. Salah satu buku terkenalnya adalah berupa terjemahan buku *al-Ilyādzah*

al-Yûnâniyyah karangan Homerus, ke bahasa Arab. Paska revolusi konstitusi Turki tahun 1908, Sulaymân Musa menulis buku tentang politik berjudul, *‘Ibrah wa Dzîkrâ: al-Dawlah al-Utsmâniyyah Qabl wa Ba’d al-Dustûr*. Terpilih sebagai perwakilan Beirut di parlemen Utsmâni, lalu menjabat sebagai menteri pertanian, perdagangan, dan perindustrian semenjak tahun 1913. Jabatan menteri ini kemudian dilepaskannya setelah Perang Dunia I meletus, lalu pergi merantau ke Swiss, Mesir, dan New York.

Muhammad Abduh (1849–1905). Ahli fikih handal dan salah satu pendiri mazhab modernisasi di dunia Arab. Belajar di Al-Azhar sejak tahun 1866. Di sinilah pertemuannya dengan Jâmâluddîn al-Afghânî terjadi, hal mana membuatnya banyak terpengaruh oleh pemikiran reformasi al-Afghânî. Pada tahun 1880, Abduh diangkat menjadi pemimpin redaksi harian *al-Waqâ’i’ al-Mishriyyah* yang lebih cenderung memihak partai liberal. Melalui harian ini, Abduh menyerukan proyek reformasi secara berkala dan gradual. Abduh dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam memperbaharui ijtihad rasional Islam. Ia menafsirkan kembali ushul fikih, mengungkap titik-titik perbedaan antara penafsiran konvensional dan syariat-syariat Islam yang sebenarnya. Paska kegagalan revolusi Arab, Abduh diusir dari Mesir pada tahun 1882, lalu kembali lagi pada tahun 1889.

Qâsim Amîn (1863–1908). Menimba ilmu di *madrasah al-huqûq wa al-idârah* di Kairo. Bekerja sebagai hakim sekembalinya dari Perancis di tahun 1885. Qâsim Amîn merupakan salah satu tokoh penting pembebasan perempuan Timur. Menurutnyanya, kemajuan umat takkan terjadi kecuali melibatkan peran perempuan. Pendidikan perempuan, menurutnyanya, menjadi syarat utama bagi kemajuan dan perkembangan umat-umat di

dunia. Qâsim Amîn juga menyerukan penghapusan poligami dan hijab. Gugusan pemikirannya ini dituangkan ke dalam dua buku terkenalnya, yaitu *Tahrîr al-Mar'ah* (1899) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1900). Di dua buku ini, Qâsim Amîn mendiskusikan kondisi perempuan dan kemungkinan peran-sertanya di berbagai bidang berbeda. Belakangan, Muhammad 'Imarah mengungkap keikutsertaan Muhammad Abduh dalam penulisan buku *Tahrîr al-Mar'ah*, mengingat dalil-dalil argumentasinya adalah dalil-dalil keagamaan.

'Abdurrahmân al-Kawâkibî (1854–1902). Lahir di daerah Kawâkibî, Halb, di tengah-tengah keluarga berpendidikan. Aktif di bidang jurnalistik, banyak menulis tentang pentingnya reformasi di dunia Arab. Al-Kawâkibî menerbitkan sejumlah harian terkemuka saat itu, seperti *al-Furât*, *al-Syabhâ'*, dan *al-I'tidâl*. Melalui harian-harian ini, ia menentang keras kesewenang-wenangan kekuasaan. Keberaniannya inilah yang membuat harian-hariannya dibredel oleh pemerintah. Setelah merantau ke banyak negara, ia kembali ke Mesir dan menulis dua buku penting; *Ummu al-Qurâ* dan *Thabâ'i' al-Istibdâd wa Mashâri' al-Isti'bâd*.

Ibnu Khaldûn (1332–1406). Lahir di Tunis pada tahun 1332, di tengah-tengah keluarga terpandang dan berpendidikan. Sejak kecil sudah mempelajari bahasa berikut gramatikanya, Al-Quran, sunnah, dan hadits. Pernah menjabat hakim (*qâdhî*) mazhab Maliki dan penulis rahasia bagi penguasa-penguasa Afrika Utara saat itu. Magnum opus-nya, *al-'Ibar fi al-Mubtada' wa al-Khabar* (yang kemudian dikenal dengan nama *al-Muqaddimah*), ditulis antara tahun 1374 hingga 1377. Di buku ini, Ibnu Khaldûn mengetengahkan pemikiran-pemikiran sosial-politik-ekonomi.

Buku ini menjadi salah satu pondasi dasar ilmu sosiologi di dunia. Ibnu Khaldūn menganalisa sebab-sebab keberadaban dan kemunduran yang keduanya terkait erat dengan fanatisme atau kesukuan. Ibnu Khaldūn mengungkap hubungan-hubungan antara kesukuan, lingkaran pemerintah, dan kekuatan negara. Di beberapa tahun terakhir hidupnya, ia pindah ke Mesir dan bekerja sebagai pengajar pada tahun 1400 atau 1401. Ia pernah bertemu dengan Timur Lenk di Damaskus. Warisan pemikirannya dianggap sebagai referensi utama bagi berbagai disiplin ilmu modern.

‘Ali ‘Abd al-Râziq (1888–1966). Seorang *qâdhî* dan pengajar. Buku kontroversialnya, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, ditulisnya di tengah-tengah perdebatan sengit seputar khilafah. Menurutnya, tidak ada landasan hukum Islam bagi pembentukan khilafah, dan khilafah hanya dibangun di atas asas kekuatan bersenjata (militer) saja. Bukunya mendapat reaksi dan kecaman keras dari berbagai kalangan keagamaan. Inti bukunya ini adalah kritik terhadap khilafah dan peran agama di dunia dari perspektif keagamaan, bukan dari perspektif sosiologis. Kerja pemikiran al-Râziq ini sama seperti kerja pemikiran kelompok sekular Kristen, seperti Schimmel dan Farah Anton.

Senarai Pustaka

Sumber Primer

Rifâ'at Râfi' al-Thaḥṡhawī, *Takhlīsh al-Ibrīz fi Talkhīsh Bâriz*, (Dâr al-Hilal, 2001)

_____ *al-Mursyid al-Amīn li al-Banât wa al-Banīn*, (Kairo: al-Majlis al-A'lâ li al-Tsaqâfah, 1873)

Abdurrahmân al-Kawâkibī, *Thabâ'i' al-Istibdâd wa Mashâri' al-Istibdâd*, Muhammad 'Imârah (ed.) (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2008)

Qâsim Amīn, *Taḥrīr al-Mar'ah*, (Kairo: Maktabah Taraqqī, 1999)

_____ *al-Mar'ah al-Jadīdah*, (Kairo: al-Majlis al-A'lâ li al-Tsaqâfah, 1999)

'Ali Abd al-Râziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, (Beirut: Dâr Maktabah al-Hayâh, al-Mu'assasah al-'Arabiyyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr, 1972)

Sulaymân al-Bustânī, *Ibrah wa Dzirkâ—al-Dawlah al-'Utsmâniyyah Qabl al-Dustûr wa Ba'dah*, (Mathba'ah al-Akhbâr, 1908)

Ahmad Luthfi Sayyid, *Mabâdi' fi al-Siyâsah wa al-Adab wa al-Ijtimâ'*, (Kitâb al-Hilâl, tt.)

_____ *Musykilât al-Hurriyyah fi al-Âlam al-'Arabī*, (Beirut: Dâr al-Rawâ'i', tt.)

Ibnu Khaldûn, *al-Muqaddimah*.

- Muhammad Abduh, *al-A'mâl al-Kâmilah*, Muhammad 'Imârah (ed.), (Kairo: Dâr al-Syurûq, tt.)
- Salâmah Musa, *Hurriyyah al-Fikr wa Abthâlulhâ fi al-Târikh*, (Kairo: Dâr al-Hilâl, tt.)
- Farah Antûn, *al-Fashl bayn al-Sulthayn al-Madaniyyah wa al-Dîniyyah*, Kumpulan artikel sejumlah penulis: Adhwâ' 'ala al-Ta'ashshub, (Dâr al-Amwâj, tt.)
- Thaha Husayn, *Turâts Thaha Husayn: al-Maqâlât al-Shuhufiyyah min 1908 – 1967*, Kajian yang dilakukan oleh Ibrâhîm 'Abd al-'Azîz, (Kairo: Dâr al-Kutub wa al-Watsâ'iq al-Qawmiyyah, 2001)
- Thaha Husayn, *al-Dîmûqarâtiyyah*. Kitab ini tidak disebarluaskan, (Nafrû li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2008)

Sumber Sekunder

- Muhammad Qâdhî & 'Abdullah Shawlah, *al-Fikr al-Ishlâhî 'ind al-'Arab fi 'Ashr al-Nahdhah*, (Tunisia: Dâr al-Janûb li al-Nasyr, 1992)
- Zakî Sulayman Bayûmî, *al-Tayyârât al-Siyâsiyyah wa al-Ijtimâ'iyyah bayn al-Mujaddidîn wa al-Muhâfizhîn*, (Mesir: Markaz Watsâ'iq wa Târikh Mishr al-Mu'âshir, tt.)
- 'Izzat Qarnî, *al-'Adâlah wa al-Hurriyyah fi Fajr al-Nahdhah al-'Arabiyyah al-Hadîtsah*, (Kuwait: al-Majlis al-Wathanî li al-Tsaqâfah wa al-Funûn wa al-Âdâb, 1980)
- 'Izzat Qarnî, *Târikh al-Fikr al-Siyâsî wa al-Ijtimâ' fi Mishr al-Hadîtsah (1834 – 1914)*, (Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-Âmmah li al-Kuttâb, 2006)
- 'Afif Faraj, *Isykâliyyah al-Nahdhah bayn al-Librâliyyah al-Ightirâbiyyah wa al-Islâmiyyah wa al-Ijtihâdiyyah*, (Beirut: Dâr al-Adab, 2006)
- Al-Jam'iyyah al-Falsafiyyah al-Mishriyyah, *Falsafah al-Hurriyyah*, (Beirut: Markaz Dirâsât al-Wuḥdah al-'Arabiyyah, 2009)
- Hâzim Shâghiyah, *Ma'zaq al-Fard fi al-Syarq al-Awsath*, (Beirut: al-Sâqî, 2009)

Waqâ'i' al-Multaqâ al-Qawmî al-Munazhham li Shafâqis, *al-Taḥkîr al-Ishlâḥî al-'Arabî: Khashâ'isuh wa Hudûduh*, (Tunisia: al-Ma'had al-Qawmî li 'Ulum al-Tarbiyyah, 1990)
'Abdullah al-'Urwâ, *Maḥûm al-Hurriyyah*, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqâfi al-'Arabî, 2008).

Sumber Asing

Ayubi, Nazih, *Over-stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East*, (London: I.B. Tauris, 2008)
Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age*, (Cambridge University Press, 1983)
Owen, Roger, *The Middle East in the World Economy 1800 – 1914*, (London: I.B. Tauris, 2005)
Rodinson, Maxime, *Islam and Capitalism*, (London: Saqi Books, 2007).